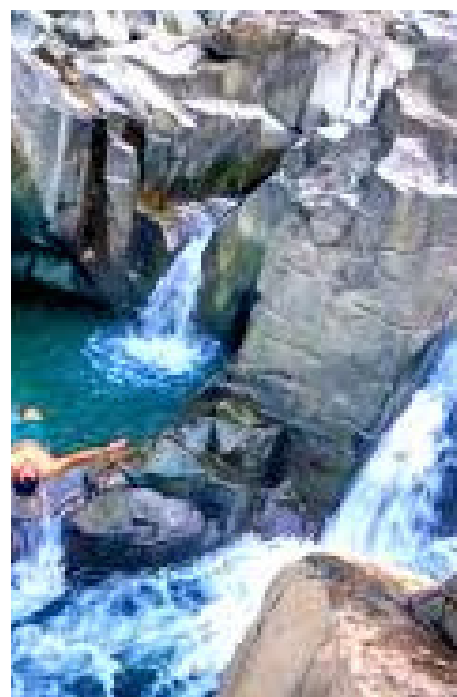




PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025

P-RKPD TAHUN 2025





BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang:
- a. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berorientasi pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, dimana perubahan ini tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga melibatkan penyesuaian terhadap perubahan kondisi dan dinamika internal maupun eksternal yang memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah;
 - b. dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melibatkan analisis dampak sosial dari perubahan rencana pembangunan daerah, serta memastikan bahwa perubahan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebelumnya, identifikasi perubahan kondisi sosial, dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - d. bahwa prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan di Daerah sehingga perlu diubah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. penutup.
 - (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 21 Juli 2025



BUPATI BARRU,

INA KARTIKA SARI

Diundangkan di Barru
pada tanggal 21 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 58

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan kegiatan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perubahan RKPD ini disusun sebagai tindak lanjut atas perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025, termasuk penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional maupun kondisi riil di daerah yang memerlukan penyesuaian target, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah, agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan arah kebijakan nasional.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 ini dilakukan secara partisipatif, melibatkan seluruh perangkat daerah, serta memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barru, serta mampu menjawab dinamika dan tantangan yang dihadapi daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.



PLT. KEPALA BAPPEDALITBANGDA

S. RIFATULLAH AKIL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... I-5

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-8

1.4 Maksud dan Tujuan..... I-9

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD I-10

BAB II. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2025 II-1

2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro II-1

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) II-14

2.3 Evaluasi Pagu Indikatif Dan Realisasi Belanja..... II-17

2.4 Evaluasi Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan..... II-19

2.5 Hambatan, Upaya Pencapaian, Dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2025..... II-525

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH..... III-1

3.1 Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-1

3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro III-1

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi III-1

3.1.1.2 Inflasi III-9

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka..... III-11

3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan III-13

3.1.1.5 Gini Ratio..... III-16

3.2 Tantangan Perekonomian Daerah III-18

3.2.1 Aspek Eksternal III-18

3.2.2 Aspek Internal..... III-21

3.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah III-23

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-24

3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah III-25

3.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah III-36

3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah III-41

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-3

4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....	V-9
4.2.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025	IV-12
4.2.1.1	Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025	IV-13
4.2.1.2	Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025	IV-13
4.2.1.3	Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025	IV-14
4.2.1.4	Agenda Pembangunan pada RKP Tahun 2025	IV-15
4.2.1.5	Dukungan Pemerintah Kabupaten Barru terhadap Sasaran Pembangunan Nasional.....	IV-15
4.2.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	IV-16
4.2.2.1	Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Barru terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.....	IV-19
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru	IV-22
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		V-1
5.1	Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025.....	V-1
5.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2025	V-2
5.3	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk Perubahan Tahun 2025	V-23
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		VI-1
6.1	Indikator Makro Pembangunan	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-2
6.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VI-3
6.4	Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM)	VI-9
6.5	TPB/SDGs	VI-12
BAB VII PENUTUP.....		VII-1
7.1	Kebijakan Ekonomi Daerah.....	VII-1
7.2	Kesimpulan.....	VII-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Makro Kabupaten Barru Tahun 2025.....	I-1
Tabel 2.2	Angka IPM dan Indikator Pendukungnya di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024	II-4
Tabel 2.3	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barru Tahun 2020-2024	II-10
Tabel 2.4	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barru Tahun 2019-2024	II-12
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru	II-15
Tabel 2.6	Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Barru Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	II-17
Tabel 2.7	Tabel Evaluasi terhadap Hasil RakOD Tahun 2025	II-20
Tabel 2.8	Realisasi Capaian Indikator SPM Kabupaten Barru Tahun 2025	II-522
Tabel 3.1	Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Barru Tahun 2023-2025	III-24
Tabel 3.2	Target Perubahan APBD Kabupaten Barru Tahun 2025	III-26
Tabel 3.3	Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025	III-35
Tabel 3.4	Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025	III-41
Tabel 3.5	Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025	III-42
Tabel 4.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Pembangunan Kabupaten Barru pada RKPD Pokok Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.....	IV-5
Tabel 4.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Pembangunan Kabupaten Barru pada RKPD Pokok Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029.....	IV-8
Tabel 4.3	Keselarasan Tema Pembangunan, Permasalahan Pembangunan, Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 Kabupaten Barru.....	IV-11
Tabel 4.4	Dukungan Pemerintah Kabupaten Barru Terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	IV-16

Tabel 4.5	Keterkaitan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.....	V-18
Tabel 4.6	Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Barru Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	IV-20
Tabel 4.7	Prioritas, Arah Kebijakan, Sasaran, indikator dan Target Kinerja Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2025	IV-23
Tabel 4.8	Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2025	IV-25
Tabel 5.1	Rincian Rencana Pendanaan Perubahan Tahun 2025	V-2
Tabel 5.2	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2025	V-4
Tabel 5.3	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Barru Tahun 2025	V-24
Tabel 6.1	Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024-2025	VI-1
Tabel 6.2	Capaian dan Target Perubahan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024-2026	VI-2
Tabel 6.3	Capaian dan Target Perubahan Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024-2026	VI-3
Tabel 6.4	Capaian dan Target Indikator SPM Kabupaten Barru Tahun 2024-2025	VI-10
Tabel 6.5	Capaian dan Target TPB/SDGs Kabupaten Barru Tahun 2024-2025	VI-13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional,
Daerah, dan OPD I-5

Gambar 4.1 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD
Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 IV-4

Gambar 4.2 Tema RKP Tahun 2025 IV-13

Gambar 4.3 Sasaran Pembangunan Tahun 2025..... IV-14

Gambar 4.4 Prioritas Nasional Tahun 2025 IV-15

Gambar 4.5 Agenda Pembangunan RKP Tahun 2025 IV-15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barru Tahun 2019-2024	I-2
Grafik 2.2	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barru dengan Capaian Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional	II-2
Grafik 2.3	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kab.Barru Tahun 2019-2024	II-5
Grafik 2.4	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional Tahun 2019-2024.....	II-6
Grafik 2.5	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab.Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2020-2024	II-6
Grafik 2.6	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-7
Grafik 2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barru Tahun 2019-2024 (dalam persen)	II-8
Grafik 2.8	Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dengan Wilayah Setara dan Capaian Propinsi Sulawesi Selatan serta Capaian Nasional Tahun 2019-2024 .	II-8
Grafik 2.9	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2024....	II-10
Grafik 2.10	Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2019 s.d Tahun 2023 (dalam Juta Rupiah)	II-13
Grafik 2.11	Penurunan Intensitas Emisi GRK Kabupaten Barru Tahun 2021-2024 (persen)	II-13
Grafik 3.1	Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025	III-7
Grafik 3.2	Target Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025	III-15
Grafik 3.3	Target Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.....	III-17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai upaya dalam mewujudkan proses pembangunan yang baik perlu ada usaha yang adaptif dan berkelanjutan dalam proses perencanaan dan penganggaran di suatu daerah. Hal ini merupakan upaya strategis dan sangat penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah, karena ini dapat menjadi pedoman dalam melihat arah pembangunan dengan mempertimbangkan pada potensi dan sumber daya suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses tahapan kegiatan persiapan yang melibatkan berbagai pihak atau unsur stakeholder dalam rangka pendayagunaan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki dalam kurun waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan atau daerah tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki pengaruh yang besar dalam mendorong pembangunan daerah. Ketika rencana yang telah ditetapkan diimplementasikan, hal tersebut akan memberikan arah dan fokus pada pembangunan daerah yang akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta dapat mencapai tujuan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, tidak heran apabila suatu rencana pembangunan dapat menjadi dasar atau acuan pelaksanaan pembangunan di kemudian hari.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari beberapa bentuk, salah satu diantaranya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang wajib ada dan dimiliki oleh tiap daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun dokumen RKPD sebagai pelaksanaan teknis dokumen RPJMD pada setiap tahun. Selain itu salah satu peraturan yang juga terkait RKPD adalah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah. Pasal dan ayat tersebut membahas mengenai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja dan pendanaan 1 (satu) tahun, yang disusun sesuai dengan RKP dan Renstra Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan yang disebutkan dalam BAB II Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini pun selaras seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ini juga yang menjadi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2025. Lebih khususnya mengacu atau sesuai dengan pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yaitu meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, serta dan atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Oleh karena itu dengan demikian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1), maka faktor-faktor pertimbangan adanya perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. Target sasaran pembangunan Daerah;
- c. Prioritas pembangunan Daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan

- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Proses pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2025 mengalami dinamika yang disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan politis adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru hasil pemilihan tahun 2024 adalah Bupati Barru ANDI INA KARTIKA SARI, SH., M.Si dan Wakil Bupati Barru Dr. Ir. ABUSTAN, M.Si, yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025. Visi dan misi bupati dan wakil bupati harus diterjemahkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barru. Adapun program prioritas Kepala Daerah terpilih tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Percepatan Penanggulangan kemiskinan terintegrasi dan Terpadu (PIK PAKET
2. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
3. Peningkatan Kualitas dan akses pelayanan pendidikan.
4. Subsidi SPP Mahasiswa S1, S2, dan S3 dan terutama Beasiswa 5 orang untuk Mahasiswa Kedokteran;
5. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
6. Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan
7. Peningkatan kesejahteraan kader posyandu;
8. Pembangunan Akademi Sepak Bola Ramang;
9. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SD/MI dan SMP/Mts;
10. Perbaikan tata kelola musabab tilawatil qur'an dan umroh serta peningkatan insentif bagi pegawai sara dan guru mengaji;
11. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan;
12. Peningkatan Infrastruktur Jalan
13. Peningkatan Infrastruktur Irigasi
14. Peningkatan Infrastruktur air Bersih
15. Penerapan dan Pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektornik (SPBE)
16. merit system ASN;
17. Digitalisasi Desa;

18. Perbaikan Tata Kelola dan peningkatan TPP ASN termasuk TPP bagi guru bersertifikasi
19. Pembangunan dan pengembangan kawasan industri Barru (KIBAR)
20. Perbaikan tata kelola dan subsidi pupuk
21. Pembangunan dan pengembangan agroteknologi, agropolitan serta hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan.
22. SPBU Nelayan
23. Pembangunan Pariwisata Gurilla
24. Penguatan Kapasitas UMKM dan Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis lokal

Kedua, adanya kebijakan nasional yang berimplikasi pada ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan kerangka keuangan daerah, terutama dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan memperhatikan kedua hal ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2025. Sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 345, Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan (semester I), Permendagri No. 12 Tahun 2024, Surat Edaran Mendagri No. 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, serta dinamika dampak sosial dan ekonomi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor

1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2929/KMK.07/2025 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3).

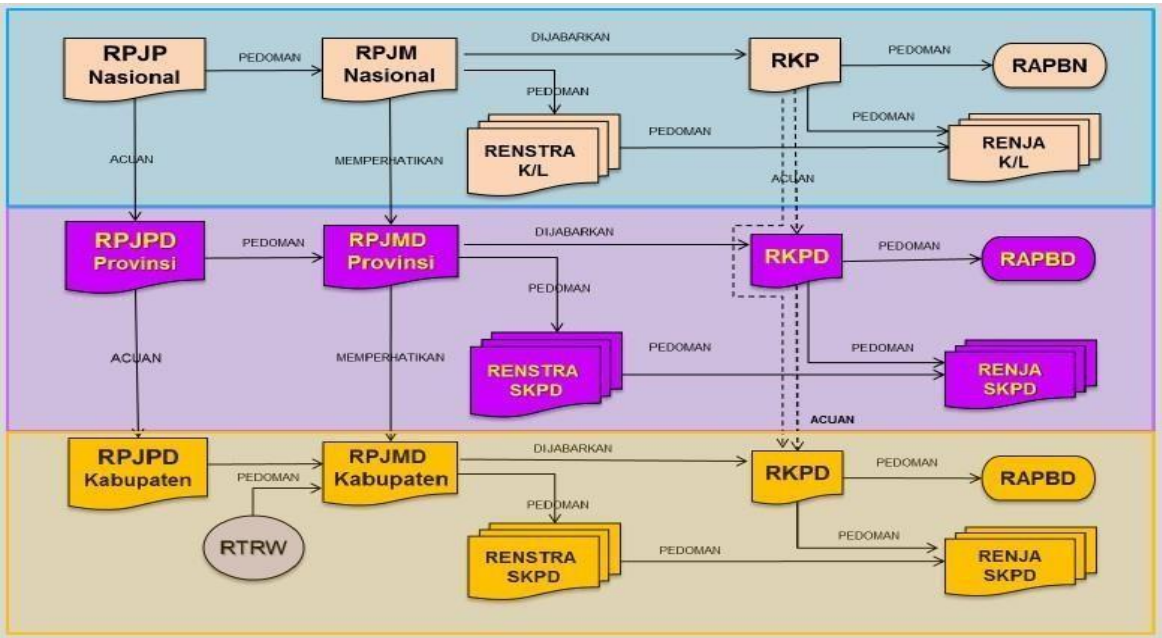
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan Perubahan RKPD harus Berpegang pada prinsip bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan nasional, maka dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2025 juga memperhatikan rencana pembangunan ditingkat nasional maupun provinsi.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah, seperti digambarkan pada Gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan OPD



Dalam siklus manajemen pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan

5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Selain berpedoman pada Dokumen Pusat dan Provinsi yang merupakan dokumen wajib yang perlu diselaraskan, dokumen-dokumen sektoral juga menjadi salah satu sumber informasi yang penting untuk digunakan sebagai bahan telaahan dalam menentukan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang selanjutnya menjadi salah satu dasar penentuan prioritas dan sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah serta penyelarasan program prioritas dan pagu indikatif.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barru tahun 2025 adalah :

1. untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Barru sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh personil diperangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
3. Sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan terwujud melalui perubahan APBD.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

1. bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan ,dalam membantu Kepala daerah untuk menghasilkan dokumen Perubahan APBD, perubahan yang berkualitas untuk mencapai sasaran pembangunan tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi jangka menengah.
2. Tersusunnya dokumen perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator dan target kinerja prioritas/agenda/program pembangunan daerah yang ditetapkan sebagai:

- a. Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025;
- b. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD;
- c. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kabupaten Tahun 2025.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2025 merupakan dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, hal hal yang mendasari perlunya dilakukan Perubahan RKPD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pada bagian ini memperlihatkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II berdasarkan Program, Kegiatan, Indikator, Target, Lokasi, dan Anggaran.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun berjalan dan perkiraan tahun berikutnya, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan triwulan II tahun berjalan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan, yaitu Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM maupun Indikator SDGs pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Indikator makro pembangunan Kabupaten Barru didasari atas indikator pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan rancangan awal dokumen RPJMD Kabupaten Barru. Adapun target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2025:

Tabel. 2.1
Indikator Makro Kabupaten Barru Tahun 2025

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,51	75,22
2	Angka Kemiskinan	%	8,31	6,28
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,42	4,98
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,92	5,5
5	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	52,28	53,47
6	Rasio Gini	poin	0,31	0,32

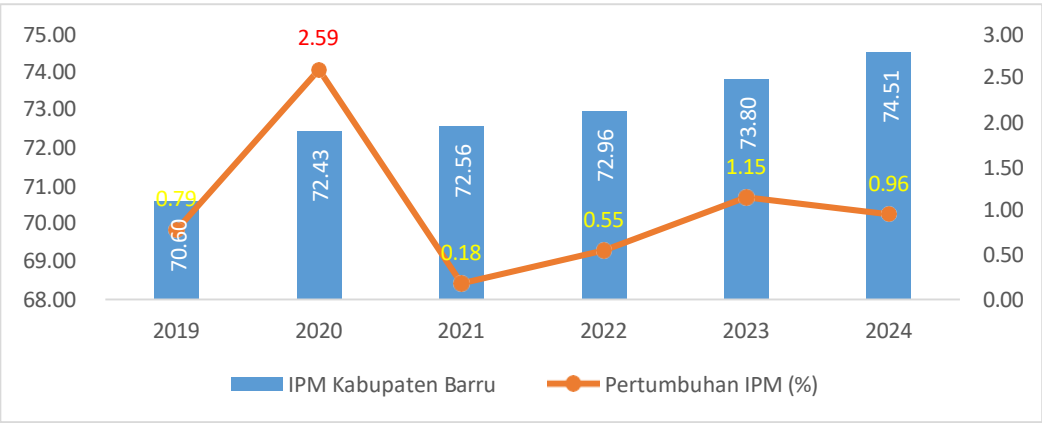
Sumber data : BPS Kab.Barru Tahun 2025 dan Bappelitbangda 2025

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. BPS membuat empat kategori pengelompokan capaian pembangunan manusia berdasarkan nilai IPM, yakni: kategori sangat tinggi ($IPM > 80$), kategori tinggi ($70 < IPM < 80$), kategori sedang ($60 < IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$).

Sejak tahun 2019 IPM Kabupaten Barru berada di kategori tinggi. IPM Kabupaten Barru terus meningkat dari angka 70,60% di tahun 2019 hingga 74,51% di tahun 2024. Pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Barru tidak pernah berkontraksi (menurun nilainya dibanding tahun sebelumnya). Capaian ini adalah hasil pertumbuhan positif dari tiap-tiap komponen penyusun IPM dari tiga dimensi: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Adapun IPM Kabupaten Barru Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

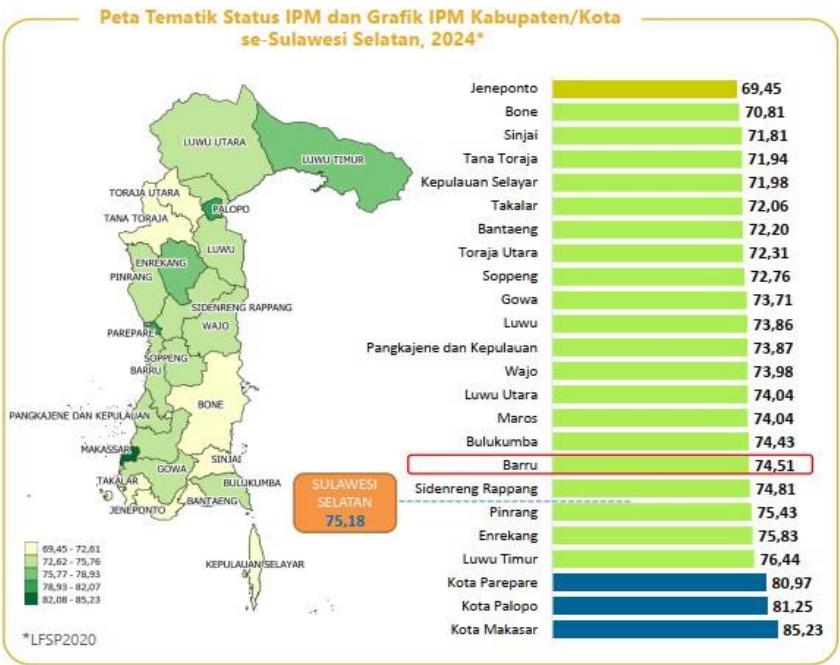
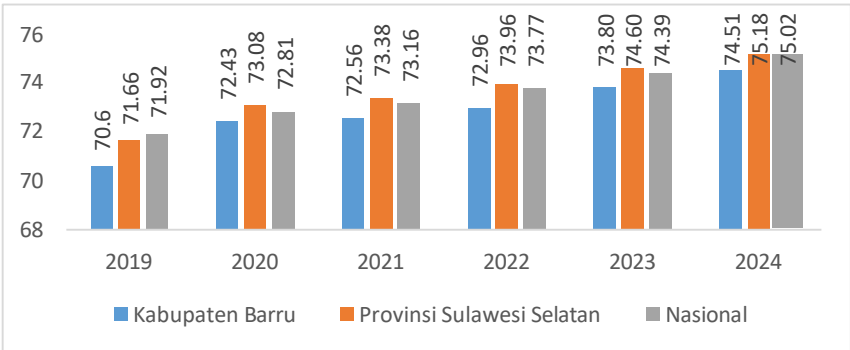
Grafik 2.1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barru Tahun 2019 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

IPM Kabupaten Barru ketika disandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, capaian IPM Kabupaten Barru berada di atas Provinsi Sulawesi Selatan dan di bawah capaian Nasional, seperti yang tersaji pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.2
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barru dengan Capaian Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

Dari grafik di atas menunjukkan IPM Kabupaten Barru berada pada peringkat delapan dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Untuk indikator pembangun IPM sendiri pada Tahun 2015 metode perhitungan IPM telah dilakukan revisi/perbaikan dengan menyesuaikan metode yang dilakukan United Nation Development Programme (UNDP). Adapun indikatornya adalah :

a. Indeks Kesehatan

Diperoleh dari angka harapan hidup yang merupakan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

b. Indeks Pendidikan

Diperoleh dari dua unsur yaitu angka harapan lama bersekolah dan rata-rata lama sekolah dimana angka harapan lama sekolah mencerminkan pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan rata-rata lama bersekolah merupakan angka yang menggambarkan tingkat capaian penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dalam bersekolah. Interpretasinya bahwa semakin tinggi angka lama bersekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai.

c. Paritas Daya Beli

Dikenal dengan *Purchasing Power Parity* (PPP); adalah PDRB riil per kapita yang telah disesuaikan dengan menggunakan PDRB riil per kapita, berarti mengasumsikan bahwa hasil pendapatan bruto daerah dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan indikator pendukungnya selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.2
Angka IPM dan Indikator Pendukungnya di Kabupaten Barru
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	72,05	72,10	72,37	72,57	72,75
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,58	13,59	13,61	13,62	13,63
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,23	8,24	8,25	8,54	8,80
4	Paritas Daya Beli (Rp.000.000)	10,92	11,02	11,28	11,71	12,06
IPM		72,43	72,46	72,96	73,80	74,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Angka statistik di atas mengindikasikan performa pembangunan pemerintah Kabupaten Barru, realisasi program dan kegiatan selama periode tersebut terbukti mampu meningkatkan derajat dan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Barru, dibuktikan dengan nilai IPM pada periode tahun 2020 yang cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2024.

b. Tingkat Kemiskinan

Salah satu indikator makro pembangunan daerah adalah angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan berbagai bidang yang ditandai dengan kerentanan pada tingkat ekonominya, ketidakberdayaan dalam berusaha, keterisolasian dan ketidakmampuan mengemukakan aspirasi untuk mengaktualisasikan diri dalam meningkatkan taraf hidup. Di samping itu masyarakat miskin juga pada umumnya ditandai dengan kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai.

Berpijak kepada gambaran kondisi kemiskinan yang ada, secara umum dapat diungkapkan bahwa penyebab kemiskinan di Kabupaten Barru disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha
2. Keterbatasan akses terhadap faktor produksi
3. Rendahnya kepemilikan aset/kepemilikan terhadap aset tertentu
4. Keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan
5. Terhambatnya mobilitas sosial dan kurangnya partisipasi
6. Lemahnya penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial

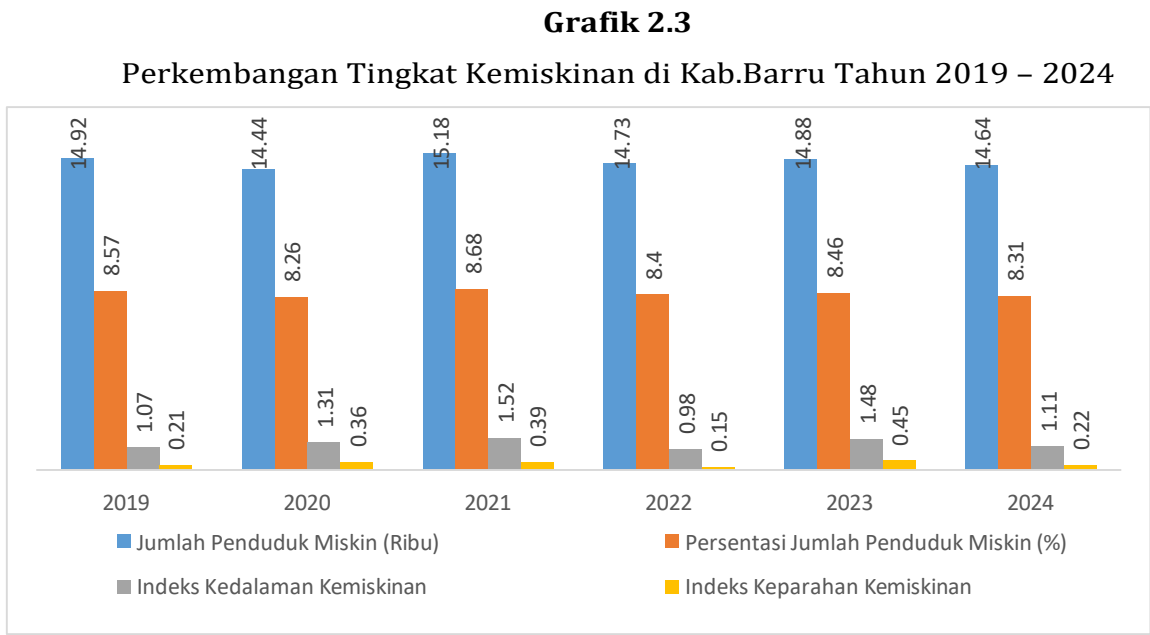
Jika dilihat dari kondisi rumah tangga miskin di Kabupaten Barru, umumnya ditemui pada rumah tangga yang hidup dari sektor perikanan (nelayan) yang sangat tergantung pada alam. Selain itu ditemui juga

pada rumah tangga yang berasal dari kelompok petani dan penduduk yang datang sebagai migrasi yang tidak mempunyai keterampilan.

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan dari hasil evaluasi, terdapat beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

1. Angka Kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan;
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan.

Adapun perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

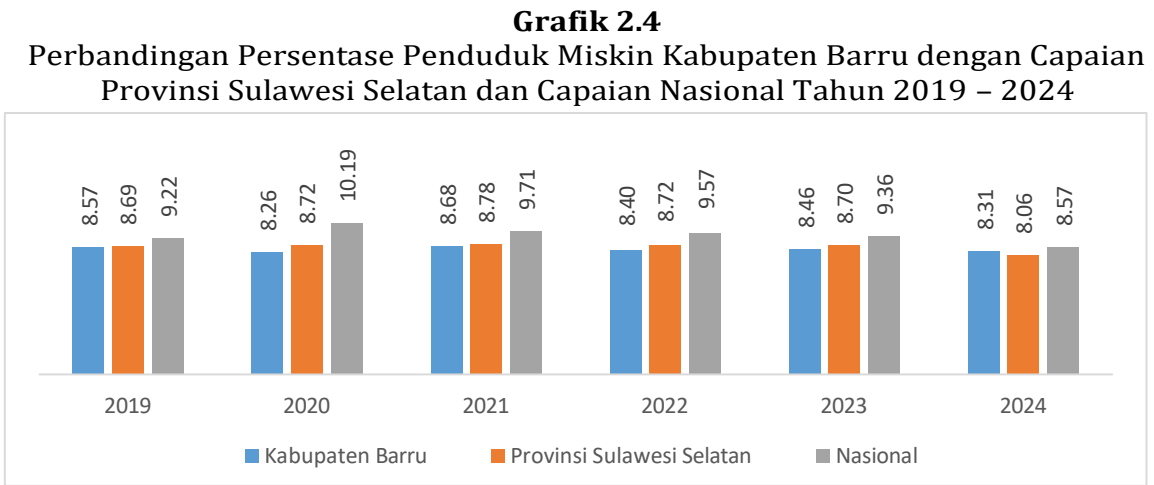


Sumber : BPS Kabupaten Barru tahun 2025

Dari grafik di atas terlihat bahwa tren angka kemiskinan Kabupaten Barru berfluktuatif, pada tahun 2021 di masa pandemic Covid-19, cenderung naik, dan menurun di tahun 2024 menjadi 8,31 persen. Untuk kondisi kemiskinan dari dimensi indeks kedalaman dan indeks

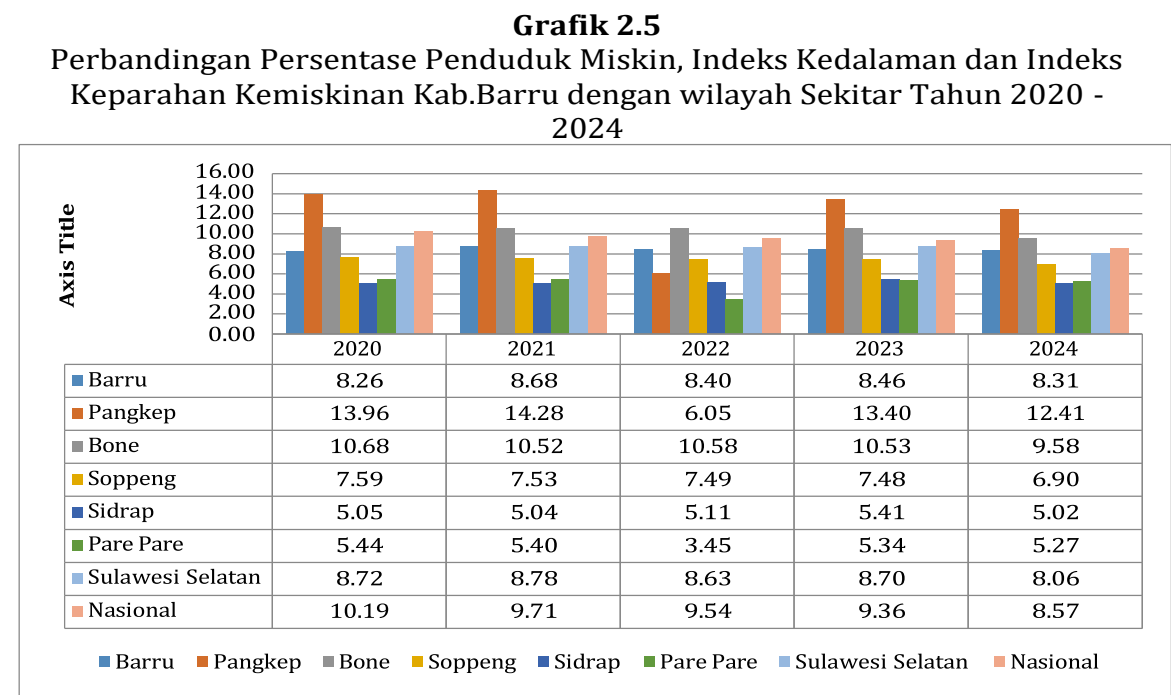
keparahan kemiskinan menunjukkan fluktuasi dari tahun 2019 ke tahun 2024.

Adapun perbandingan persentase kemiskinan antara Kabupaten Barru dengan Capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang terlihat pada grafik berikut ini :



Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

Berdasarkan angka di atas terlihat bahwa persentase kemiskinan Kabupaten Barru mulai tahun 2019 hingga tahun 2023 selalu berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Namun di tahun 2024 angka kemiskinan Kabupaten Barru di atas Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk perbandingan dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

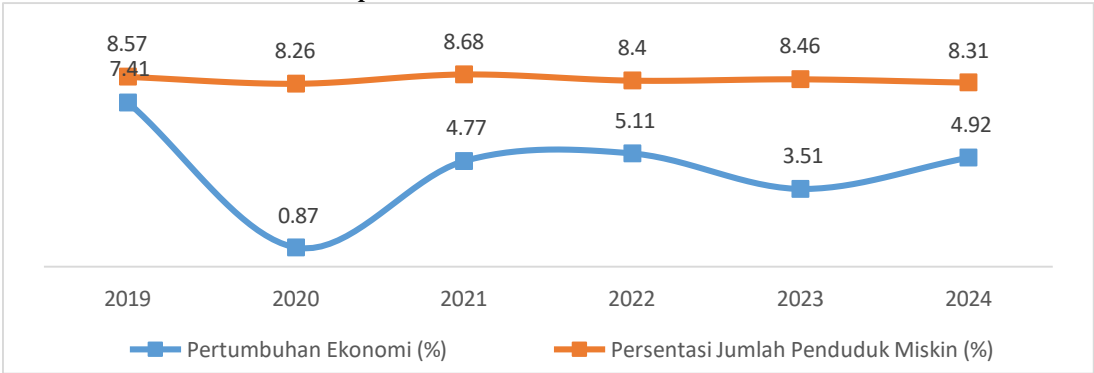


Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi sangat

besar terutama melalui pengeluaran pemerintah untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pemerintahan, berbagai proyek pembangunan memberikan stimulasi kepada pengusaha-pengusaha local untuk meningkatkan pendapatan usahanya, grafik dibawah ini menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Barru.

Grafik 2.6
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas terlihat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Barru. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka persentase penduduk miskin juga menurun, demikian pula sebaliknya. Peningkatan kesejahteraan dan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu.

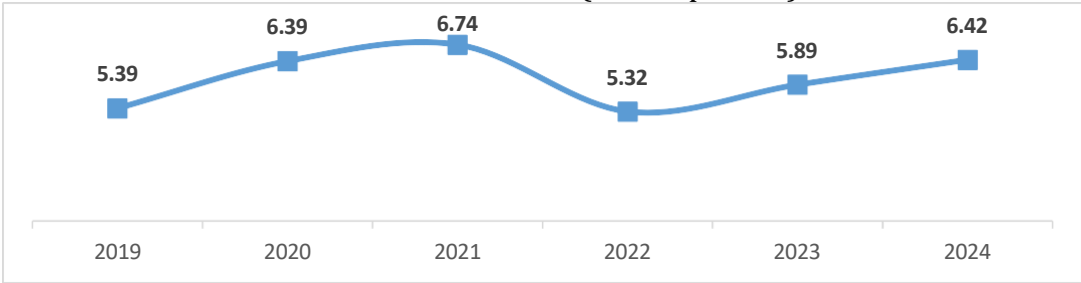
Selain itu, tingkat kemiskinan Kabupaten Barru yang flktuatif di tengah trend penurunan, juga disebabkan karakteristik rumah tangga miskin berkorelasi dengan rendahnya pendidikan, terbatasnya akses ke layanan kesehatan dan finansial, hingga kepemilikan aset produktif minim. Di wilayah pegunungan, terbatasnya akses infrastruktur membuat biaya produksi tinggi dan produktivitas rendah, sehingga kerentanan ekonomi menjadi tinggi. Program pemerintah Kabupaten Barru untuk pembangunan infrastruktur Jalan, Pendidikan, Kesehatan serta akses layanan dasar lainnya di wilayah dataran tinggi secara langsung berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja,

digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. TPT terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap di dunia kerja. TPT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

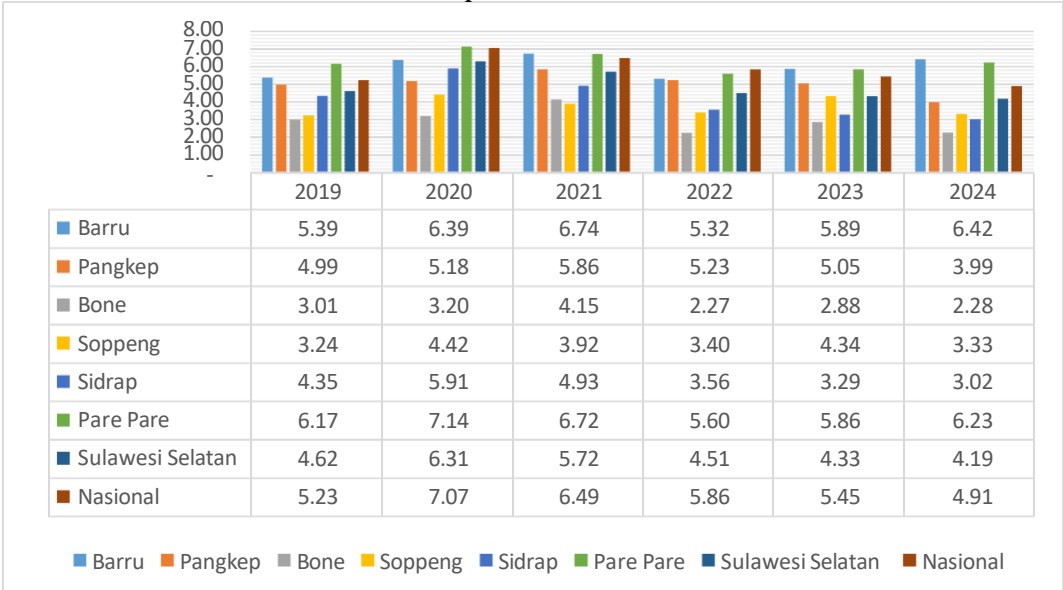
Grafik 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barru
Tahun 2019 – 2024 (dalam persen)



Sumber : BPS Kabupaten Barru tahun 2025

Sepanjang tahun 2019–2024, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terjadi peningkatan tingkat pengangguran, hal ini dipicu karena banyaknya pencari kerja yang minim pengalaman. Umumnya pada lowongan kerja dalam jajaran entri level membutuhkan kompetensi, kualifikasi dan kemampuan dasar. Selain itu, banyaknya angkatan kerja perempuan yang beralih menjadi ibu rumah tangga setelah menikah.

Grafik 2.8
Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Barru dengan Wilayah Setara dan Capaian Propinsi
Sulawesi Selatan serta Capaian Nasional Tahun 2019 – 2024



Sumber : BPS Tahun 2025

Dari grafik di atas menunjukkan capaian TPT Kabupaten Barru sejak tahun 2019 berfluktuasi. Namun capaian TPT Kabupaten Barru di tahun 2024 masih lebih tinggi dari capaian Kabupaten dan Kota sekitar serta capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian nasional. TPT yang tinggi di Kabupaten Barru mengindikasikan banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap di lapangan pekerjaan. Capaian TPT yang diperoleh Kabupaten Barru berada pada peringkat ke-3 terbawah dari kabupaten/kota se Sulawesi Selatan. TPT Kabupaten Barru yang masih tinggi dipengaruhi oleh banyaknya lulusan sarjana yang tidak terserap di dunia kerja dan memilih tidak bekerja daripada harus bekerja tidak sesuai dengan spesifikasi keilmuan. Selain itu rendahnya lowongan pekerjaan pada sektor formal dan sektor investasi yang tidak berkembang menyebabkan banyaknya pengangguran di Kabupaten Barru. Meskipun program pemerintah telah dilaksanakan serta program bantuan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mendorong peluang usaha angkatan kerja tidak memberikan hasil yang nyata bagi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Analisis terhadap meningkatnya TPT di karenakan :

1. Ketidaksesuaian Keterampilan Lokal

Program pelatihan terlalu fokus ke kewirausahaan dengan satu keahlian yaitu menjahit, hal ini tidak memberikan dampak yang langsung pada penurunan pengangguran terbuka di Kabupaten Barru.

2. Keterbatasan Investasi Lokal

Investasi tidak langsung menyasar peningkatan ketenagakerjaan. Sektor yang berkembang tidak memerlukan banyak tenaga kerja lokal.

3. Sistem UMKM yang Belum Siap

Meskipun KUR dan pelatihan tersedia, penyerapan modal dan peluang usaha UMKM di Barru terganjal oleh: kurangnya jaringan pasar, keterbatasan akses teknologi, serta masih rendahnya kualitas produk dan pemasaran.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dan dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan PDRB menurut sektor/kategori lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

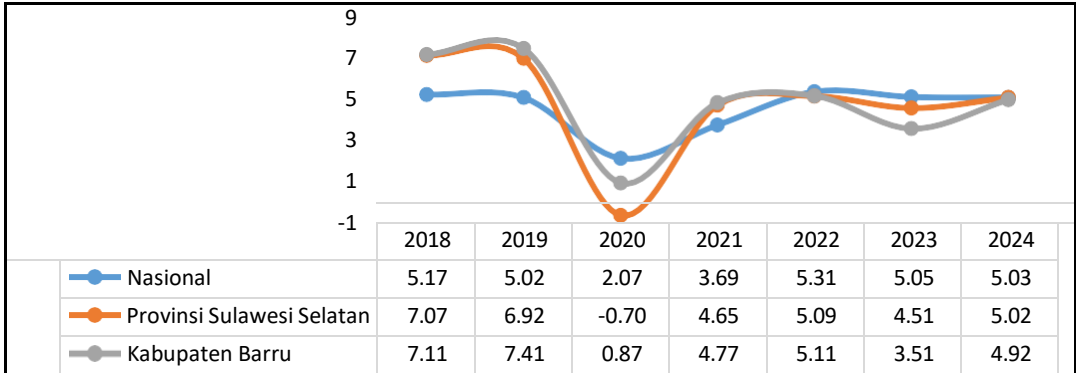
Tabel. 2.3
Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutana dan Perikanan	0,6	5,31	4,51	0,76	4,34
2	Pertambangan dan Penggalian	0,69	3,59	2,85	6,68	4,24
3	Industri Pengolahan	-2,59	4,84	8,88	2,51	4,43
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,49	6,98	1,86	16,68	-1,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	13,36	4,89	10,01	4,32	1,82
6	Konstruksi	1	4,13	2,49	6,08	3,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,54	5,48	6,48	4,99	6,09
8	Transportasi dan Pergudangan	-11,07	7,87	14,97	7,60	6,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,08	4,83	15,54	8,83	6,08
10	Informasi dan Komunikasi	11,25	6,05	6,87	8,77	6,35
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,65	6,99	0,86	-3,31	0,00
12	Real Estate	2,65	2,39	5,47	7,25	6,03
13	Jasa Perusahaan	-5,8	4,85	16,21	8,28	7,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,13	1,40	4,91	-0,07	4,52
15	Jasa Pendidikan	4,9	2,71	3,17	2,44	6,71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,12	6,83	8,31	8,06	12,17
17	Jasa Lainnya	-6,18	8,89	8,18	9,97	15,66
Produk Domestik Regional Bruto		7,41	4,77	5,11	3,51	4,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas laju pertumbuhan masing-masing sektor lapangan usaha pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif namun cenderung meningkat setelah mengalami resesi pada saat pandemi di tahun 2021.

Grafik 2.9
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018–2024



Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 cenderung fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kembali

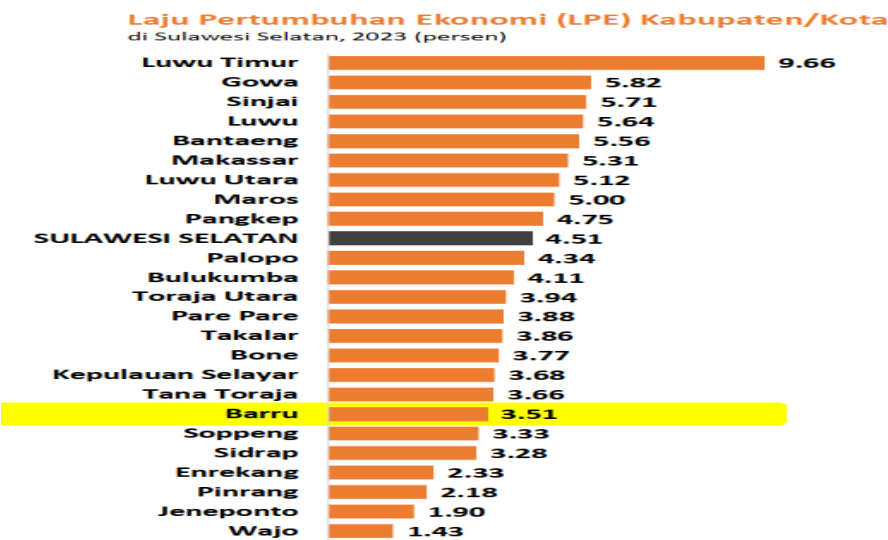
mengalami tren peningkatan di tahun-tahun selanjutnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 3,51% dan 4,92%, walaupun proses pemulihan ekonomi masih berjalan lambat bahkan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023.

Dalam skala pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional, pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru juga perlu dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional sebagai pembanding.

Jika dilihat pada Grafik di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru tahun 2019 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan pertumbuhan ekonomi nasional, kecuali pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru berada pada angka 3,51 persen setelah di tahun 2020 mengalami kontraksi pada angka 0,87 persen akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi setelah masa pandemi covid-19 di tahun 2021 secara perlahan memperlihatkan tren yang positif, program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Daerah menunjukkan potensi keberhasilan dalam stabilisasi ekonomi nasional hingga ke daerah, walaupun kembali mengalami perlambatan di tahun 2023.

Dalam skala pertumbuhan ekonomi wilayah, pencapaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru di tahun 2023 dibandingkan dengan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se Sulawesi Selatan berada pada peringkat 19. Adapun perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.10
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber : BPS Tahun 2025

e. PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita sering digunakan sebagai alat ukur atau indikator tingkat kemakmuran suatu daerah, angka ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku lebih banyak digunakan oleh para pengambil kebijakan di bidang ekonomi untuk melihat perkiraan pendapatan masyarakat pada waktu terkini, sedangkan atas dasar harga konstan biasanya dipergunakan untuk data perbandingan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (HB) dan harga konstan (HK) dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

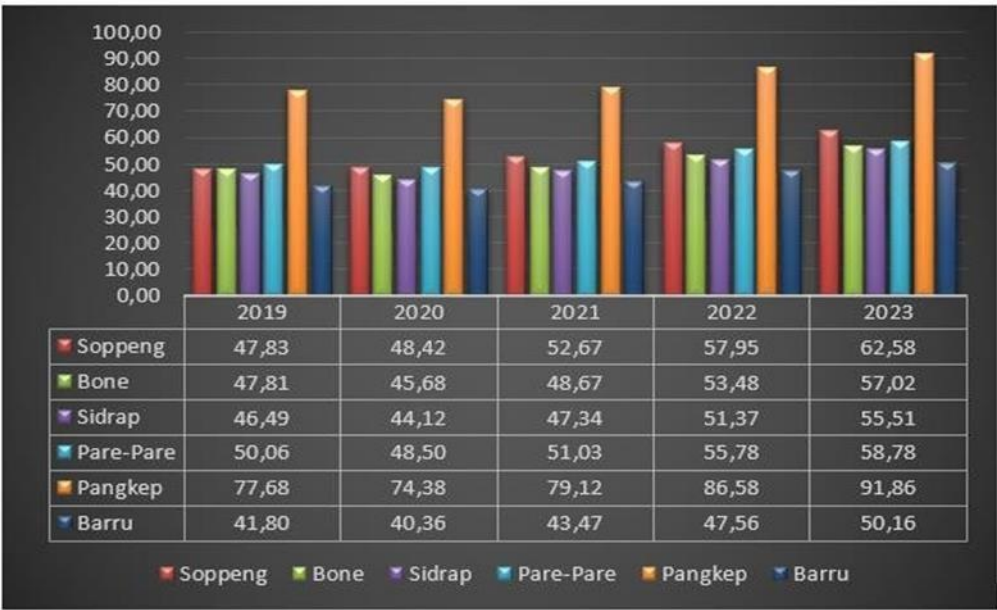
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barru Tahun 2019-2024

Tahun	ADHB (Rp.)	ADHK (Rp.)
2019	41.711.191	27.520.350
2020	42.472.955	27.653.853
2021	43.429.469	27.327.826
2022	47.500.758	28.512.702
2023	50.157.003	29.349.249
2024	52.280.000	30.587,26

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

PDRB Perkapita atas dasar harga konstan (HK) mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2024. kondisi pandemi covid19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita di tahun 2021, sehingga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. PDRB Perkapita atas dasar harga Berlaku (Hb) mengalami peningkatan tahun 2019 sampai tahun 2023. Peningkatan signifikan dalam periode tahun 2019-2023 terjadi pada tahun 2023 yang mana capaian PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tersebut mencapai 50,1 juta. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar (Kab Pangkep, Soppeng, Bone, Sidrap dan Kota Parepare), Kabupaten Barru merupakan yang paling rendah PDRB Perkapitanya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.11
 Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB)
 Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2019 s.d Tahun 2023
 (dalam Juta Rupiah)



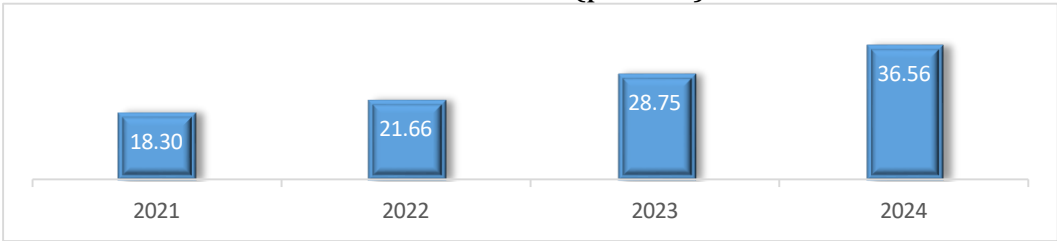
Sumber : BPS Tahun 2024

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan PDRB perkapita kabupaten/kota wilayah sekitar, di Kabupaten Barru masih stabil, namun demikian Kabupaten Barru tetap berada di posisi paling bawah diantara 5 Kabupaten Kota pada wilayah sekitarnya.

f. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi

Grafik 2. 12
 Penurunan Intensitas Emisi GRK Kabupaten Barru
 Tahun 2021-2024 (persen)



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru, Tahun 2024

Pada Grafik diatas dapat terlihat bahwa untuk tahun 2024 terlihat peningkatan persentase penurunan intensitas emisi GRK sebesar 36,56 %. Hal ini disebabkan dari berbagai sektor seperti sektor kehutanan, sektor energi, pertanian dan sektor limbah. Dari sektor-sektor tersebut

yang paling signifikan berperan dalam peningkatan emisi adalah pada sektor kehutanan dan sektor energi. Berdasarkan data dari KPH Ajattapareng, BPKH dan hasil perhitungan, pengurangan emisi dari sektor kehutanan untuk tahun 2021 adalah sebesar 259,52. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan hasil pengurangan emisi pada tahun 2020 sebesar 1.956,41. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya kegiatan alih fungsi hutan menjadi Kawasan non hutan seperti pemukiman, area pertanian dan Perkebunan. Pada sektor energi, kontributor terbesar penghasil emisi GRK yang tercakup pada inventarisasi GRK di Kabupaten Barru adalah kegiatan pembakaran bahan bakar fosil untuk kebutuhan transportasi.

Faktor pendorong penurunan emisi GRK di Kabupaten Barru diantaranya:

- Penerapan pertanian ramah lingkungan, seperti Sistem Pertanian Organik
- Pengurangan penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis, yang berkontribusi terhadap emisi N₂O
- Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pupuk kompos untuk mengurangi emisi metana (CH₄) dari limbah organik
- Pemberdayaan masyarakat adat/lokal dalam menjaga kawasan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) skala kecil di desa-desa terpencil seperti di Kecamatan Tanete Riaja dan Pujananting
- Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah dan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (impact based) yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan target IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru

No	Indikator	Satuan	2022		2023		2024		Interpretasi
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,79	72,96	72,16	73,8	72,57	74,51	Tercapai
2	Indeks Pendidikan	Poin	69,94	65,31	70,28	66,3	70,83	67,19	Belum Tercapai
3	Indeks Kesehatan	Poin	76,69	80,57	76,93	80,88	77,26	81,15	Tercapai
4	Paritas Daya Beli	Juta Rupiah	11,12	11,28	11,35	11,71	11,63	12,06	Tercapai
5	Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana	%	0,011	0,061	0,009	0,077	0,006	0,006	Tercapai
6	Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 12,73%	%	5,45	0,05	7,25	7,25	9,09	10	Tercapai
7	Indeks Ketahanan Bencana	Poin	0,69	0,64	0,72	0,54	0,75	0,51	Belum Tercapai
8	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	%	9,52	0,083	11,11	11,11	12,7	11,66	Belum Tercapai
9	Indeks Williamson	Poin	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	Tercapai
10	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur	Poin	3,82	1,95	3,874	1,95	3,881	3,42	Belum Tercapai
11	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47	5,11	5,91	3,51	6,64	4,92	Belum Tercapai
12	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	51,94	50,27	52,52	50,27	52,97	61,8	Tercapai
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	73,73	72,04	74	78,13	74,26	76,65	Tercapai
14	Indeks Gini	Poin	0,35	0,366	0,34	0,371	0,33	0,34	Belum Tercapai
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,88	5,32	5,31	5,89	5,14	6,42	Belum Tercapai
16	Angka Kemiskinan	%	7,45	8,40	6,67	8,46	6,41	8,31	Belum Tercapai
17	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	65	50,13	70	50,13	73	68,28	Belum Tercapai
18	Nilai SAKIP	Poin	60	57,34	65	60,04	70	60,04	Belum Tercapai
19	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,51	3,96	3,7	3,96	4	4,21	Tercapai
20	Angka Kriminalitas	Per 10.000 pddk	6,5	0,04	6,1	0,04	5,9	5,2	Tercapai
21	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Poin	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	Tercapai

Sumber : Bappelitbangda (Olahan) 2025

Dari tabel diatas menunjukkan kinerja penyelenggaraan daerah berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) secara umum sebagian telah mencapai target dan sebagian lagi masih belum sepenuhnya mencapai

target yang dicanangkan dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2025 menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, yang berdampak langsung terhadap pencapaian berbagai target yang telah ditetapkan. Ketidaktercapaian beberapa indikator kinerja utama dalam RPJMD ini tidak lepas dari kombinasi berbagai faktor eksternal maupun internal, yang secara akumulatif menghambat pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Pertama, dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa pada awal periode RPJMD telah menyebabkan refocusing anggaran secara masif. Anggaran pembangunan yang semula dialokasikan untuk program prioritas harus dialihkan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Hal ini menyebabkan beberapa proyek strategis mengalami penundaan atau bahkan pembatalan.

Kedua, terbatasnya kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu kendala utama. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal daerah menjadi sempit, terutama ketika Dana Transfer Umum mengalami penyesuaian. Kondisi ini menghambat pelaksanaan program yang bersifat multiyears atau memerlukan pembiayaan besar.

Ketiga, perubahan regulasi dan kebijakan nasional, seperti penyesuaian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta dinamika kebijakan fiskal nasional, turut mempengaruhi pelaksanaan RPJMD. Adaptasi terhadap regulasi baru membutuhkan waktu dan penyesuaian program yang kadang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Keempat, kurangnya sinergi antara perencanaan dan penganggaran, serta lemahnya koordinasi lintas sektor, menyebabkan implementasi program tidak berjalan optimal. Beberapa program tidak terintegrasi secara efektif antara OPD, sehingga menimbulkan duplikasi atau bahkan kekosongan program pada bidang tertentu.

Kelima, faktor sumber daya manusia dan birokrasi, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, juga turut berperan. Kualitas perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis *evidence-based policy* dan rendahnya inovasi di tingkat pelaksana menjadikan pelaksanaan program tidak mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat.

2.3. Evaluasi Pagu Indikatif Dan Realisasi Belanja

Informasi tentang realisasi pelaksanaan kegiatan per urusan menunjukkan besaran penyerapan anggaran sampai dengan triwulan 1 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD 2025 dan APBD 2025. Gambaran tentang capaian realisasi keuangan per urusan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Barru
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	%	FISIK (%)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	297.253.626.521,00	43.200.706.197,00	14,53	14,53
2	DINAS KESEHATAN	132.749.877.969,00	17.796.882.949,00	13,41	13,41
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	54.972.579.784,65	9.846.812.529,00	17,91	10,78
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	65.984.833.284,00	2.621.189.223,00	3,97	1,24
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.608.976.544,00	1.546.632.501,00	20,33	20,33
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.539.698.174,00	802.260.557,00	17,67	17,67
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.783.191.853,00	583.112.971,00	15,41	15,41
8	DINAS PERHUBUNGAN	5.514.556.017,00	1.070.724.785,00	19,42	19,42
9	DINAS SOSIAL	3.989.020.415,00	592.180.285,00	14,85	14,85
10	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	4.949.361.721,00	778.459.911,00	15,73	17,21
11	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	9.916.892.554,00	1.533.143.192,00	15,46	15,46
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.218.032.449,00	518.297.442,00	12,29	12,29
13	SEKRETARIAT DPRD	30.843.583.389,00	5.436.338.485,00	17,63	20,00
14	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	119.689.354.873,00	27.551.755.319,60	23,02	32,28
15	INSPEKTORAT DAERAH	13.584.739.062,00	1.695.283.933,00	12,48	12,48
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.272.780.850,00	754.458.581,00	14,31	22,81
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.549.197.916,06	927.030.952,00	6,84	6,84
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.868.299.671,00	849.889.228,00	17,46	18,59
19	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	17.155.063.222,00	2.388.350.834,00	13,92	13,92
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	7.240.534.207,00	790.949.351,00	10,92	10,92
21	DINAS TENAGA KERJA	2.255.905.964,00	366.084.009,00	16,23	16,23
22	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.867.854.305,00	924.793.989,00	13,47	13,47
23	DINAS PERIKANAN	4.162.280.137,00	716.689.343,00	17,22	21,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	%	FISIK (%)
24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7.934.398.715,00	1.482.661.840,00	18,69	25,00
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.030.896.118,00	629.519.636,00	20,77	10,49
26	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.970.579.117,00	616.311.667,00	20,75	20,75
27	BAGIAN UMUM	30.969.016.733,00	11.253.343.659,00	36,34	36,34
28	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	466.528.740,00	83.666.114,00	17,93	17,93
29	BAGIAN HUKUM	623.246.750,00	24.895.000,00	3,99	3,99
30	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	721.137.990,00	48.425.800,00	6,72	6,72
31	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	380.672.990,00	45.172.145,00	11,87	11,87
32	BAGIAN ORGANISASI	661.448.880,00	23.299.050,00	3,52	3,52
33	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	466.306.800,00	26.114.750,00	5,60	5,60
34	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.102.570.670,00	1.380.034.103,00	9,14	9,14
35	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	453.304.800,00	36.003.500,00	7,94	7,94
36	KECAMATAN TANETE RILAU	4.732.354.542,00	970.204.853,00	20,50	20,50
37	KECAMATAN PUJANANTING	2.654.855.813,00	493.601.936,00	18,59	18,59
38	KECAMATAN BALUSU	2.801.286.706,00	541.208.591,59	19,32	19,32
39	KECAMATAN SOPPENG RIAJA	3.911.813.471,61	803.677.789,00	20,54	20,54
40	KECAMATAN MALLUSETASI	5.396.161.782,00	811.751.891,00	15,04	11,76
41	KECAMATAN B A R R U	7.245.089.160,57	1.319.759.225,00	18,22	25,00
42	KECAMATAN TANETE RIAJA	3.643.576.947,26	733.386.743,00	20,13	20,13
		912.334.200.901,15	144.073.856.267,60	15,79%	

Sumber : Bappelitbangda (Olahan) 2025

Tabel di atas menunjukkan total belanja daerah tahun 2024 dari pagu sebesar Rp. 912.334.200.901,15 sampai dengan triwulan 2 baru terealisasi sebesar 15,79% persen atau sebesar Rp. 144.073.856.267,6. Terbagi atas 4 (empat) urusan dengan 27 (dua puluh tujuh) perangkat daerah ditambah dengan 7 (tujuh) kecamatan. Hingga triwulan 2 terdapat 1 perangkat daerah yang menunjukkan persentase realisasi di atas 30% dari jumlah keseluruhan OPD yakni Bagian Umum Setda. Adapun perangkat daerah sampai hingga triwulan 2 yang berada pada kisaran 20% - 40% dengan jumlah OPD sebanyak 7 OPD atau 25,93% dari jumlah keseluruhan OPD, sisanya sebanyak 20 OPD dengan realisasi anggaran dibawah 20%. Rendahnya capaian realisasi anggaran perangkat daerah ini dipicu oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2.4. Evaluasi Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

a. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD Pokok Tahun 2025 dengan Permendagri 90 tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 sehingga menyebabkan penyesuaian jumlah program/kegiatan/subkegiatan yang dipetakan berdasarkan indikator kinerja dan diinput dalam aplikasi SIPD. Secara keseluruhan indikator RKPD 2025 disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga mempertimbangkan efisiensi anggaran, dari hasil penyesuaian tersebut menyebabkan adanya beberapa sub kegiatan yang tidak lagi di kerjakan Disamping itu adanya penyesuaian terhadap Program RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029.

Hasil evaluasi capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2025 yang menyajikan Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diperoleh dari laporan evaluasi kinerja perangkat daerah ditampilkan sebagai berikut pada tabel Evaluasi Terhadap Hasil RKPD.

Tabel 2.7

Tabel Evaluasi terhadap Hasil RakOD Tahun 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN ANGGARAN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN ANGGARAN 2025 (%)	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUB						
							I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13 / 5 * 100%		(15)
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					Rp 295.817.244.290,00		Rp 296.243.367.821,00		Rp 43.192.306.197		Rp -		Rp -				Rp 43.192.306.197,00		Rp 339.009.550.487,00		225,26	
I.1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					Rp 295.817.244.290,00		Rp 241.368.259.751,00		Rp 42.688.306.197		Rp -		Rp -				Rp 42.688.306.197,00		Rp 269.781.746.723,00		114,41	

		PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KAB./KOT A	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pendidika n	Per sen	10 0	Rp 235.811. 542.614, 00	0, 0 0	Rp 227.093. 440.526, 00	10 0,0 0	Rp 241.368. 259.751, 00	0, 0 0	Rp 42.688 .306.1 97	0, 0 0	R p -		R p -	0, 0 0	R p -	14, 58	Rp 42.688. 306.197 ,00	14 ,5 8	Rp 269.781. 746.723, 00	14, 58	11 4,4 1	DISDI KBUD
		Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Keuangan	Per sen	10 0	Rp 233.986. 446.640, 00		Rp 226.087. 378.387, 00	10 0,0 0	Rp 240.267. 908.365, 00		Rp 42.630 .173.9 39		R p -		R p -		R p -	17, 69	Rp 42.630. 173.939 ,00	17 ,6 9	Rp 268.717. 552.326, 00	17, 69	11 4,8 4	DISDI KBUD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Ora ng	23 38	Rp 233.986. 446.640, 00		Rp 226.087. 378.387, 00	23 38	Rp 240.267. 908.365, 00		Rp 42.630. 173.93 9		R p -		R p -		R p -	17, 74	Rp 42.630.1 73.939,0 0	17 ,7 4	Rp 268.717. 552.326, 00	0,7 6	114 ,84	DISDI KBUD
		Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentase jumlah ASN yang mengikuti diklat/ teknis/ fungsional	Per sen	10 0	Rp 180.000. 000,00		Rp 25.170.0 00,00	10 0,0 0	Rp 57.628.0 00,00		Rp -		R p -		R p -		R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 25.170.0 00,00	0,0 0	13, 98	DISDI KBUD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungs i	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/kurs us	Ora ng	14	Rp 180.000. 000,00		Rp 25.170.0 00,00	14	Rp 57.628.0 00,00		Rp -		R p -				R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 25.170.0 00,00	0,0 0	13, 98	DISDI KBUD
		Administra si Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administra si perkantora n	Per sen	10 0	Rp 320.082. 904,00		Rp 254.368. 801,00	0,0 0	Rp 443.592. 900,00		Rp -		R p -		R p -		R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 254.368. 801,00	0,0 0	79, 47	DISDI KBUD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkap an gedung kantor	Pak et	3	Rp 8.000.00 0,00		Rp 82.018.7 50,00	3	Rp 58.085.4 00,00		Rp -		R p -		R p -		R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 82.018.7 50,00	0,0 0	102 5,2 3	DISDI KBUD
			Jumlah Pengadaan peralatan kantor	Pak et	2	Rp 129.135. 204,00																			

		Penyelengga raan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti rakor dan konsultasi	Lap ora n	50	Rp 182.947. 700,00	Rp 172.350. 051,00	50	Rp 385.507. 500,00	Rp -	R p -	R p -	R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 172.350. 051,00	0,0 0	94, 21	DISDI KBUD
		Pengadaaa n Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaa n Barang Milik Daerah	Per sen	10 0	Rp 60.000.0 00,00	Rp 43.400.0 00,00		Rp 38.305.0 00,00	Rp -	R p -	R p -	R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 43.400.0 00,00	0,0 0	72, 33	DISDI KBUD
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	Unit	3	Rp 60.000.0 00,00	Rp 43.400.0 00,00		Rp 38.305.0 00,00	Rp -	R p -	R p -	R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 43.400.0 00,00	0,0 0	72, 33	DISDI KBUD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pendukung Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Jen is	4	Rp 632.513. 070,00	Rp 567.447. 328,00		Rp 414.868. 382,00	Rp 58.132 .258	R p -	R p -	R p -	14, 01	Rp 58.132. 258,00	14 ,0 1	Rp 625.579. 586,00	35 0,2 5	98, 90	DISDI KBUD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Lap ora n	4	Rp 328.389. 996,00	Rp 283.520. 584,00	4	Rp 92.488.4 10,00	Rp -	R p -	R p -	R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 283.520. 584,00	0,0 0	86, 34	DISDI KBUD
		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap ora n	3	Rp 170.923. 074,00	Rp 140.833. 244,00	3	Rp 174.076. 572,00	Rp 25.132. 258	R p -	R p -	R p -	14, 44	Rp 25.132.2 58,00	14 ,4 4	Rp 165.965. 502,00	481 ,33	97, 10	DISDI KBUD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Lap ora n	2	Rp 21.000.0 00,00	Rp 143.093. 500,00	19	Rp 148.303. 400,00	Rp 33.000. 000	R p -	R p -	R p -	22, 25	Rp 33.000.0 00,00	22 ,2 5	Rp 176.093. 500,00	111 2,5 0	838 ,54	DISDI KBUD
		Kantor	Jumlah pelayanan keamanan kantor yang	Lap ora n	2	Rp 15.000.0 00,00														

			disediakan																					
			Jumlah pelayanan administrasi yang disediakan	Lap ora n	15	Rp 97.200.0 00,00																		
		Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Cakupan pemeliha ran barang milik daerah	Per sen	1 00 %	Rp 632.500. 000,00	Rp 115.676. 010,00	Rp 145.957. 104,00	Rp -	R p -	R p -	R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 115.676. 010,00	0,0 0	18, 29	DISDI KBUD					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Operasiona l	Unit	27	Rp 50.000.0 00,00	Rp 60.703.0 10,00	52 Rp 70.930.2 00,00	Rp -	R p -	R p -	R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 60.703.0 10,00	0,0 0	121 ,41	DISDI KBUD					
		Pemeliharaa n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan operasional	Unit	25	Rp 15.000.0 00,00																		
		Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Unit	4	Rp 27.500.0 00,00	Rp 45.829.0 00,00	4 Rp 63.975.0 00,00	Rp -	R p -		R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 45.829.0 00,00	0,0 0	166 ,65	DISDI KBUD					
		Pemeliharaa n/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dinas yang layak	Unit	2	Rp 490.000. 000,00	Rp 9.144.00 0,00	2 Rp 11.051.9 04,00	Rp -	R p -	R p -	R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 9.144.00 0,00	0,0 0	1,8 7	DISDI KBUD					
			Jumlah jenis pemelihara an gedung kantor	Unit	2	Rp 50.000.0 00,00																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														14, 58										
PREDIKAT KINERJA														Sa ng at Re nd ah										

		PROGRAM PENGELOL AAN PENDIDIKA N				Rp 62.446.5 69.105,0 0		Rp 68.723.8 03.764,0 0		Rp 54.875.1 08.070,0 0		Rp 504.00 0.000		R p -		R p -		R p -	19, 96	Rp 504.000 .000,00	19 ,9 6	Rp 69.227.8 03.764,0 0	0,0 0	11 0,8 6	DISDI KBUD
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sub Kegiatan Pendukung Pengelolaan Pendidikan SD	Jenis	17	Rp 26.852.1 63.655,0 0		Rp 37.232.3 62.328,0 0		Rp 28.867.5 83.486,0 0		Rp -		R p -		R p -		R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 37.232.3 62.328,0 0	0,0 0	13 8,6 6	DISDI KBUD
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah SD yang terbangun	Ruang	2	Rp 340.000. 000,00		Rp -		Rp -		Rp -		R p -		R p -		R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp -	0,0 0	0,0 0	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah yang terbangun	Ruang	1	Rp 285.341. 900,00		Rp 270.834. 626,00	0	Rp -		Rp -		R p -		R p -		R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 270.834. 626,00	0,0 0	94, 92	DISDI KBUD
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS SD/SMP yang terbangun	Ruang	2	Rp 150.000. 000,00		Rp -		Rp 157.622. 300,00		Rp -		R p -		R p -		R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp -	0,0 0	0,0 0	DISDI KBUD
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Taman, Lapangan Upacara, Fasilitas Parkir dan pagar SD yang terbangun	Unit	1	Rp 200.000. 000,00		Rp 7.858.93 4.135,00	1	Rp 175.827. 616,00		Rp -		R p -		R p -		R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 7.858.93 4.135,00	0,0 0	392 9,4 7	DISDI KBUD
			Jumlah Sarana Air Bersih/Sanitary SD yang terbangun	Unit	2	Rp 154.000. 000,00																	0,0 0	0,0 0	

			Jumlah Ruang Laboratoriu m/Praktiku m SD yang terbangun	Unit	1	Rp 210.945.000,00															0,00	0,00		
		Pembangun an Rumah Dinas Kepala Sekolah/Gu ru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Sekolah SD yang terbangun	Unit	1	Rp 201.762.500,00	Rp 183.631.250,00	2	Rp 394.055.750,00		Rp -		R p -		R p -		R p -	0,00	Rp -	0,00	Rp 183.631.250,00	0,00	91,01	DISDI KBUD
		Rehabilitasi Sedang/Ber at Ruang Kelas	Jumlah RK SD yang direhabilita si	Rua ng	15	Rp 1.462.500.000,00	Rp 7.990.752.718,00	6	Rp 729.531.220,00		Rp -		R p -		R p -		R p -	0,00	Rp -	0,00	Rp 7.990.752.718,00	0,00	546,38	DISDI KBUD
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meubeler SD	Pak et	5	Rp 200.000.000,00	Rp -		Rp -		Rp -		R p -		R p -		R p -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	0,00	DISDI KBUD
		Pengadaan Perlengkap an Sekolah	Jumlah Buku Teks/Pelaja ran SD/SMP	Pak et	10	Rp 283.490.000,00	Rp 130.000.000,00	1	Rp 27.478.000,00		Rp -		R p -		R p -		R p -	0,00	Rp -	0,00	Rp 130.000.000,00	0,00	45,86	DISDI KBUD
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah SP yang menerima BOS Daerah pendidikan Dasar	Pese rta Didi k	20281	Rp 4.625.000.000,00	Rp 16.108.929.130,00	16708	Rp 23.443.357.500,00		Rp -		R p -		R p -		R p -	0,00	Rp -	0,00	Rp 16.108.929.130,00	0,00	348,30	DISDI KBUD
			Jumlah SP yang menerima BOS Pusat pendidikan Dasar																		0,00	0,00		
			Jumlah Sosialisasi Program Pendidikan Dasar (SD)																			0,00	0,00	
			Jumlah Siswa SD kurang mampu																			0,00	0,00	

			yang menerima Beasiswa																						
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga SD	Paket	25	Rp 1.082.798.000,00		Rp 1.099.652.000,00	25	Rp 208.000.000,00		Rp -		Rp -		Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 1.099.652.000,00	0,00	101,56	DISDI KBUD		
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa yang mengikuti Ujian Akhir SD/MI	SP	199	Rp 573.733.400,00		Rp 301.674.900,00	199	Rp 205.666.300,00		Rp -		Rp -		Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 301.674.900,00	0,00	52,58	DISDI KBUD		
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	226	Rp 71.412.700,00		Rp 8.700.000,00	226	Rp 68.239.300,00		Rp -		Rp -		Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 8.700.000,00	0,00	12,18	DISDI KBUD		
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Mata Pelajaran, Olimpiade OR dan Seni	Peserta Didik	1500	Rp 325.000.000,00		Rp 173.856.913,00	600	Rp 378.012.900,00		Rp -		Rp -		Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 173.856.913,00	0,00	53,49	DISDI KBUD		
			Jumlah SP yang mengikuti Lomba UKS SD	Peserta Didik	500	Rp 32.500.000,00															0,00	0,00			
			Jumlah SP yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat SD	Peserta Didik	828	Rp 32.500.000,00															0,00	0,00			

		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah ketersediaan Tenaga pendidik dan kependidikan	Orang	79	Rp 1.144.000.000,00		Rp 206.134.000,00	79	Rp 192.347.700,00		Rp -		Rp -		Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 206.134.000,00	0,00	18,02	DISDI KBUD
			Jumlah PTK yang mengikuti Proses Sertifikasi	Orang	8	Rp 68.000.000,00		Rp 350.791.000,00	419	Rp 315.635.200,00		Rp -		Rp -		Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 350.791.000,00	0,00	515,87	DISDI KBUD
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru Kelas/bidang studi/Mata Pelajaran dan Kepsek yang mengikuti pelatihan	Orang	200	Rp 462.035.400,00														0,00	0,00		
			Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum SD	Orang	211	Rp 264.571.798,00														0,00	0,00		
			Akta Kepsek	Orang	80															0,00	0,00		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	SP	120	Rp 41.500.000,00		Rp 75.990.656,00	0	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 75.990.656,00	0,00	183,11	DISDI KBUD
			Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Replikasi MBS	Jenis	5	Rp 33.672.957,00														0,00	0,00		

			Jumlah Dokumen Data Pendidikan	Dokumen	1	Rp 110.000.000,00															0,00	0,00	
			Jumlah dokumen Data dan Informasi Dinas Pendidikan	Dokumen	1	Rp 22.500.000,00															0,00	0,00	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SP yang mengelola BOS SD	SP	199	Rp 14.474.900.000,00	Rp 2.472.481.000,00	199	Rp 2.571.809.700,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 2.472.481.000,00	0,00	17,08	DISDI KBUD			
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sub Kegiatan Pendukung Pengelolaan Pendidikan SMP	Jenis	16	Rp 19.961.123.450,00	Rp 18.520.602.043,00		Rp 13.395.072.328,00	Rp 504.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	19,96	Rp 504.000.000,00	19,96	Rp 19.024.602.043,00	124,75	95,31	DISDI KBUD			
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah SMP yang terbangun	Ruang	2	Rp 407.756.900,00	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	0,00	DISDI KBUD			
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terbangun	Ruang	1	Rp 567.022.900,00	Rp 80.661.527,00		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 80.661.527,00	0,00	14,23	DISDI KBUD			
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	Rp 75.000.000,00	Rp 185.484.651,00	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 185.484.651,00	0,00	247,31	DISDI KBUD			
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga	Jumlah Rumah Dinas Sekolah SMP yang terbangun	Unit	1	Rp 200.625.000,00	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	0,00				

		Sekolah																					
		Pembangun an Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Taman, Lapangan Upacara, Fasilitas Parkir dan pagar SMP yang terbangun	Unit	3	Rp 1.286.12 5.550,00	Rp 3.122.01 9.585,00	1	Rp 222.139. 160,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 3.122.01 9.585,00	0,0 0	242 ,75	DISDI KBUD			
			Jumlah Ruang Laboratoriu m/Praktiku m SMP yang terbangun	Unit	1													0,0 0					
			Jumlah Sarana Air Bersih/San itary SMP yang terbangun	Unit	2														0,0 0				
		Rehabilitasi Sedang/Ber at Ruang Kelas	Jumlah RK SMP yang direhabilita si	Rua ng	6	Rp 585.000. 000,00	Rp 3.911.12 2.330,00	1	Rp 196.794. 068,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 3.911.12 2.330,00	0,0 0	668 ,57	DISDI KBUD			
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meubeler SMP	Pak et	10	Rp 250.000. 000,00	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp -	0,0 0	0,0 0	DISDI KBUD			
		Pengadaan Perlengkap an Sekolah	Jumlah Buku Teks/Pelaja ran SMP	Pak et	10	Rp 275.000. 000,00	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp -	0,0 0	0,0 0	DISDI KBUD			
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jumlah SP yang menerima BOS Pusat pendidikan Dasar (SMP)	SP	39	Rp 4.625.00 0.000,00	Rp 7.822.35 7.350,00	68 22	Rp 9.531.14 0.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 7.822.35 7.350,00	0,0 0	169 ,13	DISDI KBUD			

		Pertama	Jumlah Sosialisasi Program Pendidikan Dasar (SMP)	Jenis	3	Rp 90.000.000,00															0,00	0,00	
			Jumlah Siswa SMP kurang mampu yang menerima Beasiswa	Siswa	1150	Rp 37.500.000,00															0,00	0,00	
			Jumlah Mahasiswa Miskin dan Berprestasi yang diberikan beasiswa																				
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga SMP	Paket	4	Rp 375.000.000,00	Rp 113.800.000,00	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 113.800.000,00	0,00	30,35	DISDI KBUD		
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa yang mengikuti Ujian Akhir SMP/MTs	Siswa	3407	Rp409.866.400,00	Rp 270.043.000,00	3407	Rp 115.746.200,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 270.043.000,00	0,00	65,89	DISDI KBUD		
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	39	Rp24.836.200,00	Rp 2.600.000,00	39	Rp 24.878.800,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 2.600.000,00	0,00	10,47	DISDI KBUD		
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Mata Pelajaran, Olimpiade	Peserta Didik	600	Rp430.341.700,00	Rp 224.487.500,00	600	Rp 532.812.900,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 224.487.500,00	0,00	52,16	DISDI KBUD		

			OR dan Seni (SMP)																					
			Jumlah SP yang mengikuti Lomba UKS SMP	SP	7																0,00			
			Jumlah SP yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat SMP	SP	39																0,00			
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah ketersediaa n Tenaga pendidik dan kependidikan	Orang	23	Rp278.612.000,00		Rp54.488.000,00	3	Rp31.646.500,00		Rp-		Rp-		Rp-		0,00	Rp-	0,00	Rp54.488.000,00	0,00	19,56	DISDI KBUD
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah PTK yang mengikuti Proses Sertifikasi	Orang	5	Rp42.500.000,00		Rp160.532.000,00	244	Rp215.308.300,00		Rp-		Rp-		Rp-		0,00	Rp-	0,00	Rp160.532.000,00	0,00	377,72	DISDI KBUD
			Jumlah Guru Kelas/bidang studi/Mata Pelajaran dan Kepsek yang mengikuti pelatihan	Orang	200	Rp227.557.000,00															0,00	0,00		
			Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum SMP	Orang	39	Rp40.607.000,00															0,00	0,00		

		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	SP	39	Rp 41.500.000,00		Rp 57.661.000,00	0	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 57.661.000,00	0,00	138,94	DISDI KBUD
			Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Replikasi MBS	Jenis	5	Rp 33.672.800,00														0,00	0,00	
			Jumlah Dokumen Data Pendidikan	Dokumen	1	Rp 110.000.000,00														0,00	0,00	
			Jumlah dokumen Data dan Informasi Dinas Pendidikan	Dokumen	1	Rp 22.500.000,00														0,00	0,00	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SP yang mengelola BOS SMP	SP	39	Rp 9.525.100.000,00		Rp 2.515.345.100,00	39	Rp 2.524.606.400,00		Rp 504.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	19,96	Rp 504.000.000,00	19,96	Rp 3.019.345.100,00	51,18	31,70	DISDI KBUD
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Cakupan pengelolaan Anak Usia Dini	Jenis	6	Rp 11.037.712.000,00		Rp 10.107.141.970,00		Rp 10.038.504.656,00		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 10.107.141.970,00	0,00	91,57	DISDI KBUD
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Unit Gedung Sekolah PAUD terbangun	Unit	3	Rp 400.000.000,00		Rp 9.986.120,00	1,00	Rp 207.143.556,00		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 9.986.120,00	0,00	2,50	DISDI KBUD
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah PAUD yang diadakan Sarana dan Prasarana Bermain	Unit	10	Rp 240.000.000,00		Rp 461.214.600,00	10	Rp 304.954.000,00		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 461.214.600,00	0,00	192,17	DISDI KBUD

		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang mendapatkan BOP PAUD	Peserta Didik	6959	Rp 4.104.990.400,00		Rp 3.816.166.400,00		Rp 3.719.472.800,00		Rp -		Rp -		Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 3.816.166.400,00	0,00	92,96	DISDI KBUD
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Cakupan Pendidik PAUD yang mendapatkan insentif	Peserta Didik	645	Rp 5.975.372.000,00		Rp -	7284	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	0,00	DISDI KBUD
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang				Rp 5.611.095.000,00	645	Rp 5.613.300.000,00		Rp -		Rp -		Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 5.611.095.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	DISDI KBUD
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru PAUD yang mengikuti Pelatihan	Orang	200	Rp 132.349.600,00		Rp 117.146.000,00	200	Rp 123.334.100,00		Rp -		Rp -		Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 117.146.000,00	0,00	88,51	DISDI KBUD
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Dokumen PAUD yang dibukukan	SP	7	Rp 50.000.000,00		Rp 91.533.850,00	254	Rp 70.300.200,00		Rp -		Rp -		Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 91.533.850,00	0,00	183,07	DISDI KBUD
			Jumlah pendidik/pengelola PAUD yang mengikuti publikasi/osialisasi	Orang	250	Rp 60.000.000,00															0,00	0,00	
			Jumlah Gugus PAUD terbentuk dan terbina	Gugus	22	Rp 75.000.000,00															0,00	0,00	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Angka melek aksara penduduk	Orang	137961	Rp 4.595.570.000,00		Rp 2.863.697.423,00		Rp 2.573.947.600,00		Rp -		Rp -		Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 2.863.697.423,00	0,00	62,31	DISDI KBUD

			usia dewasa usia 15-59 tahun																						
		Penyelengga raan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah WB yang mengikuti program Keaksaraa n	PD	10 0	Rp 4.000.00 0,00		Rp 2.863.69 7.423,00	10 50	Rp 2.573.94 7.600,00		Rp -		R p -		R p -		R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 2.863.69 7.423,00	0,0 0	62, 31	DISDI KBUD
			Jumlah PKBM yang dikembang kan	Lbg	1	Rp 198.970. 000,00																			
			Jumlah Kelompok yang mengikuti program paket A	Sis wa	23 6	Rp 306.800. 000,00																			
			Jumlah Kelompok yang mengikuti program paket B	Sis wa	85 8	Rp 1.287.00 0.000,00																			
			Jumlah Kelompok yang mengikuti program paket C	Sis wa	54 5	Rp 981.000. 000,00																			
			Jumlah WB Paket B/Paket C yang mengikuti pelatihan TI	WB	50	Rp 110.000. 000,00																			
			Jumlah WB yang mengikuti HAI	WB	50	Rp 125.000. 000,00																			
			Jumlah jenis kegiatan lingkup UPT Pendidikan	Jeni s	5	Rp 1.582.80 0.000,00																			

			SKB																					
		PROGRAM PENGEMBA NGAN KURIKULU M																						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	19, 96	Rp 504.000 .000,00		Rp 504.000. 000,00		#DI V/ O!		
PREDIKAT KINERJA																	Sa ng at Re nd ah							
II		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					Rp 1.528.22 2.557,00		Rp 1.010.25 8.700,00		Rp 8.400. 000		R p -		R p -		5,8 2	Rp 8.400.0 00,00		Rp 1.536.62 2.557,00				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				Rp 1.692.94 4.750,00	Rp 1.528.22 2.557,00		Rp 1.010.25 8.700,00		Rp 8.400. 000		R p -		R p -		R p -	0,0 0	Rp 8.400.0 00,00	0, 00	Rp 1.536.62 2.557,00	0,0 0	90, 77	DISDI KBUD
		PROGRAM PENGEMBA NGAN KEBUDAYA AN	Presentase cagar dan karyabuda ya yang ditetapkan sebagai WBTB			Rp 1.020.27 2.750,00	Rp 1.020.37 3.229,00		Rp 799.322. 100,00		Rp -		R p -		R p -		R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 1.020.37 3.229,00	0,0 0	10 0,0 1	DISDI KBUD
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Karyabuda ya yang dapat dilindungi	O bjek		Rp 40.000.0 00,00	Rp 117.925. 489,00		Rp 152.740. 000,00		Rp -		R p -		R p -		R p -	0,0 0	Rp -	0, 00	Rp 117.925. 489,00	0,0 0	29 4,8 1	DISDI KBUD

		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	1	Rp 40.000.000,00	Rp 117.925.489,00	3	Rp 152.740.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 117.925.489,00	0,00	294,81	DISDI KBUD
		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional	Jenis	2	Rp 809.369.900,00	Rp 744.491.187,00		Rp 576.465.400,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 744.491.187,00	0,00	91,98	DISDI KBUD
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah kegiatan: Kesenian Daerah, Karnaval budaya, Festival Budaya, Pentas budaya, Permainan Tradisional	Laporan	6	Rp 685.310.900,00	Rp 657.295.587,00	6	Rp 468.669.900,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 657.295.587,00	0,00	95,91	DISDI KBUD
		Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah tenaga juru budaya yang difasilitasi dan dibina	Sertifikat	90	Rp 124.059.000,00	Rp 87.195.600,00	90	Rp 107.795.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 87.195.600,00	0,00	70,29	DISDI KBUD

		n																					
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Adat	Kegiatan	1	Rp 170.902.850,00	Rp 157.956.553,00		Rp 70.116.700,00		Rp -		Rp -		Rp -		0,00	Rp -	0,00	Rp 157.956.553,00	0,00	92,42	DISDI KBUD
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat yang dilestarikan	Objek	1	Rp 170.902.850,00	Rp 157.956.553,00	1	Rp 70.116.700,00		Rp -		Rp -		Rp -		0,00	Rp -	0,00	Rp 157.956.553,00	0,00	92,42	DISDI KBUD
		PROGRAM PENGEMBA NGAN KESENIAN TRADISIONAL				Rp 349.022.000,00	Rp 322.111.250,00		Rp 66.494.000,00		Rp -		Rp -		Rp -		0,00	Rp -	0,00	Rp 322.111.250,00	0,00	92,29	DISDI KBUD
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian Masyarakat	Grup	15	Rp 349.022.000,00	Rp 322.111.250,00		Rp 66.494.000,00		Rp -		Rp -		Rp -		0,00	Rp -	0,00	Rp 322.111.250,00	0,00	92,29	DISDI KBUD
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan	Orang	300	Rp 349.022.000,00	Rp 322.111.250,00	300	Rp 66.494.000,00		Rp -		Rp -		Rp -		0,00	Rp -	0,00	Rp 322.111.250,00	0,00	92,29	DISDI KBUD

		Tradisional	dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensi nya)																						
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				Rp 323.650.000,00		Rp 185.738.078,00		Rp 144.442.600,00		Rp 8.400.000		R p -		R p -		R p -	5,82	Rp 8.400.000,00	5,82	Rp 194.138.078,00	0,00	59,98	DISDI KBUD
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Jenis	1	Rp 323.650.000,00		Rp 185.738.078,00		Rp 144.442.600,00		Rp 8.400.000		R p -		R p -		R p -	5,82	Rp 8.400.000,00	5,82	Rp 194.138.078,00	582,00	59,98	DISDI KBUD
		Penetapan cagar budaya	Jumlah peninggalan sejarah dan situs-situs bersejarah yang dilestarikan	Unit	27	Rp 323.650.000,00		Rp 185.738.078,00	1	Rp 144.442.600,00		Rp 8.400.000		R p -		R p -		R p -	5,82	Rp 8.400.000,00	5,82	Rp 194.138.078,00	21,56	59,98	DISDI KBUD
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			5,82	Rp 8.400.000,00	5,82	Rp 8.400.000,00			
PREDIKAT KINERJA																			Sangat Rendah						
TOTAL							297.345.466.847		Rp 297.253.626.521,00		43.200.706.197		R p -							Rp 43.200.706.197,00		Rp 340.546.173.044,00			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																									
PREDIKAT KINERJA																							Sedang	Sangat	

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perundang-undangan																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	5.000.000	2	991800	2	45.192.240	0	0,00						2	924.000	4	1.915.800	2,00	0,38	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	0	100%	65.502.626.588	100%	71.300.347.173	100%	17.475.873.079						100%	65.279.469.763	200%	130.782.096.351	200%	#DIV/0!	Kasubag Program & Keuangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	726		725	65.502.626.588	726	71.300.347.173	722	17.475.873.079						739	65.279.469.763	1464	130.782.096.351	2,02	#DIV/0!	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu	100%	0,00	100%	25.801.000,00	100%	6.716.000	0%	0,00						100%	21.722.000	200%	47.523.000	200%	#DIV/0!	Kasubag Umum & SDM
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0,00	2	25801000,00	2	6.716.000	0	0,00						2	21.722.000	4	47.523.000	4,00	#DIV/0!	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	3.774.320.000	100%	1.001.462.398	100%	912.729.500	23%	37867980,00						23%	945.010.127	123,40%	1.946.472.525	123%	0,52	Kasubag Umum & SDM
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	17.500.000	13	10.182.000	1	12.477.000	3	0,00						12	9.131.000	25	19.313.000	3,57	1,10	

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	757.230.000	3	290455398	7	81.720.000	0	0,00						3	287.325.000	6	577.780.398	0,30	0,76	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23	48.470.000	2	10.096.000	9	17.484.100	0	0,00						2	9.361.000	4	19.457.000	0,17	0,40	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	626.320.000	3	97.985.000	2	117.465.400	2	0,00						3	75.444.700	6	173.429.700	6,00	0,28	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	67.429	96.800.000	2	33.250.000	1	33.247.000	0	0,00						2	29.517.500	4	62.767.500	0,00	0,65	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	60.000.000	12	13.380.000	12	10.022.500	3	0,00						12	3.522.500	24	16.902.500	2,00	0,28	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	2.168.000.000	12	546.114.000	12	640.313.500	3	37.867.980						12	530.708.427	24	1.076.822.427	2,00	0,50	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	162.000.000	100%	32.800.000	100%	71.009.800	0%	0,00						100%	32.690.000	200%	65.490.000	200%	0,40	Kasubag Umum & SDM
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	162.000.000	5	32800000	67	71.009.800	0	0,00						5	32.690.000	10	65.490.000	2,00	0,40	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	9.696.200.000	100%	751.384.574	100%	1.649.191.167	19%	0,00						19%	733.933.449	119%	1.485.318.023	119%	0,15	Kasubag Umum & SDM

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 2	182.0 00.00 0	12	78.509. 100	12	60.287. 700	3	0,00						12	73.814.0 00	24	152.32 3.100	2, 00	0,84	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 2	3.742. 200.0 00	12	564.87 5.474	12	652.303 .467	3	0,00						12	552.119. 449	24	1.116. 994.92 3	2, 00	0,30	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 2	5.772. 000.0 00	12	108.00 0.000	4	936.600 .000	1	0,00						12	108.000. 000	24	216.00 0.000	2, 00	0,04	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	1 0 0 %	6.237. 079.5 60	10 0%	625.12 5.687	100 %	449.620 .462	41%	0,00						88 %	137.837 .380	188 %	762.9 63.06 7	18 8 %	0,12	Kasu bag Umu m & SDM
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 3	2.155. 000.0 00	40	159.80 0.000	48	136.800 .000	0	0,00						26	109.072. 380	66	268.87 2.380	0, 00	0,12	
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 1	739.7 50.00 0	60	30.125. 000	66	31.325. 000	41	0,00						63	28.765.0 00	123	58.890 .000	3, 00	0,08	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /Direhabilitasi	1 1	3.342. 329.5 60	1	435200 687,00	1	281.495 .462	0	0,00						0	0	1	43520 0687	0, 09	0,13	
		Peningkatan Pelayanan BLU D	Tingkat Kesehatan BLU D	1	##### ##### ##### #		75.345 .110.8 55	1	65.916. 695.192		0,00						0	-	0	75.34 5.110. 855	0, 00	0,30	RSU D + PKM

		Pelayanan dan Penunjang BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan	1	252.485.650.448	1	53.116.335.250	12	20.237.892.348	1							1	0	1	53.116.335.250	1,00	0,21	RSU D
				1	252.485.650.448	12	22.228.775.605	1	45.678.802.844	0	0,00						12	0	24	22.228.775.605,00	#DIV/0!	#DIV/0!	PKM
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			100.895.065.922		89.764.727.188		74.233.085.026		276.841.890							10.778.719.287,80		100.543.446.476		1,00	
			Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100		100	100%			14							14		114	0,00	113,70%	#DIV/0!	Bidang Kesmas
			Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100		100	100			14							14		114	0,00	113,9%	#DIV/0!	Bidang Kesmas
			Angka Status Gizi Masyarakat	92,97		92	92,56			84							83		175	0,00	188,6%	#DIV/0!	Bidang Kesmas
			Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	87		85	86%			19							85		170	0,00	194,9%	#DIV/0!	Bidang P2P
			Indeks Keluarga Sehat	0,8		0,6	0,7%			0,3							0,31		1	0,00	0,0%	#DIV/0!	Bidang Yankes & SDK
			Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan (SPM)	100		100	100%			20							20		120	0,00	119,5%	#DIV/0!	Bidang P2P
			Presentase pasien yang tertangani sesuai standart pelayanan	##	99.052.441.003	77.500	26.106.333.960	7750 (100%)	21.027.081.971,7	21256	-						21256	6.811.835.700	98756	32.918.169.660	0,26	0,33	RSU D

		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterpenuhi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan	100%	26.219.975.862	100%	26.106.333.960	100%	21.027.081.972	0,00							76%	10.501.877.397,80	176%	36.608.211.358	176%	1,40	Bidang Yankes & SDK
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	13	17.875.222.508	3	2.315.751.171	1	9.293.776.941	0							2	-	5	2.315.751.171	0,38	0,13	RSU D
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0	0	135	5.972.162.016	6	5.526.413.250	0	0,00						92	5.832.305.213	227	11.804.467.229	#DIV/0!	#DIV/0!	Bidang Yankes & SDK
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30	300.000.000		240		149.393.400	0	0,00						4	1.929.517.068	4	1.929.517.068	0,13	6,43	Bidang Yankes & SDK
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0	8.044.753.354	2	2.877.578.492	2	6.057.498.381	0	0,00						2	2.740.055.116,80	4	5617633609	#DIV/0!	0,70	Bidang Yankes & SDK
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Persentase Keterpenuhi layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat	100%	74.633.465.900	100%	63.052.793.428	100%	53.036.820.254	276.841.890							81,59%	276.841.890	1,815913813	59.214.957.251	1,82	0,79	

		dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Daerah Kabupaten																					
		Pengelolaan PelayananKese hatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3 1 8 0	234.6 56.20 4	3.2 70	705.36 3.300	3.27 0	597.533 .720	448	300.000							448	300.000	3.71 8	705.66 3.300	1, 17	3,01	Bida ng Kes mas
		Pengelolaan PelayananKese hatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3 0 2 8	765.6 24.40 0	3.2 51	101.69 7.500	3.25 1	6.203.0 70	453	2.960.000							453	2.960.00 0	3704	104.65 7.500	0, 00	0,14	Bida ng Kes mas
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 9 8 5	131.0 02.67 9	3.0 91	237.62 6.920	3.09 1	16.410. 000	460								460	0	3.55 1	237.62 6.920	1, 19	1,81	Bida ng Kes mas
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 4 3 8 7	68.25 3.217	15. 17 7	30.853. 472	15.1 77	20.222. 672	2.35 5								235 5	0	17.5 32	30.853 .472	1, 22	0,45	Bida ng Kes mas
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 8 8 0	37.17 5.578	26. 77 9	640.35 0.000	27.6 81	436.545 .600	8.00 1	2.800.000							800 1	2.800.00 0	34.7 80	643.15 0.000	12 ,0 8	17,30	Bida ng Kes mas
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3 4 6 7 6	8.324. 832	12 2.4 36	396.04 9.755	122. 436	115.972 .000	23.8 93								238 93	0	146. 329	396.04 9.755	4, 22	47,57	Bida ng P2P
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 6 0 2 2	250.0 31.12 9	22. 19 9	508.04 5.700	21.5 72	83.861. 700	13.4 91	2.780.000							134 91	2.780.00 0	35.6 90	510.82 5.700	2, 23	2,04	Bida ng Kes mas
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4 9 3 5 8	10.40 6.040	49. 97 9	627.10 0.233	49.9 79	169.796 .250	9.62 5								962 5	0	5960 4	627.10 0.233	0, 00	60,26	Bida ng P2P
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3 1 6 9	6.243. 624	3.1 33	31.624. 760	3.13 4	15.297. 250	1.63 7								163 7	0	4770	31.624 .760	1, 51	5,07	Bida ng P2P

		Diabetes Melitus	Sesuai Standar																					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	505	10.406.040	439	38.528.050	439	169.699.730	419	950.000							446	950.000	885	39.478.050	1,75	3,79	Bidang P2P
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3650	31.218.120	5103	350.763.174	4584	466.868.700	1.230	587.500							1230	587.500	6.333	351.350.674	1,74	11,25	Bidang P2P
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (SPM)	3748	26.015.100	3.763	113.386.300	3.763	128.343.750	509								509	0	4272	113.386.300	0,00	4,36	Bidang P2P
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	1.590.548.769	12	4.922.749.204	12	2.584.302.600	3								3	0	15	4.922.749.204	1,25	3,10	Bidang Kesmas
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	35.247.859	12	20.969.000	1	65.650.500	0	400.000							0	400.000	12	21.369.000	1,00	0,61	Bidang Kesmas
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	364.211.404	12	641.315.000	1	296.458.000	0								0	#REF!	0,00	#REF!	Bidang Kesmas		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	379.109.556	12	99.010.000	12	84.850.500	3								3	0	15	99.010.000	1,25	0,26	Bidang Kesmas
		Pengelolaan surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	14.360.335	12	756.940.500	12	326.383.400	3	4.450.000							3	4.450.000	15	761.390.500	1,25	53,02	Bidang P2P
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular & Tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	145.684.561	12	2.013.614.790	12	1.428.650.680	3	22.087.500							12	22.087.500	24	2.035.702.290	2,00	13,97	Bidang P2P
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	55.933.482.795	12	43.691.461.678	12	41.908.084.784	3	204.469.390							12	204.469.390	24	43.895.931.068	0,00	0,78	Bidang Yankes &

																							SDK
		Penyelenggara an Kabupaten/Ko ta Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	131.1 90.64 8	0	0,00	2	80.830. 600	3	1.267.500						12	1.267.50 0	12	1.267. 500	12 ,0 0	0,01	Bida ng Yank es & SDK
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TDK ADA DLM RENSTRA				746	77.500. 000														
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 2	12.48 7.248. 120	12	3.178.1 73.900	12	1.792.0 72.500														
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0	7	117477 4692,0 0	7	589.675 .298	0	23.190.000						7	23.190.0 00	14	1.197. 964.69 2	#D IV /0!	#DIV/ 0!	Bida ng Yank es & SDK
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 2	379.8 71.90 7	12	22.370. 000	12	6.399.5 40	3	2.350.000							2.350.00 0	#REF !	19583 3,33	#R EF !	Bidan g P2P	
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 3	1.593. 152.9 80	13	1.039.8 30.500	13	1.041.4 32.900	3	640.000						13	640.000	26	1.040. 470.50 0	2, 00	0,65	Bida ng Yank es & SDK
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumenhasilpengelola anupayakesehatanibud ananak	1 0 2 4	0,00	10 24	1.339.0 00.000	12	381.478 .690	3	7.610.000						0	7.610.00 0	1024	1.346. 610.00 0	1, 00	#DIV/ 0!	PKM

		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	TDK ADA DLM RENSTRA				160	5.950.000	0	0,00						0	0	0	0	#V AL UE !	#DIV/ 0!	PKM
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan					12	107.200.000	0	0,00							0	0	0	0	#D IV /0!	#DIV/ 0!
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlahdokumenhasilpe ngelolaanPelayananKes ehatanReproduksi	1 4 4	0,00	14 4	100530 000,00	12	33.145.820	0	0,00						0	0	144	100.530.000	1,00	#DIV/ 0!	PKM
		Penyelenggara an Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan Sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	1 2	41.624.160	1	599.659.800	100 %	169.182.800	0%	0,00						0%	0	1	599.659.800	0,08	14,41	Kasu bag Prog ram & Keua ngan
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 3	41.624.160	12	599.659.800	1	169.182.800	0	0,00						12	0	24	599.659.800	0,00	14,41	
		Program Peningkatan Kapasitassum ber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten sesuai standar dan Peraturan Perundang-undangan	1 0 0	50.394.980	0,92	57.003.600,00	92%	697.046.180	92%	6.300.000						92 %	51.252.500	184 %	108.256.100	0,02	2,15	Bida ng Yank es & SDK
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten Barru	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan rekomendasi izin praktik	1 0 0	17.002.190	100 %	16.615.000	100 %	8.926.800	0%	3100000,00						100 %	15.899.500	200 %	32.514.500	0,02	1,91	

		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	7.791.138	1	7.630.000	1	3.486.800	0							1	7.257.500	2	14.887.500	0,00	1,91	
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	9.211.052	1	8.985.000	1	5.440.000	0	3.100.000						1	8.642.000	2	17.627.000	2,00	1,91	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase peyusunan SDMK yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	12.730.885	100%	19.769.600	100	10.331.500	0%	3.200.000						0%	15.478.000	100%	35.247.600	1,00	2,77	
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	6.306.060	1	13.558.000	1	3.635.500	0	3.200.000						1	9.382.500	2	22.940.500	2,00	3,64	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	618	3.271.794	38	3.146.600	30	2.223.000	0							38	3.095.500	76	6.242.100	0,12	1,91	
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	3.153.030	1	3.065.000	1	4.473.000	0							1	3.000.000	2	6.065.000	0,00	1,92	

		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan kompetensi teknis	55	20.661.906	50	20.619.000	50	677.787.880	0%	0,00							238%	19.875.000	52,38	40.494.000	0,95	1,96	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	55	20.661.906	50	20.619.000	50	677.787.880	0								119	19.875.000	169	40.494.000	3,07	1,96	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang berizin dan bersertifikat.	100	65.000.000	1	344350000	100%	64.641.420,00		0,00							77%	203.765.160,00	177%	548.115.160,00	0,02	8,43	Bidang Yankes & SDK
		pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin usaha	100%	30.000.000	1,00	21561000,00	100%	41.641.440		0,00							100%	17.773.160	200%	39.334.160	2,00	1,31	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4	30.000.000	3,00	21561000,00	4	41.641.440	0	0,00							3	17.773.160	6	39.334.160	0,00	1,31	

		Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																				
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat produksi pangan industri Rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	1 0 0 %	35.00 0.000	10 0%	141.25 7.000	100 %	7.061.0 00		0,00					100 %	50.007. 000	200 %	191.2 64.00 0	2, 00	5,46	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	4	35.00 0.000	4	141.25 7.000	2	7.061.0 00	0	0,00					4	50.007.0 00	8	191.26 4.000	2, 00	5,46	

		Rumah Tangga																					
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang telah mendapatkan pemeriksaan post market sesuai aturan perundang-undangan	1 0 0 %	0	10 0%	18153 2000,0 0	100 %	15.938. 980		0,00						86 %	135.985. 000	186 %	317.5 17.00 0	1, 86	#DIV/ 0!	
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 1 0	0	88	181532 000,00	40	15.938. 980	0	0,00						76	135.985. 000	164	317.51 7.000	1, 49	#DIV/ 0!	
		Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS	8 3	30.00 0.000	0, 82	40730 2000	82%	61.674. 820,00	50,6 0%	0,00						53, 95 %	0,00	135, 95%	407.3 02.00 0,00	0, 00	13,58	Bida ng Kes mas
		Pengembanga n dan Pelaksanaan UpayaKeseha tan Bersumber Daya Masyarakat(U KBM) Tingkat			30.00 0.000		407.30 2.000		61.674. 820		0,00							0	0	407.3 02.00 0	#D IV /0 !	13,58	

		Daerah Kabupaten/K ota																					
		Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembanga ndan Pelaksanaan UpayaKesehat an BersumberDay a Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 2	30.00 0.000	2	407.30 2.000	2	61.674. 820	0	0,00						366 .84 4.7 50	0	366. 844. 752	0,00			
																		0	0	#D IV /0!	#DIV/ 0!		
																		0	0	#D IV /0!	#DIV/ 0!		
																		0	0	#D IV /0!	#DIV/ 0!		
																		0	0	#D IV /0!	#DIV/ 0!		
																		0	0	#D IV /0!	#DIV/ 0!		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																							

DINAS PUTRPERKIM

N O	SASARAN	kode	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah		
											I										
	1	2	3	4		5		6		7		8		(12)= 8+9+10+11		(13)= 6+12		(14)=13/5*100%		15	
				Uraian	Satuan	K	Rp	K	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP DPUTR-PERKIM	level	3	Rp25.531.045.431	3	9.996.652.469	3	6.857.284.889		1.282.058.678	3	1.282.058.678	3	11.278.711.147	3,00	44,18		
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JPL	20		20	20			20		20		20				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen laaporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persen	100	19.177.897.846	100	8.343.027.093	100	4.910.597.519		1.205.796.427	25	1.205.796.427	25	9.548.823.520	25	49,79		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	285	19.177.897.846	104	8.343.027.093	54	4.910.597.519	54	1.205.796.427	54	1.205.796.427	158	9.548.823.520	55,44	49,79		
			Rata-rata capaian kinerja (%)												100	24,55			55,44	49,79	
			Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
			KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyusunan Dokumen laaporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-	Persen	100	-	100	-	100	125.742.000		-	0	-	0	-	0	#DIV/0!		

			Undangan																
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							56.765.000	0		0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							68.977.000				-					
			Rata-rata capaian kinerja (%)										-	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
			Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			#DIV/0!	#DIV/0!	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	1.692.806.775		536.146.389	100	513.869.870	0	24.400.400	0	24.400.400	0	560.546.789		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	25.000.000	1	4.186.000	1	2.479.400	0	-	0	-	1	4.186.000	20	16,74
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	155	388.000.000	2	84.891.700	4	129.462.900	0		4	-	6	84.891.700	3,87	21,88
			Penyediaan peratan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	33	43.394.275	2	6.117.375	2	11.472.400	0		2	-	2	6.117.375	6,06	14,10
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	91	317.082.500	12	29.350.000	12	61.560.000	0		0	-	12	29.350.000	13,19	9,26
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	172	50.750.000	48	7.689.600	24	9.699.970			2	-	50	7.689.600	29,07	15,15
			Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	36	30.000.000			12	3.188.700			5	-	5	-	13,89	0,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.290	838.580.000	731	410.029.089	568	296.006.500	120	24.400.400	120	24.400.400	851	434.429.489	37,16	51,81

			Rata-rata capaian kinerja (%)										21	4,75			17,61	21,49	
			Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			760.500.000			100	301.933.348	0	-		-		-			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	32	1.203.997.031	3	80.636.270	124.850.000			0	-	3	80.636.270	9,375	6,70	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	Unit	50	80.500.000	15	17.250.000	65.248	3	-	3	-	18	17.250.000	36	21,43	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	64	680.000.000	34	304.023.933	301.868.100	0	0	0	-	34	304.023.933	53,125	44,71	
			Rata-rata capaian kinerja (%)										11	0,00			32,83	24,28	
			18										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	Persen	100	1.812.589.450		583.783.757	402.988.800		51.861.851		51.861.851	0	635.645.608			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	200.765.750	24	228.724.230	19.363.800	0		0	-	24	228.724.230	40,00	113,93	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	120	389.147.300	48	93.659.527	110.250.000	6	10.811.851	6	10.811.851	54	104.471.378	45,00	26,85	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	62	96.676.400	7	11.800.000	11.775.000	0	250.000	0	250.000	4	12.050.000	6,45	12,46	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	300	1.126.000.000	24	249.600.000	261.600.000	3	40.800.000	3	40.800.000	27	290.400.000	9,00	25,79	

			Rata-rata capaian kinerja (%)												20	12,87			25,11	44,76	
			Predikat Kinerja												Sang at Ren dah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrus an Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah Yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Persen	100	2.087.251. 360		533.695.2 30	100	412.120.60 0		-	100	-	100	533.695. 230	100	25,57		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	8	82.125.000	2	13.814.50 0	4	49.000.000	1	-	0	-	2	13.814.5 00	25	16,82		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	132	385.642.70 0	22	57.986.28 0	26	77.000.000	2	-	0	-	22	57.986.2 80	16,67	15,04		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	unit	75	1.619.483. 660	10	461.894.4 50	6	286.120.60 0	1	-	0	-	10	461.894. 450	13,33	28,52		
Rata-rata capaian Kinerja (%)															0,00			18,33	20,13		
Predikat Kerja															Sang at Ren dah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Meningk atnya Pengelol aan dan		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten /kota	Persen	60	41.930.000 .000	51, 67	8.053.447. 020	54, 49	4.953.624. 388,00		15.600.8 50	44,2 3	15.600.8 50	95,9 0	8.069.04 7.870	159,83	0,19		

	layanan infrastru ktur			yang dilayani oleh jaringan irigasi dalam kondisi baik															
				Persentase luas kawasan permukaan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	Persen	9,03	47.848.799.804	8,46	2.457.651.125	6,54	3.356.054.718	12.921.100	9,85	12.921.100	18,31	2.470.572.225	202,77	0,05	
			KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	Panjang Bangunan SDA dan Pengaman Pantai Yang Terbangun	KM	26	47.848.799.804	0,22	3.515.200.885	0,99	3.356.054.718	0	12.921.100	0,00	12.921.100	0,22	3.528.121.985	0,87	7,37
			Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan		10	180.000.000			2	49.999.980		2,00	-	2,00	-	20,00	0,00	
			Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara	Km	2,39	2.150.000.000		324.691.950		241.268.206			-		324.691.950	0,00	15,10	
			Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan perkuatan Tebing yang di Bangun	KM	9,1	19.308.000.000	0,137	730.209.215	0,356	1.080.699.852	0	8.143.850	0,000	8.143.850	0,137	738.353.065	1,51	3,82
			Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM	9,45	21.360.799.804	0,085	1.776.818.170	0,044	990.622.986		2.427.250	0,000	2.427.250	0,085	1.779.245.420	0,90	8,33
			Rehabilitasi seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang direhabilitasi	KM	0,63	2.550.000.000		200.405.600	0,236	219.463.896		2.350.000	0,000	2.350.000	0	202.755.600	0,00	7,95
			Penigkatan kanal banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	KM	4	2.300.000.000		483.075.950	0,349	773.999.798		0	0,000	-	483.075.950	0,00	21,00	
			Rata-rata capaian kinerja (%)											-	0,39		7,47	11,24	

			Predikat Kinerja										Sang at Ren dah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Primer dan sekunder Yang Terbangun dalam kondisi baik	KM	70,6	41.930.000.000	0,3	8.053.447.020	6,2	4.953.624.388	0	15.600.850	0,00	15.600.850	0,25	8.069.047.870	0,00	19,24
			Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	16,6	9.685.711.000	0	406.742.967	1,03	832.784.518		5.445.500	0,000	5.445.500	0,00	412.188.467	0,00	4,26
			Sub Kegiatan Peningkatan Bendung Irigasi								161.543.320		5.125.550		5.125.550				
			Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	51,5	30.614.289.000	0,25	6.947.381.180	5,063	3.639.112.650	0,0		0,000	-	0,250	6.947.381.180	0,49	22,69
			operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	2,5	1.630.000.000	0	699.322.873	0,07	320.183.900		5.029.800	0,000	5.029.800	0,000	704.352.673	0,00	43,21
			Rata-rata capaian kinerja (%)										-	0,31			0,49	23,39	
			Predikat Kinerja										Sang at Ren dah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	100% layak dan 72,22% aman	100% layak dan 72,22% aman	600.000.000		13.544.523,96	98,31	1.660.308.310		-	96,75	-	129	13.544.524		100,00
			KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah SR jaringan perpipaan SPAM di daerah Kabupaten	SR	1.200	600.000.000		13.544.524	80	1.660.308.310		-	-	-	0	13.544.524		2

			(SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Dokumen					410.874.600		-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	150	600.000.000	13.544.524	80	1.249.433.710			0	-	0	13.544.524	0	2,26		
			Rata-rata capaian kinerja (%)											-	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
			Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah			#DIV/0!	#DIV/0!	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)		100 %	17.385.609.863		4.200.959.100	100	2.215.828.489		19.478.645,00	100,00	19.478.645	100	146.993.100	100	3,50	
			KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah RT yang mendapatkan akses pengolahan air limbah		3.940	17.385.609.863	602	4.200.959.100	188	2.215.828.489	11	19.478.645,00	11	19.478.645	613	146.993.100	15,56	3,50	
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	RT	468	606.000.000		52.000.000	50	188.544.930	11		11	-	11	52.000.000	2,35	8,58	
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	RT	2.340	16.600.429.863		4.001.966.000	138	1.927.294.900			2	-	2	4.001.966.000	0,085470085	24,11	
			Sub. Kegiatan Operasi dan	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air	Unit	10	179.180.00	2	146.993.1	2	99.988.659		19.478.6	2	19.478.6	4	166.471.	40	92,91	

			Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara		0		00			45,00		45		745			
			Rata-rata capaian kinerja (%)									8	0,88			14,15	41,87	
			Predikat Kinerja									Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten		40	2.348.637.892,00		1.907.094.635	35	1.370.000.000,00		81,81	-	81,81	1.907.094.635	204,53	81,20
			KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Panjang drainase yang dikelola dan dikembangkan yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota		58,69	2.348.637.892,00		1.907.094.635,00	5	1.370.000.000,00		0	-	-	1.907.094.635	0,00	81,20
			Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	sistem drainase perkotaan	10	2.348.637.892,00	9	1.907.094.635	5	1.370.000.000		-	-	9	1.907.094.635	87,68	81,20
			Rata-rata capaian kinerja (%)									0	0,00			87,68	81,20	
			Predikat Kinerja									Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Tinggi	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kepatuhan IMB		100	40.380.000.000	100	24.890.283.678	100	39.709.085.429		100	350.000	100	24.890.633.678	100	61,64
			KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN	Jumlah bangunan pemerintah yang di tata		39	40.380.000.000	30	21.313.643.890	0	39.709.085.429		0	350.000	30	21.313.993.890	77	52,78

			MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SETIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG																
			Penyelenggara n Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	dokume n	500	800.000.000	309	107.250.000	100	19.939.200		350.000,00	0	350.000	309	350.000	61,80	0,04
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	dokume n	21	11.195.670.801	14	21.597.658.126	0	8.775.922.078			0	-	14	21.597.658.126	66,67	192,91
			Pengubahsuaia n Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	unit	13	28.139.329.199	16	17.254.251.056	0	7.567.992.771			0	-	16	17.254.251.056	123,08	61,32
			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara,		5	245.000.000			1	49.914.799		-	0	-	0	-	0,00	0,00

			Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dirawat, dan Diperiksa Berkala															
			Rata-rata capaian kinerja (%)										-	0,00			94,87	84,76	
			Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi	
			PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota		83	114.183.79 3.600	66,39	74.585.38 0.302	78,8	Rp19.932.788.061		123.587.000	0,00	123.587.000	61,16	74.708.967.302	73,69	100,17
			KEGIATAN PENYELENGGA RAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Panjang penanganan ruas jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Kewenangan Kabupaten		#REF!	114.183.79 3.600	13,627	74.585.38 0.302	#REF!	19.932.788.061		123.587.000	-	123.587.000	13,63	74.708.967.302		100,17
			Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	KM	16	8.614.400.000		29.149.702.265		1.664.201.590			-					
			Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	27	74.609.424.000	13,627	68.854.081.187	6,325	12.745.000.000			0	-	13,627	68.854.081.187	50,470	92,29
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	170	1.700.000.000	87,98	3.292.704.875	84,73	Rp723.586.471	0	123.587.000	0	123.587.000	87,98	3.416.291.875	51,755	200,96
			Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	24	31.192.369.600	7	2.023.458.740	4	Rp4.250.000.000			0	-	7	2.023.458.740	29,17	6,49
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan								Rp300.000.000			-					
			Belanja Pemeliharaan rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	1427	6.682.000.000	8	415.135.500	10	250.000.000			2	-	10	415.135.500	0,70	6,21
			Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	1			33,02	76,49	
			Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi	
			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	%	100%	#REF!	100	#REF!	100	837.644.500		2.560.600	100	2.560.600		#REF!		#REF!
			KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA	Jumlah dokumen RTRW/RRTR yang disusun/	Dokumen	9	#REF!	2	#REF!	2	837.644.500		2.560.600	2	2.560.600	4	#REF!	44,44	#REF!

			RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	ditetapkan sesuai standart peraturan Perundang-undangan																
			Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	9	1.455.000.000	1	212.175.529	1	837.644.500		2.560.600	0	2.560.600	1	214.736.129	11,11	14,76	
			Rata-rata capaian kinerja (%)											-	0			11,11	14,76	
			Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
														-						
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)		100	6.848.975.000	100	1.463.449.911	100	1.369.585.700			0	-	100	1.463.449.911	100	21,37	
			KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM	Persentase jumlah korban bencana yang telah didata	persen	100	150.000.000	100	31.262.600	100	31.990.100			100	-	100	31.262.600	100	20,84	
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	3	90.000.000			1	19.999.400			0	-	0	0	0,0	0,00	
			Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1	60.000.000	1	31.262.600	1	11.990.700			0	-	1	-	100	0,00	

			Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			100	20,84	
			Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
			KEGIATAN SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	persen	100	189.535.000	100	2.727.000	100	61.089.800			100	-	200	2.727.000	200	1,438784393	
			Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	170	106.785.000	30	1.200.000	30	23.156.800			0	-	30	1200000	17,64705882	1,12	
			Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								15.244.000				-					
			Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	orang	135	82.750.000	15	1.527.000	15	22.689.000			0	-	15	1527000	11,11111111	1,85	
			Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			14,38	1,48	
			Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN	Jumlah korban bencana yang mendapatkan	orang	250	8049440000	96	1.429.460.311	100	1.276.505.800			100	-	196	1.429.460.311	78,4	17,76	

			REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	pelayanan pembangunan dan rehabilitasi rumah																
			Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana								352.356.000				-					
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	unit	1814	4.618.080.000	96	1.429.460.311	100	924.149.800			0	-	96	1429460311	5,29	30,95	
			Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			5,29	30,95	
			Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	persen	80	1.428.000.000	86,21	344.110.000	77	889.380.415			0	#REF!	86,21	#REF!	107,76	#REF!	
			KEGIATAN PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA.		persen	100	-	0	-	100	889.380.415			100	#REF!	100	#REF!	100	#REF!	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Luas permukiman kumuh yang diremajakan /dipugar	Ha	15,4					241.931.400			-	-		0	#DIV/0!		
			Pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	dokumen	5				1	647.449.015			0	-	1	138.266.000	20	#DIV/0!	
			Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			20,00	#DIV/0!	
			Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	#DIV/0!	

			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni		2,67	17.450.000.000		-		632.311.500			3,5	-	3,50	-	131,09	0,00	
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		100	17.450.000.000		-	100	632.311.500			100	-	100,00	-	100	0,00	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	unit rumah	1.100	17.450.000.000			10	632.311.500			0	-	-	-	0,00	0,00	0
			Rata-rata capaian kinerja (%)											0	-			100,00	#DIV/0!	
			Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	#DIV/0!	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARAN ATAU UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Kawasan Perumahan memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	65	1.167.577.200	54,6	4595669050	57	10.586.564.430			24,0	-	79	4.595.669.050	1,21	3,94	
			KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	Persentase PSU Perumahan yang terbangun	%	100	1.167.577.200	54,6	7.482.035.200	100	6.955.956.256		1.169.409.600	24,0	1.169.409.600	79	8.651.444.800	0,79	7,41	
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi	16	1.096.626.350	22	7.479.166.500	61	6.930.187.356		1.169.409.600	1	1.169.409.600	23	8.648.576.100	144	789	

			Fungsi Hunian															
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dokumen	15	30.000.000	1	1.050.000	1	15.849.800		0	-	1	1.050.000	7	3,50
			Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah dokumen kerjasama penyediaan/pengelolaan PSU	Dokumen	15	40.950.850	1	1.818.700		9.919.100			-	1	1.818.700	7	4,44
			Rata-rata capaian kinerja (%)										2	17			52	266
			Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Tinggi
			PROGRAMREDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian	%	100	13.751.500			100	24.998.800		0	100	-	100	100	0
			KEGIATAN PENETAPAN SUBJEK DAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Dokumen	5	13.751.500			1	24.998.800		0	1	-	1	20	0
			Sub Kegiatan Koordinasi	Jumlah Dokumen Sidang Panitia	Dokumen	5	13.751.500			1	24.998.800			0	-	1	20	0

			Penyelenggaraa n Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah																
														0	0			20	#DIV/0 !	
														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	#DIV/0 !	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (KEGIATAN 1 S.D KEGIATAN 21)														7,71	2,93			#DIV/0 !	#DIV/0 !	
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah			#DIV/0 !	#DIV/0 !	

SATPOL PP DAN DAMKAR

0	Sasaran	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun Anggaran 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun Anggaran 2025 (%)	Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun Anggaran 2025	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun Anggaran 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Pening Jawab
								I	II					

										2025																		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = 9+10		(12) = 11 / 8 * 100		(13) = 7 + 11		(14) = 13 / 6 * 100		(17)
								URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	Meningkatnya kualitas Penerapan SakIp Satpol PP Damkar	X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Maturitas SPIP Satpol PP dan DAMKAR	persen	100%	23.402.769.358	0	0	100%	4.293.200.215	431	#####	515	#####	946	3.520.170.314	###	81,99	946	3.520.170.314	###	15,04	Satpol pp damkar
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JPL	JPL	20	750.000.000	0	0	20	150.000.000	20	-	0	0	0,00	0,00	0	0	#VALUE!				
		X	X	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	persen	100%	21.902.703.790	0	0	100	3.868.331.352	-	#####	100	#####	100	3.164.581.471	100,00	81,81	100	3.164.581.471	###	14,45	
		X	X	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	58	21.902.703.790	0	0	55	3.868.331.352	16.47	1.038.249.479	100	2.126.331.992	65	3.164.581.471	118,18	81,81	65	3.164.581.471	112,07	14,45	

		X	X	0	2,		Penyediaan Jasa Penunjang UrutanPeme rintahan Daerah	Persentase keterpenuhi an layanan jasa penunjang urusan kantor	pers en	1 0 0 %	690.359 .592	0	0	1 0 0	84.565.9 63	1 1 7	10.02 1.185	1 0 0	22.41 1.882	2 1 7	32.43 3.067	21 7,0 0	38, 35	2 1 7	32.43 3.067	### ###	4, 70	
		X	X	0	2,	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sura t	65 0	184.437. 818	0	0	8	-	0	0	1 0 0	0	1 0 0	1.2 50, 00	#D IV/ 0!	1 0 0	0	15, 38	0, 00		
		X	X	0	2,	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Reke ning	3	355.081. 274	0	0	10 0	74.965.96 3	1 0 0	10.02 1.185	0	22.41 1.882	6 1	32.43 3.067	61, 00	43, 26	6 1	32.43 3.067	2.0 33, 33	9, 13	
		X	X	0	2,	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap anKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Jenis	15	102.840. 500	0	0, 0 0	90	-	0	0	0	0	0	14, 00	#D IV/ 0!	0	0	0,0 0	0, 00		
		X	X	0	2,	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Oran g	2	48.000.0 00	0	18 0	9.600.000	1 7	0	0	0	1 7	0	9,4 4	0,0 0	1 7	0	850 ,00	0, 00		
		X	X	0	2,		Administras i Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhi an layanan administras i umum perangkat daerah	pers en	1 0 0 %	140.401 .000	0	4 2 5	115.352. 700	8	13.92 9.039	1 0 1	81.31 5.239	1 0 9	95.24 4.278	25, 65	82, 57	1 0 9	95.24 4.278	10. 900 ,00	67 ,8 4		

		X	X	01	2,06	09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OK	172	583.202.500	0		240	78.983.500	0	13.929.039	100	59.024.739	100	72.953.778	41,67	92,37	100	72.953.778	58,14	##	#
		X	X	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangU rusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100%	180.624.000	0	0	2	20.533.000	106	-	100	-	206	0	###	0,00	206	0	20.600,00	0,00	
		X	X	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jenis	4	96.164.000	0	0	100	5.675.000	100	0	100	0	200	0	200,00	0,00	200	0	5.000,00	0,00	
		X	X	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jenis	9	84.460.000	0	0	24	14.858.000	6	0	0	0	6	0	25,00	0,00	6	0	66,67	0,00	
		X	X	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangU rusan Pemerintah an Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah an daerah yang dipelihara	persen	100%	270.378.568			14	186.711.200	100	71.659.837	14	138.545.661	114	210.205.498	814,29	112,58	114	210.205.498	11.400,00	77,74	

		X	X	0	2,	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	Unit	20	150.000. 000	0	0	10 0	181.791.2 00	0	71.65 9.837	2 0	134.8 00.66 1	2 0	206.4 60.49 8	20, 00	11 3,5 7	2 0	206.4 60.49 8	100 ,00	13 7, 64		
		X	X	0	2,	0	Pemeliharaa n Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	jenis	3	51.374.0 00			8	-	0	0	0	0	0	0	0,0 0	0,0 0	0	0	0,0 0	0,00		
		X	X	0	2,	0	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	jenis	6	52.900.0 00	0	0, 0 0	51	4.920.000	0	0	0	3.745. 000	1 4	3.745. 000	27, 45	76, 12	1 4	3.745. 000	233 ,33	7, 08		
		X	X	0	2,	0	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor danBanguna n Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	unit	0	16.104.5 68	0	0, 0 0	0	-	0	0	0	0	0	0,0 0	0,0 0	0	0	0,0 0	0,00			
2		X	X	0	2,	0	Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruha n ASN	pers en	1 0 0 %	908.662 .000	0	0	1 0 0	17.706.0 00	1 0 0	0	0	1 0 0	17.70 6.000	2 0 0	17.70 6.000	20 0,0 0	10 0,0 0	2 0 0	17.70 6.000	20. 000 ,00	1, 95	
		X	X	0	2,	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelen gkappannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa n	jenis	5	390.601. 000			0	17.706.00 0		0		17.70 6.000	0	17.70 6.000			0		0,0 0			

		1	0	0	2,	0	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan , danPengawal an	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan , Pelaksanaa n Patroli, Pengamana n, dan Pengawalan	kali	36 5	236.416. 808	0	0	36 5	927.350.0 00	2	100.9 50.30 0	0	268.5 54.10 0	2	369.5 04.40 0	0,5 5	39, 85	2	369.5 04.40 0	0,5 5	15 6, 29	
		1	0	0	2,	0	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarka n Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	kawa san	6	73.600.0 00	0	0,0 0	70	-	0	0	0	0	0	0	0,0 0	#D IV/ 0!	0	0	0,0 0	0, 00	

		1	0	0	2,	0	Pemberdayaa n Perlindunga n Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdaya an Perlindunga n Masyarakat dalam rangka Ketenteram an dan Ketertiban Umum	OK	58 5	345.838. 926	0	0, 0 0	56 5	31.950.00 0	1 1	3.600 .000	1 1	5.400. 000	2 2	9.000. 000	3,8 9	28, 17	2 2	9.000. 000	3,7 6	2, 60	
		1	0	0	2,	0	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kali	30	192.742. 987	0	0	48	-	0	0	0	0	0	0	0,0 0	#D IV/ 0!	0	0	0,0 0	0, 00	
		1	0	0	2,	0	Pengadaan dan Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteram an dan Ketertiban Umum yang Tersedia	OK	10 0	122.645. 792	0	0			0	0	0	0	0	0	0,0 0	0,0 0	0	0	0,0 0	0, 00	
		1	0	0	2,	0	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaia n Pelanggara n perda dan peraturan bupati/wali kota	Pers en	1 0 0 %	508.264 .943	0	0 , 0 0	7	51.666.3 00	0	7.982 .000	0	31.67 5.500	0	39.65 7.500	0,0 0	76, 76	0	39.65 7.500	0,0 0	7, 80	

		1	0	0	2,	0	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Sosialisasi Penegakan Perda/Perka da kepada Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/	Sekol ah (SLT P/SL TA)	15	230.844. 743			2	25.063.30 0	0	0	0	13.47 0.000	0	13.47 0.000	0,0 0	0,0 0	0	13.47 0.000	0,0 0	5, 84	
		1	0	0	2,	0	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaa n Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Keca mata n	7	149.685. 200	0	0, 0 0	5	13.121.00 0	0	3.700 .000	0	8.700. 000	0	12.40 0.000	0,0 0	94, 50	0	12.40 0.000	0,0 0	8, 28	
		1	0	0	2,	0	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Penangan an Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	kali	6	127.735. 000	1 0	0, 0 0	5	13.482.00 0	0	4.282 .000	2 1	9.505. 500	2 1	13.78 7.500	420 ,00	10 2,2 7	3 1	13.78 7.500	516 ,67	10 ,7 9	

Meningkatnya Kapasitas Pemadam Kebakaran Dan masyarakat Dalam Memahami Bahaya Kebakaran	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM)	Persen	100%	9.508.237.479	0	0	20	1.468.893.200	0	0	0	1.045.701.800	0	1.045.701.800	0,00	71,19	0	1.045.701.800	0,00	11,00	
							Waktu tanggap (response time)	Menit	15	284.087.714	0	000	6	54.589.839	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
		1	05	04	2,01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persen	100%	9.370.093.740			5	1.468.893.200	0	236.270.000	0	537.924.700	0	774.194.700	0,00	52,71	0	774.194.700	0,00	8,26	

		10504202	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Kegiatan Kesiapsiaga an Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	OK	150	8.773.200.000	0	000	150	1.438.250.000	0	236.270.000	30	507.777.100	30	744.047.100	20,00	51,73	30	744.047.100	20,00	8,48	
		10504206	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulan gan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggula ngan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jenis /unit	1	367.518.740	0	006	30.643.200	0	000	30.147.600	0	30.147.600	0,00	98,38	0	30.147.600	0,00	8,20			
		10504207	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampila n Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggula ngan Kebakaran	oran g	70	215.500.000	0	000	0	-	0	000	00	00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		

		1	0	0	2,	0	Penyelenggar aan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulan gan, Penyelamata n Kebakaran dan Penyelamata n Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan , Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an Kebakaran dan Non Kebakaran	Doku men	1	13.875.0 00		1	-	0	0	0	0	0	0	0,0 0	#D IV/ 0!	0	0	0,0 0	0, 00	
		1	0	0	2,	0	Pemberdaya an Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan simulasi pemadam kebakaran	Pers en	1 0 0 %	138.143 .739	0	0 , 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 0	0,0 0	0	0	0,0 0	0, 00	
		1	0	0	2,	0	Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulan gan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatka n Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggula ngan Kebakaran Setiap Tahunnya	Keca mata n	7	138.143. 739		0	-	0	0	0	0	0	0,0 0	0,0 0	0	0	0,0 0	0, 00		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			### ##	19 4,5 5				### ###	21 ,3 5		
PREDIKAT																			Sa	Sa				San	Sa		

KINERJA			ng t Tin ggi	ng at Tin ggi			gat Ting gi	ng at Ti ng gi	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)			### ##	## ##			### ###	4, 25	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)			Sa nga t Tin ggi	Sa ng at Tin ggi			San gat Ting gi	Sa ng at Ti ng gi	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :									
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :									
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :									
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :									

BPBD

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) =6 + 12		(14) = 13 / 5 * 100		(15)
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025	Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)	Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab														
							I	II	III	IV																						
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																														
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SAKIP BPBD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP BPBD	Poin	3		3		3		2.228.534.739		523.477.240		508.922.838					3		1.032.400.078		3		9.057.648.275		3		72		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JPL	100	12.540.380.617		8.025.248.197		5							5			23		23										

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perse ntase Peny usuna n doku men Lapor an Keua ngan Tepat Wakt u dan sesua i perat uran perun dang- unda ngan	pe rse n	100	9.182.855.110	100	6.747.163.724	1	1.975.298.400	22	438.720.011	477.515.904						22	916.235.915	100	7.663.399.639	100	83	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumla h Orang yang Mener ima Gaji dan Tunja ngan ASN	ora ng	25	9.182.855.110	20	6.747.163.724	650	1.975.298.400	108	438.720.011	477.515.904						108	916.235.915	20	7.663.399.639	80	83	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
		Admins trasi Kepega waian Perangk at Daerah	Perse ntase ASN yang telah meng ikuti diklat kompetensi tekni s terha dap kesel uruha n ASN	Pe rse n	100	850.000.000	95	64.556.000	100	16.500.000	0	0	0	0					-	-	95	64.556.000	95	8	
		Pendidik an dan Pelatiha n Pegawai Berdasa rkan Tugas dan Fungsi	Jumla h Pegaw ai Berda sarka n Tugas dan Fungs i yang Mengi kuti Pendi dikan dan Pelati han	ora ng	80	190.000.000	8	17.853.000	2	11.000.000	0	0	0	0					-	-	8	17.853.000	10	9	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	20	35.000.000	4	4.482.000	-	-	0	0	0	0					0	-	4	4.482.000	20	13	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	48	625.000.000	5	42.221.000	1	5.500.000	0	0	0	0					0	-	5	42.221.000	10	7	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
		Adminis trasi Umum Perangk at Daerah	Perse ntase keter penu han layan an admi nistra si umu m peran gkat daera h	Pe rse n	1 0 0	1.202.8 25.507	198	758.838 .437	10 0	189.120 .970	116	52.783. 694	0	8.728.4 60					98	61.512. 154	296	820.350 .591	10 0, 00	68	
		Penyedia an Kompon en instalasi Listrik/ Peneran gan Bangun an kantor	Jumla h Paket Komp onen Instal asi Listrik /Pene ranga n Bang unan Kanto r yang Disedi akan	Pa ket	5	20.100. 000	4	17.942.0 80	1	4.319.40 0	-	-	-	-					0	-	4	17.942.0 80	80	89	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Paket	10	118.000.000	2	68.774.000	3	39.801.700	-	-	-	-					0	-	2	68.774.000	20	58	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	13.500.000	5	1.803.400	1	2.867.700	-	-	-	-					0	-	5	1.803.400	100	13	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedi akan	Paket	10	245.825 .507	18	172.165. 455	2	50.567.6 00	1	15.700. 750	0	5.748.4 60					1	21.449.2 10	19	193.614. 665	19 2	79	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Pengg andaa n yang Disedi akan	Paket	10	54.500. 000	8	22.782.7 80	2	11.271.1 70	0	2.943.1 40		150.000					0	3.093.14 0	8	25.875.9 20	82	47	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Baha n Bacaa	Doku me n	12	2.800.0 00	0	-	3	284.900	-	-	-	-					0	-	-	-	0	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
		Perunda ng- undanga n	n dan Perat uran Perun dang- Unda ngan yang Disedi akan																						
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumla h Laporan Fasilitasi Kunju ngan Tamu	La po ran	60	17.400. 000	48	8.621.00 0	12	4.971.50 0	-	-	-					0	-	48	8.621.00 0	80	50		
		Penyelen ggaraan Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD	Jumla h Laporan Penyel engga raan Rapat Koord inasi dan Konsu ltasi SKPD	lap ora n	1. 04 6	730.700 .000	277	466.749. 722	121	75.037.0 00	115, 00	34.139. 804	2.830.0 00					115	36.969.8 04	392	503.719. 526	37 ,4 8	69		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
		Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah	Perse ntase Peme nuhan Kebut uhan Baran g Milik Daera h Penu njang Urusa n Peme rintah Daera h	pe rse n	1 0 0	155.000 .000	0	-	1	7.377.5 00	-	-							0	-	-	-	0, 00	-	
		Pengada an Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n	Jumla h Unit Kenda raan Dinas Opera sional atau Lapan gan yang Disedi	Un it	3	35.000. 000	0	-			-	-	-	-					0	-	-	-	0, 00	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
			akan																						
		Pengada an Mebel	Jumla h Paket Mebel yang Disedi akan	Pa ket	3	85.000. 000	0	-	1	7.377.50 0	-	-							0	-	-	-	0, 00	-	
		Pengada an Gedung Kantor atau Bangun an Lainnya	Jumla h Unit Gedu ng Kanto r atau Bang unan Lainn ya yang Disedi akan	Un it	1	35.000. 000	0	-			-	-							0	-	-	-	0, 00	-	
		Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemerin	Perse ntase keter penu han layan an	pe rse n	1 0 0	444.600 .000	185	285.046 .616	10 0	105.492 .488	4	25.913. 535	-	19.975. 536					85	45.889. 071	271	330.935 .687	10 0, 00	74	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
		tahan Daerah	jasa penunjang urusan kantor																						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	6.000.000	2	920.000	1	1.704.200	-	400.000	-	-					0	400.000	2	1.320.000	40	22	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	60	192.000.000	72	144.266.616	12	56.988.288	4	13.813.535		8.275.536					4	22.089.071	76	166.355.687	127	87	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
			yang Disedi akan																						
		Penyedia an Jasa Pelayan an Umum Kantor	Jumla h Lapor an Penye diaan Jasa Pelaya nan Umu m Kanto r yang Disedi akan	La po ran	5	246.600 .000	7	139.860. 000	1	46.800.0 00	-	11.700. 000		11.700. 000					0	23.400.0 00	7	163.260. 000	14 0	66	
		Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	Perse ntase baran g milik daera h penu njang urusa n peme rinta	pe rse n	5 0 0	705.100 .000	194	169.643 .420	10 0	34.555. 200	1	6.060.0 00	-	2.702.9 38					94	8.762.9 38	288	178.406 .358	10 0, 00	25	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
			han daerah yang dipeli hara																						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasio nal atau Lapangan	Jumla h Kenda raan Perora ngan Dinas atau Kenda raan Dinas Jabat an yang Dipeli hara dan dibay arkan Pajak nya	Un it	100	640.100 .000	55	158.796. 420	16	24.420.000	-	5.310.000	-	2.702.938					0	8.012.938	55	166.809. 358	55	26	
		Pemelih aaran Mebel	Jumla h Mebel yang Dipeli	Un it	20	10.000. 000	0	-	10	3.092.700	-	-	-	-					0	-	-	-	0	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
			hara																						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara.	Unit	38	33.500.000	12	8.335.000	8	4.000.000	1	750.000		-					1	750.000	13	9.085.000	34,21	27	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	5	18.500.000	2	2.512.000	1	3.042.500	0	-							0	-	2	2.512.000	40,00	14	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	2	3.000.000	0	-	0	-	-	-							0	-	-	-	0,00	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara																						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		60	206.480.016			99	52		
PREDIKAT KINERJA																						Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	Meningkatnya akses lokasi bencana dan pengelolaan risiko bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persepsi Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	persepsi	100	330.000.000	100	166.193.592	100	702.551.560	37	106.042.396		119.790.242				100	225.832.638	99,00	167.466.915	101,00	98,91	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penanggung Jawab
				I	II				III	IV													
	ana																						
			Perse ntase Warga Negara a yang mem perol eh layan an Pence gahan dan Kesia psiag aan terha dap benca na (SPM)	pe rse n	1 0 0	2.138.8 80.036	100																
			Perse ntase Warga Negara a yang mem perol	pe rse n	1 0 0	675.000 .000	100																

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
			eh layan an penye lamat an dan evaku asi korba n benca na (SPM)																						
		Pelayan an Informa si Rawan Bencan a Kabupat en/Kota	Juml ah Warga Negar a yang mem perol eh Infor masi tenta ng Rawa n Benca na	or an g	## #	320.000 .000	395	179.427 .238	12 5	48.253. 000	0	850.00 0	-	1.059.9 85					1357 37	1.909.9 85	140 .61 0	181.337 .223	10 0, 00	56,67	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada	orang	600	195.000.000	395	179.427.238	125	48.253.000	0	850.000	-	1.059.985					0	1.909.985	395	181.337.223	65,89	92,99	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
			Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya																						
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan	orang	## #	1.923.882.909	138.174	1.613.842.560	135737	166.535.300	-	-	4	1.802.000					135737	1.802.000	136.955	1.615.644.560	97,40	83,98	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
			an pence gahan dan kesia psiag aan terha dap benca na																						
		Penyusu nan Rencana Penanggu langan Bencana Kabupat en/Kota	Jumla h Doku men Renca na Penan ggula ngan Benca na yang Dilega lisasi	Do ku me n	1	95.000. 000	1	141.537. 826	0	-									0	-	1	141.537. 826	10 0, 00	148,9 9	
		Pelatiha n Pencega han dan Mitigasi Bencana Kabupat en/kota	Jumla h Warga Negar a dan Aparat ur yang	Or an g	50 0	153.200 .000	330	182.065. 641	1	1045604 00	-	-							0	-	330	182.065. 641	66 ,0 0	118,8 4	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
			Mengi kuti Pelati han Pence gahan dan Mitiga si Benca na																						
		Pengend alian Operasi dan penyedia an sarana prasara na kesiapsi aga an terhada p bencana	Jumla h Doku men Hasil Penge ndalia n Opera si dan Penye diaan Sarana Prasar ana Kesia psiaga an Terha dap Benca na	Do ku me n	5	110.000 .000	3	25.424.5 00	1	5.456.18 0	-	-							0	-	1	5.456.18 0	20 ,0 0	4,96	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
			Kabu paten /Kota																						
		Penyedia an peralata n perlindungan dan kesiapsi agaan terhadap bencana	Jumla h Peralatan Penyel amatan Diri bagi Indivi du Warga Negar a, Kelua rga, maup un Petug as	Un it	33	130.500 .000	2	201.329. 743	5	2.610.70 0	-	-							0	-	2	201.329. 743	6, 06	154,2 8	
		Penguat an kapasita s kawasan untuk	Jumla h Kawas an yang Diting	Ka wa san	10	494.200 .000	8	335.264. 850	2	14.998.7 40	-	-							0	-	2	14.998.7 40	20 ,0 0	3,03	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
		pencegahan dan kesiapsiagaan	katkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																						
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Organis	68	569.000.000	69	631.873.400	4	7.489.800	-	-	4	1.802.000					4	1.802.000	8	9.291.800	11,76	1,63	
		Penyusunan Rencana	Jumlah Dokumen	Dokumen	5	240.000.000	2	94.230.600	1	10.249.670	0	-							0	-	1	10.249.670	25,00	4,27	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
		Kontijensi	Renca na Konti njensi yang Dilega lisasi	n																					
		Gladi Kesiapsi agaan Terhadap Bencana	Jumla h Aparatur dan Warga Negara a yang Mengi kuti Gladi Kesia psiagan	Or an g	110	131.982 .909	30	2.116.000	30	21.169.810	-	-						0	-	30	2.116.000	27,27	1,60		
		Pelayan an Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencan a	Juml ah korba n benca na alam dan sosial yang terpe	Or an g	## #	675.000 .000	2.507	576.884 .207	555	439.010 .590	35	95.554.896		112.488 .257				1401	208.043 .153	3.908	784.927 .360	140,83	116,29		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
			nuhi kebut uhan dasar nya pada saat dan setela h tangg ap darur at benca na daera h kabup aten/ kota																						
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penet apan Statu s Darur at Benca na dan SKPD B yang Diteta	Do ku me n	5	110.000 .000	3	161.650. 560	370.451. 400	0,68	87.429. 000	1,0 0	86.216. 560,00					2	173.645. 560	5	335.296. 120	93 ,6 0	304,8 1		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
			pk Paling Lama 1x24 Jam berda sarka n Hasil Doku men Laporan Kaji Cepat																						
		Pencaria n, Pertolon gan dan Evakuas i Korban Bencana Kabupat en/Kota	Jumla h Korba n yang Berha sil Ditem ukan, Ditolo ng, dan Dieva kuasi Per Jenis Kejadi an Benca	ora ng	1.775	225.000.000	2.666	135.895.050	20.388.500	3	2.620.800	99	9.297.200					102	11.918.000	2.768	147.813.050	155,94	65,69		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
			na																						
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	750	245.000.000	580	139.612.297	41.078.600	86	5.505.096	13	16.974.497					99	22.479.593	679	162.091.890	90,53	66,16		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	4	95.000.000	2	139.726.300	-	7.092.090	-	-	-					0	-	2	139.726.300	50,00	147,08		
		Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang tersedia, tertata dan	sistem	16	252.380.036	7	217.814.550	3	48.752.670	2	9.637.500	-	4.440.000					2	14.077.500	9	231.892.050	54,06	91,88	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
			terlak sana																						
		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	3	15.000.000	1	1.963.450	0	-	-							0	-	1	1.963.450	33,33	13,09		
		Pengelolaan dan Pemamfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	4	20.000.000	2	30.092.500	1	7.499.530	-	-	0					0	-	2	30.092.500	50,00	150,46		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	4	16.500.000	2	4.090.500	1	6.788.200	1	2.150.000	0	-					1	2.150.000	3	6.240.500	66,25	37,82	
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan	Dokumen	5	200.880.036	4	181.668.100	1	34.464.940	1	7.487.500	-	4.440.000					1	11.927.500	5	193.595.600	100,00	96,37	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab
											I		II		III		IV								
			Pasca Benca na (JITU PASN A) Renca na Rehab ilitasi dan Rekon struks i Pasca Benca na (R3P)																						
																	68.21 9,16	56.458. 159,50	70. 370 ,48	703.450 .298,25	98	87			
PREDIKAT KINERJA																					TINGGI	SEDANG			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 2)																	3414 0	131469 088	351 85	351725 149	99	70			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 2)																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			SANGAT TINGGI	RENDAH			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (N-2)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi 2025	Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan Iv Tahun 2025 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab
							I	II	III	IV									
																GI			
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : anggaran perubahan di tahun 2024, penambahan personil non ASN (TRC PB)																			
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Keterbatasan SDM dalam menyelesaikan administrasi, kemungkinan kejadian bencana yang berdampak lebih besar																			
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																			
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																			
*) DIISI OLEH KEPALA BAPPEDA																			

DINAS SOSIAL

(TABEL)

DINAS TENAGA KKERJA

(TABEL)

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
												I		II		III		IV							
	1	2	3			5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 12+7		13 = 12 / 5 X 100%	
				Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
		3.27	BIDANG URUSAN PANGAN																						
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ketahanan Pangan			Skoring Pola Konsumsi Pangan	Sko rin g	98	2.052 .000.000	79	421.2 58.07 0	9 6	502.9 35.94 0		8.745 .500		32.80 4.425		-	7 8 , 6	-	79	41.549 .925	17 5	462.8 07.99 5	0,80	0,02

1		2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein	Per sen	98	994.000.000	79	363.670.030	97	414.589.940	0,000	7.745.500	-	10.000.000	-	-	0,00	-	-	17.745.500	97	381.415.530	-	0,02
1		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Per sen	100	326.000.000	100	19.960.500	100	41.228.630	20,000	4.722.000	20,000	8.000.000	0,00	-	0,00	-	40	12.722.000	140	32.682.500	0,40	0,04
1		2.09.03.2.01.003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	10	100.000.000	12	7.655.500	7	20.897.160	1	2.047.000	2	4.650.000	-	-	-	-	3	6.697.000	10	14.352.500	0,30	0,07

1 . 1 . 2		2.09. 03.2. 01.0 010	Pengemb angan Kelemba gaan Distribus i Pangan Kabupate n/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	10	116.0 00.00 0	5	8.953. 250	1 0	11.33 8.240	2	1.575 .000	2	1.000 .000	-	-	-	-	4	2.575. 000	14	11.52 8.250	0,40	0,02
1 . 1 . 3		2.09. 03.2. 01.0 015	Pemanta uan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Do ku me n	12	110.0 00.00 0	12	3.351. 750	1 2	8.993 .230	3	1.100 .000	3	2.350 .000	-	-	-	-	6	3.450. 000	18	6.801. 750	0,50	0,03
Rata-rata capaian kinerja (%)																				44 ,8 3	30,86			0,60	0,06
Predikat Kinerja																				Sa ng at Re nd ah	Sangat Renda h			Sang at Renda h	Sang at Renda h
1 . 2		2.09. 03.2. 02	Pengelola an dan Keseimb angan Cadanga n Pangan Kabupate n/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Unit	13	230.0 00.00 0	3	227.7 24.58 0	3	169.3 90.81 0	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	227.7 24.58 0	0,08	-
1 2 . 1		2.09. 03.2. 02.0 003	Pengadaa n Cadanga n Pangan Pemerint ah Kabupate n/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	12	230.0 00.00 0	16	227.7 24.58 0	1 0	169.3 90.81 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	227.7 24.58 0	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0	-			#DIV /0!	#DI V/0!
Predikat Kinerja																				Sa ng at Re nd	Sangat Renda h			#DIV /0!	#DI V/0!

1 . 3		2.09. 03.2. 04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Gizi	Per sen	87	438.0 00.00 0	78	115.9 84.95 0	8 1	203.9 70.50 0	-	3.023 .500	-	2.000 .000	-	-	7 8 , 6	-	79	5.023. 500	16 0	121.0 08.45 0	0,90	0,01
1 . 3 . 1			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahunan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Do ku me n	8	125.0 00.00 0	-	-	1	10.78 4.900	-	1.000 .000	-	1.000 .000	-	-	-	-	-	2.000. 000	1	2.000. 000	-	0,02
1 . 3 . 2		2.09. 03.2. 04.0 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Lap ora n	3	313.0 00.00 0	2	115.9 84.95 0	3	193.1 85.60 0	-	2.023 .500	-	1.000 .000	-	-	-	-	-	3.023. 500	3	119.0 08.45 0	-	0,01
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0	1,57			#DIV /0!	0,01
Predikat Kinerja																				Sa ng at Re nd ah	Sangat Renda h			#DIV /0!	San gat Ren dah

2		2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Per sen	78	515.000.000	73,61	30.581.000	74	39.982.600	-	1.000.000	-	18.804.425	-	-	-	-	19.804.425	74	50.385.425	-	0,04
2.1		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	per sen	78	515.000.000	73,61	30.581.000	72,00	39.982.600	-	1.000.000	-	18.804.425	-	-	-	-	19.804.425	72	50.385.425	-	0,04
2.1.1		2.09.05.2.01.004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Do kumen	1	315.000.000	1	5.146.000	1	18.658.300	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	2.000.000	1	7.146.000	-	0,01
2.1.2		2.09.05.2.01.007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuha n Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Do kumen	1	200.000.000	1	25.435.000	1	21.324.300	-	-	-	17.804.425	-	-	-	-	17.804.425	1	43.239.425	-	0,09
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0	49,53			#DIV/0!	0,10
Predikat Kinerja																			Sangat Rend	Sangat Rendah			#DIV/0!	Sangat Rendah

																			ah					
	Penanganan Daerah Rawan Pangan			Persentase Ketersediaan Pangan per Kapita	Per sen	0, 20	543.000.000	1	17.397.795	0, 40	48.363.400		-		4.000.000	-	0, 0	-	-	4.000.000	0	21.397.795	-	0,01
3		2.09.04	Program Penanng anan Kerawan an Pangan	Persentase Penurunan Kasus Kerawanan Pangan	Per sen	0, 20	543.000.000	1, 00	17.397.795	0, 40	48.363.400	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	0	21.397.795	-	0,01
3 . 1		2.09.04.2.01	Penyusu nan Peta Kerentan an dan Ketahana n Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Do ku me n	1	393.000.000	1	17.397.795	1	29.083.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	1	19.397.795	-	0,01
3 . 1 . 1		2.09.04.2.01.001	Penyusu nan, Pemutak hiran Analisis Peta Ketahana n Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Do ku me n	1	393.000.000	1	17.397.795	1	29.083.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	1	19.397.795	-	0,01
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0	6,88			#DIV /0!	0,01
Predikat Kinerja																			Sa ng at Re nd ah	Sangat Renda h			#DIV /0!	San gat Ren dah
3 . 2		2.09.04.2.02	Penanga nan Kerawan an Pangan Kewenan gan Kabupate n/Kota	Jumlah Desa yang Masyarakatnya mendapatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Des a	3	150.000.000	4	9.609.245	3	19.280.400	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	3	11.609.245	-	0,01

3 . 2 . 1		2.09. 04.2. 02.0 003	Koordina si dan Sinkroni sasi Penanga nan Kerawan an Pangan Gizi Kabupate n/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Lap ora n	14	150.0 00.00 0	1	9.609. 245	1	19.28 0.400	-	-	-	2.000 .000	-	-	-	-	-	2.000. 000	1	11.60 9.245	-	0,01
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0	10,37			#DIV /0!	0,01	
Predikat Kinerja																			Sa ng at Re nd ah	Sangat Renda h			#DIV /0!	San gat Ren dah	
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																						
	Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			Nilai SAKIP DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Ind eks	71	67.81 3.206 .655	67 ,1 1	9.739. 817.6 16	6 8, 5 1	10.60 9.951 .938		2.348 .786. 294		2.426 .441. 057	-	-	65	4.775. 227.35 1	13 4	14.51 5.044. 967	0,92	0,07		
4		3.27. 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Lev el	3	67.51 3.206 .655	-	9.739. 817.6 16	3	10.59 7.354 .938	-	2.348 .786. 294	-	2.426 .441. 057	-	-	-	-	-	4.775. 227.35 1	3	14.51 5.044. 967	-	0,07
				Rata - rata Lama Penddikan dan Pelatihan Pegawai	JPL	20 JP L	300.0 00.00 0	20 JP L		2 0 J P L	12.59 7.000	-	-	-	-										

4 . 1		3.27. 01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	Per sen	10 0	573.5 00.00 0	10 0	55.84 8.060	1 0 0	60.74 9.600	2 0	9.766 .750	2 0	3.562 .500	-	-	-	-	40	13.329 .250	14 0	69.17 7.310	0,40	0,02	
		3.27. 01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Do ku me n	2	17.50 0.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
4 . 1 . 1		3.27. 01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap ora n	5	556.0 00.00 0	1	55.84 8.060	5	60.74 9.600	1	9.766 .750	2	3.562 .500	-	-	-	-	3	13.329 .250	8	69.17 7.310	0,60	0,02	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				60	21,94			0,60	0,02	
Predikat Kinerja																					Re nd ah	Sangat Rendah			Sang at Rendah	San gat Ren dah
4 . 2		3.27. 01.2. 02	Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	Per sen	10 0	64.02 2.861 .406	10 0	9.303. 447.8 55	1 0 0	#### #### ##	1 0 0, 0 0	2.301 .081. 170	1 0 0	2.394 .436. 114	1 0 0	-	1 0 0	-	10 0	4.695. 517.28 4	20 0	13.99 8.965. 139	1,00	0,07	
4 . 2 . 1		3.27. 01.2. 02.0 001	Penyedia an Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ora ng/ Bul an	13 0	64.00 7.861 .406	10 7	9.303. 447.8 55	1 0 6	9.895 .868. 769	1 0 6	2.301 .081. 170	1 0 6	2.394 .436. 114	-	-	-	-	10 6	4.695. 517.28 4	21 2	13.99 8.965. 139	0,82	0,07	

4 . 2 . 2		3.27. 01.2. 02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan an/ Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Laporan	12	15.00 0.000	12	-	1 2	2.469 .110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				10 0, 00	47,44			0,82	0,07
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
4 . 3		3.27. 01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	10 0	75.00 0.000	10 0	3.200. 000	1 0 0	2.725 .300	-	-	-	1.200 .000	-	-	-	-	-	1.200. 000	10 0	4.400. 000	-	0,02

4 . 3 . 1		3.27. 01.2. 03.0 006	Penataus ahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap ora n	5	75.00 0.000	1	3.200. 000	1	2.725 .300	-	-	-	1.200 .000	-	-	-	-	1.200. 000	1	4.400. 000	-	0,02	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0, 00	44,03			#DIV /0!	0,02	
Predikat Kinerja																			Sa ng at Re nda h	Sangat Renda h			#DIV /0!	San gat Ren dah	
4 . 4 .		3.27. 01.2. 05	Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Per sen	90 ,5 4	300.0 00.00 0	-	-	1 8, 8 6	12.59 7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	
4 . 4 . 1		3.27. 01.2. 05.0 009	Pendidik an dan Pelatihan Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ora ng	50	300.0 00.00 0	-	-	3	12.59 7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0, 00	-			#DIV /0!	#DI V/0!	
Predikat Kinerja																			Sa ng at Re nda h	Sangat Renda h			#DIV /0!	#DI V/0!	
4 . 5 .		3.27. 01.2. 06	Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Per sen	10 0	1.151 .816. 175	10 0	153.7 89.14 6	1 0 0	134.8 87.70 0	2 0	24.39 5.470	2 0	12.97 7.500	-	-	-	-	40	37.372 .970	14 0	191.1 62.11 6	0,40	0,03

4 . 5 . 1		3.27. 01.2. 06.0 002	Penyedia an Peralatan dan Perleng kapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pak et	1	175.0 00.00 0	-	-	1	34.52 5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
4 . 5 . 2		3.27. 01.2. 06.0 003	Penyedia an Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pak et	5	11.81 6.175	1	548.0 00	1	3.343 .200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	548.0 00	-	-	
4 . 5 . 3		3.27. 01.2. 06.0 009	Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap ora n	4	965.0 00.00 0	4	153.2 41.14 6	4	97.01 9.500	1	24.39 5.470	1	12.97 7.500	-	-	-	-	2	37.372 .970	6	190.6 14.11 6	0,50	0,04
Rata-rata capaian kinerja (%)																			40 ,0 0	37,24			0,50	0,04	
Predikat Kinerja																				Sa ng at Re nd ah	Sangat Renda h			Sang at Renda h	San gat Renda h
4 . 6		3.27. 01.2. 07	Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Per sen	10 0	128.7 50.00 0	10 0	-	1 0 0	49.04 5.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 0	-	-	-	

4 . 6 . 1		3.27. 01.2. 07.0 010	Pengadaa n Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Uni t	4	128.7 50.00 0	-	-	3	49.04 5.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0, 00	0,00			0,00	0,00
Predikat Kinerja																				Sa ng at Re nd ah	Sangat Renda h			Sang at Renda h	Sang at Renda h
4 . 7		3.27. 01.2. 08	Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Per sen	10 0	566.2 84.43 4	10 0	140.0 45.72 5	1 0 0	151.5 07.85 9	3 0	12.60 9.904	1 0	14.14 0.006	-	-	-	-	40	26.749 .910	14 0	166.7 95.63 5	0,40	0,05
4 . 7 . 1		3.27. 01.2. 08.0 001	Penyedia an Jasa Surat Menyura t	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap ora n	1	113.8 39.79 4	4	47.50 0.300	1	49.13 8.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47.50 0.300	-	-	
4 . 7 . 2		3.27. 01.2. 08.0 002	Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap ora n	12	125.9 94.64 0	12	30.64 5.425	1 2	35.95 3.959	3	2.509 .904	3	4.040 .006	-	-	-	-	6	6.549. 910	18	37.19 5.335	0,50	0,05

4 7 3		3.27.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	31.250.000	1	1.300.000	1	5.815.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.300.000	-	-		
4 7 4		3.27.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	295.200.000	12	60.600.000	12	60.600.000	3	10.100.000	3	10.100.000	-	-	-	-	6	20.200.000	18	80.800.000	0,50	0,07
Rata-rata capaian kinerja (%)																			46,15	17,66			1,00	0,12	
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
4 8		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Persen	100	694.994.640	100	83.486.830	100	300.101.200	25	933.000	10	124.937	-	-	-	-	35	1.057.937	135	84.544.767	0,35	0,00
4 8 1		3.27.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasio	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	119.000.000	21	16.868.730	83	39.934.200	3	933.000	1	124.937	-	-	-	-	4	1.057.937	87	17.926.667	0,14	0,01

				Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura (1 % pertahun)	Per sen	1,42				1,30		1,41								-			-	-
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan (1 % pertahun)	Per sen	1,42					2,42		1,41						1	-			-	-
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (2 % pertahun)	Per sen	1,16					1,14		1,14						1	-			-	-
				Nilai Tukar Petani	Per sen	102					121,01		101,35						101	-			-	-
5		3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian Perhektar Tahun	Per sen	8,98	7.244.975.081	5,33	5.861.105.000	8,48	340.301.600	0,00	3.400.000	-	22.459.500	-	0,00	-	0,00	25.859.500	8	5.886.964.500	-	0,00
				Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	Per sen	4,45	6.063.308.764	3,04	1.891.082.750	3,95	843.541.400	0,00	7.200.000	-	9.950.000	-	0,00	-	0,00	17.150.000	4	1.908.232.750	-	0,00
5.1		3.27.02.2.01.001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang mendukung modernisasi pertanian	Per sen	100	7.244.975.081	100	5.722.450.500	100	333.677.500	300	3.400.000	20	20.922.000	-	-	-	50	24.322.000	150	5.746.772.500	0,50	0,00

5 . 1 . 1		3.27. 02.2. 01.0 001	Pengawa san Penggun aan Sarana Penduku ng Pertania n sesuai dengan Komodita s, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Lap ora n	4	3.194 .975. 081	4	3.745. 059.0 00	2	35.80 2.300	-	-	-	8.687 .500	-	-	-	-	-	8.687. 500	2	3.753. 746.5 00	-	0,00
5 . 1 . 2		3.27. 02.2. 01.0 002	Pendamp ingan Penggun aan Sarana Penduku ng Pertania n	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Lap ora n	4	4.050 .000. 000	4	1.977. 391.5 00	4	297.8 75.20 0	1	3.400 .000	1	12.23 4.500	-	-	-	-	2	15.634 .500	6	1.993. 026.0 00	0,50	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)																				33 ,3 3	7,29			0,00	0,00
Predikat Kinerja																				Sa ng at Re nda h	Sangat Renda h			Sang at Renda h	Sang at Renda h
5 . 2		3.27. 02.2. 02	Pengelola an Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuh an, dan Mikro Organis me Kewenan gan	Persentase Pengeloaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme	Per sen	10 0	3.191 .570. 375	10 0	146.8 59.50 0	1 0 0	427. 497. 400	-	-	-	1.537 .500	-	-	4 0	-	40	1.537. 500	14 0	148.3 97.00 0	0,40	0,00

			Kabupate n/Kota																						
5 . 2 . 1		3.27. 02.2. 05.0 04	Penjamin an Kemurni an dan Kelestari an SDG Hewan/T anaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VU B	5	2.891 .570. 375	1	138.6 54.50 0	1	6.624 .100	-	-	-	1.537 .500	-	-	-	-	-	1.537. 500	1	140.1 92.00 0	-	0,00
5 . 2 . 2		3.27. 02.2 02.0 003	Pemanfa atan SDG Hewan/T anaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Do ku me n	1	300.0 00.00 0	1	8.205. 000	1	420.8 73.30 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.205. 000	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0, 00	0,36			#DIV /0!	0,00	
Predikat Kinerja																				Sa ng at Re nda h	Sangat Renda h			#DIV /0!	San gat Ren dah
5 . 3		3.27. 02.2. 03	Peningka tan Mutu dan Peredara n Benih/Bi bit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupate n/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	Per sen	10 0	1.196 .738. 389	10 0	69.96 2.500	1 0 0	69.13 8.800	2 0	7.000 .000	2 0	8.300 .000	-	-	-	-	40	15.300 .000	14 0	85.26 2.500	0,40	0,01

5 . 3 . 1		3.27. 02.2. 03.0 001	Pengawa san Mutu Benih/Bi bit Ternak, Bahan Pakan/P akan/Ta naman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Ta naman Skala Kecil	Lap ora n	4	1.196 .738. 389	1	69.96 2.500	4	69.13 8.800	1	7.000 .000	1	8.300 .000	-	-	-	2	15.300 .000	6	85.26 2.500	0,50	0,01
Rata-rata capaian kinerja (%)																			50	22,13			0,50	0,01
Predikat Kinerja																			Sa ng at Re nd ah	Sangat Renda h			Sang at Renda h	San gat Ren dah
5 . 4		3.27. 02.2. 05	Pengend alian dan Pengawa san Penyedia an Peredara n Benih/Bi bit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kabupate n/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Hijauan Pakan Ternak	Per sen	10 0	250.0 00.00 0	10 0	4.356. 250	1 0 0	6.462 .700	2 0	200.0 00	2 0	900.0 00	-	-	-	40	1.100. 000	14 0	5.456. 250	0,40	0,00
5 . 4 . 1		3.27. 02.2. 05.0 004	Penjamin an Peredara n HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	To m	25 0	250.0 00.00 0	0, 25	4.356. 250	0, 6 5	6.462 .700	-	200.0 00	-	900.0 00	0 , 0 0	-	0 , 0 0	0, 00	1.100. 000	1	5.456. 250	-	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0	17,02			#DIV /0!	0,00

Predikat Kinerja																				Sa ng at Re nda h	Sangat Renda h			#DIV /0!	San gat Ren dah
5 . 5		3.27. 02.2. 06	Penyedia an Benih, Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumber nya dalam 1 (satu) Daerah Kabupate n/Kota Lain	Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Per sen	10 0	1.425 .000. 000	10 0	1.808. 559.0 00	1 0 0	347.0 66.60 0	-	-	3 0	750.0 00	-	-	-	-	30	750.00 0	13 0	1.809. 309.0 00	0,30	0,00
5 . 5 . 1		3.27. 02.2. 06.0 003	Pengadaa n Benih.Bi bit Ternak yang sumbern ya dari Daerah Kabupate n/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ek or	12 .5 60	1.375 .000. 000	3. 33 2	1.803. 392.5 00	2. 8 7 5	341.2 62.50 0	-	-	-	600.0 00	-	-	-	-	-	600.00 0	2.8 75	1.803. 992.5 00	-	0,00
5 . 5 . 2		3.27. 02.2. 06.0 002	Pengadaa n Hijauan Pakan Ternak yang Sumbern ya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	20 0	50.00 0.000	1	5.166. 500	2	5.804 .100	-	-	-	150.0 00	-	-	-	-	-	150.00 0	2	5.316. 500	-	0,00

Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	0,22			#DIV /0!	0,00
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			#DIV /0!	Sangat Rendah
6		3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Persentase	100,00	36.510.600.000	100,00	2.025.253.232	100,00	381.629.700	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100	2.025.253.232	-	-
6.1		3.27.03.2.02	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang mendukung modernisasi pertanian	Persentase	100	2.250.000.000	100	-	100	185.558.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
6.1.2		3.2.03.2.02.00	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Kawasan Pertanian		Dokumen	1	2.250.000.000	-	-	1	185.558.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00	0,00			#DIV /0!	#DIV /0!
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			#DIV /0!	#DIV /0!

6 . 2		3.27. 03.2. 02	Pembang unan Prasaran a Pertania n	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun sesuai Standar Peraturan Perundang Undangan	Per sen	10 0	34.26 0.600 .000	10 0	2.025. 253.2 32	1 0 0	196.0 71.70 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 0	2.025. 253.2 32	-	-
6 . 1 . 1		3.2.0 3.2.0 2.00 8	Pembang unan, Rehabilit asi dan Pemeliha raan Balai Penyuluh an di Kecamat an serta Sarana Penduku ngnya	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Uni t	7	8.140 .600. 000	-	-	1	113.7 03.60 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6 . 1 . 1		3.27. 03.2. 02.0 009	Pembang unan, Rehabilit asi dan Pemeliha raan Prasaran a Pertania n Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Uni t	15	1.945 .000. 000	10	2.025. 253.2 32	1	82.36 8.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.025. 253.2 32	-	-
6 . 1 . 3		3.27. 03.2. 02.0 010	Rehabilit asi dan Pemeliha raanJari ngan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Uni t	60	11.57 5.000 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6 . 1 . 4		3.27. 03.2. 02.0 010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jarlan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	28	12.60 0.000 .000	-	-	4	-	-	-	-					-	-	4	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			#DIV/0!	#DIV/0!
7		3.27. 04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase	0,21	2.761 .484. 106	0,76	407.1 70.19 7	0,30	234.4 87.28 0	-	8.755 .000	0,00	37.08 8.810	0,00	-	0,00	-	0,00	0	453.0 14.00 7	-	0,02	
7 . 1		3.27. 04.2. 01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase	100	1.458 .200. 000	100	82.43 6.565	100	66.73 8.700	20	2.217 .500	20	16.92 5.210	-	-	-	-	40	19.142 .710	140	101.5 79.27 5	0,40	0,01

7 . 1 . 1		3.27. 04.2. 01.0 008	Pembera ntasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) daerah kabupate n/kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Lap ora n	5	1.458 .200. 000	1	82.43 6.565	5	66.73 8.700	1	2.217 .500	1	16.92 5.210	-	-	-	2	19.142 .710	7	101.5 79.27 5	0,40	0,01
Rata-rata capaian kinerja (%)																			40 ,0 0	28,68			0,40	0,01
Predikat Kinerja																			Sa ng at Re nda h	Sangat Renda h			Sang at Renda h	Sang at Renda h
7 . 2		3.27. 04.2. 02	Pengawa san Pemasuk an dan Pengelua ran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupate n/Kota	Persentase Perpindahan Hewan/Ternak dan Produk Hewan yang diawasi sesuai standar peraturan perundang undangan	Per sen	10 0	291.1 00.00 0	10 0	49.83 7.500	1 0 0	50.02 3.800	2 0	2.037 .500	2 0	15.28 5.000	-	-	-	40	17.322 .500	14 0	67.16 0.000	0,40	0,06
7 . 2 . 1		3.27. 04.2. 02.0 4	Pengawa san atas Penerapa n Persyarat an Teknis untuk Pemasuk an dan/ atau pengelua ran hewan,	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/ atau pengeluaran HPM	Lap ora n	7	218.2 00.00 0	7	40.05 0.000	7	39.07 9.300	2	800.0 00	2	13.76 7.500	-	-	-	4	14.567 .500	11	54.61 7.500	0,57	0,07

			produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya																						
7 . 2 . 1		3.27.04.2.02.07	Analisis Resiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Jumlah Analisis Resiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Laporan	4	72.900.000	1	9.787.500	3	10.944.500	-	1.237.500	1	1.517.500	-	-	-	-	1	2.755.000	4	12.542.500	0,25	0,04
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50	34,63			0,82	0,10
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
7 . 3		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah	Per sen	100	659.184.106	110	230.666.632	100	74.606.600	20	3.250.000	20	4.178.600	-	-	-	-	40	7.428.600	140	238.095.232	0,40	0,01

7 . 3 . 1		3.27. 04.2. 03.0 001	Penyedia an Pelayana n Jasa Laborato rium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Lap ora n	2	508.2 07.10 6	2	36.74 5.536	2	36.17 5.200	-	2.662 .500	-	2.212 .500	-	-	-	-	-	4.875. 000	2	41.62 0.536	-	0,01	
7 . 3 . 2		3.27. 04.2. 03.0 002	Penyedia an Pelayana n Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Lap ora n	2	150.9 77.00 0	2	193.9 21.09 6	2	38.43 1.400	-	587.5 00	-	1.966 .100	-	-	-	-	-	2.553. 600	2	196.4 74.69 6	-	0,02	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0	9,96			#DIV /0!	0,01	
Predikat Kinerja																					Sa ng at Re nd ah	Sangat Renda h			#DIV /0!	San gat Ren dah
7 . 4		3.27. 04.2. 04	Penerapa n dan Pengawa saan Persyarat an Teknis Kesehata n Masyara kat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang dibina dan diawasi	Per sen	10 0	73.29 2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7 . 4 . 1		3.27. 04.2. 04.0 002	Pendamp ingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Lap ora n	1	73.29 2.000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0, 00	0,00			0	0,00	
Predikat Kinerja																					Sa ng at Re	Sangat Renda h			Sang at Rend ah	San gat Ren dah

			n Kabupate n/Kota																						
8 . 1 . 1		3.27. 05.2. 01.0 001	Pengend alian Organis me Penggangu Tumbuh an (OPT) Tanaman Pangan, Hortikult ura, dan Perkebun an	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	50	840.0 00.00 0	-	-	5	31.55 0.800	-	-	1	-				1	-	6	-	0,02	-	
8 . 1 . 2		3.27. 05.2. 01.0 002	Penanga nan Dampak Perubaha n Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikult ura, dan Perkebun an	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	2	250.0 00.00 0	2	44.46 1.500	2	48.98 0.900	-	-	-	-	-		-	-	-	2	44.46 1.500	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			14 ,2 9	0,00			#DIV /0!	#DI V/0!	
Predikat Kinerja																				Sa ng at Re nda h	Sangat Renda h			#DIV /0!	#DI V/0!

9		3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang memiliki Izin Usaha Sesuai Standart	Per sen	100	75.000.000	100	7.580.500	100	5.907.200	-	-	30	1.500.000	-	-	-	-	30	1.500.000	130	9.080.500	0,30	0,02
9.1		3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase Pelayanan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Per sen	100	75.000.000	100	7.580.500	100	5.907.200	-	-	30	1.500.000	-	-	-	-	30	1.500.000	130	9.080.500	0,30	0,02
9.1.1.1		3.27.06.2.03.002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	2	75.000.000	2	7.580.500	2	5.907.200	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	1.500.000	2	9.080.500	-	0,02
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0	25,39			#DIV/0!	0,02	
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			#DIV/0!	Sangat Rendah	
10		3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	Per sen	100	4.334.600.000	15	1.180.698.089	20	647.587.114	5	11.464.040	5	8.752.606	-	-	-	-	10	20.216.646	30	1.200.914.735	0,10	0,00
10.1		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Per sen	100	4.334.600.000	100	1.180.698.089	100	647.587.114	200	11.464.040	200	8.752.606	-	-	-	-	40	20.216.646	140	1.200.914.735	0,40	0,00

10.1.1		3.27.07.2.01.001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	7	1.000.000.000	7	1.009.652.089	7	437.038.600	1	2.350.000	1	-	-	-	-	2	2.350.000	9	1.012.002.089	0,29	0,00
10.1.2		3.27.07.2.01.002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	7	1.711.000.000	7	19.058.000	7	26.381.900	1	-	1	-		-	-	2	-	9	19.058.000	0,29	-
10.1.2		3.27.07.2.01.003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	7	1.623.600.000	7	151.988.000	7	184.166.614	1	9.114.040	2	8.752.606		-	-	3	17.866.646	10	169.854.646	0,43	0,01
Rata-rata capaian kinerja (%)																			33,33	3,12			0,33	0,01
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (KEGIATAN 1 S.D KEGIATAN 10)																		21,44	16,19955102			#DIV/0!	#DIV/0!

Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			#DIV/0!	#DIV/0!
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																							
TOTAL ANGGARAN / REALISASI										13.646.873		2.388.350.834		2.538.996.398		-		-		4.927.347.232			0

BKAD

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Dan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 6 + 12	(14) = 13/5 * 100	(11)								
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangka t Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
											I		II		III		IV								
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 6 + 12	(14) = 13/ 5 * 100	(11)								
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	Meningkatnya kualitas penerapan/impl ementasi SAKIP BPKAD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	Level		44.231.476.937	-	15.245.190.810	3	6.224.776.343	0	1.492.719.690	0	1.313.760.840	0	-	0	-	0	2.806.480.530	3	##### ##### ###	75 %	41%	SEKRETARIAT
			Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JPL	20	2.487.500.000	20	-	20	159.977.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	20				SEKRETARIAT
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100 %	217.265.000	100 %	28.552.484	100	2.435.500	25 %	-	25 %	-	0 %	-	0 %	-	50%	-	100 %	28.552.484	100 %	13%	KASUBAG PROGRAM

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab	
			(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
				URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.
(1)	(2)		perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan																							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	10	217.265.000	4	28.552.484	2	2.435.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	28.552.484	40	13,14	KASUBAG PROGRAM	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat	%	100%	37.980.643.940	100%	13.416.213.607	100%	5.105.853.143	25%	1.428.694.144	25%	1.268.582.840	0%	-	0%	-	50%	2.697.276.984	100%	#####	100%	42%	KASUBAG KEUANGAN	

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangka t Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
											I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		(11)
			URAIAN	SAT UA N	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Waktu dan Sesuai Peratur an Perund ang- undang an																						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Meneri ma Gaji dan Tunjang an ASN	Ora ng/ bul an	5 3	37.980. 643.940	51	13.416.2 13.607	4 7	5.105. 853.1 43	4 7	1.42 8.69 4.14 4	4 7	1.268 .582. 840	0	-	0	-	47	2.697. 276.98 4	47	##### ##### #	100	42,4 3	KASUBA G KEUAN GAN
		Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Persent ase ASN yang Telah Mengik uti Diklat Kompet ensi Terkait Terhada p Keselur uhan	%	1 0 0 %	2.487.5 00.000	1 0 0 %	613.897 .509	1 0 0	609.9 11.50 0	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0%	-	100 %	613.8 97.50 9	100 %	25%	KASUB AG UMUM

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggu ng Jawab								
											I				II											III				IV			
											(8)		(9)		(10)		(11)									(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100			
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		(11)							
(1)	(2)	(3)	ASN																														
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	2.487.500.000	40	-	1	159.977.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	40	-	100	0,00	KASUBAG UMUM							
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpe nuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat	%	100%	2.899.325.922	100%	611.574.509	100%	445.129.900	25%	31.025.546	25%	21.708.000	0%	-	0%	-	50%	52.733.546	100%	664.308.055	100%	23%	KASUBAG UMUM							

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
(1)	(2)	(3)	URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(11)		
			Daerah																						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5	50.000.000	4	2.323.000	1	4.804.600	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	2.323.000	100	4,65	KASUBAG UMUM
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	550.000.000	0	-	1	34.509.600	0	500.000	0	-	0	-	0	-	0	500.000	0	500.000	100	0,09	KASUBAG UMUM
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Paket	5	50.000.000	13	2.268.000	1	5.497.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	13	2.268.000	100	4,54	KASUBAG UMUM

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)																					(11)		
			Berdasarkan Jenisnya																						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	210.000.000	0	-	1	60.277.500	0	10.921.000	0	-	0	-	0	-	0	10.921.000	0	10.921.000	100	5,20	KASUBAG UMUM
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		60.000.000	0	-	1	13.940.000	0	512.900	0	-	0	-	0	-	0	512.900	0	512.900	100	0,85	KASUBAG UMUM
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	135.000.000	0	-	12	24.020.000	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	100	0,00	KASUBAG UMUM

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangka t Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab								
											I				II											III				IV			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		(11)								
			URAIAN	SAT UA N	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
		Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksa naan Rapat-rapat Koordin asi dan Konsult asi yang Terlaksa na	Lap ora n		1.844.3 25.922	24	606.983. 509	1 2	302.0 80.40 0	3	19.0 91.6 46	3	21.70 8.000	3		3		3	40.799 .646	27	647.7 83.15 5	100	35,1 2	KASUBA G UMUM								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persent ase Pemenu han Kebutu han Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Peme ri ntah Daerah	%	1 0 0 %	700.00 0.000	1 0 0 %	322.038 .750	1 0 0	412.3 15.60 0	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-	100 %	322.0 38.75 0	100 %	46%	KASUB AG UMUM								

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	200.000.000	80	27.450.000	5	251.960.000	0	-	0	-	0	-	0	-	80	27.450.000	4000	13,73	KASUBAG UMUM	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		250.000.000	80	268.282.750	5	26.870.600	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	80	268.282.750	1600	107,31

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangka t Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluas i		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
			URAIAN	SAT UA N	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)																						(11)	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasara na Gedung Kantor atau Bangu nan Lainnny a	Uni t	1	250.000 .000	-	26.306.0 00	3	133.4 85.00 0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	26.30 6.000	0	10,5 2	KASUBA G UMUM
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persent ase Keterpe nuhan Layana n Jasa Penunja ng Urusan Kantor	%		1.975.7 67.075	1 0 0 %	656.614 .450	1 0 0	188.1 23.00 0	2 5 %	33.0 00.0 00	2 5 %	22.0 00.0 00	0 %	-	0 %	-	50%	55.00 0.000	100 %	711.6 14.45 0	100 %	36%	KASUB AG UMUM
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Surat Menyur	Lap ora n	6 0	1.817.1 69.340	36	656.614. 450	1 2	7.386 .000	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	39	656.6 14.45 0	100	36,1 3	KASUBA G UMUM

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab		
			(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12			(14) = 13/ 5 * 100	
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
(1)	(2)																								(11)		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	158.597.735	12	-	12	180.737.000	3	33.000.000	3	22.000.000	3	-	3	-	3	55.000.000	15	55.000.000	100	34,68	KASUBAG UMUM		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	%	100%	458.475.000	100%	210.197.010	100%	70.919.200	25%	-	25%	1.470.000	0%	-	0%	-	50%	1.470.000	84%	211.667.010	84%	46%	KASUBAG UMUM		

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)																					(11)		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	24	45.975.000	24	50.367.010	24	42.075.000	24	-	24	-	24	-	24	-	0	-	24	50.367.010	100	109,55	KASUBAG UMUM
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	Unit	24	200.000.000	24	110.824.000	4	24.745.000	4	-	4	-	4	-	4	-	0	-	24	110.824.000	100	55,41	KASUBAG UMUM

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggu ng Jawab
											I		II		III		IV								
			(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100										
(1)	(2)	(3)	URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(11)		
			dan Perizinannya																						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	45	112.500.000	45	-	45	21.050.000	45	-	45	1.470.000	45	-	45	-	0	1.470.000	45	1.470.000	100	1,31	KASUBAG UMUM
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	49.006.000	1	4.099.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	49.006.000	100	49,01	KASUBAG UMUM

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab	
											I		II		III		IV									
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100			
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
(1)	(2)	(3)	si																							
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)																28%		97,71%		97,71%	33,05%		
			Predikat Kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	%	100	562.914.919.405	100	260.218.316.315	100	112.107.590.620	0	#####	0	25.936.344.576	0	-	0	-	0%	51.992.930.205	75%	#####	100%	55,46%	KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangka t Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
											I		II		III		IV								
			(1)	(2)	(3)	(4)	SAT UAN	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(12)	(13) = 6 + 12	
			Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah	%	100		91,5		92		96,79		96,79		0		0		96,79		96,79 %		96,79 %		KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH
			Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	%	100		100		100		0		0		0		0		0%		75 %		100 %		KEPALA BIDANG AKUTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangka t Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 6 + 12	(14) = 13/ 5 * 100	(11)								
			URAIAN	SAT UAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase keterpe nuhan Dokumen Anggaran Daerah yang disahkan Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undang an	%	100%	11.401.497.879	100%	2.075.055.502	100%	824.995.380	0%	33.912.500	0%	3.516.000	0%	-	0%	-	0%	37.428.500	100%	2.112.484.002	100%	18,53%	BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	203.910.192	4	65.850.600	2	19.569.890	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	65.850.600	40	32,29	KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangka t Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
											I				II										
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
			URAIAN	SAT UA N	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)																						(11)	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dok um en		156.317 .636	4	51.165.0 00	2	17.46 3.740	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	51.16 5.000	40	32,7 3	KASUBI D PENYUS UNAN ANGGA RAN
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifik asi	Dok um en	5 4	40.721. 241	54	8.235.00 0	5 4	3.058. 000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	54	8.235. 000	100	20,2 2	KASUBI D PENYUS UNAN ANGGA RAN
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifik asi	Dok um en	5 4	31.981. 690	54	11.639.0 00	5 4	17.95 9.600	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	54	11.63 9.000	100	36,3 9	KASUBI D PENYUS UNAN ANGGA RAN
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifik asi	Dok um en	5 4	88.592. 449	54	10.309.0 00	5 4	9.083. 500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	54	10.30 9.000	100	11,6 4	KASUBI D PENYUS UNAN ANGGA RAN

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
											(8)		(9)		(10)		(11)								
			(4)	SAT UAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(11)		
(1)	(2)	(3)	URAIAN	SAT UAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(11)
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		88.592.449	54	15.446.000	54	3.268.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	54	15.446.000	100	17,43	KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	10	3.753.770.165	4	888.195.124	2	300.503.920	0	29.050.000	0	-	0	-	0	-	0	29.050.000	4	917.245.124	40	24,44	KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Dokumen	10	2.034.488.320	4	591.644.180	2	171.773.930	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	591.644.180	40	29,08	KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
(1)	(2)	(3)	URAIAN	SAT UA N	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(11)		
		Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																						
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	50	3.350.000.000	12	409.825.298	10	95.883.000	0	1.762.500	0	1.323.500	0	-	0	-	0	3.086.000	12	412.911.298	24	12,33	KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	5	50.000.000	2	8.974.700	1	2.514.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	8.974.700	40	100,00	KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV												
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		(11)	
						URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.
		Koordinasi Perencanaaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen		50.000.000	2	13.771.600	1	2.686.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	13.771.600	40	100,00	KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN				
		Koordinasi Perencanaaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	5	50.000.000	1	-	1	2.986.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	20	100,00	KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN				
		Pembinaan Perencanaaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran	Orang	504	1.503.123.737	108	-	108	178.244.400	0	3.100.000	0	2.192.500	0	-	0	-	0	-	108	5.292.500	21,4285714	100,00	KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN				

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab			
											I		II		III		IV											
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
						URAIAN	SATUA N	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.
			Daerah Pemerint ah Kabupat en/Kota																									
		Koordinasi dan Pengelolaa n Perbendaharaan Daerah	Rata - rata Waktu Penerbitan Dokum en Admini strasi Pengelu aran Kas	Me nit	1 5	2.163.7 11.162	1 5	896.517 .781	1 5	353.7 60.62 0	1 5	22.8 96.0 00	1 5	12.7 59.2 00	1 5	-	1 5	-	0	35.65 5.200	100 %	932.1 72.98 1	100 %	43,0 8%	KEPALA BIDANG PERBEN DAHAR AAN DAERA H			
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokume n Hasil Koordin asi dan Pengelol aan Kas Daerah	Dok um en		1.731.1 36.500	2	784.370. 204	1	309.5 43.12 0	0	22.8 96.0 00	0	10.71 2.200	0	-	0	-	0	33.608 .200	44	817.9 78.40 4	880	47,2 5	KASUBI D KAS DAERA H			

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											I		II		III		IV									
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100			
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
(1)	(2)	(3)	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen		247.074.662	2	66.458.427	1	23.384.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	66.458.427	40	26,90	KASUBID PERBENDAHARAAN

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV												
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/5 * 100		(11)	
						URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	10	185.500.000	4	45.689.150	2	20.833.000	0	-	0	2.047.000	0	-	0	-	0	2.047.000	4	47.736.150	40	25,73	KASUBID KAS DAERAH				

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)																							(11)
			dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyeto ran Perhitu ngan Fihak Ketiga (PFK)																						

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangk t Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 6 + 12	(14) = 13/ 5 * 100	(11)								
			URAIAN	SAT UAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase keterpe nuhan pelaksa naan Akunta nsi dan Pelapor an Keuang an Daerah	%	1 0 0	3.461.4 32.615	1 0 0 %	1.341.5 37.693	1 0 0	481.1 94.92 0	0 %	-	0 %	148. 489. 400	0 %	-	0 %	-	0%	148.4 89.40 0	100 %	1.490 .027. 093	100 %	43,0 5%	KEPALA BIDANG AKUTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
		Koordinasi Pelaksanaa n Akuntansi Penerimaan dan Pengeluara n Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordin asi Pelaksa naan Akunta nsi Penerimaan dan Pengelu aran Kas Daerah	Lap ora n	6 0	61.954. 345	8	21.879.6 00	4	6.828. 210	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	9	21.87 9.600	15	35,3 2	KASUBI D AKUTAN SI ASET

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab				
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		(11)	
						URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan , Belanja, Pembiayaan , Pendapatan -LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan -LO, dan Beban	Dokumen	20	192.079.874	8	21.879.600	4	26.945.510	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	9	21.879.600	45	11,39	KASUBID AKUTANSI ASET				
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan , Triwulanan dan Semeste	Laporan	10	221.078.787	4	84.437.590	2	31.276.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	84.437.590	40	38,19	KASUBID AKUTANSI, PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS				

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)																						(11)	
			ran																						
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan		14.011.993		-	2	15.479.200	0	-	0	5.511.500	0	-	0	-	0	5.511.500	0	5.511.500	0	39,33	KASUBID AKUTANSI, PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)																							(11)
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	10	2.876.708.542	4	1.177.600.693	2	361.946.300	0	-	0	142.977.900	0	-	0	-	0	142.977.900	4	1.320.578.593	40	45,91	KASUBID AKUTANSI, PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)																					(11)		
			en/Kota																						
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerin	Orang	20	95.599.075	0	35.740.210	4	38.719.300	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	35.740.210	0	37,39	KASUBID AKUTANSI ASET

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab		
			(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12			(14) = 13/ 5 * 100	
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
(1)	(2)		tah Kabupaten/Kota																								
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Daerah yang Dilaksanakan	%	100	544.000.000	100%	255.650.659.444	100	110.235.099.890	25%	#####	25%	#####	0%	-	0%	-	50%	51.762.899.805	100%	#####	100%	56,51%	KASUBAG KEUANGAN		
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan	Laporan	5	8.000.000.000	2	5.183.179.941	1	2.530.000.000	0	-	0	653.826.150,72	0	-	0	-	0	653.826.150,72	2	5.837.006.092	40	72,96	KASUBAG KEUANGAN		

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangk a Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluas i		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
			URAIAN	SAT UAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)																					(11)		
			Bunga Pinjama n Pemerin tah Daerah																						
		Analisis Perencanaa n dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perenca naan dan Penyalu ran Bantua n Keuang an	lapo ran		491.000 .000.00 0	2	241.507. 395.690	1	97.86 3.196. 100	0	24.1 97.7 42.4 80	0	25.11 1.546 .525	0	-	0	-	0	49.309 .289.0 05	2	##### ##### #	40	59,2 3	KASUBA G KEUAN GAN
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelol aan Dana Darurat dan Mendes	Lap ora n	5	45.000. 000.000	2	8.960.08 3.813	1	4.580. 302.0 69	0	1.79 9.78 4.65 0	0	-	0	-	0	-	0	1.799. 784.65 0	2	##### ##### #	40	23,9 1	KASUBA G KEUAN GAN

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangka t Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluas i		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
											I				II										
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
			URAIAN	SAT UA N	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)																							

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)																					(11)		
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	5	630.758.920	4	203.349.655	1	52.844.900	0	2.250.000	0	2.560.600	0		0		0	4.810.600	4	208.160.255	80	33,00	KASUBID PENGELOLAAN DATA DAN ANALISIS ANGGARAN
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	Orang	540	946.138.380	4	51.196.240	108	31.969.890	0	-	0	3.646.700	0	-	0	-	0	3.646.700	4	54.842.940	0,74074074	5,80	KASUBID PENGELOLAAN DATA DAN ANALISIS ANGGARAN

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab	
											I		II		III		IV									
											(8)		(9)		(10)		(11)									(12)
			(4)	SATUA N	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		(11)
(1)	(2)	(3)	Keuang an Daerah Pemerin tah Kabupat en/Kota																							
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)															16,6 7%		95,8 %		100 %	38,4 3%			
			Predikat Kinerja															Sang at Ren dah		San gat Ting gi		San gat Ting gi	Sang at Ren dah			
			PROGRAM PENGELOL AAN BARANG MILIK DAERAH	Persent ase Pember dayaan aset tetap tanah dan bangun an	%		5.323.3 57.211, 60	## ## #	1.449.2 89.366, 00	# # #	861.5 53.20 0,00	8 8	2.45 0.00 0,00	8 8	84.4 25.9 50,0 0	8 8	-	8 8	-	88	86.87 5.950	88	1.536 .165. 316	88	28,8 6	KEPALA BIDANG ASET DAERA H
			Pengelolaa n Barang Milik Daerah	Jenis Barang Milik Daerah yang dikelola	jeni s	6	5.323.3 57.211, 60	6	1.449.28 9.366,00	6	861.5 53.20 0,00	6	2.45 0.00 0,00	6	84.42 5.950 ,00	6	-	6	-	6	86.875 .950,0 0	6	##### ##### #	100	28,8 6	KEPALA BIDANG ASET DAERA H

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangka t Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggu ng Jawab
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
			URAIAN	SAT UA N	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)																						(11)	
		Penyusunana Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen		193.250.934	4	132.702.000	2	62.216.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	132.702.000	40	68,67	KASUBID PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PEMINDA TANGAN
		Penyusunana Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	10	25.205.423	4	7.184.600	2	5.543.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	7.184.600	40	28,50	KASUBID PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PEMINDA TANGAN
		Penyusunana Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	115.522.368			1	12.745.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		-			KASUBID PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PEMINDA TANGAN

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangka t Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
			URAIAN	SAT UA N	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)																						(11)	
		Penatausah aan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatau sahaan Barang Milik Daerah	Lap ora n		1.873.1 90.658	10	637.017. 406	2	346.7 67.90 0	0	-	0	74.72 4.600	0	-	0	-	0	-	10	637.0 17.40 6	100	34,0 1	KASUBI D PERENC ANAAN, PEMANF AATAN DAN PEMIND ATANGA NAN
		Inventarisas i Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventar isasi (LHI) Barang Milik Daerah	Lap ora n	5	307.298 .218	14	67.468.0 00	1	45.52 3.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	14	67.46 8.000	280	21,9 6	KASUBI D PERENC ANAAN, PEMANF AATAN DAN PEMIND ATANGA NAN
		Pengamana n Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengaman an Barang Milik Daerah	Lap ora n	1 0	608.044 .560	4	148.531. 860	2	134.2 40.90 0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	148.5 31.86 0	20	24,4 3	KASUBI D PERENC ANAAN, PEMANF AATAN DAN PEMIND ATANGA NAN

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
			(1)	(2)	(3)	(4)	SATUAN	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 6 + 12	(14) = 13/5 * 100	(11)							
			URAIAN		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	5	140.000.000	0	-	1	68.377.900	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	20	0,00	KASUBID PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PEMINDAATAN
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	Dokumen	25	673.332.549	10	233.405.912	5	78.522.400	0	2.450.000	0	4.701.350	0	-	0	-	0	-	10	233.405.912	100	34,66	KASUBID PENGGUNAAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangka t Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/ 5 * 100		
						URAIAN	SAT UAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.
			Penghap usan Barang Milik Daerah																									
		Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusuna n Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsil iasi dalam rangka Penyusu nan Laporan Barang Milik Daerah	Lap ora n	2 0	160.480 .000	2	6.439.80 0	4	16.15 8.600	0	-	0	5.000 .000	0	-	0	-	0	-	2	6.439. 800	10	4,01	KASUBI D PENG GUNAAN, PEMUS NAHAN DAN PENGH APUSAN			
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengik uti Pembina an Pengelol aan Barang Milik	Ora ng	2 7 0	1.227.0 32.501	16 8	216.539. 788	1 0 8	91.45 7.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	168	216.5 39.78 8	62,2 2	17,6 5	KASUBI D PENG GUNAAN, PEMUS NAHAN DAN PENGH APUSAN			

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab		
											I		II		III		IV										
											(8)		(9)		(10)		(11)									(12)	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
(1)	(2)	(3)	URAIAN	SATUA N	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(11)		
			Daerah Pemerint ah Kabupat en/Kota																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				88,00		88,00		88,00	26,51		
Predikat Kinerja																					Tinggi		Tinggi		Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :		• Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). BKAD telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM, antara lain melalui pelatihan, seminar, dan workshop. Upaya ini telah membuahkan hasil yang positif, di mana SDM BKAD kini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.																									
		• Penerapan sistem informasi yang handal. BKAD telah menerapkan sistem informasi keuangan dan aset daerah yang handal, yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah melalui Aplikasi SIPD dan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIMDA BMD. Sistem informasi ini telah membantu BKAD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib, efisien,																									

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
			(1)	(2)	(3)	(4)	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(14) = 13/5 * 100	
dan efektif.																									
• Kerja sama yang baik dengan stakeholders. BKAD telah menjalin kerja sama yang baik dengan stakeholders, baik internal maupun eksternal. Kerja sama ini telah membantu BKAD dalam mendapatkan informasi dan masukan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.																									
• Peningkatan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran BKAD untuk meningkatkan kinerja. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan-kebijakan pimpinan yang mendukung peningkatan kinerja, serta adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran BKAD untuk meningkatkan kinerjanya.																									
• Peningkatan pemahaman dan penerapan SAKIP oleh seluruh jajaran BKAD. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan pemahaman dan penerapan SAKIP oleh seluruh jajaran BKAD, yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, dokumen pelaksanaan anggaran, dan laporan kinerja.																									
Faktor Penghambat		• Pengelolaan dan pemungutan retribusi pelayanan pasar belum memadai.																							
:		• Piutang pajak daerah PBB-P2 tahun 2009-2021 belum didukung dengan data rincian wajib pajak yang mengakibatkan piutang pajak daerah PBB-P2 tahun 2009-2021berpotensi tidak dapat ditagih																							

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 6 + 12	(14) = 13/5 * 100	(11)								
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(11)		
			• Piutang retribusi daerah/pelayanan pasar 2012-2023 belum didukung data rincian wajib retribusi yang mengakibatkan piutang retribusi daerah/pelayanan pasar tahun 2012-2023 berpotensi tidak dapat ditagih • Pengamanan aset tetap peralatan mesin khususnya kendaraan dinas roda dua dan roda empat belum optimal sehingga mengakibatkan risiko penyalagunaan dan berpotensi hilang • Setiap pegawai belum membuat bukti pendukung dalam perumusan dan penetapan perencanaan kinerja. • Belum menyusun kebijakan internal tentang pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja. • Laporan akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk penentuan reward and punishment ataupun pemberian tunjangan kinerja.																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			• Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait rencana tindak lanjut temuan BPK • Mengidentifikasi kembali aset tetap yang belum dikapitalisasi ke asset induknya serta asset peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaanya, dan dikuasai oleh pihak lain kemudian melengkapi dokumen pinjam pakai, dan dilakukan update kedalam KIB sesuai hasil inventatrisasi.																						

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 6 + 12	(14) = 13/5 * 100	(11)								
URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
Melakukan koordinasi dengan Bapenda terkait Wajib Pajak PBB P2 untuk dilakukan identifikasi dan validasi.																									
Melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja strategis yang telah ditetapkan secara berkala, untuk memastikan bahwa indikator kinerja strategis tersebut masih relevan dengan tujuan dan sasaran organisasi..																									
Melakukan sosialisasi terhadap indikator kinerja strategis kepada seluruh jajaran BKAD, agar seluruh jajaran BKAD memahami indikator kinerja strategis yang telah ditetapkan.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pengendalian intern. BKAD perlu terus meningkatkan kualitas pengendalian intern, baik dari sisi kebijakan, prosedur, maupun pelaksanaan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.																								
	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. BKAD perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat.																								
	Melakukan perbaikan berkelanjutan. BKAD perlu melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi secara berkala dan menerapkan hasil evaluasi tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD																								

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											I		II		III		IV									
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 6 + 12		(14) = 13/5 * 100			
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
(1)	(2)	(3)																								(11)
• Meningkatkan kualitas perencanaan strategis. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja strategis yang telah ditetapkan, serta melakukan penyempurnaan terhadap indikator kinerja strategis yang belum terukur atau terukur secara tidak tepat. • Meningkatkan kualitas laporan kinerja. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penyempurnaan terhadap laporan kinerja yang belum lengkap atau belum memenuhi standar yang ditetapkan.																										

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun Anggaran 2025	Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun Anggaran	Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab
							I	II				

				5		6		7		8		9		11		(12) = 6 + 11		2025 (%)		(14)
1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barru	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.	- Nilai maturitas SPIP Kesbangpol - Rata-rata lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan.	4	10.830.462.360		5.483.892.392	3	2.168.776.123	3	449.887.421	0	440.733.756	3	890.621.177	3	6.374.513.569	75,00	58,86	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan.	48	8.730.602.330	100	4.927.849.310	100	2.012.610.455	100	421.938.799	100	429.622.597	100	851.561.396	100	5.779.410.706	2,08	66,20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	809	8.730.602.330	100	4.927.849.310	21	2.012.610.455	106	421.938.799	109	429.622.597	19	851.561.396	100	5.779.410.706	12,36	66,20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN.	100	435.000.000	100	29.489.250	0	6.897.000	0	0	0	0	0	0	0	29.489.250	0,00	6,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	66	435.000.000	11	29.489.250	3	6.897.000	0	0	0	0	0	0	11	29.489.250	16,67	6,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah.	100	776.594.561	100	226.229.253	100	55.620.300	100	15.922.791	100	1.463.500	100	17.386.291	100	243.615.544	100,00	31,37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	7.882.629	13	4.494.300	7	1.511.100	7	1.511.100	0	0	7	1.511.100	20	6.005.400	666,67	76,19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3	9.886.000	20	4.878.500	11	2.015.500	0	0	2	230.000	0	230.000	20	5.108.500	666,67	51,67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	2150	758.825.932	408	216.856.453	91	52.093.700	22	14.411.691	2	1.233.500	24	15.645.191	432	232.501.644	20,09	30,64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	100	172.868.052	100	26.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.820.000	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	41	172.868.052	6	26.820.000	0	0	0	0	0	0	0	6	26.820.000	14,63	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100	378.306.885	100	169.888.959	100	62.328.368	100	8.324.400	100	6.847.659	100	15.172.059	100	185.061.018	100,00	48,92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyutar	20	275.677.485	12	149.399.409	4	52.593.500	1	8.324.400	1	6.847.659	1	15.172.059	13	164.571.468	65,00	59,70	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	102.629.400	54	20.489.550	4	9.734.868	0	0	0	0	0	54	20.489.550	90,00	19,96	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara.	100	337.090.532	100	103.615.620,00	100	31.320.000	100	3.701.431	100	2.800.000	100	6.501.431	100	110.117.051	100,00	32,67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25	197.385.500	17	96.775.620	6	27.320.000	6	3.701.431	2	1.550.000	6	5.251.431	23	102.027.051	92,00	6.582,39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	59	16.000.000	14	6.840.000	8	4.000.000	0	0	5	1.250.000	5	1.250.000	19	8.090.000	32,20	50,56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	4	123.705.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														66,67	41,07	66,67	1.062.418.928,17	50,35	37,19	
PR EDI KAT KIN ER JA														Sedang	Sangat Rendah	Sedang		Rendah	Sangat Rendah	

		Program : Penguatan Ideologi Panca Sila dan Karakter Kebangsaan.	Persentase Tingkat Keikutsert aan Aparat dan Masyaraka t Bela Negara.	1 0 0	2.405.5 20.183	10 0	4.318.07 7.848	10 0	1.066. 160.80 0	1 0 0	19.98 5.021	1 0 0	12.81 5.700	100	32.800.7 21	100	4.350.878 .569	100, 00	180,8 7	Badan Kesatu an Bangsa dan Politik
		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantap an Pelaksana an Bidang Ideologi Pancasila dan Karater Kebangsaa n.	1 3	2.405.5 20.183	6	4.318.07 7.848	3	1.066. 160.80 0	3	19.98 5.021	3	12.81 5.700	3	32.800.7 21	6	4.350.878 .569	6,00	180,8 7	Badan Kesatu an Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.	Jumlah Orang yang mengikuti kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaa n, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaa n, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaa n	90 0	202.061. 509	84	2.149.381 .674	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	84,00	2.149.381. 674	9,33	1.063 ,73	Badan Kesatu an Bangsa dan Politik	

		Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	0	54.077.000	65	19.314.500	10	8.139.000	0	0	0	0	0	0	65,00	19.314.500	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pembinaan terhadap aktifitas kepaskibrakan	Laporan hasil pembinaan aktifitas kepaskibrakan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibraka	84	2.149.381.674	84	2.149.381.674	84	1.058.021.800	1	19.985.021	1	12.815.700	0	32.800.721	84,00	2.182.182.395	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														100,00	3,08	100,00	4.350.878.569,00	100,00	180,87	
PR EDI KAT KINERJA														Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

		Program: Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pilkada.	80	12.024.833.890	80	1.547.313.124,00	80	604.258.126	80	2.075.000	80	0	80	2.075.000	80	1.549.388.124	80,00	12,88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pilkada Serta Pantauan Situasi Politik.	20	3.184.872.578	8	1.547.313.124,00	4	604.258.126	4	2.075.000	4	0	4	2.075.000	12	1.549.388.124	60,00	48,65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah orang yang mengikuti kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	2460	2.901.082.600	92392	1.547.313.124,00	107082	604.258.126	1	2.075.000	0	0	0	2.075.000	92.392	1.549.388.124	3.755,77	53,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemil	Jumlah Laporan hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan	48	283.789.978	4	28.910.261.701	0	0	0	0	0	0	0	0	4	28.910.261.701	0,00	10.187,20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		ihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	pemerintah an, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pe milihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.																	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														80,00	0,34	80,00	1.549.388.124,00	80,00	12,88	
PR EDI KAT KINERJA														Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi		Tinggi	Rendah	
		Program: Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.	Persentase Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi.	100	666.384.685	100	117.298.631	100	35.963.700	100	1.175.000	100	4.870.000	100	6.045.000	100	123.343.631	100,00	18,51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5	666.384.685	2	117.298.631	2	35.963.700	2	1.175.000	2	4.870.000	2	6.045.000	4	123.343.631	80,00	18,51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	830	476.278.452	266	77.738.433	27	15.569.900	2	1.175.000	0	0	0	1.175.000	266	78.913.433	32,05	16,57	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	Jumlah Laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	15	190.106.233	2	39.560.198,00	1	20.393.800	0	0	1	4.870.000	1	4.870.000	3	44.430.198	20,00	23,37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														100	16,81	100	123.343.631	100	19	
PR EDI KINERJA														Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

		Program : Pembinaan dan pengembang an ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.	- Persentase Pelaksana an Kebijakan Pemnbina an dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	1 0 0	618.036 .242	10 0	69.149.4 54	10 0	37.925 .000	1 0 0	550.0 00	1 0 0	0	200	550.000	100	69.699.45 4	100, 00	11,28	Badan Kesatu an Bangsa dan Politik
		Perumusan kebijakan tekhnis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantap an Pelaksana an Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	1 2	618.036 .242	4	69.149.4 54	1	37.925 .000	1	550.0 00	1	0	1	550.000	5	69.699.45 4	41,6 7	11,28	Badan Kesatu an Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgun aan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah.	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaa n kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegaha n penyalahg unaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaa n didaerah.	10 00	199.328. 483	0	0	280	8.123.8 00	2 8 0	550.0 00	0	0	280	550.000	280	550.000	28,0 0	0,28	Badan Kesatu an Bangsa dan Politik

		Pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	350	418.707.759	55	69.149.454	13	29.801.200	0	0	0	0	0	0	55	69.149.454	15,71	16,51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														200,00	1,45	100,00	69.699.454,00	100,00	11,28	
PR EDI KAT KINERJA														-	-	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Program : Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.	Persentase penurunan konflik sosial di Lingkungan Masyarakat.	50	1.711.481.262	40	811.970.226,00	50	304.948.700	10	44.625.000	15	53.642.830	25	98.267.830	65	910.238.056	130,00	53,18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	19	1.711.481.262	3	811.970.226,00	4	304.948.700	4	44.625.000	4	53.642.830	4	98.267.830	7	910.238.056	36,84	53,18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan , serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	600	194.749.320	0	0,00	70	15.933.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan , serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	990	584.570.279	173	279.855.222,00	59	117.040.500	59	16.250.000	59	25.101.750	59	41.351.750	232	321.206.972	23,43	54,95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga	60	100.000.000	35	67.677.604,00	12	20.313.300	3	3.000.000	3	2.969.830	6	5.969.830	41	73.647.434	68,33	73,65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		kelembagaan bidang kewaspadaan , serta penanganan konflik di daerah.	asing, kewaspadaan an perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganana n konflik di daerah																	
		Pelaksanaan forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota (FORKOPIMDA).	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota (FORKOPIMDA)	60	832.161.353	28	464.437.400	2	151.661.000	1	25.375.000	1	25.571.250	1	50.946.250	29	515.383.650	48,33	61,93	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1													25,00	32,22	65,00	910.238.056,00	130,00	53,18		
PREDIKAT KINERJA													Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah		Tinggi	Sangat Rendah		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)													95,28	15,83	85,28	1.344.327.793,69	93,39	52,32		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)													Rendah	Sangat Rendah	Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																				
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																				
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																				
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																				

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Kode Rencanng	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan(Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun Anggaran 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2024 (%)	Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 (%)					
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
				URAIAN	SATUAN	K	Rp													(9+10+11+12)	(11/8) x 100			(7+13)		(15/6x100)	
						(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp					(K)	Rp			(K)	Rp		
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		%	100	149.982.000		1540768300	100	143.316.500	0,41	587.500		-	-	-	0,41	-	0,41	587.500	0,41	0,41	1,41	587.500,00	140,99	0,39
			RPPLH KAB /KOTA		do k	1	149.982.000	-	-	1	143.316.500	0,41	587.500		-	-	-	-	-	0,41	587.500	41,0	0,4	1,41	587.500	140,99	0,39
			Penyusunan RPPLH Kab / Kota	Jumlah Dok RPPLH di Kab / Kota yang berisi arahan RPPLH Kab/Kota dan Menga	do k	1	149.982.000	1,00	-	1	143.316.500	0,41	587.500						0,41	587.500	41	0,41	1,41	587.500	141,0	0,39	

[illegible]

Terkenalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta terjadinya kebakaran hayati		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang ditentukan status mutunya	KEG	3	1.271.430.460	0	0	3	50.208.950	11,30	5.675.000	22,22	11.520.780					33,52	17.195.780	4.370	67	67	17.195.780	4.370	8
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, dan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Udara, dan	Titik	3	512.527.895			3	34.479.950	9,39	3.237.500	25,71	9.120.780					35,10	12.358.280	1.170	35,84	35,10	12.358.280	1.169,86	2,41

			PROGRA M PENGEN DALIAN BAHAN BERBAH AYA DAN BERACU N (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAH AYA DAN BERACU N (LIMBA H B3)	Presen tase ketaat an pengh asil LB3	%	8 8, 5 6	569.0 04.58 4	0	-	88,5 6%	17.4 39.5 00	8, 6 0	1.500. 000	12 ,0 5	2.387. 500					20, 65	3.887. 500	2332 ,091 073	22, 29	0, 00 3	3.887. 500	0,00	0,68
			Penyim panan Sement ara Limbah B3	ketaat an pengh asil LB3	us ah a	1 0	188.2 93.49 4	0	-	2 Usa ha	5.11 0.00 0	2 9, 3 5	1.500. 000	16 ,0 3	150.0 00					45	1.650. 000	1.13 5	32	45	1.650. 000	1.13 5	1
			Verifikas i Lapanga n untuk Memasti kan Pemenu han Persyara tan Administ rasi dan Teknis Penyimp anan Sementa ra Limbah B3	Jumla h rekom endasi yang dikelu arkan	Re k	4	188.2 93.49 4	-	-	4	5.110 .000	29 ,3 5	1.500. 000	16 ,0 3	150.0 00					45	1.650. 000	1.13 5	32, 29	45, 38	1.650. 000	1.13 4,52	0,88
			Pengum pulan Limbah B3 dalam 1 (satu)	Perse ntase B3 dan Limba h B3	Pe ng u m p ul	1 0 0	380.7 11.09 0	0	-	1 pen gum pul	12.3 29.5 00	-	-	10 ,1 9	2.237. 500	1 8, 1 5	-	1 8 , 1 5	-	28	2.237. 500	945	18	28	2.237. 500	405	1

			DAN PENGEL OLAAN LINGKU NGAN HIDUP (PPLH)	izin PPLH dan PUU LH yang diterbi tkan oleh Pemer intah Daera h Kab/K ota																						
			Pembina an dan Pengawa san Terhada p Usaha dan/ata u Kegiata n yang Izin Lingkun gan dan Izin PPLH diterbit kan oleh Pemerin tah Daerah Kabupat en/Kota	Jumla h usaha dan/a tau Kegiat an yang taat terhad ap izin Lingk ungan izin PPLH yang diterb itkan oleh Pemer intah Daera h Kabup aten/ Kota	us ah a	2 0	153.6 80.49 0	0	-	20	13.9 77.5 00	4 0, 1 3	5.608. 750	7, 56	1.267. 500				47, 69	6.876. 250	238, 44	49, 20	3	68762 50	15	4,47 4380 582
			Fasilitas Pemenu han Ketentua n dan Kewajiba n Izin Lingkun gan	Jumla h Rekom endasi dan/at au Perset ujuan Teknis	re k	1 0	51.34 4.789	-	-	10	4.646 .500	67 ,9 8	3.158. 750	4, 44	-				72, 42	3.158. 750	724	67, 98	72, 42	3.158. 750	724, 23	6,15

			dan/atau Izin PPLH	, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan																							
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	objek	10	102.335.701	-	-	10	9.331.000	26,26	2.450.000	51,73	1.267.500				77,99	3.717.500	780	39,84	77,99	3.717.500	779,91	3,63	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			752,07	49,20					752,07	4,89	
PREDIKAT KINERJA																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah					Sangat Tinggi	Sangat Rendah

			PROGRA M PENING KATAN PENDIDI KAN, PELATI HAN DAN PENYUL UHAN LINGKU NGAN HIDUP UNTUK MASYAR AKAT	Tingka t pemah aman masya rakat terhad ap pengel olaan lingku ngan hidup	%	8 0	371.2 46.99 2	0	0	86%	25.25 4.000	19 ,6 7	4.967. 500	24 ,0 7	5.362. 500					43, 74	10.330 .000	2187	41	44	10.330 .000	2187	3
			Penyele nggaraa n Pendidi kan, Pelatiha n, dan Penyulu han Lingkun gan Hidup untuk Lembag a Kemasy arakata n Tingkat Daerah Kabupat en/Kota	Jumla h lemba ga atau kelom pok masya rakat yang diting katka n kapasi tasny a dalam PPLH	%	2	371.2 46.99 2	0	0	2 Lem baga /Or gani sasi	25.2 54.0 00	1 9, 6 7	4.967. 500	24 ,0 7	5.362. 500					43, 74	10.330 .000	2.18 7	41	44	10.33 0.000	2.18 7	3
			Pendam pingan Gerakan Peduli Lingkun gan Hidup	Jumla h Penda mping an Pembi naan Gerak an Peduli dan Berbu	2	2	371.2 46.99 2	-	-	2	25.25 4.000	19 ,6 7	4.967. 500	24 ,0 7	5.362. 500					43, 74	10.330 .000	2.18 7	40, 90	43, 74	10.330 .000	2.18 6,90	2,78

			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan terkait izin PPLH	Pengaduan	3	60.649.329	0	0	5	9.951.000	13,44	1.337.500	18,34	2.300.000					31,78	3.637.500	795	37	32	3.637.500	1.059	6
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusahaan lingkungan yang ditangani	Pengaduan	3	60.649.329	-	-	4	9.951.000	13,44	1.337.500	18,34	2.300.000					31,78	3.637.500	795	36,55	31,78	3.637.500	1.059,41	6,00
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				795	37					1059,41	6,00
PREDIKAT KINERJA																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah					Sangat Tinggi	Sangat Rendah

			Program Pengelol aan Persamp ahan	Presen tase sampa h yang tertan gani	%	8 1, 2 6	5.229. 559.4 50	0 %	-	82,3 7%	4.219 .060. 900	18 ,2 2	768.7 16.50 0	40 ,6 2	954.3 98.33 3					58, 84	1.723. 114.83 3,00	0,23	40, 84	58, 84	1.723. 114.83 3,00	0,23	32,9 5
			Pengelol aan Sampah	Jumla h sampa h yang dikelo la	to n	2 5. 8 1 1	5.229. 559.4 50	-	-	25.1 80,6	4.21 9.06 0.90 0	1 8, 2 2	768.7 16.50 0	40 ,6 2	954.3 98.33 3					58, 84	1.723. 114.83 3	0,23	40, 84	58 ,8 4	1.723. 114.8 33	0,23	32,9 5
			Penyusu nan Rencana , Kebijaka n dan Strategi Daerah Pengelol aan Sampah Kab/Kot a Pengelol aan Sampah Kabupat en/Kota	Jumla h dokum en pengel olaan persa mpaha n	D O K	1	257.6 35.22 0	-	-	1	18.46 6.000	50 ,4 0	9.307. 500	37 ,7 8	3.748. 500					88, 18	13.056 .000	8.81 8	70, 70	88, 18	13.056 .000	8.81 7,85	5,07
			Penanga nan Sampah dengan Melakuk an Pemilaha n, Pengum pulan,Pe ngangku tan,Peng olahan, Pemrose san Akhir Sampah di TPA/TPS T/SPA		to n	2 5. 8 1 0, 6 0	2.819. 938.0 00			25.1 80,6	3.386 .875. 000	18 ,8 7	638.9 55.00 0	41 ,9 0	780.1 20.00 0					60, 76	1.419. 075.00 0	0	41, 90	60, 76	1.419. 075.00 0	0,24	50,3 2

	sm e apa rat ur		DAERA H KABUPA TEN/KO TA																							
				Rata - rata lama pegaw ai menda patka n pendid ikan dan pelatih an	%	2 0 jpl	468.0 00.00 0	0		20 jpl	-			-					-	-	-	-	-	-	-	-
			Adminis trasi Keuanga n Perangk at Daerah		%	1 0 0	10.58 7.379. 571	0		100 %	2.47 8.72 2.29 4	2 7, 9 6	693.0 77.55 3,00	45 ,8 8	444.0 72.70 2				73, 84	1.137. 150.25 5,00	321, 03	45, 88	73 ,8 4	1.137. 150.2 55,00	434, 34	10,7 4
			Penyedia an Gaji dan Tunjang an ASN		Or an g	1 7	10.58 7.379. 571	0		23	2.478 .722. 294	27 ,9 6	693.0 77.55 3	45 ,8 8	444.0 72.70 2				73, 84	1.137. 150.25 5	321	45, 88	73, 84	1.137. 150.25 5	434, 34	10,7 4
			Penyedia an Administ rasi Pelaksan aan Tugas ASN		La p	1 2		0																		
			Pelaksan aan Penatau sahaan dan Pengujia n/Verifik asi Keuanga n SKPD		D ok	1 2		0																		

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Lap	1																				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD		Lap	12																				
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Lap	1																				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	321,03	45,88						434,34	10,74	
PREDIKAT KINERJA																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah						Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah staf yang mengikut	%	100	468.000.000	-	0	2	-	0	0,00	0	-			-	-	-			-	-	-	-

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	3	309.435.350		3	26.872.000	0	-	-	-				-	-	0	-	-	-	-	-	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	4	28.396.838		4	3.892.800	0	-	3,93	153.000				3,93	153.000	98	3,93	3,93	153.000	98,26	0,54	
			Fasilitasi kunjungan tamu	Periodisasi penyediaan kebutuhan makan dan minuman dalam rangka fasilitas tamu	bulan	12	19.892.273		12	4.010.300	0	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Org	85	682.418.222		223	140.321.000	25,189708	35.346.450	20,00	20.283.420				45,19	55.629.870	20	39,64	45,19	55.629.870	53,16	8,15	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			20,55	37,63					75,71	4,35

PREDIKAT KINERJA																			Sangat Rendah	Sangat Rendah					Tinggi	Sangat Rendah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perse ntase keterp enuha n layana n jasa penun jang urusa n kanto r	%	100	526.376.584	0	0	100	106.864.900	10	10.608.000	16,65	7.183.000				16,65	17.791.000,00	390,19	44,92	51,84	17.791.000,00	780,38	9,50
			Penyedia an jasa surat menyura t	jumla h surat	S ur at	150	150.376.584	-	-	4	31.394.900	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyedia an jasa komunik asi, sumber daya air dan listrik	Period esasi jasa komu nikasi, air dan listrik k	b ul an	12	100.000.000	-	-	24	25.000.000	10,0	2.508.000		2.283.000				10,03	4.791.000	42	19,16	10,03	4.791.000	83,60	4,79
			Penyedia an jasa pelayana n umum kantor	Jumla h tenaga Non PNS yang meneri ma gaji untuk tiap bulan nya selam a 1 tahun	Or g	6	276.000.000	-	-	12	50.470.000	16,0	8.100.000	25,76	4.900.000				41,81	13.000.000	348	25,76	41,81	13.000.000	696,78	4,71
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			12,9,6	16,65					390,19	4,75

																				0								
PREDIKAT KINERJA																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah						Sangat Tinggi	Sangat Rendah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	%	100	401.785.000	0	0	100	83.062.000	23	19.007.748,00	24,52	16.333.955				47,41	35.341.703,00	5.021,49	123,34	110,71	35.341.703,00	7.375,30	40,83		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajakn ya tiap tahun nya	UNIT	23	190.625.000	-	-			0	-						0	-	0	-	-		0	-		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Unit	2	113.125.000		0	32	62.815.000	30,25987	19.007.748		7.931.711				30,26	26.939.459	95	42,89	30,26	26.939.459	1.512,99	23,81		

			Pemeliha raan Peralata n dan Mesin Lainnya	Jenis peralat an kantor yang diperb aiki	Je ni s	3	47.91 0.000	-	-	21	8.400 .000	0		32 ,7 4	2.750. 000					32, 74	2.750. 000	156	32, 74	32, 74	2.750. 000	1.09 1,27	5,74
			Pemeliha raan/Re habilitas i Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya	Jumla h gedun g kantor yang dipelih ara	ge d u ng	1	50.12 5.000	-	-	1	11.84 7.000	0	0	47 ,7 1	5.652. 244					47, 71	5.652. 244	4.77 1	47, 71	47, 71	5.652. 244	4.77 1,03	11,2 8
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				20 5,0 2	42,55					245 8,43	13,6 1
PREDIKAT KINERJA																				San gat Tin ggi	Sangat Renda h					Sang at Ting gi	Sang at Rend ah

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (KEGIATAN 1 S.D KEGIATAN 11)																			53 0,7 67 93 37	30,87						116 2,34	6,22
Predikat Kinerja																			San gat Tin ggi	Sangat Renda h						Sang at Ting gi	Sang at Rend ah

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

N o	Sas ara n	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang	Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Sd 2025	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat
--------	-----------------	--	--	--	---	--	---------------------------------	--	---	--

					Renstra Perangkat Daerah)		Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				I		II		III		IV		Di Evaluasi				Daerah Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13=6+12)		(14=13/5X 100%)	
				SAT UAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	R p.	K	R p.	K	Rp.	K	Rp.		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	TINGKAT PERAN PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI		21, 30 %	1.652. 002.30 2	17 %	6.246. 082.40 2	13, 30 %	2.883.05 8.800	0,0 0%	-		57.92 8.144					0	57.928. 144	17,0 0%	6.304. 010.54 6	80%	120 %
			TINGKAT PARTISIPA SI PEMUDA DALAM ORGANISA SI KEPEMUD AAN DAN ORGANISA SI SOSIAL KEMASYA RAKATAN		1,5 4%		0,7 4%	-	1,1 2										0	-	0,74 %	-	48%	
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase penyadara n, pemberday aan dan pengemba ngan Pemuda dan Kepemuda an terhadap pemuda pelopor Kabupaten / Kota Wira Usaha Muda	Pers en	10 0	1.415. 399.70 2	10 0%	6.246. 082.40 2	10 0%	2.883.05 8.800				57.92 8.144					0	57.928. 144	1	6.304. 010.54 6	1%	120 %

			Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten Kota																				
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	570	122.292.500	0	-	-	-	0	-						0	-	0	-	0%	0%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten /Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	900	350.948.000	160	98.816.500	80	94.623.000	0	-			57.928.144			0	57.928.144	160	156.744.644	18%	45%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten /Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	360	232.406.201	80	96.948.000	40	52.454.300	0	-						0	-	80	96.948.000	22%	42%

		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	600	100.610.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0%	0%
		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RA D Tingkat	Dokumen	4	506.944.324	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0%	0%

			Kabupaten /Kota																				
		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten /Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	9	1.348.444.787	0	-	-				-				0	-	0	-	0%	0%	
		Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang	50	95.000.000	3440	5.280.994.100	1972	2.735.981.500	0	-	-				0	-	3440	5.280.994.100	120%	120%	
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten /Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang	200	100.000.000	0	-	-				-				0	-	0	-	0%	0%	
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten /Kota yang Diseleksi sebagai	Orang	210	4.000.000.000	70	769.323.802	-				-				0	-	70	769.323.802	33%	19%	

			Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan																			
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten / kota	Persen	100	236.602.600	-										0	-	0	-	0%	0%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	200	133.000.000	0	-									0	-	0	-	0%	0%
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	4	103.602.600	2,00	180.000.000	2	140.065.000							0	-	2	180.000.000	50%	120%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	0	26			25	41
PREDIKAT KINERJA																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah

		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTA SE KENAIKAN RAIHAN PRESTASI PADA EVENT OLAHRAG A PROVINSI DAN NASIONAL		10 0%	2.393.206.196	10 0%	3.872.927.100	10 0%	2.443.122.509	0%	750.000.000	754.160.000					0	1.504.160.000	100 %	5.377.087.100	100 %	225 %
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten /Kota	Pers en	10 0	614.102.643	10 0%	-		591.841.209			900.000					0	900.000	100 %	900.000	1%	0%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit		-	0	-		0		-						0	-	0%	-		

		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	4	60.000.000	0	-		0	-						0	-	0%	-	0%	0%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	5	554.102.643	0	-	1	100.105.809	0	-					0	-	0%	-	0%	0%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			1				1	491.735.400				900.000			0	900.000	0%	900.000	0%	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten / Kota	Persen	100	624.784.696	0	258.514.850	100%	304.566.300				3.260.000			0	3.260.000	0%	261.774.850	0%	42%
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single	Dokumen	5	384.784.696	1	41.602.000		98.384.600							0	-	100%	41.602.000	20%	11%

			Event Tingkat Kabupaten /Kota																				
		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten /Kota	Dokumen	4	150.00 0.000	0	216.91 2.850	1	206.181. 700				3.260. 000				0	3.260.0 00	0%	220.17 2.850	0%	147 %
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi tingkat Daerah Provinsi	Persen	10 0	423.07 0.591	10 0%	16.781 .500		46.428.5 00				-				0	-	100 %	16.781 .500	1%	4%
		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	100	50.000. 000	0	-										0	-	0%	-	0%	0%
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelata	100	35.000. 000	0	-										0	-	0%	-	0%	0%
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten /Kota yang	Orang	500	150.00 0.000	0	-										0	-	0%	-	0%	0%

			Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan																				
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten /Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	92	110.000.000	0	-	15	11.421.000	0	-						0	-	0%	-	0%	0%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	5	78.070.591	3	16.781.500	1	35.007.500	0	-						0	-	300%	16.781.500	60%	21%
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Kegiatan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga	Persen	100	256.248.266	100%	3.597.630.750	100%	1.500.286.500	100%	750.000.000		750.000.000				100%	1.500.000.000	200%	5.097.630.750	2%	1989%
		Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen	5	85.000.000	2	20.073.750										0	-	200%	20.073.750	40%	24%
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	29	75.000.000	1	3.577.557.000	1	1.500.286.500	1	750.000.000		750.000.000				1	1.500.000.000	200%	5.077.557.000	7%	120%

		Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	53.532.000	0	-										0	-	0%	-	0%	0%
		Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Organisasi	15	42.716.266	0	-										0	-	0%	-	0%	0%
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Persen	100	475.000.000	0	-										0	-	0%	-	0%	0%
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	9	85.000.000	0	-	1									0	-	0%	-	0%	0%
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	8	110.000.000	0	-										0	-	0%	-	0%	0%

		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	4	85.000.000	0	-										0	-	0%	-	0%	0%
		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dokumen	5	140.000.000	0	-										0	-	0%	-	0%	0%
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	5	55.000.000	0	-										0	-	0%	-	0%	0%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		0	0			9	108%
PREDIKAT KINERJA																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTA SE LEMBAGA KEPRAMUKAAN YANG AKTIF				100%	950.130.000	100%	400.170.000								0	-	100%	950.130.000		

		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan	persen	100	645.089.741	100%	950.130.000		400.170.000								0	-	100%	950.130.000	1%	147%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	9	30.167.369	0	-										0	-	0%	-	0%	0%
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	20	37.000.000	0	-										0	-	0%	-	0%	0%
		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	410	330.398.006	153	950.130.000	50	400.170.000								0	-	1530%	950.130.000	37%	288%
		Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Unit	3	112.724.366	0	-										0	-	0%	-	0%	0%

		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Dokumen	8	55.000.000	0	-										0	-	0%	-	0%	0%
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	8	20.000.000	0	-										0	-	0%	-	0%	0%
		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	18	20.000.000	0	-										0	-	0%	-	0%	0%
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	6	39.800.000	0	-										0	-	0%	-	0%	0%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						4	48
PREDIKAT KINERJA																						Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Urusan Pemerintahan Pilihan																					
		Urusan Pemerintahan Bidang pariwisata																					

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Barru				3	9.315. 892.12 4	3 Lev el	##### #####	2 Lev el	782.9 56.03 8						-	782.95 6.038	300, 00%	##### ##### ##		
		Rata-rata lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							20 JP									-	-	0,00 %	-		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusuna n dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan		10 0	21.503 .576.9 40	94 00 %	8.004. 193.83 9	32	##### #####	33 %	736.8 77.53 3						0	736.87 7.533	9433 ,33%	8.741. 071.37 2	94,3 3%	40, 65 %
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Oran g	32	21.503. 576.94 0	94	8.004. 193.83 9	32	##### #####	30	736.8 77.53 3		##### ##### #				30	2.160.5 32.134	1240 0,00 %	##### ##### ##	387, 50%	47, 27 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN		14 0	457.10 4.000	5	63.613 .250	4	17.379.0 00								-	-	500, 00%	63.613 .250	3,57 %	13, 92 %
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Oran g	140	457.10 4.000	5	63.613 .250	4	17.379.0 00								-	-	500, 00%	63.613 .250	3,57 %	13, 92 %

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100	2.002.331.500	100%	869.585.575		346.472.700	33%	14.309.500		59.811.850				0	74.121.350	133,33%	943.706.925	1,33%	47,13%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	61.051.000		3.978.300	1	-				-				-	-	0,00%	3.978.300	0,00%	6,52%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	87	91.576.500	2	3.978.300	1	1.166.700				59.811.850				-	59.811.850	200,00%	63.790.150	2,30%	69,66%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	1.849.704.000	36	861.628.975	12	345.306.000	3	14.309.500						3	14.309.500	3900,00%	875.938.475	65,00%	47,36%
		Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			135	967.586.000	131	525.865.979		-				-				-	-	1310,00%	525.865.979	97,04%	54,35%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	110	295.622.500	115	402.726.400	22	-								-	-	1150,00%	402.726.400	104,55%	136,23%

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	25	671.96 3.500	16	123.13 9.579	6	-							-	-	1600 ,00%	123.13 9.579	64,0 0%	18, 33 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor		10 0	1.025. 652.50 0	10 0%	442.11 2.710		204.371. 494	### ###	31.76 9.005	73.79 7.039				0	105.56 6.044	133, 33%	547.67 8.754	1,33 %	53, 40 %
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapo ran	60	575.90 0.000	36	266.75 0.500	12	109.385. 500	3	14.20 0.000	35.50 0.000				3	49.700. 000	3900 ,00%	316.45 0.500	65,0 0%	54, 95 %
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapo ran	60	449.75 2.500		175.36 2.210	12	94.985.9 94	3	17.56 9.005	38.29 7.039				3	55.866. 044	300, 00%	231.22 8.254	5,00 %	51, 41 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara							31.280.0 00			187.1 54				-	187.15 4	0,00 %	187.15 4		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Unit	35	170.94 2.800	24	43.721 .767	11	21.900.0 00	1	187.1 54	187.1 54				1	374.30 8	2500 ,00%	44.096 .075	71,4 3%	25, 80 %

		Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																				
		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan														-	-	0,00 %	-			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	61.051.000	48	20.150.000	30	9.380.000							-	-	4800,00%	20.150.000	192,00%	33,01 %	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	179.160.000	1	225.364.500	1	-							-	-	100,00%	225.364.500	25,00%	125,79 %	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		91	41.236.000			1	-							-	-	0,00 %	-	0,00 %	0,00 %	

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				0	26		65	41
PREDIKAT KINERJA																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sedang	Sangat Rendah
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTA SE PENINGKATAN JUMLAH PAD PARIWISATA		2,00%	27.716 .806.943	2%	517.19 9.494	2%	55.051.900	1,03%	-	1,03%	-	###	-	###	-	52%	0%	2,00%	517.19 9.494	100,00%	1,87%
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola dan dikembangkan				0	-											-	-	0	-		
		Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota	Dokumen	5	915.765.000	5	-		-									-	-	5	-	100,00%	0,00%
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,	Lokasi	8	16.799.188.357	0	-		-									-	-	0	-	0,00%	0,00%

			Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)																				
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	20	36.630.600	0	-	-									-	-	0	-	0,00 %	0,00 %
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola dan berkembang		4	11.379.771.503	7	506.077.494	-									-	-	7	506.077.494	175,00%	4,45%
		Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	0	2.836.008.517	0	-	-									-	-	0	-		
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	7	482.000.000	1		1	-								-	-	1	-	14,29%	0,00%
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang	Lokasi	20	649.033.586	4	22.502.400	4	-								-	-	4	22.502.400	20,00%	3,47%

			g, Pemantapan, Revitalisasi)																			
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	40	7.376.098.800	7	483.575.094	13	32.642.400							-	-	7	483.575.094	17,50%	6,56%
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Dok \	20	36.630.600	0	-									-	-	0	-	0,00%	0,00%
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang direkomen dasikan	Dokumen	1	326.460.000	0	11.122.000									-	-	0	11.122.000	0,00%	3,41%
		Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota		60	79.615.000	0	-									-	-	0	-	0,00%	0,00%
		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	Laporan	5	246.845.000	1	11.122.000	1	22.409.500							-	-	1	11.122.000	20,00%	4,51%

			dan Pengawasa n Usaha Pariwisata																				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					37	2	
PREDIKAT KINERJA																					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTA SE PERTUMB UHAN JUMLAH WISATAAW AN	pers en	6,0 9%	2.099. 916.82 9	54, 8	388.05 7.365	7,6 4	404.458. 000								0	-	6,00	388.05 7.365	985 2,22 %	18, 48 %
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dilaksanak an	kali	5	2.099. 916.82 9	2	388.05 7.365		404.458. 000								0	-	2,00	388.05 7.365	40,0 0%	18, 48 %
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokume n	10	406.60 0.000	2	70.040 .750	2	80.310.0 00	2	17.09 7.000		1.250. 000				2	18.347. 000	4,00	88.387 .750	40,0 0%	21, 74 %

		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	37	1.658.936.829	5	318.016.615	6	324.148.000	4	196.918.400		800.000					4	197.718.400	9,00	515.735.015	24,32%	31,09%
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				0	-											0	-	0,00	-		
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	20	34.380.000	0	-											0	-	0,00	-	0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							40	17
PREDIKAT KINERJA																							Sangat Rendah	Sangat Rendah
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PERSENTA SE PENINGKATAN PELAKU EKRAF YANG MEMILIKI HAKI	%	100	487.777.400	0	0		-		-		-		-		-	-	-				
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekraf yang berkembang	Unit	20	487.777.400	0	-		-		-		-		-		-	-	-				

		Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaata n Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dok ume n	200	457.14 6.800	0	-				-		-		-		-		-				
		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengemban gan Ekonomi Kreatif	Dok ume n	1	-	0	-				-		-		-		-		-				
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengemban gan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dok ume n	20	30.630. 600	0	-				-		-		-		-		-				

		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PENINGKATAN TENAGA KERJA SEKTOR PARIWISATA DAN EKRAF	%	65	4.436.454.068	1	625.974.854	12 %	169.404.000								0	24.175.300	1,00	650.150.154	1,54 %	14,65 %		
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	Orang	720	3.612.265.568		501.504.854										0	24.175.300	0,00	525.680.154	0,00 %	14,55 %		
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	240	1.709.428.000	80	249.073.000										0	-	80,00	249.073.000	33,33 %	14,57 %		
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	200	854.714.000	40	126.604.354	30	84.627.000								0	-	40,00	126.604.354	20,00 %	14,81 %		

		Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	80	187.304.468	0	-	15	99.409.300								0	24.175.300	0,00	24.175.300	0,00%	12,91%
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	200	824.188.500	40	125.827.500										0	-	40,00	125.827.500	20,00%	15,27%
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	20	36.630.600	0	-										0	-	0,00	-	0,00%	0,00%
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif (Ekraf) yang mendapatkan peningkatan kualitas SDM	Orang	360	824.188.500	0	124.470.000		84.777.000								0	-	0,00	124.470.000	0,00%	15,10%

		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang g	360	824.188.500	0	124.470.000	30	84.777.000								0	-	0,00	124.470.000	0,00%	15,10%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						12	11
PREDIKAT KINERJA																						Sangat Rendah	Sangat Rendah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				0	39	36	29
PREDIKAT KINERJA																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Faktor Pendorong keberhasilan Kinerja : Inisiatif, kreatif dan kerja sama tim yang baik																							
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Kurang inisiatif, kualitas sdm yang belum memadai																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana tidak dilaksanakan nanti ditriwulan II																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Penyusunan perencanaan lebih baik dan tepat waktu																							

DINAS PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2021s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran <u>RENJA</u> PD yang Di Evaluasi 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025(%)		
											Pada Triwulan I		Triwulan II									
	2	1	2		3		4		5		6		7		10 =6+7+8+9		11 = 10/5 x 100%		12=4+10		13= 12/3 x 100%	
			Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
	3.25	BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																				
I	3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perikanan	level	3	14.956.257.648	-	2.850.503.350		3.091.148.847		704.837.064		794.679.082	-	1.499.516.146	-	48,51	-	4.350.019.496	-	29,08
1	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan	PersentasePenyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-	%	100	12.545.348.098	28	2.447.055.495	100	2.856.063.747	25	669.761.872	25	710.640.550	50	1.380.402.422	50,00	48,33	100	3.827.457.917	100,00	30,51

			undangan																			
1 · 1	3.25.01. 2.02.000 1	Penyedi aan Gaji dan Tunjang an ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bula n	14	12.545.3 48.098	28	2.447.0 55.495	14	2.856.0 63.747	4	669.7 61.87 2	4	710.64 0.550	8	1.380. 402.42 2	57,1 4	48,33	36	3.827. 457.91 7	257 ,14	30,5 1
3	3.25.01. 2.06	Admini strasi Umum Perangk at Daerah	Persentase Keterpenuh an layanan Administra si UmumPera ngkat Daerah	Pers en	60	1.447.05 4.287	10 0	211.283 .324	100	63.024. 600	25	14.31 6.200	25	34.896 .550	50	49.212 .750	50,0 0	78,08	150	260.49 6.074	250 ,00	18,0 0
3 · 1	3.25.01. 2.06.000 2	Penyedi aan Peralata n dan perleng kapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	unit	30	23.418.1 81	3	4.260.0 00	3	4.493.0 00	1	230.0 00	1	3.430. 000	2	3.660. 000	66,6 7	81,46	5	7.920. 000	16, 67	33,8 2
3 · 2	3.25.01. 2.06.000 9	Penyelee nggaraa n Rapat Kooordi nasi dan konsult asi SPKD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	3.17 0	1.402.81 9.945	29 8	203.049 .640	280	54.543. 800	45	14.08 6.200	32	27.535 .550	77	41.621 .750	27,5 0	76,31	375	244.67 1.390	11, 83	17,4 4
4	3.25.01. 2.07	Pengad aan Barang Milik Daerah Penunja ng Usaha Pemer intah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pers en	100	118.138. 803	9	63.960. 000	100	25.311. 300	-	-	50	11.188 .800	50	11.188 .800	50,0 0	44,20	59	75.148 .800	59, 00	63,6 1

		Daerah																				
4 · 1	3.25.01. 2.07.001 1.	Pengada an sarana dan Prasara na Penduk ung Gedung Kantor atau bangun an lainnny a	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	unit	30	118.138. 803	9	63.960. 000	23	25.311. 300	-	-	1	11.188 .800	1	11.188 .800	4,35	44,20	10	75.148 .800	33, 33	63,6 1
5	3.25.01. 2.08	Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemer intahan Daerah	Persentase keterpenuh an layanan Jasa Penunjang Urusan kantor	pers en	100	519.198. 478	10 0	83.585. 100	100	100.41 0.200	25	11.64 8.500	25	33.154 .700	50	44.803 .200	50,0 0	44,62	150	128.38 8.300	150 ,00	24,7 3
5 · 1	3.25.01. 2.08.000 1	Penyedi aan Jasa Surat Menyur at	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	sura t	4.80 0	224.844. 787	48 0	39.874. 400	12	40.534. 200	3	-	3	17.077 .200	6	17.077 .200	50,0 0	42,13	486	56.951 .600	10, 13	25,3 3
5 · 2	3.25.01. 2.08.000 2.	Penyedi aan jasa komuni kasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bula n	72	90.897.0 54	12	11.510. 500	12	11.676. 000	3	4.253. 500	3	3.147. 500	6	7.401. 000	50,0 0	63,39	18	18.911 .500	25, 00	20,8 1

5 · 3	3.25.01. 2.08.000 3.	Penyedi aan Jasa Peralata n dan Perlengk apan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Jeni s	15	53.157.5 53	3	6.400.2 00	12	7.400.0 00	3	595.0 00	3	4.330. 000	6	4.925. 000	50,0 0	66,55	9	11.325 .200	60, 00	21,3 0
5 · 4	3.25.01. 2.08.000 4	Penyedi aan Jasa Pelayan an Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bula n	72	150.299. 084	4	25.800. 000	12	40.800. 000	3	6.800. 000	3	8.600. 000	6	15.400 .000	50,0 0	37,75	10	41.200 .000	13, 89	27,4 1
6	3.25.01. 2.09	Pemelih araan barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerit ntahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah an daerah yang dipelihara	pers en	100	326.517. 982	10 0	44.619. 431	100	46.339. 000	25	9.110. 492	25	4.798. 482	50	13.908 .974	50,0 0	30,02	150	58.528 .405	150 ,00	17,9 3
6 · 1	3.25.01. 2.09.000 1	Penyedi aan Jasa Pemelih araan Biaya Pemelih araan dan pajak Kendara an Peroran gan Dinas atau Kendara an Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	unit	62	258.441. 202	17	42.644. 431	17	44.375. 000	3	9.110. 492	#REF !	2.839. 482	3	11.949 .974	17,6 5	26,93	20	54.594 .405	32, 26	21,1 2

		Jabatan																				
6 2	3.25.01. 2.09.000 9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Gedung lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	15.008.7 00	1	1.975.0 00	1	1.964.0 00	-	-	1	1.959. 000	1	1.959. 000	100	99,75	2	3.934. 000	200 ,00	26,2 1
II	3.25.03	Program Pengem- bangan Perikan- an Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	213 98,6 4 Ton	2.774.76 8.562	24	99.517. 600	21.08 2	74.306. 800	3.36 2	6.264. 200	6.53 5	4.801. 880	9.89 7	11.066 .080	46,9 4	14,89	9.89 7	110.58 3.680	### ### #	3,99
1	3.25.03. 2.01	Pengelolaan penangkapan ikan diwilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat dilaksana- kan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Persentase kelompok yang mendapatk- an sarana dan Prasarana penangk- ap ikan	%	29	1.471.37 1.000	2	49.384. 500	7	44.576. 700	-	5.764. 200	-	2.476. 540	-	8.240. 740	-	18,49	2	57.625 .240	8,3 3	3,92

1 .	2	3.25.03. 2.01.000 1	Penyedi aan Data dan Informa si sumber daya ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten /Kota yang Tersedia	Dok	10	314.775. 202	8	6.652.1 00	1	13.578. 700	Tri. 1	5.764. 200	Triw ulan II	1.414. 270	Triw ulan II	7.178. 470	### ### ##	52,87	### ### ##	13.830 .570	### ### #	4,39
		3.25.03. 2.01.02	Penyedi aan Prasara na Usaha Perikan an Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	48	855.808. 032	10	42.732. 400	10	30.998. 000	-	-	-	1.062. 270	-	1.062. 270	-	3,43	10	43.794 .670	20, 83	5,12
	2	3.25.03. 2.02	Pember dayaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatk an Pembinaan, Pendampin gan dan pengemban gan Usaha	klp	50	1.303.39 7.562	22	50.133. 100	6	29.730. 100	-	500.0 00	-	2.325. 340	-	2.825. 340	-	9,50	22	52.958 .440	44, 00	4,06
		3.25.03. 2.02.01	Pengem bangan Kapasit as Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasn ya	Ora ng	120	379.291. 911	20	48.761. 200	20	28.432. 400	-	500.0 00	3	1.528. 970	3	2.028. 970	15,0 0	7,14	23	50.790 .170	19, 17	13,3 9
2 .	1	3.25.03. 2.02.000 3	Pelaksa naan Fasilata s Pemben tukan dan Pengem bangan Kelemba gaan Nelayan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentuk an dan Pengemban gan Kelembagaa nnya	Klp	36	290.664. 751	19	1.371.9 00	6	1.297.7 00	-	-	3	796.37 0	3	796.37 0	50,0 0	61,37	22	2.168. 270	61, 11	0,75

		Kecil																				
3	3.25 . 04	PROGR AM PENGE LAAN PERIKA NAN BUDIDA YA	produksi Perikanan Budidaya	Ton	6.98 7	1.392.30 0.000	44	730.702 .678	6.715	263.37 3.830	1.58 6	3.223. 219	1.75 5	2.921. 692	3.34 1,8	6.144. 911	49,7 6	2,33	3.38 6	736.84 7.589	48, 46	52,9 2
2	3.25 . 04.2.02	Pember dayaan Pembud i Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudida ya ikan yang mendapatk an Pembinaan, Pendampin gan dan pengemban gan Usaha	KLP	66	534.090. 402		1.258.0 00	12	9.862.5 50	-	200.0 00	-	1.376. 465	-	1.576. 465	-	15,98	-	2.834. 465	-	0,53
2 . 1	3.25 . 04.2.02. 0001	Pengem bangan Kapasit as Pembud idaya ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengemban gan Kapasitas	KLP	36	510.570. 201		600.000	6	8.464.8 50	-	-	-	1.080. 095		1.080. 095	-	12,76	-	1.680. 095	-	0,33
2 . 2	3.25 . 04.2.02. 0002	Pelaksa naan Fasilitas i Pemben tukan dan Pengem bangan Kelemba gaan Pembud	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentuk an dan Pengemban gan Kelembagaa n	KLP	30	23.520.2 01	2	658.000	6	1.397.7 00	-	200.0 00	1	296.37 0	1	496.37 0				1.154. 370	-	4,91

		i Daya Ikan Kecil																				
3	3.25 . 04.2.03.	Penerbi tan Tanda Daftar bagi Pembud i Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupa ten/Kot a	Jumlah Tanda daftar bagi pembudida ya ikan kecil (TDPIK)	Dok ume n	50	76.206.0 00	12	3.353.0 00	10	1.740.0 00	-	300.0 00	7	119.88 0	7	419.88 0	70,0 0	24,13	19	3.772. 880	38, 00	4,95
3 . 1	3.25 . 04.2.03. 0002	Pelayan an Penerbit an Tanda Daftar bagi Pembud i Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupat en/Kota	Jumlah Rekomenda si Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenanga n Kabupaten /Kota	Dok ume n	50	76.206.0 00	12	3.353.0 00	10	1.740.0 00	-	300.0 00	7	-	7	300.00 0	70,0 0	17,24	19	3.653. 000	38, 00	4,79

4	3.25 . 04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidayaan ikan yang mendapatkan pengelolaan usaha	KLP	80	7.851.49 7.749	19	726.091 .678	10	251.77 1.280	-	2.723. 219	-	1.425. 347	-	4.148. 566	-	1,65	19	730.24 0.244	23, 75	9,30
4 . 1	3.25 . 04.2.04. 0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Dokumen	5	104.080. 803	1	5.140.6 00	1	4.078.0 50		260.2 95	Tri II	1.055. 885	Triwulan II	1.316. 180	### ### ##	32,27	### ### ##	6.456. 780	### ### #	6,20
4 . 3	3.25 . 04.2.04. 0003	Penjaminan Keterse- diaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam satu Daerah Kabupaten	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Unit	700	5.666.22 2.496	16	523.715 .928	20	138.44 7.960		639.3 60		133.88 4	-	773.24 4	-	0,56	16	524.48 9.172	2,2 9	9,26
4 . 4	3.25 . 04.2.04. 0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam satu Daerah Kabupaten	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan	%	25	122.753. 201	16	425.000	5	773.58 0	-	65.49 0	-	51.042	-	116.53 2	-	15,06	16	541.53 2	64, 00	0,44

		en	Kesehatan Ikan																			
4 · 5	3.25 . 04.2.04. 0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	%	200	26.020.201	40	1.860.000	40	1.070.000	-	65.490	-	-	-	65.490	-	6,12	40	1.925.490	20,00	7,40
4 · 6	3.25 . 04.2.04. 0006	Perencanaan Pengembangan Pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha	50	793.520.016	1	83.422.850	10 (1Dokumen)	6.806.740	-	1.261.604	-	184.536	-	1.446.140		21,25	1	84.868.990	2,00	10,70
4 · 7	3.25 . 04.2.04. 0007	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembeudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Paket	50	1.138.901.032	40	111.527.300	50	100.594.950	-	430.980	-	-	-	430.980	#REF!	0,43	#REF!	111.958.280	#REF!	9,83

4	3.25 . 06	PROGR AM PENGO LAHAN DAN PEMES ARAN HASIL PERIKA NAN	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan	ton	1.49 4	1.319.49 8.053	3.1 85	124.211 .795	1.464	127.04 8.660	123, 8	2.364. 860	320, 1	3.646. 100	444	6.010. 960	30,3 2	4,73	3.62 8	130.22 2.755	242 ,86	9,87
1	3.25 . 06.2.01	Penerbit an Tanda Daftar Usaha Pengola han Hasil Perikan an Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Daftar usaha Pengolahan yang diterbitkan	%	5	35.988.4 00	-	7.047.9 00	5,00	3.884.5 80	-	1.483. 520	-	1.404. 000	-	2.887. 520	-	74,33	-	9.935. 420		27,6 1
1 : 1	3.25 . 06.2.01. 0001	Penyedi aan Data dan Informa si Usaha Pemasar an dan Pengola han Hasil Perikan an dalam 1 (satu) Daerah Kabupat en/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarka n Skala Usaha dan Risiko	Dok ume n	5	35.988.4 00	-	7.047.9 00	1,00	3.884.5 80	Tri. 1	1.483. 520	Tri II	1.404. 000	Tri II	2.887. 520	### ### ##	74,33		9.935. 420		27,6 1

2	3.25 . 06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil	Persentase usaha skala mikro dan kecil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengolahan dari keseluruhan umkm perikanan	%	-	127.118.000	5	6.990.500	4,83	5.553.080	-	65.490	-	117.000	-	182.490	-	3,29	5	7.172.990		5,64
2 : 1	3.25 . 06.2.02. 0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar Pada usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan hasil Produksi Perikanan	klp	-	127.118.000	3	6.990.500	3,00	5.553.080	-	65.490	-	117.000	-	182.490	-	3,29		7.172.990		5,64

3	3.25 . 06.2.03	Penyedi aan dan Penyalu ran Bahan Baku Industri Pengola han Ikan dalam satu Daerah Kabupat en	Jumlah Bahan Baku olahan perikanan (TON)	Ton	3.34 1	1.156.39 1.653	3.3 87	110.173 .395	3.284	117.61 1.000	-	815.8 50	-	2.125. 100	-	2.940. 950	-	2,50	3.38 7	113.11 4.345	101 ,37	9,78
3 . 1	3.25 . 06.2.03. 0001	Peningk atan Keterse diaan Ikan untuk Komsu msi dan Usaha Pengola han dalam satu Daerah	Jumlah Peningkata n Ketersediaa n Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kg/ Kapi ta		2.228.67 8.280	45, 99	110.173 .395	46,15	31.143. 600	-	684.8 70	-	-	-	684.87 0	-	2,20	46	110.85 8.265	#DI V/0 !	4,97
3 . 2	3.25 . 06.2.03. 0002	Pemberi an fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikan an Skala Mikro dan Kecil dalam satu Daerah Kabupat en	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yang Terfasilitasi	klp	25	933.523. 373	9	78.679. 895	13	86.467. 400	-	130.9 80	-	2.125. 100	-	2.256. 080	-	2,61	26	80.935 .975	104 ,00	8,67
	\																	2,78			50,	7,71

														69	
	PREDIKAT KINERJA														
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				3.555.878.137	#RE F!	716.689.343		806.048.754		1.522.738.097		42,82		
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 4)										Tinggi	sedang		Sedang	Kurang
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Sumber daya Manusia														

KECAMATAN TANETE RIAJA

Ko de Rek eni ng	Sasar an	Bidang Urusan Pemerinta han, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/S ub Kegiatan)		Target Renstra Pd Pada Tahun 2021 S/D 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pd Sampai Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Pd Tahun Berjalan Yang Di Evaluasi (2025) Yang Di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024 (%)		Unit Pd Pena nggu ng Jawa b
											I		II								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 X 100%		15
			Uraian	Satua n	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Meni ngkat nya Kuali tas	PROGRAM PENUNJA NG URUSAN PEMERIT	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan Tanete Riaja	Level	1 0 0	17.626.277 .250	67 %	11.748. 050.923	1 0 0	3.137.84 1.514	25 %	710.11 6.143	25 %	728.792 .119	20 %	1.438.9 08.262	60 %	12.953.8 92.906	60 %	73	Kec. Tane te Riaja

	Penerapan/Implementasi SAKIP	AHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan																	
	pada Kantor Kecamatan Tanete Riaja	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	190	15.555.870.430	76	10.395.751.852	38	2.828.432.342	38	678.165.408	38	691.046.433	38	1.369.211.841	114	11.764.963.693	60	75,63
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	190	15.555.870.430	114	10.395.751.852	38	2.828.432.342	38	678.165.408	38	691.046.433	38	1.369.211.841	152	11.764.963.693	80	75,63
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN		100%	270.000.000	7	47.473.000	2	4.598.000	0	-	0	-	0	-	7	47.473.000	13	17,58
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		55	270.000.000	7	47.473.000	2	4.598.000	0	-	0	-	-	-	7	47.473.000	12,73	17,58
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100%	724.990.570	50%	363.643.457	39	143.519.140	21	13.770.600	0	19.353.100	21	33.123.700	2150%	396.767.157	60,00	54,73

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan		25	12.199.840	15	5.648.80 0	2	1.457.70 0	0	-	0	531.100	-	531.100	15	6.179.900	60,0 0	50,6 6	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		10	17.000.000	12	8.379.80 0	2	1.844.70 0	0	-	0	801.500	-	801.500	12	9.181.300	120, 00	54,0 1	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	91.388.000	22	78.452.9 00	2	32.628.4 00	0	-	0	8.270.00 0	-	8.270.0 00	22	86.722.90 0	440, 00	94,9 0	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		10	25.680.000	6	42.597.0 00	4	5.929.44 0	1	420.00 0	0	856.500	1	1.276.5 00	7	43.873.50 0	70,0 0	170, 85	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Doku men	20	25.680.000	9	11.585.2 00	1	1.510.00 0	0	-	0	-	-	-	9	11.585.20 0	45,0 0	45,1 1	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapor an	60	10.480.000	36	14.143.5 00	1 2	6.032.00 0	0	-	0	1.626.00 0	-	1.626.0 00	36	15.769.50 0	60,0 0	150, 47	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsul tasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	15	542.562.730	9	202.836. 257	5 5 1	94.116.9 00	20	13.350. 600	0	7.268.00 0	20	20.618. 600	29	223.454.8 57	193, 33	41,1 9	

		Pengadaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		6 5	267.500.00 0	23	390.872 .258	2	29.510.0 00	0	-	0	-	0	-	23, 00	157.805. 979	35, 38	58,9 9	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		30	72.000.000	8	54.215.0 00	0	-	0	-	0	-	-	-	8	54.215.00 0	26,6 7	75,3 0	
		Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	195.500.000	15	103.590. 979	2	29.510.0 00	0	-	0	-	-	-	15	103.590.9 79	42,8 6	52,9 9	
		Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase keterpenuha n layanan jasa penunjang urusan kantor		9 5	723.356.25 0	54	407.462 .546	4 9	98.111.0 32	9	15.811 .935	0	6.893.3 86	9	22.705. 321	63	430.167. 867	60, 00	59,4 7	
		Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		60	606.532.250	36	330.717. 200	1 2	68.949.5 00	3	11.550. 000	0	2.796.30 0	3	14.346. 300	39	345.063.5 00	65,0 0	56,8 9	
		Penyediaa n Jasa Komunika si sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	30	101.824.000	18	76.745.3 46	3 7	29.161.5 32	6	4.261.9 35	0	4.097.08 6	6	8.359.0 21	24	85.104.36 7	80,0 0	83,5 8	
		Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5	15.000.000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
		Pemelihara aan Barang milik	jumlah barang milik daerah yang dipelihara		3 9	84.560.000	16 9 %	142.847 .810	2 2	33.671.0 00	2	2.368. 200	0	11.499. 200	14	13.867. 400	16	156.715. 210	60, 00	185, 33	

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	26.560.000	21	83.914.310	8	22.718.100	2	2.368.200	0	11.149.200	2	13.517.400	23	97.431.710	65,71	366,84	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	24.500.000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25	12.500.000	15	12.345.000	12	5.130.000	0	-	0	350.000	-	350.000	15	12.695.000	60,00	101,56	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	14	21.000.000	8	46.588.500	2	5.822.900	0	-	0	-	-	-	8	46.588.500	57,14	221,85	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															53,95	45,86			80,30	95,96	
Predikat Kinerja															Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Tinggi	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase Dokumentasi SOP Pelayanan yang disusun dan Implementasikan	%	100	139.332.800	20%	88.337.000	10	18.532.400	3	7.645.000	-	420.000	3	8.065.000	23	96.402.000	63,00	69,19	Kec. Tane te Riaja

	m mewu judka n keten trama n dan keter tiban	PUBLIK																			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	4 5	136.832.80 0	24	86.830. 000	6	18.307.9 00	3	7.645. 000	0	420.000	3	8.065.0 00	27	94.895.0 00	60, 00	69,3 5	
		Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	15	121.032.800	9	82.700.0 00	5	12.638.6 00	3	7.645.0 00	0	420.000	3	8.065.0 00	12	90.765.00 0	80,0 0	74,9 9	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	30	15.800.000	15	4.130.00 0	1	5.669.30 0	0	-	0	-	-	-	15	4.130.000	50,0 0	26,1 4	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di	Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	%	2 0	2.500.000	18	1.507.0 00	4	224.500	0	-	0	-	0	-	18	1.507.00 0	90, 00	60,2 8	

		Kecamatan																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	20	2.500.000	18	1.507.000	4	224.500	0	-	0	-	-	-	18	1.507.000	90,00	60,28	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															30	43,00			72,17	60,04	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
2		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/ kelompok/ lembaga	%	95	2.061.949.600	44	643.697.358	19	306.316.433	15	11.575.600	15	2.613.740	15	14.189.340	59	698.029.638	62,11	33,85	Kec. Tante Riaja
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan		30	15.400.000	18	4.600.000	6	1.006.300	0	-	0	-	0	-	18	395.700.638	60,00	2.569,48	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Lembaga	30	15.400.000	18	4.600.000	6	1.006.300	0	-	0	-	0	-	18	4.600.000	60,00	29,87	

		an Pembangu nan di Desa	n di Desa																		
		Kegiatan Pemberda yaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Kelurahan yang diberdayaka n		4 0	1.415.759. 600	16	339.688 .358	8	190.731. 033	7	10.605 .600	0	663.740	7	11.269. 340	23	350.957. 698	57, 50	24,7 9	
		Peningkata n Partisipasi Masyaraka t dalam Forum Musyawar ah Perencana an Pembangu nan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan		15	94.520.000	9	30.689.2 00	7	18.263.7 40	7	8.790.0 00	0	663.740	7	9.453.7 40	16	40.142.94 0	106, 67	42,4 7	
		Pembangu nan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paket	5	1.302.121.6 00	1	14.418.4 08	1	45.886.7 93,26	0	-	0	-	0	-	1	14.418.40 8	20,0 0	1,11	
		Pemberday aan Masyaraka t di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanaka n Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Pokma s	10	10.010.000	6	294.580. 750	3	126.580. 500	3	1.815.6 00	0	-	3	1.815.6 00	9	296.396.3 50	90,0 0	2.96 1,00	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		20	9.108.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
		Pemberda yaan Lembaga Kemasyar akatan Tingkat	Persentase Lembaga Kemasyaraka tan yang Diberdayaka n dan Dibina	%	2 5	630.790.00 0	10	299.409 .000	5	114.579. 100	1	970.00 0	5	1.950.0 00	1	2.920.0 00	11	302.329. 000	44, 00	47,9 3	

		Kecamatan																			
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		25	630.790.000	15	299.409.000	3	114.579.100	1	970.000	0	1.950.000	1	2.920.000	16	302.329.000	64,00	47,93	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															42,11	4,63			112,85	1.151,69	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	246.284.500	20%	99.182.000	100	30.033.600	3	4.050.000	2	-	3	4.050.000	3	103.232.000	3,20	41,92	Kec. Tante Riaja
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Laporan	25	246.284.500	15	99.182.000	13	30.033.600	3	4.050.000	0	-	3	4.050.000	18	103.232.000	72,00	41,92	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi	20	104.834.500	12	80.300.000	12	16.270.000	3	4.050.000	0	-	3	4.050.000	15	84.350.000	75,00	80,46	

		Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	141.450.000	3	18.882.000	1	13.763.600	0	-	0	-	0	-	3	18.882.000	60,00	13,35	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															23	13,48			52,55	44,41	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		125	153.105.000	80%	122.891.300	13	28.115.500	-	-	0	-	0	-	50	122.891.300	60,00	80,27	Kec. Tane te Riaja
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		125	153.105.000	25	122.891.300	13	28.115.500	-	-	0	-	0	-	25	122.891.300	60,00	80,27	

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	125	153.105.000	75	122.891.300	13	28.115.500	0	-	0	-	0	-	75	122.891.300	60,00	80,27	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0,00	0,00			60,00	80,27	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Tinggi	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibangun dan diawasi	%	6	20.400.000	6	9.775.200	6	3.224.500	-	-	-	1.500.000	0	1.500.000	6	11.275.200	100,00	55,27	Kec. Tane te Riaja

		DESA																		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Sub.k eg.	30	20.400.000	6	9.775.200	6	3.224.500	-	-	0	1.500.000	0	1.500.000	6	11.275.200	20,00	55,27
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		30	20.400.000	18	9.775.200	6	3.224.500	0	-	0	1.500.000	0	1.500.000	18	11.275.200	60,00	55,27
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0,00	46,52			60,00	55,27	
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														24,85	25,58			72,98	247,94	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :		Peningkatan Kualitas Data / Informasi dan Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan KAK																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :		Penentuan TKDN terhadap Belanja Modal (penyesuaian Belanja Modal)																		
TOTAL ANGGARAN / REALISASI						20.247.349.150		12.711.933.781		3.524.063.947,26		733.386.743		733.325.859		1.466.712.602				

DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN

N O	SASAR AN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KE GIATAN (OUTPUT)		Target Renstra PD Pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) yang di Evaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit PD Penan ggung jawab
											I		II								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11 / 5 X 100%		12
			Uraian	Satu an	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
A	Mening katnya Kualita s dan Imple mentas i SAKIP Dinas Kominf o-Sp		Nilai SAKIP Dinas Kominf o-SP																		
I		PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Nilai Maturit as SPIP Dinas Kominf o	Level	4, 00	18.310.65 1.354	3, 00	2.846.71 1.289	3, 00	3.209.51 6.667	0, 0 0	666.954.05 1	0, 0 0	687.249. 180	0,0 0	1.354.203 .231	3, 00	4.200.91 4.520	0,7 5	22, 94	
			Rata- rata Lama Pegawai mendap atkan Pendidi kan dan Pelatiha n	JPL	10 0, 00	325.535.0 00	0, 00	-	0, 00	-	0, 0 0	-	0, 0 0	-	0,0 0	-	0, 00	-	0,0 0	0,0 0	

1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan		32	6.572.000	8	2.045.476	8	1.626.250	-	-	-	-	0	-	8	2.045.476	0,25	0,31	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	1.808.000	2	841.000	2	643.400	0	-	0	-	0	-	2	841.000	0,25	0,47	Diskominfo-SP
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	8	1.588.000	2	425.000	2	355.000	0	-	0	-	0	-	2	425.000	0,25	0,27	Diskominfo-SP
3		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	8	1.588.000	2	389.476	2	319.300	0	-	0	-	0	-	2	389.476	0,25	0,25	Diskominfo-SP

4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	1.588.000	2	390.000	2	308.550	0	-	0	-	0	-	2	390.000	0,25	0,25	Diskomininfo-SP
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		167	15.796.576.054	25	2.433.788.778	31	2.817.578.107	23	635.828.805	27	607.714.155	27	1.243.542.960	52	3.677.331.738	0,31	0,23	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	152	15.796.367.054	25	2.433.788.778	31	2.817.578.107	23	635.828.805	27	607.714.155	27	1.243.542.960	52	3.677.331.738	0,34	0,23	Diskomininfo-SP
2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Diskomininfo-SP

3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10	209.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Diskominfo-SP
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN		25	325.535.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	
1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	25	325.535.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Diskominfo-SP

4		Administrasi umum perangkat Daerah	Terlaksanayanya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1690	1.247.936.000	186	184.386.535	82	86.961.810	24	6.466.200	20	18.830.025	44	25.296.225	230	209.682.760	0,14	0,17	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	13.544.000	1	1.839.000	1	1.908.600	0	-	0	-	0	-	1	1.839.000	0,10	0,14	Diskominfo-SP
2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	15.764.000	2	1.434.000	2	1.499.100	0	-	0	-	0	-	2	1.434.000	0,13	0,09	Diskominfo-SP
3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	96	155.817.000	12	23.122.000	12	23.454.800	0	-	6	5.826.825	0	5.826.825	12	28.948.825	0,13	0,19	Diskominfo-SP
4		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas i Kunjungan Tamu	Laporan	120	24.000.000	4	1.215.000	4	1.192.000	0	-	0	-	0	-	4	1.215.000	0,03	0,05	Diskominfo-SP

5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1449	1.038.811.000	167	156.776.535	63	58.907.310	24	6.466.200	14	13.003.200	38	19.469.400	205	176.245.935	0,14	0,17	Diskominfo-SP
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	611.369.000	4	51.094.000	0	-	0	-	0	-	0	-	4	51.094.000	0,33	0,08	
1		Pengadaan Sarana dan Perasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	611.369.000	4	51.094.000	0	-	0	-	0	-	0	-	4	51.094.000	0,33	0,08	Diskominfo-SP
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor		120	532.772.800	4	112.186.000	4	111.395.500	1	13.000.000	2	19.648.000	2	32.648.000	6	144.834.000	0,05	0,27	
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	60	516.272.800	4	112.186.000	4	111.395.500	1	13.000.000	2	19.648.000	2	32.648.000	6	144.834.000	0,10	0,28	Diskominfo-SP

			Surat Menyurat																		
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	16.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Diskominfo-SP
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86	115.425.500	14	63.210.500	15	191.955.000	3	11.659.046	1	41.057.000	4	52.716.046	18	115.926.546	0,21	1,00	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	32	85.425.500	8	59.210.500	7	187.955.000	3	11.659.046	1	41.057.000	4	52.716.046	12	111.926.546	0,38	1,31	Diskominfo-SP

2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	54	30.000.000	6	4.000.000	8	4.000.000	0	-	0	-	0	-	6	4.000.000	0,11	0,13	Diskominfo-SP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															0,00	42,19			0,18	0,30	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
B	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		Indeks Keterbukaan Informasi Publik																		
I		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase	100,00	10.782.205.500	100,00	2.292.663.886	100,00	1.517.894.400	0,00	70.570.300	0,00	499.712.450	0,00	570.282.750	100,00	2.862.946.636	1,00	0,27	

1		Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya Jumlah Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan		307,28	10.782.205.500	53	2.292.663.886	185	1.517.894.400	100	70.570.300	145	499.712.450	100	570.282.750	153	2.862.946.636	0,50	0,27	
1		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	32	6.078.157.500	7	1.489.767.265	0	-	0	-	0	-	0	-	7	1.489.767.265	0,22	0,25	Diskominfo-SP
2		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	15	2.575.210.000	3	158.015.250	0	-	0	-	0	-	0	-	3	158.015.250	0,20	0,06	Diskominfo-SP
3		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	223	1.355.500.000	39	395.886.460	0	-	0	-	0	-	0	-	39	395.886.460	0,17	0,29	Diskominfo-SP
4		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	5	201.338.000	1	7.867.100	0	-	0	-	0	-	0	-	1	7.867.100	0,20	0,04	Diskominfo-SP

5		Penyeleng- gaan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokume- n Kemitra- an dengan Masyara- kat, Media dan Komunit- as dalam Mendise- minasik- an Informa- si Program atau Kebijaka- n	Doku- men	32, 28	572.000.0 00	3	241.127.8 11	0	-	0	-	0	-	0	-	3	241.127. 811	0,0 9	0,4 2	Disko minfo- SP
6		Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenu- hi kriteria sebagai berikut: 1. terverifi- kasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo , dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Lapo- ran	0	-	0	-	1	303.051.3 00	1	28.000.000	1	42.000.00 0	1	70.000.00 0	1	70.000.0 00	0,0 0	0,0 0	Disko minfo- SP

7		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	0	-	0	-	58	153.475.200	58	39.020.300	58	64.334.650	58	103.354.950	58	103.354.950	0,00	0,00	Diskominfo-SP
8		Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	0	-	0	-	1	4.099.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Diskominfo-SP
9		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan	Permohonan	0	-	0	-	80	892.997.100	41	3.550.000	41	368.927.800	41	372.477.800	41	372.477.800	0,00	0,00	Diskominfo-SP

			n perunda ngan																		
1 0		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komuni kasi publik milik pemerin tah daerah yang dikelola maupun pemanfa atan media berbaya r sesuai kriteria/ juknis	Medi a	0	-	0	-	45	164.271.8 00	0	-	4 5	24.450.00 0	45	24.450.00 0	45	24.450.0 00	0,0 0	0,0 0	Disko minfo- SP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															0,0 0	37,57			0,5 0	0,2 7	
Predikat Kinerja															Sa ng at Re nd ah	Sangat Rendah			San gat Ren dah	Sa ng at Re nd ah	
C	Mening katkny a Kualita s Akses Interne t yang disedia kan oleh Kominf o		Tingkat Aksesib ilitas PD dalam Pemanf ataan Layana n Interne t Kominf o																		
I I I		PROGRAM PENGELOL AAN APLIKASI INFORMATI KA	Present ase Perangk at Daerah yang terhubu	Pers en	10 0	8.792.717 .200	10 0	1.394.54 4.734	10 0	2.133.39 5.700	1 0 0	53.085.000	1 0 0	158.901. 282	10 0	211.986.2 82	10 0	1.606.53 1.016	1,0 0	0,1 8	

			ng Daya Akses Interne t yang berkuali tas yang disedia kan Kominf o																		
1		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barru	Tersedianya Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah		9	6.531.240.700	2	1.029.849.996	1	15.070.000	1	15.000.000	0	-	1	15.000.000	3	1.044.849.996	0,33	0,16	
1		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	5	75.000.000	1	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	15.000.000	0,20	0,20	Diskominfo-SP
2		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	4	6.456.240.700	1	1.014.849.996	0	-	0	-	0	-	0	-	1	1.014.849.996	0,25	0,16	Diskominfo-SP

3		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	0	-	0	-	1	15.070.000	1	15.000.000	0	-	1	15.000.000	1	15.000.000	0,00	0,00	Diskominfo-SP
2		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Aplikasi yang menunjang SPBE di Kabupaten Barru		44	2.261.476.500	1	364.694.738	0	2.118.325.700	34	38.085.000	37	158.901.282	71	196.986.282	72	561.681.020	1,64	0,25	
1		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	350.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Diskominfo-SP

2		Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	38	1.597.800.000	1	364.694.738	0	-	0	-	0	-	0	-	1	364.694.738	0,03	0,23	Diskominfo-SP
3		Pengelolaan Government Chief Informasi Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	5	313.676.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Diskominfo-SP
4		Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	0	-	0	-	3	271.640.700	0	37.085.000	3	72.581.300	3	109.666.300	3	109.666.300	0,00	0,00	Diskominfo-SP
5		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah	Peraangkat Daerah	0	-	0	-	34	1.846.685.000	34	1.000.000	34	86.319.982	34	87.319.982	34	87.319.982	0,00	0,00	Diskominfo-SP

			Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100,00	9,94			0,98	0,20	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
D	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektor al		Presentase Keterseediaan Data Statistik Sektoral																		
I V		'PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	Persen	100	864.767.800	100	73.196.550	100	66.410.200	0	340.000	0	1.475.000	0	1.815.000	100	75.011.550	1,00	0,09	
1		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Barru		41	864.767.800	9	73.196.550	141	66.410.200	0	340.000	2	1.475.000	2	1.815.000	11	75.011.550	0,27	0,09	

1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	41	864.767.800	9	73.196.550	0	-	0	-	0	-	0	-	9	73.196.550	0,22	0,08	Diskominfo-SP
2		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	0	-	0	-	5	8.191.000	0	-	2	1.175.000	2	1.175.000	2	1.175.000	0,00	0,00	Diskominfo-SP
3		Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Person	0	-	0	-	100	53.774.300	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Diskominfo-SP

4		Penyelenggaan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	0	-	0	-	18	2.671.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Diskominfo-SP
5		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	0	-	0	-	18	1.773.900	0	340.000	0	300.000	0	640.000	0	640.000	0,00	0,00	Diskominfo-SP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															0,00	2,73			0,27	0,09	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
E	Terwujudnya Keamanan Informasi Milik Pemda melalui Penyelenggaraan Persandian		Indeks Keamanan Informasi																		

V		'PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Informasi Daerah yang Wajib diaman kan dengan Persandian	Persen	100	298.000.000	100	28.182.200	100	17.230.500	0,000	-	0,000	-	0,000	-	100	28.182.200	1,000	0,09	
1		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersele nggaran ya Kegiatan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota		5	298.000.000	1	28.182.200	1	17.230.500	0	-	0	-	0	-	1	28.182.200	0,20	0,09	
1		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	5	298.000.000	1	28.182.200	1	17.230.500	0	-	0	-	0	-	1	28.182.200	0,20	0,09	Diskominfo-SP
Rata-rata capaian kinerja (%)															0,000	0,00			0,20	0,09	

Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 5)										20,00	18,49					2,14	0,95		
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya Konsistensi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta Koordinasi dan Kerjasama yang baik dari seluruh Stake Holder																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kemampuan SDM yang Kurang, Tidak adanya kejelasan pembagian tugas pokok dan fungsi, Sarana dan Prasana yang kurang memadai																			
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																			
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya : Penambahan Jumlah Pegawai serta Sarana dan Prasarana yang memadai																			

DINAS PENANAMAN MODAL-PTSP

No	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)		Target Renstra Pd Pada Tahun 2021 S/D 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pd Sampai Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Pd Tahun Berjalan Yang Di Evaluasi (2025) Yang Di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2025 (%)		Unit Pd Penanggung Jawab
			Uraian	Satuan	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 X 100%		16
1	Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Maturitas SPIP DPMPSP	Poin t	5,00	14.464.557.497	3,00	8.424.737.052	3,00	2.674.407.907	12,45	597.858.667	0,00	695.184.676	12,45	1.293.043.343	3,00	8.930.200.795	60,00	61,74	DPMP TSP
			Rata-rata Lama Pegawai mendapa	JPL	120,00	650.000.000	20,00	-	20,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	20,00	-	16,67	-	DPMP TSP

	DPMP TSP		tkan Pendidik an dan Pelatiha n																		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persenta se Penyusu nan dokume n Laporan Keuanga n Tepat Waktu dan sesuai peratura n perunda ng- undanga n	Pers en	10 0	10.746. 972.671	19 8,4 2	5.994.5 30.906	10 0	2.222.9 10.017	80 ,7 7	518.00 6.667	80 ,7 7	637.648 .576	161, 5	1.155.6 55.243	359 ,96	7.150.1 86.149	20,0 0	66,53	DPMP TSP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjanga n ASN	Oran g	26	10.746.9 72.671	76	5.994.5 30.906	26	2.222.9 10.017	21	518.006 .667	21	637.648. 576	42	1.155.6 55.243	118	7.150.1 86.149	453, 85	66,53	DPMP TSP
Rata-rata capaian kinerja (%)															161, 54	51,99			453, 85	66,53	
Predikat Kinerja															Sang at Tingg i	Rendah			Sang at Tingg i	Sedang	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persenta se kebutuh an administ rasi umum yang terpenuhi	Pers en	10 0%	1.929.2 88.706	19 8,4 2	1.217.5 33.676	10 0	166.800 .190	15 ,6 6	17.452. 000	12 ,0 5	15.251. 100	27,7 1	32.703. 100	226 ,13	1.250.2 36.776	0,20	64,80	DPMP TSP

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	13	23.497.668	4	6.059.600	2	343.900	0	-	0	-	0	-	4	6.059.600	30,77	25,79	DPMP TSP
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	26	118.997.694	7	52.059.600	2	2.402.100	0	-	0	-	0	-	7	52.059.600	26,92	43,75	DPMP TSP
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	90.000.000	5	80.479.600	4	24.051.000	0	-	0	-	0	-	5	80.479.600	125,00	89,42	DPMP TSP
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	4	11.000.000	3	5.476.000	1	1.478.190	0	-	0	-	0	-	3	5.476.000	75,00	49,78	DPMP TSP
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	170.342.727	4	32.151.300	2	4.643.000	0	-	0	-	0	-	4	32.151.300	33,33	18,87	DPMP TSP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	1320	1.515.450.617	691	1.041.307.576	72	133.882.000	13	17.452.000	10	15.251.100	23	32.703.100	714	1.074.010.676	54,09	70,87	DPMP TSP

			si SKPD																		
Rata-rata capaian kinerja (%)															27,71	19,61			57,52	49,75	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan Jasa Penunjang yang terpenuhi	Persen	197	787.579.600	100,00	324.888.300	100	256.897.700	20,00	62.400.000	0,00	41.600.000	20,00	104.000.000	120,00	428.888.300	39,40	54,46	DPMP TSP
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	50.566.600	14	178.994.000	2	297.700	0	-	0	-	0	-	14	178.994.000	140,00	353,98	DPMP TSP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	5.213.000	1	17.777.300	2	1.000.000	0	-	0	-	0	-	1	17.777.300	25,00	341,02	DPMP TSP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	731.800.000	16	128.117.000	1	255.600.000	1	62.400.000	0	41.600.000	1	104.000.000	17	232.117.000	283,33	31,72	DPMP TSP

Rata-rata capaian kinerja (%)															20,00	40,48			149,44	242,24	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah siap Pakai	Persen	100	231.361.851	160,00	100.204.570	100	27.800.000	0,00	-	10,00	685.000	10,00	685.000	170,00	100.889.570	20,00	43,61	DPMP TSP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	69	194.757.348	24	80.704.570	10	27.800.000	0	-	1	685.000	1	685.000	25	81.389.570	36,23	41,79	DPMP TSP
Rata-rata capaian kinerja (%)															10,00	2,46			36,65	41,79	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi PMDN	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pro investasi yang tersusun sesuai standart	Persen	100,00	260.724.658	100,00	106.539.411	100,00	39.172.140	0,00	-	0,00	1.277.500	-	1.277.500	100,0	107.816.911	20,0	275,24	DPMP TSP

	/ PMA		peraturan per UU an																		
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase persetujuan fasilitas/ insentif	Persen	100,00	104.748.278	100,00	20.341.161	100,00	8.819.440	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20.341.161	0,00	230,64	DPMP TSP
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	5	104.748.278	1	20.341.161	1	8.819.440	0	-	0	-	1	-	0	20.341.161	-	230,64	DPMP TSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0,00	230,64	
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Peta Potensi Investasi yang telah mencakup	Persen	20	155.976.380	30,00	86.198.250	20	30.352.700	0,00	-	0,00	1.277.500	0,00	1.277.500	30,00	87.475.750	4,00	56,08	DPMP TSP

			p keseluru han potensi investasi																		
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/K ota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupate n/Kota	Dok ume n	23	155.976. 380	12	86.198. 250	4	30.352. 700	0	-	0	1.277.50 0	0	1.277.5 00	12	87.475. 750	52,1 7	56,08	DPMP TSP
Rata-rata capaian kinerja (%)															0,00	4,21			52,1 7	56,08	
Predikat Kinerja															Sang at Rend ah	Sangat Rendah			Ren dah	Rendah	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persenta se calon investor yang berinves tasi	Pers en	80, 86	8.288.4 47	35, 00	3.108.5 00	80, 16	55.109. 000	0, 00	-	0, 00	-	80,1 8	-	115 ,18	3.108.5 00	142, 4	5,64	DPMP TSP
		Penyelengga raan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persenta se Investor yang mendapa tkan pelayana n Promosi Penanam an Modal	Pers en	10 0	8.288.4 47	35, 00	3.108.5 00	45, 00	55.109. 000	0, 00	-	0, 00	-	0,00	-	35, 00	3.108.5 00	77,7 8	5,64	DPMP TSP
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peratura n Daerah yang Mengatur Promosi Penanam an Modal Kewenan gan	Dok ume n	5	8.288.44 7	2	3.108.5 00	1	55.109. 000	0	-	0	-	1	-	3	3.108.5 00	60,0 0	37,50	DPMP TSP

			Kabupate n/Kota																			
Rata-rata capaian kinerja (%)															2,17	0,00			68,8 9	37,50		
Predikat Kinerja															Sang at Rend ah	Sangat Rendah			Seda ng	Sangat Rendah		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persenta se Peningka tan Ketepata n Waktu Penyeles aian Izin yang diterbitk an Sesuai Peratura n Perunda ng- undanga n	Pers en	10 0,0 0	2.718.8 18.496	37 8,0 0	471.268 .400	99, 46	122.489 .370	14 ,0 0	18.453. 000	1, 00	4.560.0 00	15,0 0	23.013. 000	393 ,00	494.281 .400	393, 0	403,5	DPMP TSP	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasa n Masyara kat	Inde ks	10 0	2.718.8 18.496	35 8,2 7	471.268 .400	92, 00	122.489 .370	1, 98	18.453. 000	0, 00	4.560.0 00	1,98	23.013. 000	360 ,25	494.281 .400	1,98	403,53	DPMP TSP	

		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	15 21 6	1.595.24 6.316	63 91	308.538 .000	27 00	72.545. 200	0	7.893.0 00	0	-	0	7.893.0 00	639 1	316.431 .000	42,0 0	19,84	DPMP TSP
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	32 98	1.007.23 9.401	88 6	153.921 .400	55 0	44.011. 450	70	10.560. 000	0	4.560.00 0	70	15.120. 000	956	169.041 .400	28,9 9	16,78	DPMP TSP

		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	42	92.111.080	17	8.809.000	10	5.932.720	0	-	0	-	0	-	17	8.809.000	40,48	9,56	DPMP TSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	8	24.221.699	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DPMP TSP
Rata-rata capaian kinerja (%)															2,15	18,79			55,73	23,09	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	

		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Milyar	49 4,4 5	1.712.256.503	49 4,4 5	1.264.926.600	58 0,0 0	79.400.700	0,00	-	0,00	750.000	0,00	750.000	494,45	1.265.676.600	100,0	1.594,0	DPMP TSP
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	Persen	25,82	1.712.256.503	25,23	1.264.926.600	27,46	79.400.700	0,00	-	0,00	750.000	0,00	750.000	25,23	1.265.676.600	0,00	1594,04	DPMP TSP
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	399	614.657.689	705	368.284.000	20	20.896.000	0	-	0	750.000	0	750.000	705	369.034.000	176,69	60,04	DPMP TSP
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	1004	700.450.939	650	582.652.100	50	24.830.100	0	-	0	-	0	-	650	582.652.100	64,74	83,18	DPMP TSP

		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	16 3	397.147. 876	42 6	313.990 .500	90	33.674. 600	0	-	0	-	0	-	426	313.990 .500	261, 35	79,06	DPMP TSP
Rata-rata capaian kinerja (%)															0,00	0,94			167, 59	74,09	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sedang	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (KEGIATAN 1 S.D KEGIATAN 9)															24,8 4	15,39			117, 87	65,68	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :			Peningkatan Kualitas Data / Informasi dan Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan KAK																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :			Penentuan TKDN terhadap Belanja Modal (penyesuaian Belanja Modal)																		
TOTAL ANGGARAN / REALISASI						19.814. 645.601		10.270. 579.963		2.970.5 79.117		616.31 1.667		701.772 .176		1.318.0 83.843					

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kinerja dan anggaran renja PD tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 1 SD II Tahun 2025				Realisasi capaian kinerja dan anggaran renja PD yang dievaluasi (sd Triwulan II Tahun Anggaran 2025)		Realisasi kinerja dan anggaran renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggungjawab
											TRIWULAN I		TRIWULAN II								
		URUSAN PEMERINTAHAN YANG WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				##### ###	22.353.9 93.518		4.768.6 33.631		849.88 9.228		1.075.2 22.537		1.925.1 11.765		24.279.1 05.283		105 ,45		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				##### ###	##### ###		4.731.3 74.061		845.02 4.653		##### ###		1.914.3 23.625		24.172.6 00.318		106 ,11		
	Meningkatnya Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		4	17.441.6 89.927	3 10.232.5 84.074	3	3.921.4 70.961		833.47 6.203		880.650 .372	-	1.714.1 26.575	0	11.946.7 10.649	3	68, 50	Sekretariat	
	Terwujudnya Administrasi Keuangan Yang Berkualitas/Baik	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan nya	Persen	10 0	11.381.4 04.510	10 0 7.758.88 8.054	10 0	3.059.5 36.283	25	710.11 0.825	0	745.747 .505	30	1.455.8 58.330	25, 00	9.214.74 6.384	25, 00	80, 96	Sekretariat	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	33	11.381.404.510	30	7.758.888.054	31	3.059.536.283	29	710.110.825	30	745.747.505	30	1.455.858.330	30	9.214.746.384	30,00	80,96	Sekretariat
	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Yang Berkualitas/Baik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Diklat Kompetensi Teknis terhadap Keseluruhan ASN	Persen	100	425.000.000	##	27.337.830	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	27.337.830	100,00	6,43	Sekretariat
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	14	166.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Sekretariat
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	14	259.000.000	9	27.337.830	0	-	0	-	0	-	0	-	9	27.337.830	64	10,56	Sekretariat
	Terwujudnya Administrasi Umum Yang Berkualitas/Baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1.230.843.717	100	276.836.656	100	39.850.400	25	12.698.150		4.078.331	25	16.776.481	25	293.613.137	25	24	Sekretariat

		Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	2.273.00 0	-	0	-	0	-	0	-		-	-	0	0	Sekretaria t		
		Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultas i SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	96 5	1.228.57 0.717	58 0	276.836. 656	68	39.850. 400	37	12.698 .150	8	4.078.3 31	45	16.776. 481	625	293.613. 137	64, 77	24	Sekretaria t
	Tersedian ya Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	Persentase Penenuhan Kebutuhan Bahang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	10 0	537.000. 000	10. 6	59.215.0 00	10 0	34.617. 500	0, 0	-	0	-	0,0	-	10, 6	59.215.0 00	100	11	Sekretaria t
		Pengadaa n Kendaraa n Dinas Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	202.000. 000	1	25.720.0 00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	25.720.0 00	20	13	Sekretaria t
		Pengadaa n Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	125.000. 000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Sekretaria t
		Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19	110.000. 000	8	33.495.0 00	4	34.617. 500	0	-	0	-	0	-	8	33.495.0 00	42	30	Sekretaria t

		Pengadaa n Gedung Kantor dan Bangunan	JJumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	100.000. 000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Sekretaria t
	Terwujud nya Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase Keterpenuh an Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	Persen	10 0	3.622.94 5.000	10 0	2.067.68 9.834	10 0	753.696 .778		106.92 5.412		114.630 .034	100	221.555 .446	100	2.289.24 5.280	100	63, 19	Sekretaria t
		Penyediaa n Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapora n	60	247.605. 000	36	56.845.8 50	12	29.107. 600	0	150.00 0	5	8.787.5 09	5	8.937.5 09	41	65.783.3 59	68, 333	26, 57	Sekretaria t
		Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapora n	20 4	177.340. 000	12 0	92.543.9 84	24	84.989. 178	6	15.275 .412	6	14.342. 525	12	29.617. 937	132	122.161. 921	65	68, 89	Sekretaria t
s		Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	60	3.198.00 0.000	36	1.918.30 0.000	12	639.600 .000	3	91.500 .000	3	91.500. 000	6	183.000 .000	42	2.101.30 0.000	70	65, 71	Sekretaria t

	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		100%	244.496.700	100%	42.616.700	100	33.770.000		3.741.816		16.194.502		19.936.318	100	62.553.018	100	25,58	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	111.427.700	12	29.911.700	15	26.870.000	4	3.741.816	6	12.744.502	10	16.486.318	10	46.398.018	63	41,64	Sekretariat
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	80	12.550.000	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	Sekretariat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32	69.900.000	18	12.705.000	18	6.900.000	0	-	9	3.450.000	9	3.450.000	27	16.155.000	84	23	Sekretariat
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	50.619.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	0	Sekretariat
Total Rata-Rata Capaian Kinerja															0	44			75,00	35,17	

Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah		
	Meningkatnya Peningkatan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Taman Baca	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Pemustaka pada Perpustakaan Daerah dan Taman Baca		85	5.339.198.440	76,3	11.154.463.337	81	809.903.100		11.548.450		188.648.600	89	200.197.050	89	11.354.660.387	105	213	Bidang Perpustakaan
	Peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten / Kota yang dikelola dengan Baik	Persen	100	3.801.080.350	100	1.698.363.087	100	218.358.440		8.450.000		131.112.845	100	139.562.845	100	1.837.925.932	100	48	Bidang Perpustakaan
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 { ITSM : Information Technology Service Management }	Layanan	1	112.820.000	1	307.969.918	1	8.210.000	0	-	1	8.210.000	1	8.210.000	1	316.179.918	100	280	Bidang Perpustakaan

		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten / Kota sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	1	43.280.000	1	498.018.069	0	-	0	-	0	-	0	-	1	498.018.069	100	1151	Bidang Perpustakaan
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten /Kota yang Dikembangkan	Eksampler	6	24.442.000	0	-	2	119.920.500	0	-	2	119.328.930	0	119.328.930	2	119.328.930	33,33	488	Bidang Perpustakaan
		Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	238	535.500.000	238	37.655.000	238	32.043.490	101	8.450.000	45	3.573.915	146	12.023.915	238	49.678.915	100	9	Bidang Perpustakaan

		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	7	24.538.350	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Bidang Perpustakaan
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	165	335.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Bidang Perpustakaan
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	3	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Bidang Perpustakaan
		Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan	Eksampelar	## #	2.500.000.000	1925	854.720.100	0	-	0	-	0	-	0	-	1925	854.720.100	38,5	34	Bidang Perpustakaan

			Diadakan																		
		Pengolahan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksamp ^{lar}	2	73.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Bidang Perpustakaan
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Dokum ^{en}	5	52.000.000	0	-	1	58.184.450	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Bidang Perpustakaan
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan literasi	Persen	100	1.538.118.090	9.456.100.250	100	591.544.660	3.098.450	57.535.755	0	60.634.205	79,18	9.516.734.455	79,18	618,73			Bidang Perpustakaan	

		Sosialisasi budaya baca pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	7	1.196.578.090	0	-	1	481.882.750	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Bidang Perpustakaan
		Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1	272.640.000	1	9.456.100.250	1	29.283.500	0	3.098.450	0	11.996.220	0	15.094.670	1	9.471.194.920	100	3474	Bidang Perpustakaan
		Pemberian penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	15	34.142.000	0	-	24	80.378.410	0	-	6	45.539.535	0	45.539.535	6	45.539.535	40	133	Bidang Perpustakaan
		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang	15	34.758.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Bidang Perpustakaan
Total Rata-Rata Capaian Kinerja															0	61			89,59	333,54	

Predikat Kinerja															San gat Ren dah	Rendah			Ting gi	San gat Ting gi	
		URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG KEARSIP AN				244.315. 000		45.306.1 00		37.259. 570		4.864. 575		5.923.5 65		10.788. 140		56.094.2 40		23	Bidang Kearsipan
	Terwujud nya Pengelolaa n Arsip Yang Baik Sesuai dengan Kaidah- Kaidah Kearsipan	PROGRA M PENGELO LAAN ARSIP	Persentase Peningkata n Perangkat Daerah yang mengelola Arsip sesuai Peraturan Perundang- Undangan		10 0	161.000. 000	57	29.941.7 50	86	25.352. 570		4.864. 575		5.923.5 65	0	10.788. 140	73	40.729.8 90	73	25	Bidang Kearsipan
	Terwujud nya Pengelolaa n Arsip Dinamis Yang Baik Sesuai dengan Kaidah- Kaidah Kearsipan	Pengelolaa n Arsip Dinamis Daerah Kabupate n Kota	Persentase Arsip Dinamis Daerah Yang di Kelola dengan Baik	Persen	10 0	50.896.0 00	10 0	9.463.85 0		11.197. 980		4.864. 575		4.361.9 64		9.226.5 39	100	18.690.3 89	100	37	Bidang Kearsipan
		Penciptaa n dan Pengguna an Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	5	16.768.0 00	1	3.066.95 0	1	3.498.4 00	0	-	0	3.358.2 98	0	3.358.2 98	2	6.425.24 8	40	38	Bidang Kearsipan
		Pemelihar aan dan Penyusuta n Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemelihara an dan Penyusutan	Berkas	15 95 5	34.128.0 00	15 75 5	6.396.90 0	15 90 5	7.699.5 80	0	4.864. 575	0	1.003.6 66	0	5.868.2 41	157 55	12.265.1 41	99	35, 94	Bidang Kearsipan

	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Statis Yang Baik Sesuai dengan Kaidah-Kaidah Kearsipan	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota yang dikelola dengan baik	Persen	100	55.080.000	100	10.684.000	100	7.356.390	0	-		1.211.601	0	1.211.601	100	11.895.601	100	22	Bidang Kearsipan
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	250	55.080.000	50	10.684.000	50	7.356.390	0	-	0	1.211.601	0	1.211.601	50	11.895.601	20	22	Bidang Kearsipan
	Terpublikasinya arsip Statis Ke Publik	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten /Kota yang dikelola dengan baik	Persen	100	55.024.000	100	9.793.900	0	6.798.200	0	-		350.000	100	350.000	100	10.143.900	100	18	Bidang Kearsipan
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab. Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota	Laporan	60	55.024.000	12	9.793.900	12	6.798.200	0	-	0	350.000	0	350.000	12	10.143.900	20	18	Bidang Kearsipan
Total Rata-Rata Capaian Kinerja															0	0	38		100	25,59	
Predikat Kinerja															Sangat	Sangat Rendah			Sangat	Sangat	

															Ren dah					Ting gi	Ren dah	
	Tersedian ya Arsip Dinamis Maupun Arsip Statis	PROGRA M PERLIND UNGAN DAN PENYELA MATAN ARSIP	Tingkat ketersedian arsip sebagai bahan akuntabilit as kinerja , alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (pasal 40 dan pasal 59 undang- undang 43 tahun 2009)	Nilai	66, 5	83.315.0 00	75	15.364.3 50	60, 5	11.907. 000	0	-	0	-	0	-	75	15.364.3 50	75	18	Bidang Kearsipan	
	Terselama tkannya Arsip Yang Bernilaigu na dan Yang Tidak Bernilaigu na	Pemusnah an Arsip Dilingkun gan Pemerinta h Daerah Kabupate n/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnaha n Arsip Dilingkung an Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persen	10 0	13.150.0 00	20	2.273.00 0	10 0	1.899.0 00	0	-	0	-	0	-	100	2.273.00 0	20	17	Bidang Kearsipan	
		Penilaian dan Penetapan Pemusnah an arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaa n Pemusnaha n Arsip yang Memiliki Retensi di	Arsip	5	3.300.00 0	1	594.000	1	499.200	0	-	0	-	0	-	2	594.000	40	18	Bidang Kearsipan	

			Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	2400	9.850.000	2100	1.679.000	2300	1.399.800	0	-	0	-	0	-	2100	1.679.000	87,5	17	Bidang Kearsipan
	Terselamatkannya Arsip Statis dan Memori Organisasi	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terselamatkan	Persen	100	64.000.000	18,18	11.993.850	100	9.176.000	0	-	0	-	100	-	40	11.993.850	40	19	Bidang Kearsipan
		Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah	Arsip	5	32.000.000	1	5.995.600	1	5.241.500	0	-	0	-	0	-	1	5.995.600	20	19	Bidang Kearsipan

			Kecamatan																		
		Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah /Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip	5	32.000.000	1	5.998.250	1	3.934.500	0	-	0	-	0	-	1	5.998.250	20	19	Bidang Kearsipan
	Terselamatkan Arsip Statis Yang Bernilai sejarah	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang	Persentase Arsip Statis Kabupaten /Kota yang dinyatakan hilang yang dicari	Persen	100	6.165.000	20	1.097.500	100	832.000	0	-	100	-	100	-	100	1.097.500	100	18	Bidang Kearsipan
		Penilaian dan Penetapan autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	5	6.165.000	1	1.097.500	1	832.000	0	-	0	-	0	-	1	1.097.500	20	18	Bidang Kearsipan
Total Rata-Rata Capaian Kinerja															0	0			53,33	17,94	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program															0,00	36			79,48	103	

predikat kinerja dari seluruh program										San gat Ren dah	Sangat Rendah				Ting gi	San gat Ting gi	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	------------------	--	--	--	------------	--------------------------	--

KECAMATAN BARRU

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun Anggaran 2025 (%)	Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2025	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penerima Anggaran Jawab								
							I		II														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 10 + 6		(13) = 12 / 5 * 100		(13)
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan /Impelmentasi SAKIP Kantor Kecamatan Barru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Barru	Level	3	29.295.022.898	3	14.515.675.631	3	5.427.878.764	3	1.155.205.125	3	1.170.777.916	21,54	2.325.983.041	26,51	42,85	3	16.841.658.672	57,74	57,49	Kantor Kecamatan Barru
			Rata-rata lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JPL	100	447.591.500	18	26.232.000	2	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	18	26.232.000	18,00	5,86	Kantor Kecamatan Barru

		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan</i>	<i>Persen</i>	1 0 0	22.186 .365.6 75	60	11.712 .362.4 88	1 0 0	4.335.3 41.419	25	1.031. 606.1 94	25 ,0 0	1.088. 317.4 77	50, 00	2.119.9 23.671	50 ,0 0	48 ,9 0	65 ,0 0	13.832. 286.15 9	65, 00	62, 35	<i>Kantor Kecamatan Barru</i>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	27 0	22.186. 365.67 5	15 5	11.712. 362.48 8	4 8	4.335.3 41.419, 00	48	1.031. 606.19 4	48	1.088. 317.47 7	48	2.119.9 23.671	10 0,0 0	48 ,9 0	20 3	13.832. 286.159	75, 19	62, 35	<i>Kantor Kecamatan Barru</i>
		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN</i>	<i>Persen</i>	1 0 0	447.59 1.500	10	26.232 .000	2	2.200.0 00		0	0	0	0	0	0, 00	0, 00	10	26.232. 000	10, 00	5,8 6	<i>Kantor Kecamatan Barru</i>
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	10 2	447.59 1.500	6	26.232. 000	2	2.200.0 00	0	0	0	-	0	0	0,0 0	0, 00	6	26.232. 000	5,8 8	5,8 6	<i>Kantor Kecamatan Barru</i>
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Persen</i>	1 0 0	2.238. 372.07 4	42	765.63 7.998	1 0 0	270.49 1.560	3, 57	44.55 5.920	7, 14	36.90 9.090	10, 71	81.465. 010	16 ,0 5	30 ,1 2	52 ,7 1	847.10 3.008	52, 71	37, 84	<i>Kantor Kecamatan Barru</i>

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	50	82.958. 100	0	-	6	5.530.1 00	0	0	56.610	0	56.610	0,0 0	1, 02	0	56.610	0,0 0	0,0 7	Kant or Keca mata n Barru	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	40	56.161. 074	4	747.00 0	1 2	2.620.8 00	0	0	0	0	0	0,0 0	0, 00	4	747.000	10, 00	1,3 3	Kant or Keca mata n Barru	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	152.80 7.000	36	131.02 7.850	1 2	62.177. 200	0	-	6	29.989 .950	6	29.989. 950	50, 00	48 ,2 3	42	161.017 .800	70, 00	10 5,3 7	Kant or Keca mata n Barru
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	70.625. 000	36	22.343. 600	1 2	8.851.0 60	-	0	56.610	0	56.610	0,0 0	0, 64	36	22.400. 210	60, 00	31, 72	Kant or Keca mata n Barru	
		Penyediaan Bahan Bacaam dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokum en	25	76.800. 000	15	42.467. 000	4	12.430. 000	0	-	1	806.61 0	1	806.610	25, 00	6, 49	16	43.273. 610	64, 00	56, 35	Kant or Keca mata n Barru
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapora n	60	71.830. 000	36	30.882. 000	1 2	10.580. 000	0	3	427.41 0	3	427.410	25, 00	4, 04	39	31.309. 410	65, 00	43, 59	Kant or Keca mata n Barru	
		Penyelengg ara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	2. 98 8	1.727.1 90.900	1. 22 3	538.17 0.548	8 0 2	168.302 .400	60	44.555 .920	39	5.571. 900	99	50.127. 820	12, 34	29 ,7 8	1. 32 2	588.298 .368	44, 26	34, 06	Kant or Keca mata n Barru

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.256.904.000	60	214.078.000	100	128.762.800		0	0	0	0	0	0,00	0,00	60	214.078.000	60,00	17,03	Kantor Kecamatan Barru
		Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	36	327.700.000	33	23.376.000	207	56.867.100	0	0	0	-	0	0	0,00	0,00	33	23.376.000	91,67	7,13	Kantor Kecamatan Barru
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	137	929.204.000	26	190.702.000	11	71.895.700		0	0	-	0	0	0,00	0,00	26	190.702.000	18,98	20,52	Kantor Kecamatan Barru
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	300	2.994.958.561	180	1.607.328.745	48	566.925.313	12	79.043.011	6	8.016.849	18,00	87.059.860	37,50	15,36	198	1.694.388.605	66,00	56,57	Kantor Kecamatan Barru
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	2.636.276.836	36	1.414.472.600	12	492.911.400	3	67.000.000	0	-	3	67.000.000	25,00	13,59	39	1.481.472.600	65,00	56,20	Kantor Kecamatan Barru
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	180	214.681.725	108	106.401.145	24	45.143.913	6	7.243.011	6	7.960.239	12	15.203.250	50,00	33,68	120	121.604.395	66,67	56,64	Kantor Kecamatan Barru

			yang Disediakan																				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantora n	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	60	144.00 0.000	36	86.455. 000	1 2	28.870. 000		4.800. 000	0	56.610	3	4.856.6 10	25, 00	16 ,8 2	39	91.311. 610	65, 00	63, 41	Kant or Keca mata n Barru
		Pemeliha aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Persen	1 0 0	618.42 2.588	45	216.26 8.400	1 0 0	126.35 7.672		0	29	37.53 4.500	29, 00	37.534. 500	29 ,0 0	29 ,7 0	45	253.80 2.900	45, 00	41, 04	Kant or Keca mata n Barr u
		Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasiona l dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	399.11 8.570	9	157.87 3.860	9	72.182. 800	0	-	0		0	0	0, 00	0, 00	9	157.873 .860	10 0,0 0	39, 56	Kant or Keca mata n Barru
		Pemelihara an Mebel	Jumlah meubelair yang dipelihara	Unit	33	14.665. 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0, 00	0, 00	0	0	0,0 0	0,0 0	Kant or Keca mata n Barru
		Pemelihara an peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	65	61.280. 000	35	14.730. 000	2 9	12.665. 000	0	0	29	12.615 .000	29	12.615. 000	10 0, 00	99 ,6 1	64	27.345. 000	98, 46	44, 62	Kant or Keca mata n Barru

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit	6	117.796.178	6	39.664.540	6	39.959.872		0	o	24.919.500	0	24.919.500	0,00	62,36	6	64.584.040	100,00	54,83	Kantor Kecamatan Barru
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Unit	36	25.562.000	9	4.000.000	3	1.550.000	0	0	o	0	1	0	33,33	0,00	10	4.000.000	27,78	15,65	Kantor Kecamatan Barru
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															23,94	42,84			71,9	2.811.315.112,00	49,79	36,78	
PREDIKAT KINERJA															Sangat rendah	Sangat rendah					Sangat rendah	Sangat rendah	
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan pada Kantor Kecamatan Barru	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	persen	100	436.257.925	60	156.471.950	100	52.880.330	12,50	12.202.700	12,50	0	6,25	12.202.700	6,25	23,08	61,25	168.674.650	61,25	38,66	Kantor Kecamatan Barru
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Desa/Kel	100	429.990.325	60	126.238.050	100	51.801.530	12,50	12.202.700	0,00	0	12,50	12.202.700	12,50	23,56	62,50	138.440.750	62,50	32,20	Kantor Kecamatan Barru

		Koordinasi /Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	20	135.529.125	12	35.254.050	4	16.470.700	2	12.202.700	0	0	2	12.202.700	50,00	74,09	14	47.456.750	70,00	35,02	Kantor Kecamatan Barru
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	30	294.461.200	18	90.984.000	5	35.330.830	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	18	90.984.000	60,00	30,90	Kantor Kecamatan Barru
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	Persen	100	6.267.600	60	30.233.900	100	1.078.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	60	30.233.900	60,00	48,238	Kantor Kecamatan Barru
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	6.267.600	6	30.233.900	2	1.078.800	0	0	0	-	0	0	0,00	0,00	6	30.233.900	60,00	48,238	Kantor Kecamatan Barru
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																6,25	23,08		61,2	84.337.325,00	61,25	25,7,2	

																			5			9	
PREDIKAT KINERJA														Sangat rendah	Sangat rendah						Re nd ah	Sa ng at tin ggi	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/lembaga	persen	100	9.631.182.842	40	3.760.370.898	100	1.500.515.067	12,50	146.651.400	5,83	131.242.469	18,33	277.893.869	18,33	18,52	62,50	4.038.264.767	62,50	41,93	Kantor Kecamatan Barru
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	100%	100	15.180.850	60,00	9.235.000	100	4.570.000		0	0	56.610	0	56.610	0,00	1,24	60,00	9.291.610	60,00	61,21	Kantor Kecamatan Barru
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah laporan kegiatan perencanaan pembangunan desa yang tersusun	Lembaran Kemasan	175	15.180.850	105	9.235.000	35	4.570.000		-	0	56.610	0	56.610	0,00	1,24	105	9.291.610	60,00	61,21	Kantor Kecamatan Barru
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	100%	100	5.508.025.992	60	1.391.880.954	100	665.156.066,57	12,50	20.537.400	12,50	130.985.859	25,00	151.523.259	25,00	22,78	62,50	1.543.404.213	62,50	28,02	Kantor Kecamatan Barru

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lemba ga Kemas yaraka tan	17 5	320.42 3.700	10 5	80.687. 500	3 5	45.500. 800		19.137 .400	35	13.365 .400	35	32.502. 800	10 0,0 0	71 ,4 3	14 0	113.190 .300	80, 00	35, 33	Kant or Keca mata n Barru
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	Unit	25	3.727.0 45.722	10	1.137.8 35.504	5	562.931 .767	0	-	2	112.32 5.449	2	112.325 .449	40, 00	19 ,9 5	12	1.250.1 60.953	48, 00	33, 54	Kant or Keca mata n Barru
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokma s	50	1.435.0 80.770	26	169.95 2.950	1 0	55.145. 500	0	0	10	5.224. 000	10	5.224.0 00	10 0,0 0	9, 47	36	175.176 .950	72, 00	12, 21	Kant or Keca mata n Barru
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Lapora n	25	25.475. 800	15	3.405.0 00	5	1.578.0 00	5	1.400. 000	0	71.010	5	1.471.0 10	10 0,0 0	93 ,2 2	20	4.876.0 10	80, 00	19, 14	Kant or Keca mata n Barru
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina	Lemba ga	1 0 0	4.107. 976.00 0	60	2.359. 254.94 4	1 0 0	830.78 9.000		126.1 14.00 0	5	200.0 00	30	126.31 4.000	30 ,0 0	15 ,2 0	65 ,0 0	2.485.5 68.944	65, 00	60, 51	Kant or Keca mata n Barr u
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lemba ga	15 0	4.107.9 76.000	90	2.359.2 54.944	3 0	830.789 .000	30	126.11 4.000	30	200.00 0	30	126.314 .000	10 0,0 0	15 ,2 0	12 0	2.485.5 68.944	80, 00	60, 51	Kant or Keca mata n Barru

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														18,33	18,52			62,50	1.346.088.255,73	62,50	49,91		
PREDIKAT KINERJA														Sangat rendah	Sangat rendah					Rendah	Sangat rendah		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	persen	100	14.182.300	60	1.670.000	100	1.234.000	0	0	0	56.610	0	56.610	0,00	4,59	60	1.726.610	60,00	12,17	Kantor Kecamatan Barru
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	16	14.182.300	5	1.670.000	4	1.234.000		0	0	56.610	0	56.610	0,00	4,59	5	1.726.610	31,25	12,17	Kantor Kecamatan Barru
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	16	14.182.300	5	1.670.000	4	1.234.000	0	-	0	56.610	0	56.610	0,00	4,59	5	1.726.610	31,25	12,17	Kantor Kecamatan Barru
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															0	4,59			60	1.726.610	41	12,17	
PREDIKAT KINERJA															0	Sangat rendah					Sangat Rendah	Sangat rendah	

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	persen	100	53.455.000	60	8.495.000	100	5.070.000	5	2.100.000	0	56.610	50	2.156.610	50,00	42,54	65	10.651.610	65,00	19,93	Kantor Kecamatan Barru
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	50	53.455.000	60	8.495.000	100	5.070.000	5	2.100.000	0	56.610	5	2.156.610	50,00	42,54	65	10.651.610	130,00	19,93	Kantor Kecamatan Barru
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	50	53.455.000	30	8.495.000	100	5.070.000		2.100.000	0	56.610	5	2.156.610	50,00	42,54	35	10.651.610	70,00	19,93	Kantor Kecamatan Barru
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															50	42,54			65	10.651.610	65,00	19,93	
PREDIKAT KINERJA															Sangat Rendah	Sangat Rendah					Rendah	Sangat Rendah	
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	persen	100	242.158.000	60	110.676.500	100	30.594.000	12,50	3.600.000	12,50	3.656.610	25,00	7.256.610	25,00	23,72	60,00	117.933.110	60,00	48,70	Kantor Kecamatan Barru
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	laporan	61	242.158.000	60	110.676.500	200	30.594.000	3	3.600.000	0	3.656.610	3	7.256.610	15,00	23,72	60,00	117.933.110	98,36	48,70	Kantor Kecamatan Barru

			<i>umum</i>																				
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	26	149.758.000	33	96.365.000	12	21.670.000	3	3.600.000	0	3.656.610	3	7.256.610	25,00	33,49	36	103.621.610	138,46	69,19	Kantor Kecamatan Barru
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	35	92.400.000	19	14.311.500	8	8.924.000	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	19	14.311.500	54,29	15,49	Kantor Kecamatan Barru
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															25,00	23,72			60,00	58.966.555,00	60,00	48,70	
PREDIKAT KINERJA															Sangat Rendah	Sangat Rendah					Rendah	Sangat Rendah	
									7.020.372.160,57		1.319.759.225		1.305.790.215	37,40	2.625.549.440,20				21.205.141.419				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															20,59	25,88					56,56	70,80	

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															Sangat Rendah									
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : - KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF - KOORDINASI DAN KERJASAMA YANG BAIK DARI SELURUH STAKE HOLDER DAN APARATUR DIKECAMATAN																								
FAKTOR PENHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : - KUALITAS YANG BELUM MERATA - SARANA DAN PRASARANA YANG TERBATAS - KURANGNYA ANGGARAN - PENGAWASAN DAN EVALUASI YANG LEMAH																								
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) : - PENINGKATAN KAPASITAS SDM - PENGUATAN SARANA DAN TEKNOLOGI - OPTIMALISASI ANGGARAN - PENGUATAN KOORDINASI INTERNAL DAN EKSTERNAL - EVALUASI DAN PENGAWASAN KINERJA																								
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) : - PENYELARASAN PROGRAM KEGIATAN KECAMATAN DENGAN PERIORITAS DAERAH - PENGUATAN USULAN PROGRAM PERIORITAS MELALUI MJUSRENBANG - PENGAJUAN KEBUTUHAN SARANA, PRASARANA DAN SDM - PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN BERBASIS DIGITAL - PENINGKATAN KAPASITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KECAMATAN - MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KECAMATAN YANG TERINTEGRASI - PENGUATAN FORUM DIKECAMATAN																								

KECAMATAN SOPPENG RIAJA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat t Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat t Daerah Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat t Daerah Tahun berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat t Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Per an gk at Da era h Pe na ng gu ng Ja wa b		
									I	II											
1	2	3	4		5		6		7		8				12		13 (6 + 12)		14=13/5 X 100 %		15
			Uraian	Sa tu an	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Soppeng	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan Soppeng Riaja	Poin t	15	17.837.364.140	9	8.288.496.454	3	3.203.470.372	3	718.180.819	3	727.492.269	6	1.445.673.088	15	9.734.169.542	100,00	54,57	Kec. Soppeng Riaja
			Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JPL	100	265.779.000	20	11.620.188	6	6.600.000	-	-								0,00	

	peng Riaja																				
1.1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundangn		500	13.544.209.540	272	6.828.862.866	100	2.682.388.992	94	638.053.253	94	624.998.860	94	1.263.052.113	366	8.091.914.979	73,25	59,74	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	160	13.544.209.540	87	6.828.862.866	31	2.682.388.992	29	638.053.253	29	624.998.860	29	1.263.052.113	116	8.091.914.979	72,50	59,74	
1.2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundangn		500	265.779.000	80	11.620.188	100	6.600.000	-	-	-	-	-	80	11.620.188	16,00	4,37		

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	or ang	40	265.779.000	8	11.620.188	6	6.600.000	-	-			-	8	11.620.188	20,00	4,37		
1.3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administ rasi Keterpen uhan layanan Administ rasi Perangka t Daerah		500	2.267.488.000	239	746.481.289	100	152.609.210	13	24.568.650	40	50.635.884	49	75.204.534	288	821.685.823	57,58	36,24	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Banguna n Kantor yang Disediak an/pener angan banguna n kantor yang diadakan	pa ke t	15	29.000.000	2	876.000	1	536.500	1	479.500	1	57.000	1	536.500	3	1.412.500	20,00	4,87	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediak an	\p ak et	15	58.300.000	3	744.000	3	1.603.700			3	1.603.700	3	1.603.700	6	2.347.700	40,00	4,03	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pa ke t	6 0	1.06 836 1.00 0	2 5	80.9 28.4 00	1 1	37.0 97.2 00			6	17.8 83.2 54	6	17.8 83.2 54	31	98.81 1.654	51, 67	9, 25	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan di sedakan	Pa ke t	3 0	67.0 00.0 00	6	10.5 43.0 00	3	6.14 2.61 0	3	940. 100	3	683. 680	3	1.62 3.78 0	9	12.16 6.780	30, 00	18 ,1 6	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Do ku m en	2 5	42.0 00.0 00	1 5	22.0 30.0 00	5	3.36 0.00 0					-	-	15	22.03 0.000	60, 00	52 ,4 5	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	La po ra n	6 0	11.7 00.0 00	2 4	19.8 03.0 00	1 2	13.8 49.1 00			6	4.64 2.80 0	6	4.64 2.80 0	30	24.44 5.800	50, 00	20 8, 94	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	La po ra n	6 0	991. 127. 000	3 6	611. 556. 889	1 2	90.0 20.1 00	3	23.1 49.0 50	3	25.7 65.4 50	6	48.9 14.5 00	42	660.4 71.38 9	70, 00	66 ,6 4	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik		5 0 0	309. 995. 000	1 6 4	112. 427. 000	1 0 0	99.5 37.7 00	-	-				-	16 4	112.4 27.00 0	32, 86	36 ,2 7	

			Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah																	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit mebel yang disediakan	un it	2 0	56.5 35.0 00	-	-	4	16.1 87.0 00							-				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	U nit	2 5	309. 995. 000	1 1	112. 427. 000	1 1	83.3 50.7 00	-	-			-	11	112.4 27.00 0	44, 00	36 ,2 7		
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenyediaan layanan jasa penunjang urusan kantor		5 0 0	918. 571. 600	2 3 3	438. 232. 940	1 0 0	184. 774. 870	17	30.2 89.7 16	2 5	39.0 94.8 25	42	69.3 84.5 41	27 5	507.6 17.48 1	55, 00	55 ,2 6	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	La po ra n	6 0	134. 772. 000	1 2	25.3 64.2 00	1 2	39.0 37.3 00			6	18.7 30.6 00	6	18.7 30.6 00					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	la po ra n	6 0	204. 799. 600	3 6	53.7 68.7 40	1 2	26.9 37.5 70	3	5.08 9.71 6	3	3.96 4.22 5	6	9.05 3.94 1	42	62.82 2.681	70, 00	30 ,6 8	

			Disediak an																	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediak an	la po ra n	6 0	579. 000. 000	3 6	359. 100. 000	1 2	118. 800. 000	3	25.2 00.0 00	3	16.4 00.0 00	6	41.6 00.0 00	42	400.7 00.00 0	70, 00	69 ,2 1
1.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persenta se Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah yang dipeliha ra		5 0 0	797. 100. 000	1 2 8	150. 872. 171	1 0 0	77.5 59.6 00	14	25.2 69.2 00	1 7	12.7 62.7 00	31	38.0 31.9 00	15 9	188. 904. 071	31, 71	23 ,7 0
		Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasiona l	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasio nal atau lapangan yang Dipelihar a dan dibayark an Pajaknya	un it	5 5	186. 250. 000	1 8	56.3 70.9 20	7	53.1 98.6 00	3	24.4 14.2 00	1	8.34 2.70 0	4	32.7 56.9 00	22	89.12 7.820	40, 00	47 ,8 5
		Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihar a	un it	2 5	87.5 00.0 00	3 1	18.6 80.0 00	2 5	11.3 40.0 00	2	855. 000	5	4.42 0.00 0	7	5.27 5.00 0	38	23.95 5.000	152 ,00	27 ,3 8

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit	20	57.850.000	8	14.599.400	4	13.021.000					-	-	8	14.599.400	40,00	25,24				
																				%	44,40	35,93		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																		-						
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan pada Kantor Kecamatan Soping Riaja	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Dokumen SOP Pelayanan Kecamatan Yang disusun dan Diimplementasikan		5000	388.000.000	224	109.926.007	100	25.492.940	32	86.186.907	19	-68.192.567	50	17.994.340	274	127.920.347	54,70	32,97	Kec. Soping Riaja			

2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenyuluhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		500	124.250.000	272	89.103.507	100	24.837.940	63	86.186.907	38	-68.192.567	100	17.994.340	372	107.097.847	74,36	86,20
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD dan atau instansi vertikal	laporan	32	37.500.000	22	69.610.007	6	16.576.900	5	86.186.907	1	-72.513.607	6	13.673.300	28	83.283.307	87,50	22,09
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerint	Dokumen	12	86.750.000	7	19.493.500	2	8.261.040			2	4.321.040	2	4.321.040	9	23.814.540	75,00	27,45

		Kecamatan	ahan di Tingkat Kecamat an																	
2.2		<i>Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han yang Tidak Dilaksana kan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamata n</i>	<i>Persenta se Keterpen uhan Pelayan an public di Tingkat Kecamat an sesuai SOP</i>		5 0 0	263. 750. 000	2 0 0	20.8 22.5 00	1 0 0	655. 000	-	-		-	-	7	20.8 22.5 00	1,4 0	7, 89	
		Peningkata n Efektifitas Pelaksanaa n Pelayanan kepada Masyaraka t di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordina si/Sinerg i dengan Perangka t Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliha raan Sarana dan Prasaran a Pelayana n	la po ra n	1 6	263. 750. 000	7	20.8 22.5 00	2	655. 000				-	-	7	20.82 2.500	43, 75	7, 89	
Rata-rata capaian kinerja																		37, 88	47 ,0 5	
Predikat Kinerja																		San gat Ren dah	Sa ng at Re nd	

																				ah	
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/lembaga		500	2.192.145.000	287	1.127.995.268	100	508.728.660	56	61.413.670	44	32.345.700	65	93.809.370	352	1.221.804.638	70,33	55,74	Ke c. So pp en g Ria ja
3.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan		500	37.500.000	300	3.532.500	100	1.320.000	7	100.000	7		7	150.000	307	3.682.500	61,40	9,82	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	20	37.500.000	15	3.532.500	14	1.320.000	1	100.000	1	50.000	1	150.000	16	3.682.500	80,00	9,82	

3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan		500	1.857.895.000	231	602.449.840	100	294.731.760	61	17.439.670	26	28.194.600	87	45.634.270	318	648.084.110	63,64	34,88
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga	20	719.395.000	13	52.701.400	14	47.656.470	14	17.439.670			14	17.439.670	27	70.141.070	135,00	9,75
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	8	75.000.000	4	311.132.640	1	109.795.929,61	-	-			-	-	4	311.132.640	50,00	414,84
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / ormas	8	1.000.000	14	237.315.800	6	136.709.360			6	28.194.600	6	28.194.600	20	265.510.400	250,00	26,55

		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	28	63.500.000	4	1.300.000	2	570.000					-	-	4	1.300.000	14,29	2,05			
3.3		Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina	lembaga	500	296.750.000	300	522.012.928	100	212.676.900	100	43.874.000	100	4.151.100	100	48.025.100	400	570.038.028	80,00	192,09			
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lembaga	20	296.750.000	15	522.012.928	9	212.676.900	9	43.874.000	9	4.151.100	9	48.025.100	24	570.038.028	120,00	192,09			
																			%	68,35	78,93		
																			Predikat Kinerja		Sedang	Tinggi	
4	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan ketertarikan dan ketertiba	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani		500	167.000.000	250	93.627.800	100	28.475.000	29	11.810.000			29	11.810.000	1	105.437.800	0,20	63,14	Kec. Sope ng Riaja		

	n																			
4.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	la po ra n	5 0 0	167. 000. 000	2 5 0	93.6 27.8 00	1 0 0	28.4 75.0 00	29	11.8 10.0 00		29	11.8 10.0 00	1	105. 437. 800	0,2 0	63 ,1 4	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	la po ra n	6 0	125. 000. 000	3 6	82.9 02.8 00	1 2	18.7 75.0 00	3	4.05 0.00 0		3	4.05 0.00 0	39	86.95 2.800	65, 00	69 ,5 6	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	la po ra n	1 0	42.0 00.0 00	2	10.7 25.0 00	2	9700 000	1	7.76 0.00 0		1	7.76 0.00 0	3	18.48 5.000	30, 00	44 ,0 1	

			Agama dan Tokoh Masyarakat																		
Rata-rata capaian kinerja																		31,73	58,90		
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Rendah		
5	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menerima pelayanan pada Kantor Kecamatan Soping Riaja	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Dokumen SOP Pelayanan Kecamatan Yang disusun dan Diinplemen tasikan		125	11750000	276	107115800	13	19858500						-	69	28.631.000	55,20	24,37	Kec. Soping Riaja
5.1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Keterpenyuluhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		125	11750000	276	107115800	13	19858500						-	69	107.115.800	55,20	91,16	

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	or an g	1 2 5	1175 0000 0	6 9	107. 115. 800	1 3	1985 8500						-	69	107.1 15.80 0	55, 20	91 ,1 6	
Rata-rata capaian kinerja																			55, 20	68 ,9 0	

Predikat Kinerja																			Ren dah	Se da ng	
6		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWA SANPEME RINTAHAN DESA	Peresenta se Pemerint ahan desa/kel urahan yang dibina dan diawasi	la po ra n	2 5	37.5 00.0 00	3 0 0	4.04 7.50 0	5	1.57 8.00 0	-				-	-	5	4.047 .500	20, 00	10 ,7 9	Ke c. So pp en g Ria ja
6.1		Fasilitasi, Rekomend asi dan Koordinas i Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	Jumlah kegiatan Fasilitas i, Rekome ndasi dan Koordin asi Pembina an dan Pengawa san Pemerint ahan Desa yang terlaksa na	la po ra n	2 5	37.5 00.0 00	3 0 0	4.04 7.50 0	5	1.57 8.00 0	-				-	-	5	4.04 7.50 0	20, 00	10 ,7 9	
		Koordinasi Pendampin gan Desa di Wilayahny a	Jumlah Laporan Hasil Koordina si Pendamp ingan Desa di Wilayahn ya	la po ra n	2 5	37.5 00.0 00	1 1	4.04 7.50 0	5	1.57 8.00 0					-		11	4.047 .500	44, 00	10 ,7 9	
Rata-rata capaian kinerja																			28, 00	10 ,7 9	

											Predikat Kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Jumlah anggaran dan Realisasi dari seluruh Program										#### #### ####	877.591.396	691.645.402		1.569.286.798	11.222.010.827				
										Total rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh Program					44,26	50,08			
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					Sangat Rendah	Rendah		
																-			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Jumlah Anggaran yang tersedia													
Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. kurangnya koordinasi dengan pihak terkait sehingga ada beberapa kegiatan kurang realisasinya 2. kurangnya pemahaman terhadap sistem perencanaan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):													

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

BKPSDM

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun	Realisasi Capaian Kinerja Renstra	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD	Realisasi Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja dan	Tingkat Capaian Kinerja dan	Realisasi Kinerja dan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja dan	Unit PD Penganggaran
----	---------	------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------

					2026 (Akhir Periode Renstra PD)	PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024	Tahun Berjalan TA 2025 yang di Evaluasi			Anggara n Renja PD yang dievalua si Triwulan II TA 2025	Realisas i Anggara n Renja PD s/d Triwula n II TA. 2025 (%)	Renstra Perangka t Daerah s/d Triwulan II TA. 2025	Realisas i Anggara n Renstra PD s/d Triwula n II TA. 2025 (%)	ng jawa b									
(1)	(2)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = 9 +10		(12) = 11/8*10 0		(13) = 7 + 11		(14) = 13/6*10 0		(16)
			Uraian	Satu an	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Menin gkatn ya kualit as pener apan SAKIP pada BKPS DM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																					
		Kepegawaian																					
		Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Maturitas SPIP BKPSDM	Nilai	4	### ### ##	3	### ### ##	4	##### ##	0	##### ##	0	##### ###	0,00	### ### #	0 %	## ## #	3,00	### ### ##	## ## ##	## ## #	
			Rata-rata pegawai mendapat kan pendidika n dan pelatihan	JP	100	### ### ##	70,7	### ### ##	20	##### ##	16,96	-	# # #	-	22,91	-	## ## #	0,00 %	93,65	### ### ##	## ## ##	## ## #	
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentas e ASN yang menerima gaji dan tunjangan	%	###	### ### ##	## ## ##	### ### ##	### ## ##	##### ##	25 %	##### ##	25 %	##### ###	## ## #	### ### #	50 %	## ## #	350 %	### ### ##	70 %	## ## #	

		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	170	### ### ##	85	### ### ##	35	2.899.097.690	28	681.255.001	27	720.324.527	27	### ### #	77%	## ## #	112	### ### ##	## ## ##	## ## ##	
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ASN BKPSDM yang telah mengikuti pengembangan SDM	%	###	### ### ##	## ## ##	### ### ##	### #	##### ##	0%	-	-	-	## ## #	-	0,00%	0,00%	## ## #	### ### ##	## ## ##	## ## #	
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	170	### ### ##	63	### ### ##	35	81.708.000	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	63	### ### ##	## ## ##	## ## #	
		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tiap tahun	%	###	### ### ##	## ## ##	### ### ##	### #	##### ##	25%	##### ##	25%	##### ##	## ## #	### ### #	## ## #	## ## #	## ## #	### ### ##	## ## ##	## ## #	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	15	### ### ##	7	### ### ##	4	##### ##	0	-	2	##### ###	2	### ### #	## ## #	## ## #	9	### ### ##	## ## ##	## ## #	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	15	### ### ##	6	### ### ##	2	##### ##	0	-	1	##### ###	1	### ### #	## ## #	## ## #	7	### ### ##	## ## ##	## ## #	

		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	30	### ### ##	18	### ### ##	6	##### ##	0	##### ##	3	##### ###	3	### ### #	## ## #	## ## #	21	### ### ##	## ## #	## ## #	
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah tiap tahun	%	###	### ### ##	## ##	### ### ##	### #	##### ##	## ##	-	4 9 %	##### ###	## ## #	### ### #	## ## #	0, 00 %	## ## #	### ### ##	## ## #	## ## #	
		Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	24	### ### ##	1	### ### ##	2	##### ##	0	-	-	-	-	-	0 %	0, 00 %	1	### ### ##	## ## #	## ## #	
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	14	### ### ##	20	### ### ##	2	##### ##	0	-	2	##### ###	2	### ### #	## ## #	0, 00 %	22	### ### ##	## ## #	## ## #	
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	%	###	### ### ##	## ##	### ### ##	### #	##### ##	## ##	##### ##	# # # #	##### ###	## ## #	### ### #	## ## #	## ## #	## ## #	### ### ##	## ## #	## ## #	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	5	### ### ##	5	### ### ##	1	##### ##	0	##### ##	-	##### ###	-	### ### #	0, 00 %	## ## #	5	### ### ##	## ## #	## ## #	

		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara tiap tahun	%	###	### ### ##	## ## ##	### ### ##	### #	##### ##	## ##	-	# # #	##### ###	## ## #	### ### #	0, 00 %	## ## #	## ## #	### ### ##	## ## ##	## ## #	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	100	### ### ##	54	### ### ##	18	##### ##	0	-	1 0	##### ###	10	### ### #	## ## #	## ## #	64	### ### ##	## ## ##	## ## #	
		Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	65	### ### ##	0	-	0	-	0	-	-		-	-	0, 00 %	0, 00 %	0	-	## ##	0, 00 %	
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	90	### ### ##	30	### ### ##	18	##### ##	0	-	2	655.0 00	2	655 .00 0	## ## #	9, 49 %	32	### ### ##	## ## ##	## ## #	
	Terwujudnya ASN yang profesional dan berintegritas	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Kategori A (81-100)	A(81-100)	### ### ##	69 ,1 0	### ### ##	B (61-80)	##### ##	0	##### ##	-	##### ###	-	### ### #	0	## ## #	## ## #	### ### ##	## ## ##	## ## #	

		Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Persentase keterpenuhan ASN tiap tahun yang dikelola secara elektronik	%	###	### ### ##	## ## ##	### ### ##	### #	##### ##	## ##	##### ##	# # # #	##### ###	## ## #	### ### #	## ## #	## ## #	## ## #	### ### ##	## ## ##	## ## #	
		Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	dokumen	10	### ### ##	6	### ### ##	2	##### ##	0	-	2	260.295	2	260.295	## ## #	## ## #	8	### ### ##	## ##	2,34%	
		Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	dokumen	5	### ### ##	3	### ### ##	1	##### ##	0	##### ##	-	##### ###	-	### ### #	0,00%	## ## #	3	### ### ##	## ##	## ## #	
		Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	dokumen	5	### ### ##	3	### ### ##	1	##### ##	0	##### ##	-	##### ###	-	### ### #	0,00%	## ## #	3	### ### ##	## ##	## ## #	

		Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	lembaga	10	### ### ##	4	### ### ##	1	##### ##	0	##### ##	-	##### ###	-	### ### #	0, 00 %	## ## #	4	### ### ##	## ## #	## ## #	
		Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	dokumen	5	### ### ##	3	### ### ##	1	##### ##	0	##### ##	-	195.3 60	-	### ### #	0, 00 %	5, 98 %	3	### ### ##	## ## #	6, 34 %	
		Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	dokumen	10	### ### ##	6	### ### ##	2	##### ##	0	-	1	##### ###	1	### ### #	## ## #	## ## #	7	### ### ##	## ## #	## ## #	
		Mutasi dan promosi ASN	Persentase keterisian jabatan yang sesuai dengan syarat jabatan	%	###	### ### ##	## ##	### ### ##	### #	##### ##	## ##	##### ##		##### ###	## ## #	### ### #	## ## #	## ## #	## ## #	### ### ##	## ## #	## ## #	
		Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksanaan dan mutasi ASN antar daerah	dokumen	25	### ### ##	17	### ### ##	6	##### ##	0	##### ##	-	##### ###	-	### ### #	0, 00 %	## ## #	17	### ### ##	## ## #	## ## #	
		Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat	dokumen	10	### ### ##	6	### ### ##	2	##### ##	0	##### ##	-	##### ###	-	### ### #	0, 00 %	## ## #	6	### ### ##	## ## #	## ## #	

			ASN																				
		Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	dokumen	5	### ### ##	5	### ### ##	1	##### ##	0	##### ##	-	##### ###	-	### ### #	0,00 %	## ## #	5	### ### ##	## ##	## ##	
		Pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang berpendidikan D-IV sampai S3	%	###	### ### ##	## ##	### ### ##	### #	##### ##	## ##	##### ##	# # #	##### ###	## ## #	### ### #	## ## #	## ## #	## ## #	### ### ##	## ##	9,40 %	
		Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	280	### ### ##	10 9	### ### ##	56	##### ##	19	##### ##	2	##### ###	21	### ### #	## ## #	## ## #	13 0	### ### ##	## ##	9,40 %	
		Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Persentase PNS yang memiliki penilaian kinerja bernilai minimal baik	%	###	### ### ##	## ##	### ### ##	### #	##### ##	## ##	##### ##		##### ###	## ## #	### ### #	0 %	## ## #	## ## #	### ### ##	## ##	## ##	
		Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	15	### ### ##	9	### ### ##	3	##### ##	0	##### ##	-	##### ###	-	### ### #	0,00 %	## ## #	9	### ### ##	## ##	## ##	
		Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Orang	###	### ### ##	33 2	### ### ##	263	##### ##	0	-	-	739.260	-	739.260	0,00 %	2,73 %	33 2	### ### ##	## ##	7,31 %	

		Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	Orang	34	### ### ##	26	### ### ##	6	##### ##	2	-	-	##### ###	2	### ### #	## ## #	## ## #	28	### ### ##	## ##	## ## #	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP pertahun	%	###	### ### ##	## ## ##	### ### ##	80 %	##### ##	## ##	##### ##	# # #	##### ###	## ## #	### ### #	1, 67 %	3, 54 %	## ## #	### ### ##	## ##	## ## #	
		Pengembangan kompetensi teknis	Persentase penyusunan dokumen rencana pengembangan kompetensi	%	###	### ### ##	0	-	### #	-		-		-	-	-	0 %	0, 00 %	-	-	## ##	0, 00 %	
		Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan	dokumen	1 dokumen	### ### ##	0	-	0	-					-	-	0 %	0, 00 %	-	-	## ##	-	

			urusan pemerintah umum yang disusun																				
		Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang lulus diklat bernilai minimal baik	%	###	### ### ##	## ##	### ### ##	### #	##### ##	0	##### ##		##### ###	0 %	### ### #	0 %	3, 54 %	30 0 %	### ### ##	## ##	## ## #	
		Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	laporan	30	### ### ##	7	### ### ##	3	##### ##	0	##### ##	-	##### ###	-	### ### #	0, 00 %	3, 54 %	7	### ### ##	## ##	## ## #	
JUMLAH ANGGARAN						### ### ##		### ### ##		##### ##		##### ##		##### ###		### ### #		## ## #		### ### ##		## ## #	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	## ##	## ##			## ##	## ##	

	#	#				#	
Predikat Kinerja	sa ng at re nd ah	sa ng at re nd ah			re nd ah	sa ng at re nd ah	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)	## ## #	## ## #			## ## ##	## ## #	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)	sa ng at re nd ah	sa ng at re nd ah			tin ggi	sa ng at re nd ah	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. Komitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan							
2. Adanya uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas, sehingga aparatur memahami tugas pokok dan fungsinya							
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Dinamika perubahan peraturan yang sangat cepat							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :							

DINAS SOSIAL

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TRIWULAN I + TRIWULAN IV ANGGARAN 20254)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II ANGGARAN 2025 (%)	UNIT PER ANGKAT DAERAH PENGANGGUN GAWAB
								I	II	III	IV				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) = 9+10+11+12		(15) = 7 + 13		(16) = 15/6 * 100		(17)
				URAIA N	SA TU AN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Meni ngka tkan pelay anan kesej ahter aan sosial		1	Urusan Pemerin tahan Wajib Yang Berkaita n Dengan Pelayan an Sosial				25.016.4 21.047		43986454 40		3.714.43 4.915		592.180.2 85		966.045. 204						1.558.22 5.489		5.956.870. 929		23,8 1	
	Terlak sanana ya Penyel enggar aan urusa n dan sub urusa n yang terpen uhi dukun gan admin istrasi nya, sarana dan prasar anany a dan komp etensi aparap urnya	1,06	Urusan Pemerin tahan Bidang Sosial				25.016.4 21.047		43986454 40		3.714.43 4.915		592.180.2 85		966.045. 204						1.558.22 5.489		5.956.870. 929		23,8 1	
		1.06.01	PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH KABUPA TEN/KO TA			4	15.604.6 17.740	3	4.705.86 1.230	3	2.686.86 9.215	0	549.580.2 85		687.745. 384					3	1.237.32 5.669	3	5.943.186. 899	75	38,0 9	
		1.06.01 .2.02	Adminis trasi Keuang an			1 0 0	12.376.6 79.909	1 0 0	3.811.90 4.810	1 0 0	2.289.49 9.685		509.422.0 17		554.483. 840					50	1.063.90 5.857	100	4.875.810. 667	100	39,4 0	

			Perangkat Daerah																						
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100	12.376.679.909	100	3.811.904.810	100	2.289.499.685		509.422.017		554.483.840				50	1.063.905.857	100	4.875.810.667	100	39,40	
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25	460.000.000	20	18.260.098	5	13.988.000	0	-		5.271.100				10	5.271.100	30	23.531.198	120	5,12	
		1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Organisasi	25	460.000.000	20	18.260.098	5	13.988.000	0	-		5.271.100				10	5.271.100	30	23.531.198	120	5,12	
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	1.526.702.165	100	642.129.019	100	134.343.030	0	17.031.567		40.254.804				100	57.286.371	100	699.415.390	100	45,81	
		1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	44.293.200		17.073.000	6	7.159.000		-		-					-		17.073.000		38,55	

		1.06.01 .2.06.0 2	Penyediaa n Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumla h Paket Peralat an dan Perlen gkapa n Kantor yang Disedi akan	Pa ket		260.908. 565	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
		1.06.01 .2.06.0 3	Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga	Jumla h Paket Peralat an Ruma h Tangga yang Disedi akan	Pa ket	1 3	24.687.0 00	6.824.300	1 3	4.165.700	-	-	-	-	-	-	6.824.300	27,6 4	
		1.06.01 .2.06.0 4	Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumla h Paket Bahan Logisti k Kantor yang Disedi akan	Pa ket	2	72.070.0 00	40.437.40 0	2	25.919.10 0	-	2.111.400	-	2.111.40 0	-	42.548.800	59,0 4		
		1.06.01 .2.06.0 6	Penyedia an Barang Cetakan dan Penggaa ndaan	Jumla h Paket Barang Cetaka n dan Penggaa ndaan yang Disedi akan	Pa ket	1 5 0 0	63.615.0 00	16.570.00 0	3	7.849.530	-	-	-	-	-	16.570.000	26,0 5		
		1.06.01 .2.06.0 8	Fasilitasi Kunjung an Tamu	Jumla h Lapora n Fasilit asi Kunju ngan Tamu	La por an	5	19.960.0 00	7.764.000	1 1 0	3.921.500	-	-	-	-	-	7.764.000	38,9 0		

		1.06.01 .2.06.0 9	Penyeleng garan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumla h Lapora n Penyel enggar aan Rapat Koordi nasi dan Konsul tasi SKPD	La por an	5	1.041.16 8.400		553.463.3 19		85.328.20 0	17.031.567		38.143.40 4					55.174.9 71		608.638.29 0		58,4 6	
		1.06.0 1.2.07	Pengad an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah			1 0 0	392.799. 266	1 0 0	23.060.0 00	1 0 0	65.659.8 00	-		60.388.5 01		100	60.388.5 01	100	83.448.501	100	21,2 4			
		1.06.01 .2.07.0 1	Pengada an Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n	Jumla h Unit Kendar aan Dinas Operas ional atau Lapan gan yang Disedi akan	Uni t	5	158.560. 000	-		2	-	-		-			-		-		0,00			
		1.06.01 .2.07.0 6	Pengada an Peralata n dan Mesin Lainnya	Jumla h Unit Peralat an dan Mesin Lainnya yang Disedi akan	Uni t	7	234.239. 266	15.550.00 0		1	65.659.80 0	-		60.388.50 1			60.388.5 01		75.938.501		32,4 2			
			Pengada an Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n	Jumla h Unit Peralat an dan Mesin Lainnya yang Disedi akan	Uni t	1		7.510.000			-			-			-		7.510.000		#DI V/0!			

		1.06.0 1.2.09	PEMELI HARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAH DAERAH			1 0 0	405.564. 400	1 0 0	112.183. 000	1 0 0	60.364.2 00	0	5.812.132	10.850.0 00				100	16.662.1 32	100	128.845.13 2	100	31,7 7	
		1.06.01 .2.09.0 1	Penyediaa n Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan dan Pajak Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumla h kendar aan roda empat dan roda dua yang dipelih ara	Uni t	7	157.500. 000		51.076.30 0	2	15.600.00 0		823.258	4.500.000					5.323.25 8		56.399.558		35,8 1	
		1.06.01 .2.09.0 2	Penyediaa n Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan	Jumla h STNK kendar aan dinas/ operasi onal yang diperp anjang perizin annya	Uni t	8	197.680. 000		36.373.00 1	7	34.494.20 0	1	4.988.874	5.500.000					10.488.8 74		46.861.875		23,7 1	
		1.06.01 .2.09.0 6	Pemeliha raan Peralata n dan Mesin Lainnya	Jumla h Pemeli haraan Peralat an dan Mesin Lainnya	Uni t	1 2	24.950.0 00		9.600.000	1 2	4.915.000	-		850.000					850.000		10.450.000		41,8 8	
		1.06.01 .2.09.0 9	Pemelihar aan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumla h perlen gkapa n gedun g kantor yang dipelih	Uni t	5	25.434.4 00		12.276.00 0	0	5.355.000	-		-					-		12.276.000		48,2 7	

		1.06.02 .2.03.0 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	35	218.738.463		45.835.300	7	20.316.800	-		1.175.000						1.175.000		47.010.300		21,49	
		1.06.02 .2.03.0 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluaraga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	50	469.722.220		86.463.000	2	27.994.700			7.100.000						7.100.000		93.563.000		19,92	
		1.06.02 .2.03.0 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi	Sertifikat	5	159.693.418		-	0	-	-		-						-		-		0,00	

			Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota																			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																100,00	9,93			100,00		
PREDIKAT KINERJA																Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi		
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				66.069.000	-	-	-	-						-	-			0,00	
		1.06.032.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Keurahan Asal				66.069.000	-	-	-	-						-	-			0,00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Anak Terlant ar, Lanjut Usia Terlant ar, serta Gelanda ngan Pengemi s di Luar Panti Sosial																					
		1.06.04 .2.01.0 1	Penyedia an Permak anan	Jumla h Orang yang Menda patkan Pemen uhan Kebut uhan Perma kanan Sesuai denga n Stand ar Gizi Minim al Kewen angan Kabup aten/K ota	Or an g	2 0 0	658.269. 060		365.723.5 50	4 0	41.325.90 0						35.370.19 0		35.370.1 90		401.093.74 0		60,9 3	
		1.06.04 .2.01.0 2	Penyedia an Sandang	Jumla h Orang yang Meneri ma Pakaia n dan Keleng kapan Lainny a yang Tersedi a dalam 1 Tahun Kewen angan	Or an g	2 0 0	658.269. 060		107.748.3 00	4 0	33.494.40 0						28.180.00 0		28.180.0 00		135.928.30 0		20,6 5	

				Kabupaten/Kota																			
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	19.643.802	135.168.000	2	11.043.900			4.380.430				4.380.430		139.548.430			710,39	
		1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	47.782.222	80.783.800	3	10.862.300			3.307.500				3.307.500		84.091.300			175,99	
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	132	308.991.611	-	0	-			-				-		-			0,00	

		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyan dan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial			100	653.330.000	100	190.482.250	100	-	0	-	-	-	-	0	-	100	190.482.250	100	29,16	
		1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Pencegahan Narkoba, HIV/AIDS	Orang	600	300.000.000		20.080.500	50	-	-	-	-	-	-	-	-		20.080.500		6,69	
		1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membuat Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identit	Orang	35	7.000.000		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-		-		0,00	

				as Anak bagi Penyang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota																		
		1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Menda patkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	18	50.500.000	-	0	-				-				-		-	0,00	
		1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabup	Dokumen	5	295.830.000	170.401.750	3	-			-				-		170.401.750	57,60		

[illegible]

		1.06.05 .2.02.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluar ga yang Mendapatkan Pengen tasan Fakir Miskin Kabup aten/K ota	Kel uar ga	1	125.000.000	-	0	-								-		-		0,00		
		1.06.05 .2.02.0 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluar ga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluar ga Kewenangan Kabup aten/K ota	Kel uar ga	1 1 0 0	538.895.844	3.306.105.796	1 1 0 0	510.306.800								98.637.500		98.637.500		3.404.743.296	631,80	
		1.06.05 .2.02.0 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabup aten/K ota	Or an g	5 0 0	338.120.403	-	0	-								-		-		0,00		

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		100,00	19,91			100,00	111,85	
PREDIKAT KINERJA																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi	
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			100	1.970.885.371	100	1.208.888.658	100	234.086.300	0	33.000.000		69.551.080			0	102.551.080	100	1.311.439.738	100	66,54	
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			0	1.610.885.371	0	868.289.058	0	94.921.000	0	-		36.928.370			0	36.928.370	0	905.217.428	#DIV/0!	56,19	
		1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggapan Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7500	289.000.000		143.068.750	1500	30.602.600	-	-		-				-		143.068.750		49,50	
		1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan	Unit	5	125.000.000	-	0	-	-	-	-		-				-		-		0,00	

				Kabup aten/K ota																				
		1.06.06 .2.01.0 4	Penanga nan Khusus bagi Kelompo k Rentan	Jumla h Orang yang Menda patkan Penan ganan Khusu s bagi Kelom pok Rentan Kewen angan Kabup aten/K ota	Or an g	6 0 0	1.021.88 5.371	708.550.8 08	4 0	55.398.90 0			36.720.80 0					36.720.8 00		745.271.60 8		72,9 3		
		1.06.06 .2.01.0 5	Pelayana n Dukung an Psikosos ial	Jumla h Korba n Benca na yang Menda patkan Layana n Dukun gan Psikos osial Kewen angan Kabup aten/K ota	Or an g	1 0 0	175.000. 000	16.669.50 0	2 0	8.919.500	-		207.570					207.570		16.877.070		9,64		
		1.06.0 6.2.02	Penyele nggaraa n Pember dayaan Masyar akat terhada p Kesiaps iagaan Bencan			0	360.000. 000	0	340.599. 600	1 0	139.165. 300	0	33.000.00 0					0	65.622.7 10	0	406.222.31 0	#DI V/0!	112, 84	

			a Kabupa ten/kota																						
		1.06.06 .2.02.0 2	Koordina si, Sosialisa si dan Pelaksan aan Taruna Siaga Bencana	Jumla h Orang yang Melaks anaka n Koordi nasi, Sosialisa sasi dan Pelaks anaan Tarun a Siaga Benca na Kewen angan Kabup aten/K ota	Or an g	1 0	360.000. 000		340.599.6 00	1 0	139.165.3 00	1 0	33.000.000		32.622.71 0					65.622.7 10		406.222.31 0		112, 84	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		100, 00	43,81			100,0 0	66,54		
PREDIKAT KINERJA																		Sang at Ting gi	Rendah			Sang at Tingg i	Rend ah		
		1.06.07	PROGRA M PENGEL OLAAN TAMAN MAKAM PAHLA WAN	Persen tase Pengel olaan TMPN yang menda patkan pemeli haraan		1 0 0	384.223. 547	1 0 0	150.664. 375	1 0 0	45.800.8 00	0	9.600.000		9.600.00 0			0	19.200.0 00	100	169.864.37 5	100	44,2 1		
		1.06.0 7.2.01	Pemelih araan Taman Makam Pahlaw an Nasiona l	Jumla h TMPN yang menda patkan Pemeli haraan		7	384.223. 547	0	150.664. 375	7	45.800.8 00	0	9.600.000		9.600.00 0			0	19.200.0 00	0	169.864.37 5	0	44,2 1		

			Kabupaten/Kota																						
		1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	7	384.223.547		150.664.375,00	7	45.800.800		9.600.000		9.600.000					19.200.000		169.864.375		44,21	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	100,00	41,92				100,00	44,21		
PREDIKAT KINERJA																	Sangat Tinggi	Rendah				Sangat Tinggi	Rendah		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)																		31,63				86,19	41,99		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)																		Sedang				Tinggi	Rendah		
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																									
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																									
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																									
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																									

DINAS PMD-PPKB-PPPA

No	Sasaran	Kode Rekening						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja				Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Di Evaluasi Tahun Anggaran 2025		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun Anggaran 2025 (%)		Pena nggu ng Jawa b	
																	I		II									
(1)	(2)							(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10) 8+9		(11) =6+10		(12) = 11/5 * 100		(12)	
									URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
								DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
								URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				

Meni ngkat nya kuali tas pemb erday aan pere mpua n dan Perli ndun gan anak	2	0 8	0 2			PROGRA M PENGAR USUTAM AAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMP UAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	19	810.0 00.00 0	1 9	302.232. 694	1 8, 9 0	23.856. 670	0	0	0	0	0	0	0	18, 90	302.232. 694	98 ,1 8	37 ,3 1	Dinas PMD PPKB PPPA
	2	0 8	0 2	2. 0 1		Pelembag aan Pengarus utamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerint ah Kewenan gan Kabupate n/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam Pelembagaa n Pengarusut amaan Gender	PD	36	390.0 00.00 0	3 6	71.273.7 00		5.290.2 00	0	0	0	0	0	0	0	36	71.273.7 00	10 0	18 ,2 8	
	2	0 8	0 2	2. 0 1	0 0 0 2	Koordinas i dan Sinkronis asi Pelaksana an PUG Kewenang an Kabupate n/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaa n Pengarusta maan Gender (PUG) Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Dok	36	390.0 00.00 0	3 6	71.273.7 00	3 6	5.290.20 0	0	0	0	0	0	0	0	36	71.273.7 00	10 0, 00	18 ,2 8	Dinas PMDP PKBP PPA

		2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial	%	0,40	420.000.000	0,20	230.958.994	0,36	18.566.470	0	0	0	0	0	0	0,20	230.958.994	0,20	54,99			
		2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Organisasi	7	420.000.000	7	230.958.994		18.566.470	0	0	0	0	0	0	7	230.958.994	100,00	54,99	Dinas PMDP PKBP PPA		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																									79,68	36,77		
PREDIKAT KINERJA																										Tinggi	Sangat Rend	

																								ah		
	Terwujudnya Penuh ran Keke rasan terha dap Pere mpua n dan Anak	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	0,2	575.000.000	0,2	84.136.800	0,63	3.758.191.175	0	0	0,63	2.675.000	0,63	2.675.000	0,08	86.811.800	40	15,10	
		2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif sesuai peraturan perundang undangan	%	100	575.000.000	100	84.136.800	100	3.758.191.175	0	0	100	2.675.000	100	2.675.000	100	86.811.800	100	15,10	
		2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban	layanan	6	575.000.000	6	84.136.800	6	3.758.191.175	0	0	6	2.675.000	6	2.675.000	6	86.811.800	100,00	15,10	Dinas PMDP PKBP PPA

								Perempua n Korban Kekerasa n Kewenang an Kabupate n/Kota	Kekerasan Kewenanga n Kabupaten/ Kota																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																									80 ,0 0	15 ,1 0	
PREDIKAT KINERJA																									Ti ng gi	Sa ng at Re ndah	
		2	08	05			PROGRA M PENGEL OLAAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang menerapka n anggaran berbasis gender	%	95	289.0 00.00 0	88	100.122. 900		14.546. 630	0	0	88	2.65 0.00 0	88	2.65 0.00 0	88	102.772. 900	92 ,6 3	35 ,5 6		
		2	08	05	2.01		Pengump ulan, Pengolah an Analisis dan Penyajia n Data Gender dan Anak Dalam Kelemba gaan Data di Tingkat Daerah Kabupate n/kota	Persentase Keterpenuh an Data Gender dan Anak sesuai peraturan perundang undangan	%	100	289.0 00.00 0	100	100.122. 900	100	14.546. 630	0	0	100	2.65 0.00 0	100	2.65 0.00 0	100	102.772. 900	100	35 ,5 6		

		2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jenis	3	289.000.000	3	100.122.900	14.546.630	-	0	3	2.650.000	3	2.650.000	3	102.772.900	100	35,56	Dinas PMDP PKBP PPA	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							97,54	35,56		
PREDIKAT KINERJA																							Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase OPD yang menerapkan pemenuhan Hak Anak dalam Pelayanan Tupoksi OPDnya	%	100	420.000.000	100	518.983.550	100	65.210.230	0	0	100	17.877.700	100	17.877.700	100	536.861.250	100	127,82	
		2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenan	Status Predikat Kabupaten Layak Anak	KLA	KLA	420.000.000	936	518.983.550	750	65.210.230	0	0	936	17.877.700	936	17.877.700	936	536.861.250	100	127,82	

	Meni ngkat nya Kuali tas dan Akun tabili tas Kiner ja Dinas PMD PPKB PPPA	2	1 3	0 1			PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KAB/KO TA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pemberday aan Masyarakat , Pengendali an Penduduk dan KB, Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak	Nilai maturi tas	4	18.72 5.278 .265	3	11.362.6 53.756	3	3.281.0 35.826	3	645. 570. 652	3	803. 824. 936	3	1.44 9.39 5.58 8	3	12.812.0 49.344	75	68 ,4 2	
		2	1 3	0 1	2, 0 2		Adimistr asi Keuanga n Perangka t Daerah	Persentase Penyusuna n dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	%	10 0	16.24 1.278 .265	1 0 0	10.329.4 58.070		2.919.7 46.700	10 0	645. 570. 652	10 0	669. 012. 005	10 0	1.31 4.58 2.65 7	10 0	11.644.0 40.727	10 0	71 ,6 9	
		2	1 3	0 1	2, 0 2	0 0 0 1	Penyediaa n Gaji dan Tunjanag an ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/ bulan	36	16.24 1.278. 265	3 6	10.329.4 58.070	3 6	2.919.74 6.700	36	635. 370. 652	36	669. 012. 005	36	1.304 .382. 657	36	11.633.8 40.727	10 0	71 ,6 3	Dinas PMDP PKBP PPA
		2	1 3	0 1	2, 0 6		Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Persentase keterpenuh an layanan administras i umum perangkat daerah	%	10 0	655.0 00.00 0	1 0 0	169.835. 406	1 0 0	71.218. 500	10 0		10 0	28.1 10.7 10	10 0	28.1 10.7 10	10 0	197.946. 116	10 0	30 ,2 2	
		2	1 3	0 1	2, 0 6	0 0 0 1	Penyediaa n Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	12.50 0.000	1 0	3.820.00 0	1 0	1.015.90 0	0	0	0	0	0	0	10	3.820.00 0	10 0	30 ,5 6	Dinas PMDP PKBP PPA

		2	13	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	7.500.000	12	3.315.500	496.400	0	12	354.400	12	354.400	12	3.669.900	100	48,93	Dinas PMDP PKBP PPA	
		2	13	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	635.000.000	20	341.191.070	69.706.200	-	2	27.756.310	2	27.756.310	20	368.947.380	100	58,10	Dinas PMDP PKBP PPA	
		2	13	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	566.000.000	100	16.289.000	4.765.900	0	0	0	0	0	100	16.289.000	100	2,88		
		2	13	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5	135.000.000	1	16.289.000	4.765.900	0	0	0	0	0	1	16.289.000	20	12,07	Dinas PMDP PKBP PPA	
		2	13	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	%	100	497.500.000	100	372.712.804	93.566.726	100	10.200.000	100	25.722.241	100	35.922.241	100	408.635.045	100	82,14	
		2	13	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	350.000.000	2	230.889.362	33.797.390	0	0	2	12.322.875	2	12.322.875	2	243.212.237	100	69,49	Dinas PMDP PKBP PPA

		2	13	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	97.500.000	12	70.563.442	12	18.969.336	0	0	12	7.599.366	12	7.599.366	12	78.162.808	100	80,17	Dinas PMDP PKBP PPA
		2	13	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	50.000.000	12	71.260.000	12	40.800.000	3	10.200.000	12	5.800.000	12	16.000.000	12	87.260.000	100	174,52	Dinas PMDP PKBP PPA
		2	13	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	%	100	333.000.000	100	283.918.016		191.738.000	0	0	100	80.979.980	100	80.979.980	100	364.897.996	100	109,58	
		2	13	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	29	234.000.000	29	179.372.742		182.860.000	0	0	29	80.979.980	29	80.979.980	29	260.352.722	100	111,26	Dinas PMDP PKBP PPA
		2	13	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	2	36.500.000	3	4.374.000	3	4.400.000	0	0	0	0	0	0	3	4.374.000	150	11,98	Dinas PMDP PKBP PPA

		2	13	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	47.500.000	1	191.961.200		4.478.000		0		0		0	1	191.961.200	50	404,13	Dinas PMDP PKBP PPA	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																									93,82	84,57	
PREDIKAT KINERJA																									Sangat Tinggi	Tinggi	
	Meningkatnya status perkembangan desa	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama antar Desa dari 17,50% menjadi 75%	%	75	270.000.000	30	39.498.457		18.061.360	0	0	82,50	5.009.500	82,50	5.009.500	30	44.507.957	40	16,48		
		2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam kabupaten	Persentase MoU Kerja sama antar Desa yang ditetapkan	%	75	270.000.000	30	39.498.457	50	18.061.360	0	0	50	5.009.500	50	5.009.500	30	44.507.957	40	16,48		
		2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	dok	40	125.000.000	7	39.498.457	40	18.061.360	0	0	40	5.009.500	40	5.009.500	7	44.507.957	18	35,61	Dinas PMDP PKBP PPA	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																									32,50	22,86	
PREDIKAT KINERJA																									Sa	Sa	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

																							0	,67		
PREDIKAT KINERJA																							Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase LPM Berprestasi	%	100	2.518.000.000	100	1.859.642.008		151.487.220	100	35.432.830	0	0	100	35.432.830	100	1.895.074.838	100	75,26	
		2	13	05	2.01		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa yang di bina	lembaga	7	2.518.000.000	7	1.859.642.008	6	151.487.220	6	35.432.830	0	0	6	35.432.830	7	1.895.074.838	100	75,26	

							adat yang masyarakat atpelaku nya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota																			
		2	13	05	2.01	00003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	4	191.000.000	3	148.699.050	3	24.831.030	0	0	0	0	0	0	3	148.699.050	75	77,85	Dinas PMDP PKBP PPA
		2	13	05	2.01	00005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan	dok	5	617.000.000	5	96.119.600	5	15.719.800	0	0	0	0	0	0	5	96.119.600	100	15,58	Dinas PMDP PKBP PPA

							Pendapat an Asli Desa	an Pendapatan Asli Desa																		
		2	1 3	0 5	2. 0 1	0 0 0 9	Fasilitasi Tim Penggera k PKK dalam Penyeleng garaan Gerakan Pemberda yaan Masyarak at dan Kesejahte raan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelengga raan Gerakan Pemberdaya an Masyarakat dan Kesejahtera an Keluarga	dok	55	1.710. 000.0 00	5 5	1.614.82 3.358		110.936. 390	0	35.4 32.8 30	0	0	0	35.43 2.830	55	1.650.25 6.188	10 0	96 ,5 1	Dinas PMDP PKBP PPA
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		-		10 6		170		95 ,0 0	68 ,0 9	
PREDIKAT KINERJA																		Sa nga t Tin ggi		Sa nga t Tin ggi		San gat Tin ggi		Sa ng at Ti ng gi	Se da ng	
							URUSAN PPENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA																			
	Menu runn ya Angk a kelah	2	1 4	0 2			PROGRA M PENGEN DALIAN PENDUD UK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contracepti ve	%	14, 65	125.6 00.00 0	1 0	213.180. 600	1 4, 6 5	191.996 .600	14, 65	17.2 53.0 00	0	0	14, 65	17.2 53.0 00	14, 65	230.433. 600	10 0	18 3, 47	

iran total							Prevalence Rate/mCPR)																		
		2	14	02	02:02	Pemetaan Perkiraan Pengenda lian Pendudu k Cakupan Daerah Kabupate n/Kota	Persentase ketersediaa n data pemetaan perkiraan pengendali an penduduk	%	10	125.600.000	10	213.180.600	10	191.996.600	10	17.253.000	0	0	10	17.253.000	10	230.433.600	100	183,47	
		2	14	02	02:02	Pembinaa n dan Pengawas an Penyeleng garaan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga raan Sistem Informasi Keluarga	Lapora n	2	59.996.600	2	59.996.600		59.996.600	2	6.216.000		0	2	6.216.000					
		2	14	02	02:02	Pencatata n dan Pengumpu lan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpula n Data Keluarga	Lapora n	2	48.600.000	2	92.600.000	2	48.000.000	2	0	0	0	2	0	2	92.600.000	100	190,53	Dinas PMDP PKBP PPA
		2	14	02	02:02	Pengolaha n dan Pelaporan Data Pengendali an Lapangan dan Pelayana n KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalia n Lapangan dan Pelayanan n KB	Dokum en	1	77.000.000	1	60.584.000	1	84.000.000	1	11.037.000	0	0	1	11.037.000	1	71.621.000	100	93,01	Dinas PMDP PKBP PPA
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100	183	

PREDIKAT KINERJA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								Keluarga Berencana)																		
		2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	3	105.000.000	3	54.557.200	3	69.154.400	0	0	0	0	0	0	3	54.557.200	100	51,96	Dinas PMDP PKBP PPA
		2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media	Laporan	3	290.000.000	3	192.384.000	3	158.569.400	0	0	0	5.429.750	0	5.429.750	3	197.813.750	100	68,21	Dinas PMDP PKBP PPA

[illegible]

		2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat at Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	298	165.000.000	298	185.800.000		416.000.000	0	0	0		0	0	298	185.800.000	100	112,61	Dinas PMDP PKBP PPA	
		2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluh an, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan , Penggerakakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	laporan	12	3.285.600.000	12	904.749.500		1.032.875.700	3	46.800.000	3	107.280.000	3	154.080.000	12	1.058.829.500	100	32,23	Dinas PMDP PKBP PPA	
		2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat	Persentase ketersediaa n dan distribusi alat dan obat kontrasepsi	%	100	216.102.000	5	1.379.801.100		100	979.315.200	0	0	0		0	0	100	1.379.801.100	100	638,50	

							Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota																		
		2	14	03	2.033	00001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	14	11.700.000	5	12.008.000	14.460.000	0	0	0	0	0	5	12.008.000	36	102,63	Dinas PMDP PKBP PPA	
		2	14	03	2.033	00003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	517	189.502.000	2.010	191.983.000	517	944.758.800	0	0	0	0	2.010	191.983.000	389	101,31	Dinas PMDP PKBP PPA	
		2	14	03	2.033	00008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Laporan	2	14.900.000	2	7.951.800	2	20.096.400	0	0	0	0	2	7.951.800	100	53,37	Dinas PMDP PKBP PPA	

							n Reproduk si di Fasilitas Kesehata n Termasuk Jaringan dan Jejarin nya	Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarin nya																		
							Pemberd ayaan dan Peningka tan Peran Serta Organisa si Kemasya rakatan Tingkat Daerah Kabupate n/Kota Dalam Pelaksan aan Pelayana n dan Pembina an Kesertaa n Ber-KB	Persentase Keterpenuh an Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%	10 0	321.0 00.00 0	2 0	88.766.5 00	1 0 0	213.466 .300	0	0	0	1.20 0.00 0	0	1.20 0.00 0	10 0	89.966.5 00	10 0	28 ,0 3	
							Penguata n Peran serta Organisas i Kemasyar akatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksana an	Jumlah Organisasi yang Mendapatka n Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarak atan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaa n Pelayanan	Organi sasi	15	321.0 00.00 0	1 5	22.227.5 00	1 5	23.066.3 00	0	0	15	1.20 0.00 0	15	1.200 .000	15	23.427.5 00	10 0	7, 30	

							RA (KS)																				
		2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitas Kegiatan Bina Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan	6	1.152.000.000	6	0	6	173.946.000	0	0	0	0	0	0	6	-		100	0,00	
		2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan/Dokumen	1	43.946.000	1	43.946.000	1	43.946.000	0		0		0							
		2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Usaha Peningkat	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-RdanUsaha Peningkatan Pendapatan	Unit	55	300.000.000	45	297.920.000	25	130.000.000	0	0	0	0	0	0	45	297.920.000	82	99,31	Dinas PMDP PKBP PPA	

[illegible]

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sas ara n	Kode Rekening	Urusa n / Bidan g Urusa n Peme rinta h Daera h dan Progr am / Kegia tan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangka t Daerah Berjalan (Tahun 2025) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Un it Pe ra ng ka t Da er ah Pe na ng gu ng ja wa b				
											I				III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+ 12		14 = 13 / 8 * 100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 * 100		17
				Uraia n	Sa tu an	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Bela nja Lang sung																												
1	Me nin gk atn ya Ter tib Ad mi nis tra si Ke pe nd ud	2	1 2 0 2																									Di sd uk ca pil
				PRO GRA M PEND AFTA RAN PEND UDU K	PER SEN TASE PER EKA MAN KTP- EL	%	9 9	1.23 3.89 1.50 0	98 ,3 3	187.3 42.40 0	9 9	190. 040. 500	0, 01	1.95 0.00 0	-	-	-	-	-	-	0, 01	1.95 0.00 0	0	1	98 ,3 4	189. 292. 400	99 ,3 3	15,34

		2	1 2	0 2	2 0 3	Peny eleng garaan Pend aftar an Pend uduk	Juml ah Pend aftar an Pend uduk yang Disel enggar akan	je ni s	1 5	364. 530. 000	2	54.78 3.000	2	54.9 70.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	54.78 3.000	13	15	Di sd uk ca pil
		2	1 2	0 2	2 0 3	Koord inasi Antar Lemb aga Peme rinta h dan Lemb aga Non- Peme rinta h di Kabup aten /Kota dala m Pener tiban Pelay anan Pend aftara n Pend uduk	Juml ah Lapor an Hasil Koor dinas i antar Lemb aga Peme rinta h dan Lemb aga Non- Peme rinta h di Kabup aten /Kot a dala m Pener tiban Pelay anan Pend aftar an Pend uduk	La po ran	2 0	72.50 0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

							Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Keperndudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Keperndudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	do kumen																						
			2	12	02	203	02			10	173.000.000	2	54.783.000	2	54.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	54.783.000	20	32	
			2	12	02	203	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	5	119.030.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	12	02	204		Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah pembinan dan	jenis	5	156.065.000	1	14.628.000	1	14.698.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.628.000	20	9		

							Peny eleng garaa n Pend aftar an Pend uduk	peng awas an peny eleng garaa n pend aftar an pend uduk																									
			2	1 2	0 2	2 . 0 4	0 2	Pemb inaan dan Penga wasa n terkai t Pend aftara n Pend uduk	Juml ah Lapor an Pemb inaan dan Peng awas an Terka it Pend atara n Pend uduk	La po ra n	2 0	156.0 65.00 0	4	14.62 8.000	4	14.69 8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14.62 8.000	20	9	
			2	1 2	0 3		PRO GRA M PENC ATAT AN SIPIL	PER SEN TASE KEP EMIL IKAN AKT A KEL AHIR AN	%	9 9	899. 255. 250	98 ,0 0	64.26 6.900	9 9	70.8 43.3 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 ,0 0	64.2 66.9 00	98 ,9 9	7		
			2	1 2	0 3	2 . 0 1	Pelay anan Penc atata n Sipil	Juml ah Pelay anan Penc atata n Sipil	je ni s	1 5	636. 840. 000	3	64.26 6.900	3	67.8 43.3 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	64.2 66.9 00	20	10		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						k/Pe neran gan Bang unan Kanto r	asi Listri k/Pe nera ngan Bang unan Kant or yang Dised iakan																							
		X	X	0	2	Penye diaan Peral atan dan Perle ngka pan Kanto r	Juml ah Paket Peral atan dan Perle ngka pan Kant or yang Dised iakan	Pa ke t	1 0	1.444 .100. 000	2	294.6 81.60 0	2	302.9 38.00 0	0	-	1	13.5 22.5 00	-	-	-	-	1	13.52 2.500	5 0	4	3	308.2 04.10 0	30	21
		X	X	0	2	Penye diaan Peral atan Ruma h Tangg a	Juml ah Paket Peral atan Rum ah Tang ga yang Dised iakan	Pa ke t	2 0	4.000 .000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		X	X	0	2	Fasili tasi Kunj unga n Tam u	Juml ah Lapor an Fasili tasi Kunj unga n Tam u	La po ran	5	9.075 .000	4	1.655. 000	4	1.776 .000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.655 .000	80	18

		X	X	01	206	09	Penye leng araan Rapat Koord inasi dan Kons ultasi SKPD	Juml ah Lapor an Peny eleng garaa n Rapa t Koor dinas i dan Kons ultasi SKPD	La po ran	359	362.3 85.70 0	170	228.8 17.06 2	139	89.41 7.000	30	14.7 39.6 00	30	6.60 6.25 0	-	-	-	-	60	21.34 5.850	43	24	230	250.1 62.91 2	64	69	
		X	X	01	207		Peng adaa n Bara ng Milik Daera h Penu jang Urusa n Peme rinta h Daera h	Perse ntas e Pem enuh an Kebu tuha n Bara ng Milik Daer ah Penu njan g Urus an Pem erint ah Daer ah	%	100	1.48 5.66 2.50 0	100	22.23 7.500	100	135. 610. 950	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	22.2 37.5 00	100	1	
		X	X	01	207	02	Penga daan Kend araan Dinas Opera sional atau Lapa ngan	Juml ah Unit Kend araa n Dina s Oper asion al	Un it	1	800.0 00.00 0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		X	X	01	208	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Perse ntas e keterpenuhan layanan jasa penujangan urusan kantor	%	100	950.108.000	100	280.136.500	100	285.020.500	0,2024	57.700.000	0,82976	47.876.980	-	-	-	-	1	105.576.980	1	37	101	385.713.480	101	41	
		X	X	01	208	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	80.108.000	12	38.336.500	12	40.220.500	0	-	6	12.076.980	-	-	-	-	6,00	12.076.980	50	30	18	50.413.480	30	63	
		X	X	01	208	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	50	870.000.000	12	241.800.000	12	244.800.000	5	57.700.000	6	35.800.000	-	-	-	-	11	93.500.000	92	38	23	335.300.000	46	39	
		X	X	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Perse ntas e barang milik daer	%	100	391.750.000	70,01	40.427.974	100	57.750.000	0,0038	219.928	20,1202	4.425.000	-	-	-	-	20	4.644.928	20	8	90	45.072.902	90	12	

[illegible]

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	24.65 2.479 .930	3.369. 977.9 31	4.393 .843. 670	583. 112. 971	619. 921. 557	-	-	1.203 .034. 528	27,38	4.573 .012. 459	72	19
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)												
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :												
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :												

SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I + Triwulan Ii + Triwulan Iii + Triwulan Iv								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Peran Pngkat Daerah S/D 2024(%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah S/D 2024 (%)		
																	I		II		III		IV										
																	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
4	2	1					PROGRAM PENUJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Maturitas SPIP Sekretariat DPRD	Poin	4,0	74.090.684.551	2,0	50.777.439.192	3,0	18.084.535.939		3.362.627.459		3.924.153.078		-		-		2,0	7.286.780.537	50%	40%	2	54.371.972.901	50%	73%

[illegible]

4	02	01	2	08		Penye diaan Jasa Penunjang Urusa n Pemer intaha n Daerah		Perse ntase Keter penu han Layan an jasa penu njang urusa n kanto r	Per se n	100%		-	2.310.297.207	100	766.245.000	25	199.282.796	25	144.564.112	25	-	25	-	100	343.846.908	100%	45%	100%	2.654.144.115	100%	91%
4	02	01	2	08	01	Penye diaan Jasa Surat Menyurat	Terlak sanan ya Penye diaan Jasa Surat Menyurat	Jumla h Lapor an Penye diaan Jasa Surat Menyurat	La por an	2.000		12,00	4.101.750	12							-				-			12	4.101.750	1%	16%
4	02	01	2	08	02	Penye diaan Jasa Komu nikasi, Sumbe r Daya Air dan Listrik	Tersed ianya Jasa Komu nikasi Sumbe r Daya Air dan Listrik	Jumla h Lapor an Penye diaan Jasa Komu nikasi Sumb er Daya air dan Listrik	La por an	180	971.349.080	48,00	892.161.959	36	204.345.000	36	75.682.796	36	33.664.112				72	109.346.908	200%	54%	120	1.001.508.867	67%	103%	
4	02	01	2	08	04	Penye diaan Jasa Pelaya nan Umum Kantor	Tersed ianya Jasa Pelaya nan Umum Kantor	Jumla h Lapor an Penye diaan Jasa Pelaya nan Umu m Kanto	La por an	240	1.909.460.677	48,00	1.414.033.498	48	561.900.000	12	123.600.000	12	110.900.000				24	234.500.000	50%	42%	72	1.648.533.498	30%	86%	

II - 442

4	02	01	2	09	02	Penye- diaan Jasa Pemeli- haraa n, Biaya Pemeli- haraa n, Pajak, dan Perizin- an Kenda- raan Dinas Opera- sional atau Lapan- gan	Tersed- ianya Jasa Pemeli- haraa n, Biaya Pemeli- haraa n, Pajak, dan Perizin- an Kenda- raan Dinas Opera- sional atau Lapan- gan	Jumla- h Kenda- raan Dinas Opera- sional atau Lapan- gan yang Dipeli- hara dan dibay- arkan Pajak dan Perizi- nanny a	Un- it	12	180. 835. 060	12	71.664 .900	15	20.840.0 00	-	-	616.8 18					-	616. 818	0 %	0 %	12	72.281 .718	10 0 %	4 0 %	
4	02	01	2	09	06	Pemeli- haraa n Peralat- an dan Mesin Lainny a	Terlak- san Peralat- an dan Mesin Lainny a	Jumla- h Peralat- an dan Mesin Lainny a Yang Dipeli- hara	Un- it	40	104. 241. 076	12	34.929 .500	36	21.474.4 00	-	-						-	-	0 %	0 %	12	34.929 .500	30 %	3 4 %	
4	02	01	2	09	09	Pemeli- haraa n/Reh- abilita- si Gedun- g Kantor dan Bangun- an Lainny a	Terlak- san Peralat- an dan Mesin Lainny a	Jumla- h Gedu- ng Kanto- r dan Bangun- an Lainny a Yang Di- Peliha- ra/Dir- ehabil- itasi	Un- it	7	348. 414. 819	4	3.493. 339.08 2	4	135.273. 030	-	-	3.750. 000						-	3.75 0.00 0	0 %	3 %	4	3.497. 089.08 2	57 %	1 0 0 4 %

4	02	01	2	15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Person	100		100%	29.323.083.297	100	10.697.955.384	25	2.426.262.436	25	1.771.517.599	-	50	-	100	4.197.780.035	100%	39%	101	33.520.863.332	101%	65%
4	02	01	2	15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/bulan	25		25	28.070.132.697	25	10.343.717.884	25	2.426.262.436	1.548.067.599				-	3.974.330.035	0%	38%	25	32.044.462.732	100%	64%
4	02	01	2	15	02	Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaiannya Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	5	974.054.105	1	1.019.566.800	1	229.237.500	0	-	1	223.450.000			1	223.450.000	100%	97%	2	1.243.016.800	40%	128%
4	02	01	2	15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	25	626.320.798	22	233.383.800	25	125.000.000		-	-	-			-	-	0%	0%	22	233.383.800	88%	37%

4	02	01	2	16		Layanan Administrasi DPRD		Perse ntase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	Perse n	100	5.833.310.521	100	3.597.733.110	100	1.113.665.600	25	178.394.330	25	149.503.188	-	25	-	75	327.897.518	75%	29%	175	3.925.630.628	175%	67%
4	02	01	2	16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksanan ya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumla h Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsu ltasi DPRD	La por an	460		12	635.283.910	12	33.407.000	3	-	3	4.555.500			6	4.555.500	50%	14%	18	639.839.410	4%	89%	
4	02	01	2	16	04	Penye diaan Kebut uhan Ruma h Tangg a DPRD	Terlak sanya Penye diaan Kebut uhan Ruma h Tangg a DPRD	Jumla h Paket Kebut uhan Ruma h Tangg a DPRD Yang Disedi akan	Pa ket	15	5.117.973.387	3	2.962.449.200	4	1.080.258.600	3	178.394.330	3	144.947.688			3	323.342.018	75%	30%	6	3.285.791.218	40%	64%	
								Perse ntase Keterpenuhan Duku ngan Persi dangan, Admi nistra si	Perse n	100%	43.498.731.250	100%	-		8.081.742.950		2.073.711.026		1.469.931.088	-		-	100%	3.543.642.114	64%	45%	100%	3.543.642.114	100%	8%

								Serta Saran a dan Prasa rana penu njang dalam Pelak sanaa n Tugas dan Fungs i Pimpi nan dan Anggo ta DPRD																				
4	02	02				PROG RAM DUKU NGAN PELA KSAN AAN TUGA S DAN FUNG SI DPRD	Perse ntase Perda Yang Ditet apkan Tepat Wakt u sesua i Perat uran Perun dang- Unda ngan	Per se n	100	43.4 98.7 31.2 50	100 %	35.13 7.266. 083	100	8.081.7 42.950	10 %	2.073. 711.02 6	15 %	1.469. 931.0 88	-	-	25 %	3.54 3.64 2.11 4	0 %	44 %	63 %	38.680 .908.1 97	1 %	89 %
4	02	02	2	01	Pembe ntuka n Peratu ran Daera h dan Peratu ran DPRD	Perse ntase Ranca ngan Perda yang Ditet apkan Menja di Perda sesua i	Per se n	100	6.93 9.75 0.00 0	100 %	3.755. 649.7 09	100	676.710 .650	-	-	-	-	100	-	100 %	0 %	101	3.755. 649.70 9	101 %	54 %			

[illegible]

4	02	02	2	04	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan Kapasitas SDMnya	Orang	25		25	6.708.176.746	25	2.020.493.300	25	262.606.800	25	352.981.382	-	-	-	615.588.182	-	30%	25	7.323.764.928	100%	93%
4	02	02	2	04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	770	5.021.295.000	119	3.908.814.046	154	919.381.000	15	102.106.800	34	169.341.382			49	271.448.182	32%	30%	168	4.180.262.228	22%	83%
4	02	02	2	04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	500		12	1.031.862.700	17	471.112.300	3	3.000.000	10	78.640.000			13	81.640.000	76%	17%	25	1.113.502.700	5%	345%
4	02	02	2	04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	27	1.134.000.000	9	878.500.000	9	378.000.000	9	94.500.000	9	63.000.000			-	157.500.000	0%	42%	9	1.036.000.000	33%	91%

[illegible]

	me nta si SA KIP Ins pek tor at		n																						
A		Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah	Persent ase Penyus unan dokume n Laporan Keuang an Tepat Waktu dan sesuai peratur an perunda ng- undang an	%	5 0 0	15.5 98.3 16.2 40	30 0	10.446. 360.644	1 0 0	3.119. 663.2 48	3 0 0 5 2	952.08 2.508		1.701.61 7.268	0, 0 0	-	0, 00	-	85 ,0 6	2.653. 699.7 76	385	13.100 .060.4 20	77,01	83,98	In sp ek otr at
1		Penyediaa n Gaji dan Tunjanga n ASN	Jumlah Orang Yang Meneri ma Gaji dan Tunjang an ASN	Or an g	2 5 2 0	15.5 98.3 16.2 40	1. 87 0	10.446.3 60.644	3 9	3.119. 663.2 48	1 1 , 9 0	952.08 2.508	2 1, 2 7	1.701.61 7.268	0, 0 0	-	0, 00	-	33, 17	2.653. 699.77 6	1.9 03	13.100 .060.4 20	75,52	83,98	Ins pe kot rat
B		Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah	Persent ase aparap at inspekt orat yang mengik uti pelatiha n	%	5 0 0	10.5 91.2 60.0 00	30 0	246.885 .139	1 0 0	2.118. 252.0 00	0 , 0 0	-		121.820. 707	0, 0 0	-	0, 00	-	5, 75	121.8 20.70 7	306	368.70 5.846	61,15	3,48	In sp ek otr at

1		Pendidika n dan Pelatihan Pegawai Berdasark an Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasa rkan Tugas dan Fungsi yang Mengiku ti Pendidi kan dan Pelatiha n	Or an g	2 1 0	4.72 5.96 0.00 0	84	160.881. 650	4 3	945.1 92.00 0	0 , 0 0			121.820. 707	0, 0 0	-	0, 00	-	-	121.82 0.707	84	282.70 2.357	40,00	5,98	Ins pe kot rat
2		Bimbinga n Teknis Implemen tasi Peraturan Perundan g- Undangan	Jumlah Orang yang Mengiku ti Bimbing an Teknis Impleme ntasi Peratura n Perunda ng- Undang an	Or an g	2 5 0	5.86 5.30 0.00 0	68	86.003.4 89	5 0	1.173. 060.0 00	0 , 0 0			-	0, 0 0	-	0, 00	-	-	-	68	86.003 .489	27,23	1,47	Ins pe kot rat
C		Administ rasi Umum Perangk at Daerah	Persent ase keterpe nuhan layanan adminis trasi umum perangk at daerah	%	5 0 0	1.27 6.63 9.00 0	30 0	552.730 .170	1 0 0	278.3 38.00 0	6 3 , 6 5	177.16 7.200	7 7, 6 1	216.018. 840	0, 0 0	-	0, 00	-	14 1, 26	393.1 86.04 0	441	945.91 6.210	88,25	74,09	In sp ek otr at
1		Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralata n Rumah Tangga Yang Disedia kan	Pa ket	4 0	67.8 21.0 00	19	3.903.10 0	1 2	14.80 0.000	0 , 0 0	155.49 6.000	0, 0 0	155.832. 700	0, 0 0	-	0, 00	-	-	311.32 8.700	19	315.23 1.800	47,50	464,8 0	Ins pe kot rat

2		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyele nggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	La pra n	1 9 0	1.20 8.81 8.00 0	20 4	548.827. 070	3 8	263.5 38.00 0	3 , 1 2	21.671 .200	8, 6 8	60.186.1 40	0, 0 0	-	0, 00	-	11, 80	81.857 .340	216	630.68 4.410	113,6 1	52,17	Ins pe kot rat
D		Pengadaa n Barang Milik Daerah Dan Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Persentase Pemenu han Kebutu han Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerit ah Daerah	%	5 0 0	754. 640. 000	30 0	127.748 .500	-	150.9 28.00 0	-	117.18 5.000		136.277. 000	-	-	-	-	-	253.4 62.00 0	300	381.21 0.500	60,00	50,52	In sp ek otr at
1		Pengadaa n Mebel	Jumlah paket mebel yang disediak an	Un it	6 0	400. 240. 000	50	80.800.0 00	1 2	80.04 8.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	50	80.800 .000	83,33	20,19	Ins pe kot rat
		Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralata n dan mesin lainnya	Un it	6 0	354. 400. 000	5	46.948.5 00	1 2	70.88 0.000		117.18 5.000		136.277. 000						253.46 2.000	5	300.41 0.500	8,33	84,77	Ins pe kot rat
E		Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Persentase keterpe nuhan layanan jasa penunja ng urusan kantor	%	5 0 0	381. 860. 000	30 0	137.513 .823	1 0 0	83.40 0.000	6 , 3 5	5.294. 602	2 4, 4 4	20.384.9 21	0, 0 0	-	0, 00	-	30 ,7 9	25.67 9.523	331	163.19 3.346	66,16	42,74	In sp ek otr at

1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	Laporan	7500	333.860.000	1.514	122.513.823	4	72.600.000	0,15	2.737.000		12.463.400	0,00	-	0,00	-	0,84	15.200.400	1.515	137.714.223	20,20	41,25	Inspektorat
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	2	-			2	-		1.357.602		5.271.521		-		-	-	6.629.123	-	6.629.123	-	100,00	Inspektorat
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	10	48.000.000	4	15.000.000	2	10.800.000	0,22	1.200.000	0,49	2.650.000	0,00	-	0,00	-	0,71	3.850.000	5	18.850.000	51,42	39,27	Inspektorat
F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	%	500	450.523.000	300	118.577.164	100	95.288.000	24,17	23.029.623	75,29	71.739.624	0,00	-	0,00	-	99,46	94.769.247	399	213.346.411	79,89	47,36	Inspektorat

1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	156.273.000	16	87.072.564	7	36.288.000	0,61	3.142.044	8,4	45.852.045	0,00	-	0,00	-	9,45	48.994.089	25	136.066.653	72,81	87,07	Inspektorat
2		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	95	29.250.000			20	6.000.000	0,00	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat
3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	180	90.000.000	47	8.953.800	36	18.000.000	2,32	1.159.679	2,32	1.159.679	0,00	-	0,00	-	4,64	2.319.358	52	11.273.158	28,75	12,53	Inspektorat
4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	175.000.000	2	22.550.800	1	35.000.000	0,54	18.727.900			24.727.900	0,00	-	0,00	-	1,24	43.455.800	3	66.006.600	324,16	37,72
		RATA RATA CAPAIAN KINERJA %																				72,08	50,36		
		PREDIKAT KINERJA																				Rendah	Sangat Rendah		

1	Me nin gka tny a ku alit as pe nge nd alia n int ern da n Im ple me nta si SA KIP Pe md a	PROGRA M PENYELE NGGARA AN PENGAW ASAN	Persent ase Hasil Pemer iksaan Ekstern al (Temua n BPK) dan Internal (APIP) yang telah ditinda klanjuti	%	5 0 0	12.4 69.3 58.0 00	30 0	3.891.8 41.751	1 0 0	2.552. 839.0 00	1 9 , 3 2	420.52 5.000		681.688. 200	0, 0 0	-	0, 00	-	48 , 7 6	1.102. 213.2 00	349	4.994. 054.95 1	69,75	40,05	Ins pe kot rat
A		Penyelen ggaraan Pengawas an Internal	Persent ase hasil pengaw asan	%	5 0 0	7.81 2.08 7.00 0	30 0	1.669.9 90.541	1 0 0	1.604. 867.0 00	8 , 2 5	132.42 5.000	1 8, 8 1	301.888. 200	0, 0 0	-	0, 00	-	27 , 0 6	434.3 13.20 0	327	2.104. 303.74 1	65,41	26,94	In sp ek otr at
1		Pengawas an Kinerja Pemerinta h Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemerik saan Kinerja Pemerin tah Daerah	La por an	1 9 0	3.30 4.80 0.00 0	52	582.720. 000	3 8	673.2 00.00 0	0 , 0 0	-	0, 0 0	-	0, 0 0	-	0, 00	-	-	-	52	582.72 0.000	27,62	17,63	Ins pe kot rat
2		Pengawas an Keuangan Pemerinta h Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemerik saan Keuang an Pemerin tah	La por an	3 5	997. 459. 000	18	261.375. 000	7	210.6 50.00 0	3 , 1 5	94.925 .000	8, 3 1	250.050. 000	0, 0 0	-	0, 00	-	11, 46	344.97 5.000	30	606.35 0.000	85,33	60,79	Ins pe kot rat

			saan APIP																						
B		Penyelen ggaraan Pengawas an Dengan Tujuan Tertentu	Persent ase pengaw asan dengan tujuan tertent u	%	5 0 0	4.65 7.27 1.00 0	30 0	2.221.8 51.210	1 0 0	947.9 72.00 0	3 0 0 3 9	288.10 0.000		379.800. 000	0, 0 0	-	0, 00	-	70 ,4 6	667.9 00.00 0	370	2.889. 751.21 0	74,09	62,05	In sp ek otr at
1		Penangan an Penyelesai an Kerugian Negara/D aerah	Jumlah Laporan Penyeles aian Kerugia n Negara/ Daerah yang Ditanga ni	La por an	2 5	197. 860. 000	6	31.375.0 00	5	39.57 2.000	0 , 0 0	-		-	0, 0 0	-	0, 00	-	-	-	6	31.375 .000	24,46	15,86	Ins pe kot rat
2		Pengawas an Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengaw asan Dengan Tujuan Tertentu	La por an	2 0 0	4.45 9.41 1.00 0	10 6	2.190.47 6.210	4 0	908.4 00.00 0	1 2 , 6 9	288.10 0.000	1 6, 7 2	379.800. 000	0, 0 0	-	0, 00	-	29, 41	667.90 0.000	135	2.858. 376.21 0	67,60	64,10	Ins pe kot rat
		RATA RATA CAPAIAN KINERJA %																			69,75	44,49			
		PREDIKAT KINERJA																			Renda h	Sanga t Renda h			
I I I	Me nin gka tny a ku alit as pe nge nd	PROGRA M PERUMU SAN KEBIJAK AN, PENDAM PINGAN DAN ASISTEN SI	Persent ase Penyim pangan /penyal ahguna an yang terjadi	%	5 0 0	4.11 3.62 3.00 0	30 0	1.249.2 53.780	1 0 0	950.3 53.00 0	0 , 0 0	-	9, 3 5	83.933.0 40	0, 0 0	-	0, 00	-	9, 35	83.93 3.040	309	1.333. 186.82 0	61,87 06805 5	32,41	In sp ek otr at

[illegible]

			yang Disusun																						
B		Pendampingan Dan Asistensi	Indeks Efektifitas Pengen- dalian Korupsi (IEPK)	%	5 0 0	3.86 9.89 9.00 0	30 0	1.249.2 53.780	1 0 0	897.3 53.00 0	0 , 0 0	-		83.933.0 40	0, 0 0	-	0, 00	-	9, 35	83.93 3.040	309	1.333. 186.82 0	61,87	34,45	In spek- trat
1		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	3 5	645. 002. 000	44	424.465. 000	3 6	143.7 48.00 0	0 , 0 0	-		21.000.0 00	0, 0 0	-	0, 00	-	5,2 6	21.000 .000	49	445.46 5.000		69,06	Inspe- ktrat
2		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	3 6	657. 420. 000	-		3 6	143.3 85.00 0	0 , 0 0		0, 0 0	-	0, 0 0	-	0, 00	-	-	-	-	-	-	-	Inspe- ktrat

3		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	20	2.567.477.000	9	743.011.800	4	560.000.000	0, -	0,45	62.933.040	0,00	-	0,00	-	0,45	62.933.040	9	805.944.840		31,39	Inspektorat
4		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dokumen	7	-	2	81.776.980	36	50.220.000	0, -	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	2	81.776.980		-	Inspektorat
		RATA RATA CAPAIAN KINERJA %																			69,38	42,56		
		PREDIKAT KINERJA																			Rendah	Sangat Rendah		
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																					-			
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																					-			
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																					-			
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																					-			

KECAMATAN TANETE RILAU

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Anggaran 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penerimaan Anggaran Jawa b	
											I		II									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)				(12) = 8+9+10+11		(13) = 6 + 12		(14) = 13 / 5 * 100		(13)	
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.		K
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
		PERENCANAAN																				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan/ Implementasi SAKIP Kantor Kecamatan	PROGRAM PENUJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Barru	Poin	3	18.644.811.324	100	10.191.719.199	3	#### #### #	3	879.428.853	3	923.293.939	3,00	1.802.722.792	100	11.947.550.041	100,00	64,08	Kecamatan Tanete Rilau	

	Tanete Rilau	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100	15.809.052.170	100,00	8.841.509.077	100	3.403.783.002	24	821.040.429	25	839.537.756	49	1.660.578.185	100	10.502.087.262	100,00	66,43	Kecamatan Tanete Rilau
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	204	15.809.052.170	117	8.841.509.077	39	3.403.783.002	39	821.040.429	39	839.537.756	78,00	1.660.578.185	195	10.502.087.262	95,59	66,43	Kecamatan Tanete Rilau
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi terhadap keseluruhan ASN	Persen	100	280.505.000	100,00	46.891.950	100	2.200.000	0	0	0	0	0	0	100	46.891.950	100,00	16,72	Kecamatan Tanete Rilau
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	67	280.505.000	11	46.891.950	2	2.200.000	-	-	-	-	-	-	11	46.891.950	16,42	16,72	Kecamatan Tanete Rilau

		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase Keterpenuhan layanan Admintrasi umum perangkat daerah	Persen	100	865.136.428	193,86	678.576.679	100	182.330.120	14	25.658.000	22	40.958.525	36,54	66.616.525	230	745.193.204	230,39	86,14	Keamatan Tante Rilau
		<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	35	39.548.200	17	3.286.500	3	1.942.200	0	0	-	0	-	-	17	3.286.500	48,57	8,31	Keamatan Tante Rilau
		<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	60	68.974.000	36	5.368.425	12	2.661.800	3	577.400	0	0	3	577.400	39	5.945.825	65,00	8,62	Keamatan Tante Rilau
		<i>Penyediaan bahan logistik kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	3	83.990.000	6	98.670.250	11	46.977.900	2	6.812.000	3	10.875.525	5	17.687.525	11	116.357.775	366,67	138,54	Keamatan Tante Rilau
		<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	60	27.820.000	36	15.572.000	12	5.548.520	0	0	6	2.840.000	6	2.840.000	42	18.412.000	70,00	66,18	Keamatan Tante Rilau

		Penye- diaan Bahan Bacaan dan Peratu- ran Perun- dang - Perun- dangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan- g- Undangan yang Disediakan	Dok- ume- n	2 0	48.05 0.500	7	6.240. 000	1	1.680 .000	0	0	1	560. 000	1	560.0 00	8	6.800.00 0	40, 00	14, 15	Ke- ca- ma- tan Ta- net e Ril- au
		Fasilit- asi Kunju- ngan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap- ora- n	6 0	33.15 3.728	36	16.388 .800	12	6.143 .700	0	0	0	0	-	-	36	16.388.8 00	60, 00	49, 43	
		Peyele- nggar- aan Rapat Koordi- nasi dan Konsu- ltasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng- garaan Rapat Koordinas- i dan Konsultasi	Lap- ora- n	6 0	563.6 00.00 0	36	533.05 0.704	12	117.3 76.00 0	2	18.26 8.600	3	26.6 83.0 00	5	44.95 1.600	41	578.002. 304	68, 33	102 ,56	Ke- ca- ma- tan Ta- net e Ril- au
		Penga- daan Barang Milik Daerah Penun- jang Urusan Pemer- intah Daerah	Persetase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjan- g Urusan Pemerintah daerah	Persen	1 0 0	444.7 02.50 0	18 9,3 7	93.10 6.000	100	91.2 71.5 00	-	-	-		-	-	189	93.106.0 00	189 ,37	20, 94	Ke- ca- ma- tan Ta- net e Ril- au
		Penga- daan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2 5	303.8 02.00 0	8	81.406 .000	10	78.36 0.900	-	-	-	-	-	-	8	81.406.0 00	32, 00	26, 80	Ke- ca- ma- tan Ta- net e Ril- au

		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	30	69.069.000	0	-	2	12.910.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Tanete Rilau	
		Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	23	71.831.500	7	11.700.000	-	-	-	-	-	-	-	7	11.700.000	30,43	16,29	Kecamatan Tanete Rilau	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Pelayanan Jasa Penunjang urusan Kantor	Persen	100	849.130.226	124	434.077.133	100	169.628.960	19	32.730.424	18	31.056.758	38	63.787.182	161	497.864.315	161,39	58,63	Kecamatan Tanete Rilau
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	604.302.000	36	317.765.950	12	124.590.800	3	24.000.000	3	21.339.100	6	45.339.100	42	363.105.050	70,00	60,09	Kecamatan Tanete Rilau
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	120	192.528.226	72	81.111.183	24	30.558.660	4	5.130.424	5	6.917.658	9	12.048.082	81	93.159.265	67,50	48,39	Kecamatan Tanete

		Daya Air dan Listrik	Daya Air dan Listrik yang Disediakan																	Rilau	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	52.300.000	36	35.200.000	12	14.479.500	3	3.600.000	3	2.800.000	6	6.400.000	42	41.600.000	70,00	79,54	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dipelihara	Persen	100	396.285.000	113	97.558.360	100	45.996.100	0	0	26	11.740.900	26	11.740.900	138	109.299.260	138,32	27,58	Kecamatan Tanete Rilau
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	30	176.550.000	17	68.380.460	5	28.097.000	-	-	1	5.500.000	1	5.500.000	18	73.880.460	60,00	41,85	Kecamatan Tanete Rilau

		<i>sional atau Lapan gan</i>																		
	<i>Pemeli haraa n Mebel</i>	Jumlah meubelair yang terpelihar a	unit	3 7	13.68 5.000	6	687.00 0	0	-	-	-			-	-	6	687.000	16, 22	5,0 2	Ke ca ma tan Ta net e Ril au
	<i>Pemeli haraa n Perala tan dan Mesin Lainn ya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihar a	unit	4 8	33.55 0.000	36	18.760 .000	25	11.19 5.000	-	-	7	3.21 0.00 0	7	3.210. 000	43	21.970.0 00	89, 58	65, 48	
	<i>Pemeli haraa n/ Rehab ilitasi Gedun g Kanto r dan Bangun an Lainn ya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang Dipelihar a/Direha bilitasi	unit	2 0	156.0 00.00 0	2	9.730. 900	2	6.704 .100	-	-	1	3.03 0.90 0	1	3.030. 900	3	12.761.8 00	15, 00	8,1 8	Ke ca ma tan Ta net e Ril au
	<i>Pemeli haraa n/ Rehab ilitasi Saran a dan Prasar ana Gedun g Kanto</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	unit	3 7	16.50 0.000	0	-	0	0	-	-			-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	Ke ca ma tan Ta net e Ril au

		r dan Bangu nan Lainn ya	/Direhabil itasi																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	153	1.999.07 3.665	153	46	
PREDIKAT KINERJA																	Sang at Tingg i		San gat Tingg i	ren dah	
2	Meni ngka tnya kepu asan masy arak at dala m mene rima pelay anan pada Kant or Keca mata n Tanet e Rilau	PROG RAM PENY ELEN GGAR AAN PEME RINT AHAN DAN PELA YANA N PUBLI K	Persenta se dokumen SOP Pelayana n Kecamat an yang tersusun dan diinflme ntasikan	Per sen	1 0 0	170.4 00.00 0	100	62.898 .100	100	24.60 7.310	44	10.76 0.000	0	0	44	10.76 0.000	100	73.658.1 00	100 ,00	43, 23	Ke ca ma tan Ta net e Ril au
		Koordi nasi Penyel engga raan Kegiat an Pemer intaha n di Tingk at Keca matan	Persentas e ketepenu han penyeleng garaan pemerinta han di tingkat Kecamata n	Pers en	1 0 0	167.6 50.00 0	100	61.056 .000	100	24.16 1.810	45	10.76 0.000	0	0	45	10.76 0.000	100	71.816.0 00	100 ,00	42, 84	Ke ca ma tan Ta net e Ril au

		<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Peran gkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	Laporan	60	107.250.000	36	61.056.000	12	13.864.000	3	10.760.000	-	-	3	10.760.000	39	71.816.000	65,00	66,96	
		<i>Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Dokumen</i>	15	60.400.000	-	-	2	10.297.810	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Kecamatan Tante Rilau
		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan</i>	<i>Persentase Keterpenuhan pelayanan Publik di tingkat Kecamatan SOP</i>	Persen	100	2.750.000	100	1.842.100	100	445.500	0	0			-	0	100	1.842.100	100,00	66,99	Kecamatan Tante Rilau

		n oleh Unit Kerja Peran gkat Daera h yang ada di Keca matan																			
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	15	2.750.000	10	1.842.100	3	445.500	0	0	0	0	-	-	10	1.842.100	66,67	66,99	Kecamatan Tanete Rilau
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	100	36.829.050	100	55	
PREDIKAT KINERJA																	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	tinggi	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan Masyarakat/Kelompok/Le	Per sen	100	4.195.804.180	100	1.286.805.254	100	586.882.950	13	74.675.000	19	109.845.175	31	184.520.175	100	1.471.325.429	100,00	35,07	Kecamatan Tanete Rilau

			mbaga																		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Persen	100	15.066.250	100	5.014.090	100	1.000.000	0	0			-	0	100	5.014.090	100,00	33,28	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	30	15.066.250	18	5.014.090	6	1.000.000	0	0			-	-	18	5.014.090	60,00	33,28	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Persen	100	2.703.267.825	100	381.247.611	100	253.945.850	8	19.400.000	23	58.920.175	31	78.320.175	100	459.567.786	100	17,00	Kecamatan Tanete Rilau

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	60	169.192.500	36	62.070.000	12	23.757.000	10	19.400.000	-	-	10	19.400.000	46	81.470.000	76,67	48,15	Kecamatan Tanete Rilau
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	unit	10	2.297.975.325	6	311.013.611	2	222.269.850	-	-	1	55.040.175	1	55.040.175	7	366.053.786	70,00	15,93	Kecamatan Tanete Rilau
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /or mas	30	224.500.000	18	4.840.000	6	7.919.000	-	-	3	3.880.000	3	3.880.000	21	8.720.000	70,00	3,88	Kecamatan Tanete Rilau
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	10	11.600.000	3	3.324.000	0	0	-	-	-	-	-	-	3	3.324.000	30,00	28,66	Kecamatan Tanete Rilau

	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat</i>	Persen	100	1.477.470.105	100	900.543.553	100	331.937.100	17	55.275.000	15	50.925.000	32	106.200.000	100	1.006.743.553	100	68,14	Kecamatan Tante Rilau
	<i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>	Lembaga	45	1.464.970.105	27	900.543.553	9	331.937.100	2	55.275.000	1	50.925.000	3	106.200.000	30	1.006.743.553	66,67	68,72	Kecamatan Tante Rilau
	<i>Fasilitasi Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	Laporan	5	12.500.000	0	0	0	-		0	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																100	490.441.810	100	39	
PREDIKAT KINERJA																Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH	Persentase Pemeliharaan Desa/kelurahan yang dibangun dan diawasi	Persen	100	59.937.000	123,4579	4.381.500	100	2.000.000	0	0	0	950.000	0	950.000	123	5.331.500	123,46	8,90	Kecamatan Tante Rilau

	AHAN DESA																			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	40	59.937.000	24	4.381.500	8	2.000.000	0	0	4	950.000	4	950.000	28	5.331.500	70	8,90	Kecamatan Tanete Rilau
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	40	59.937.000	24	4.381.500	8	2.000.000	-	-	4	950.000	4	950.000	28	5.331.500	70,00	8,90	Kecamatan Tanete Rilau
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																28	5.331.500	70,0	9	
PREDIKAT KINERJA																rendah		Tinggi	rendah	

	PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<i>Persen</i>	100	235.061.745	75	183.912.000	100	50.354.600	0	0			0	0	75	183.912.000	60	78	Kecamatan Tanete Rilau
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>orang</i>	125	235.061.745	75	183.912.000	25	50.354.600	0	0			0	0	75	183.912.000	60	78	Kecamatan Tanete Rilau
	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-</i>	<i>orang</i>	125	235.061.745	75	183.912.000	13	50.354.600	0	0	0	0	-	-	75	183.912.000	60,00	78,24	Kecamatan Tanete Rilau

	anaan Undan g- Undan g Dasar Negar a Repub lik Indon esia Tahun 1945, Pelest arian Bhinn eka Tungg al Ika serta Pemer tahan an dan Pemeli haraa n Keutu han Negar a Kesat uan Repub lik Indon esia	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestaria n Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertah anan dan Pemelihar aan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															75	183.912. 000	60	78	
PREDIKAT KINERJA															Tingg i		ting gi	ting gi	

3.	Meningkakannya kesadarannya masyarakat dalam mewujudkan ketertarikan dan ketertiban	PROGRAM KOORDINASI KETEMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	Person	100	382.972.082	42	124.331.000	100	40.702.000	14	5.625.000	14	5.625.000	28	11.250.000	48	135.581.000	103	63	Kecamatan Tanete Rilau
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	7	382.972.082	42	124.331.000	14	40.702.000	3	5.625.000	3	5.625.000	6	11.250.000	48	135.581.000	103	63	Kecamatan Tanete Rilau
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	60	193.280.000	36	97.477.000	12	24.018.000	3	5.625.000	3	5.625.000	6	11.250.000	42	108.727.000	70,00	56,25	Kecamatan Tanete Rilau

		matan																			
		Harm onisas i Hubu ngan Denga n Tokoh Agama dan Tokoh Masy arakat	Jumlah Laporan Pelaksana an Harmonis asi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak at	Lap oran	1 8	189.6 92.08 2	6	26.854 .000	2	16.68 4.000	0	0	0	0	-	-	6	26.854.0 00	33, 33	7,0 1	Ke ca ma tan Ta net e Ril au
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	48	135.581. 000	103	63	
PREDIKAT KINERJA																	rend ah		San gat Ting gi	ting gi	
TOTAL					23.688.9 86.331	11.854.047. 053	4.599.756.5 42	970.488.85 3	1.039.714. 114	2.010.202.9 67	13.817.358.070										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)																	84	475.194. 837,47	97, 76	48, 48	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)																	Tingg i		San gat Ting gi	ren dah	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																					
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																					
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																					
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																					

*) DIISI OLEH KEPALA BAPPEDA

DINAS PERHUBUNGAN

Kod e Rek enin g	Sas ara n	Bidang Urusan Pemer i ntahan, Progra m, Kegiata n, Sub Kegiata n	Indikator Kinerja (Program/Kegia tan/Sub Kegiatan)		Target Renstra Pd Pada Tahun 2021 S/D 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pd Sampai Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Pd Tahun Berjalan Yang Di Evaluasi (2025) Yang Di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah 2025 (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra Perangkat t Daerah S/D Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2025 (%)		Uni t Pd Pe na nggun g Ja wa b
											Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8 + 9 + 10 + 11		(13) = 12 / 7 x 100		(14) = 6 + 12		(15) = 14 / 5 x 100		(16)
			Uraian	Sat uan	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																											
	Men ing kat nya kual itas dan aku nta bilit as kin erja Din as Per		Nilai SAKIP Dinas Perhubun gan	Poi nt	8 0				75																		

2 15 01 2.02 01		Penyedi aan Gaji dan Tunjang an ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjanga n ASN	Ora ng/ bul an	4 2	16.893 .639.5 90	4 2		42	3.58 8.39 7.85 2	3 9	910. 955. 031	4 3	886. 375. 342	-	-	-	-	39	1.79 7.33 0.37 3	93%	50%	4 2	11.8 53.0 30.2 62	100 %	70%	
		Pelaksa naan Penatau sahaan dan Pengujia n/Verifi kasi Keuanga n SKPD	Jumlah Dokumen Penataus ahaan dan Pengujian /Verifikas i Keuangan SKPD	Do ku me n	9 6	9.250. 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
		Koordin asi dan Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinas i Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap ora n	4	2.300. 000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	72	38.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	%	100	600.000.000	60	169.949.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	80	169.949.758	80%	28%	DISHUB
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	133.000.000	1	133.637.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	133.637.000	33%	100%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan	Orang	13	135.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	

2 15 01 2.07		Pengad aan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ah Daerah	Persen Pemenuh an Kebutuha n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	%	1 0 0	641.9 66.21 6	4 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	4 0	14.8 00.0 00	40%	2%	DIS HU B
		Pengada an Kendara an Dinas Operasi onal atau Lapanga n	Jumlah Unit Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Disediaka n	Uni t	6	267.12 6.873	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	- -	-	0%	0%	
		Pengada an Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n	Uni t	7	15.500 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	- -	-	0%	0%	
2 15 01 2.07 06		Pengada an Peralata n dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n	Uni t	2 4	274.33 9.343	4	14.8 00.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	4	14.8 00.0 00	17%	5%	
		Pengada an Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediaka n	Uni t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	- -	-	0%	0%	

		Pengada an Sarana dan Prasara na Penduk ung Gedung Kantor atau Bangun an Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka n	Uni t	7	85.000 .000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
2 15 01 2.08		Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemer ntahan Daerah	Persentas e jasa penunjan g urusan pemerint ahan daerah	%	1 0 0	305.1 97.79 9	5 5		100	106. 150. 642	1 3	14.0 95.4 22	-	-	-	-	-	-	13	14.0 95.4 22	13%	13%	7 0	283. 049. 358	70%	93%	DIS HU B
2 15 01 2.08 01		Penyedi aan Jasa Surat Menyur at	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	lap ora n	8 2 0 0	15.197 .799	9 9		170 0 Lapo ran	12.0 90.0 00	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0%	0%	9 9	21.5 90.0 00	1%	142 %		
2 15 01 2.08 02		Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	lap ora n	6 0	290.00 0.000	2 0 6		12 Lapo ran	94.0 60.6 42	3	14.0 95.4 22	3	15.9 35.3 07	-	-	-	-	6	30.0 30.7 29	25%	32%	2 1 2	261. 459. 358	353 %	90%	
2 15 01 2.09		Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemer	Persentas e pemenuh an pemeliha raan barang milik daerah	%	1 0 0	1.077. 400.0 00	5 6	476. 319. 770	100	192. 198. 300	6	11.8 92.2 33	-	26.5 75.0 00	-	-	-	-	6	38.4 67.2 33	6%	20%	7 2	514. 787. 003	72%	48%	DIS HU B

		ntahan Daerah																								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	143.000.000	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	2	13.216.250	20%	9%		
2 15 01 2.09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	84	405.000.000	33	234.211.520	18 Unit	126.053.800	2	3.892.233	-	6.550.000	-	-	-	-	2	10.442.233	11%	8%	35	244.653.753	42%	60%
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	39	20.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		

2 15 01 2.09 06		Pemelih araan Peralata n dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Uni t	1 6 5	87.400 .000	4 3		30 Unit	8.77 5.00 0	-	-	3	1.45 0.00 0	-	-	-	-	3	1.45 0.00 0	0%	17%	4 6	23.4 81.5 00	28%	27%	
2 15 01 2.09 07		Pemelih araan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Uni t	8	291.50 0.000	3		2 Unit	57.3 69.5 00	-	8.00 0.00 0	-	18.5 75.0 00	-	-	-	-	-	26.5 75.0 00	0%	46%	3	215. 770. 500	38%	74%	
2 15 01 2.09 09		Pemelih araan/R ehabilita si Gedung Kantor dan Bangun an Bangun an Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabi litasi	Uni t	6	80.000 .000	3	17.6 65.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	3	17.6 65.0 00	50%	22%		
		Pemelih araan/R ehabilita si sarana dan prasara na gedung kantor atau bangun an lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabi litasi	Uni t	7	50.000 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					27%	26%			69%	45%	
Predikat Kinerja																					San gat Ren dah	San gat Ren dah			Seda ng	San gat Ren dah	

2	Meningkatnya prasarana dan layanan moda transportasi		Rasio Konektivitas Kabupaten/ kota	%	73,91		77,50		73,57													77,50		105,83%			
2 15 02		PROGRAM PENYELANGGAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Perlengkapan Jalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan	%	100	18.387.767.147	100	3.990.281.944	100	642.933.350	-	46.200.000	-	286.719.825	-	-	-	-	-	332.919.825	0%	52%	100	4.323.201.769	100	24%	
			persentase layanan angkutan darat	%	100	3.857.619.246	100	1.697.497.550	100	559.460.800	-	68.400.000	-	116.800.000	-	-	-	-	-	185.200.000	0%	33%	100	1.882.697.550	100	49%	
2 15 02 2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan dan prasarana jalan Kabupaten yang terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan	Jenis	8	18.387.767.147	8	3.990.281.944	7	642.933.350	-	46.200.000	-	286.719.825	-	-	-	-	-	332.919.825	0%	52%	8	4.323.201.769	100%	24%	DISHUB

		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C yang dikelola sesuai standart peraturan perundangan g-undangan	Lokasi	4	96.401.016	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	-	25%	0%	DISHUB
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	9	51.499.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	2	44.902.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	

2 15 02 2.05		Penguji an Berkala Kendar aan Bermot or	Jumlah kendaraa n wajib uji yang dinyatak an lulus uji sesuai dengan peraturan yang telah di persyarat kan	Uni t	4 2 0 6	427.1 90.60 0	-		900	18.4 55.8 00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	55.3 50.0 00	0%	13%	DIS HU B
		Penyedi aan Sarana dan Prasara na Penguja n Berkala Kendara an Bermoto r	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraa n Bermotor yang Tersedia	Uni t	3	292.20 0.000	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	52.4 00.0 00	33%	18%	
		Peningk atan Kapasita s Sumber Daya Manusia Penguja n Berkala Kendara an Bermoto r	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraa n Bermotor yang Ditingkat kan Kapasitas nya	Ora ng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
2 15 02 2.05 04		Penyedi aan Bukti Lulus Uji Penguja n Berkala Kendara an Bermoto	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraa n Bermotor	Do ku me n	1 6 0 0 0	125.00 0.000	-	-	200 0 Dok ume n	2.50 0.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	

		r																									
2 15 02 2.05 07		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	26	9.990.600	2	2.950.000	6 Unit	15.955.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	2	2.950.000	8%	30%		
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
2 15 02 2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kotaa	Jumlah ruas jalan kabupaten terselenggara manajemen rekayasa lalu lintas	Ruas	470	3.213.028.130	256,6	1.633.867.570	105	538.800.000	-	68.400.000	-	116.800.000	-	-	-	-	-	185.200.000	0%	34%	257	1.819.067.570	55%	57%	DIS HUB

2 15 02 2.06 01		Penataa n Manaje men dan Rekayas a Lalu Lintas Untuk Jaringa n Jalan Kabupat en/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajeme n dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupate n/Kota	Lap ora n	2 4	2.848. 500.00 0	4 8		5 Lapo ran	535. 200. 000	8	68.4 00.0 00	2 2	116. 800. 000	-	-	-	-	30	185. 200. 000	600 %	35%	7 8	1.80 4.20 2.57 0	325 %	63%	
		Pengada an, Pemasa ngan, Perbaika n dan Pemelih araan Perlengk apan Jalan dalam rangka Manaje men dan Rekayas a Lalu Lintas	Jumlah Pengadaa n, Pemasang an, Perbaikan dan Pemelihar aan Perlengka pan Jalan dalam rangka Manajeme n dan Rekayasa Lalu Lintas	Uni t	1 3 5	200.00 0.000	2	4.11 0.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	2	4.11 0.00 0	1%	2%		
2 15 02 2.06 05		Forum Lalu Lintas dan Angkuta n Jalan Kabupat en/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupate n/Kota	Lap ora n	2 5	164.52 8.130	2		5 Lapo ran	3.60 0.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	2	10.7 55.0 00	8%	7%		

2 15 02 2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Andalalin yang direkomendasikan yang telah memenuhi standart peraturan perundangan-g-undangan	Do ku me n	5	53.90 2.000	9	8.27 9.98 0	1	2.20 5.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	0%	9	8.27 9.98 0	180 %	15%	DIS HU B
		Peningkatan Kapasitas Penilaian Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Ora ng	2	44.902 .000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	7.22 9.98 0	50%	16%	
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Do ku me n	1 8 0	9.000. 000	1 7	-	36 Lapo ran	2.20 5.00 0	-	-	2	-	-	-	-	2	-	0%	0%	1 9	1.05 0.00 0	11%	12%	
2 15 02 2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pelaksanaan pengendalian dan keselamatan sesuai standart peraturan perundangan-g-undangan	%	-	67.09 7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DIS HU B

2 15 02 2.08 02		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1 1	67.097 .500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
2 15 02 2.09		Penyediaan Angkut an Umum untuk Jasa Angkut an Orang dan/atau Barang antar Kota	persentase pelaksanaan pengendalian dan pengawasan yang sesuai standart peraturan perundangan	%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DIS HUB

[illegible]

2 15 03		PROGR AM PENGEL OLAAN PELAYA RAN	Persentas e Peningka tan jumlah orang/ba rang yang terangku t melalui dermaga	%	2 %	8.740. 531.5 78	2 %		2%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	2 %	73.4 39.4 30	2%	1%	
2 15 03 2.13		Pemban gunan dan penerbi tan izin pemban gunan dan pengop erasian pelabuh an sungai dan danau	Persentas e keterpen uhan pelabuha n penyeber angan yang fungsiona l dan sesuai standart peraturan perundan g- undangan	%	1 0 0	8.740. 531.5 78	4 0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	4 0	73.4 39.4 30	40%	1%	DIS HU B
		Pemban gunan Pelabuh an Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuha n Sungai dan Danau yang Dibangun	Uni t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
2 15 03 2.13 03		Pengope rasian dan Pemelih araan Pelabuh an Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuha n Sungai dan Danau yang Beroperas i dan Terpelihar a	Uni t	9	4.884. 013.65 8	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	73.4 39.4 30	11%	2%	

		Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	Unit	140	3.856.517.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			0%	0%			11%	2%	
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 3)																			165%	42%			66%	33%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 3)																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
TOTAL ANGGARAN/ REALISASI						52.82	17.7	5.33	1.07	1.35					2.42					20.1					
						2.284.	27.4	0.00	0.72	3.35					4.07					67.4					
						795	08.3	2.44	4.78	2.65	-				7.43	-				21.1					
							92	4	5	0					5					34					

*) Diisi Oleh Kepala DINAS PERHUBUNGAN

KECAMATAN MALLUSETASI

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA (DPA) PERANGKAT DAERAH TAHUN	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA	UNIT PRANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV				

					PERANGKAT DAERAH)		RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		BERJALAN (TAHUN YANG DIEVALUASI)								YANG DIEVALUASI				PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		(12) = 8 + 9+10+11		(13) = 6 + 12		(14) = 13 / 5 * 100		(15)
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I	Meningkatnya Kualitas Penerapan/Implementasi SAKIP Kantor Kecamatan Mallusetasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Maturitas SPIP kecamatan	level	100	15.486.073.055	80,64 %	11.475.956.133	3	4.464.743.212	19,15 %	855.081.399	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,19	855.081.399	1,00	12.331.037.532	1,00	79,63	
			Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Jpl	20																				
1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	persen	100	10.573.454.655	100	9.282.492.758	100	3.628.914.282	100,00	787.751.891	-	-	-	-	-	-	100	787.751.891	100,00	10.070.244.649	100,00	95,24	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org	215	10.573.454.655	138	9.282.492.758	43	3.628.914.282	43	787.751.891	0	-	0	-	0	-	43	787.751.891	100,00	10.070.244.649	181	95,24	
2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	persen	91,65	149.500.000	14,58	30.794.000	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	14,58	30.794.000	15,91	20,60	
1		Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti	org	44	149.500.000	7	30.794.000	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	0%	-	0,00	-	0	-	

		Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																						
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	persen	100	1.733.547.500	100	866.060.381	100	504.347.820	5,65%	28.487.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	5,65%	28.487.800	5,65%	894.548.181	0,06	51,60	
1		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	20	186.600.000	12	57.862.000	4	19.448.400	0,00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0,00	57.862.000	12	31	
2		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	40	83.117.500	20	30.318.100	8	8.211.420	0,00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0,00	30.318.100	20	36	
3		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	25	55.950.000	15	23.680.000	5	10.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	23.680.000	15	42	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	46.000.000	12	6.510.500	0	-	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	6.510.500		14		
4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	1.361.880.000	36	747.689.781	1638	465.888.000	100	28.487.800	0	-	0	-	0	-	100	28.487.800	6,11	776.177.581	136	57	
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	686.350.000	100	148.733.300	100	92.487.100	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	148.733.300	0,00	21,67	

1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	40	686.350.000	19	148.733.300	6	92.487.100	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	148.733.300	19	22	
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	persen	100	1.978.250.900	100	903.133.870	100	222.286.210	17,47%	38.841.708	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	17,47%	38.841.708	17,47%	941.975.578	0,17	47,62	
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	195.250.000	36	121.271.700	12	47.160.600	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0,00	121.271.700	36	62	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	175.000.900	36	129.062.170	12	60.525.610	0	10.941.708	0	-	0	-	0	-	0	10.941.708	0,00	140.003.878	36	80	
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	1.608.000.000	36	652.800.000	12	114.600.000	3	27.900.000	0	-	0	-	0	-	3	27.900.000	25,00	680.700.000	39	42	
6		Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	persen	100	364.970.000	97,49	244.741.824	100%	16.707.800	0,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00	244.741.824	0,00	67,06	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	170	295.000.000	66	167.453.574	20	16.707.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	167.453.574	66	57	

2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	155	69.970.000	73	34.866.250	0	-	0	-	0,00	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	34.866.250	73	50	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi		20	101.500.000	4	42.422.000	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-			4	-	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			25,00	19,15	19,14	12.331.037.532	19,36	50,63	
Predikat Kerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
II	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan pada Kantor Kecamatan Mallusetasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen SOP Pelayanan yang disusun dan Implementasikan	persen	100	37.500.000	100	28.818.500	100	9.423.600	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00	28.818.500	50,00	76,85	
1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persen	100	37.500.000	40	28.818.500	100	9.423.600	0,0%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00	28.818.500	40,00	76,85	
1		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	10	37.500.000	6	28.818.500	2	9.423.600	0,00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	6,00	28.818.500	60	77	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			0,00	0,00			40,00	76,85	

Predikat Kerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi	
II I		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat / kelompok / lembaga	persen	100	7.069.503.650	100	2.074.696.797	100	858.948.270	0,38%	3.250.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,38%	3.250.000	0,00	2.077.946.797	50,00	29,39	
1		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	persen	100	566.301.000	100	5.567.500	0	-	0	-	0,00	-	0	-	0	-	0%	-	0,00	5.567.500	100	0,98	
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	25	566.301.000	10	5.567.500	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	5.567.500	10	0,98		
2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kelompok Masyarakat yang mendukung Kegiatan Pemberdayaan	persen	100	5.522.952.650	100	1.451.838.800	100	136.944.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00	1.451.838.800	50,00	26,29	
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga	25	566.301.000	15	67.965.200	5	32.652.000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0,00	67.965.200	15	12		
2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	unit	30	4.081.468.650	18	858.095.000	0	-	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	858.095.000	18	21	

			Terbangun																						
3		Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan	Kelo mpo k	15 0	851.683. 000	63	519.618. 800	3	104.292 .000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,0 0	519.618. 800	63	61	
4		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Lapo ran	15	23.500.0 00	9	6.159.80 0	0	-	0	-	0	-	0,0 0	-	0	-	0	-	#DI V/0 !	6.159.80 0	9	26	
3		Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarak atan yang Diberdayaka n dan Dibina	pers en	10 0	980.250 .000	100	617.290 .497	10 0	722.00 4.270	0,4 5%	3.250. 000	0,0 0%	-	0,0 0%	-	0,0 0%	-	0,4 5%	3.250. 000	0,0 0	620.540 .497	50, 00	63, 30	
1		Penyelenggara an Lembaga Kemasyarakat an	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggara kan	lemba ga	25	980.250. 000	15	617.290. 497	5	722.004 .270	0	3.250. 000	0	-	0	-	0,0 0	-	0	3.250. 000	0,0 0	620.540. 497	15	63	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			0,0 0	0,38			66, 67	30, 19	
Predikat Kerja																			San gat Ren dah	Sangat Renda h			Sed ang	San gat Ren dah	
I V	Meningkatny a kesadaran masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	pers en	10 0	161.250 .000	100	105.537 .300	10 0	28.833. 100	0,0 0	4.500. 000	0,0 0%	-	0,0 0%	-	0,0 0%	-	0,0 0%	4.500. 000		110.037 .300	50, 00	68, 24	
1		Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelengg araan ketentrama n dan ketertiban umum	Lapo ran	75	161.250 .000	44	105.537 .300	14	28.833. 100	0	4.500. 000	0	-	0	-	-	0	4.500. 000	0,0 0	110.037 .300	44	68, 24		

1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	60	98.750.000	36	89.704.800	12	19.629.600	12	4.500.000	0	-	0	-	0	-	12	4.500.000	100,00	94.204.800	48	95	
2		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	15	62.500.000	8	15.832.500	2	9.203.500	0,00%	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0,00	15.832.500	8	25	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			0,00	15,61			44,00	68,24	
Predikat Kerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sedang	
V		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	persen	100	281.250.000	100	140.297.200	100	34.213.600	0,00	-	0,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%	140.297.200	0,00%	49,88	
1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	org	125	281.250.000	50	140.297.200	13	34.213.600	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	50,00	140.297.200	50	49,88	
1		Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila,Pela	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	org	125	281.250.000	84	140.297.200	13	34.213.600	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	84	140.297.200	84	50	

		ksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara KESatuan Republik Indonesia	rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
Rata-rata capaian Kinerja (%)																0,0 0	0,00	50, 00		50, 00	50	
Predikat Kerja																Sang gat Ren dah	Sangat Renda h			Sang gat Ren dah	Sang gat Ren dah	
								5.396.1 61.782		862.8 31.39 9		-		-		15, 99	862.8 31.39 9		862.831 .399			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																5,0 0	7,03			44, 00	55, 16	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sang gat Ren dah	Sangat Renda h			Sang gat Ren dah	Ren dah	

BAPPELITBANGDA

NO	URAIAN	VOLUME	LOKA SI	JUMLAH DANA DALAM DPA/DIPA	JUMLAH NILAI KONTRAK	REKANAN / PELAKSA NA KEGIATA N	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	WAKTU PELAKSANA AN	REALISASI			BOB OT	SISA ANGGARAN	KETERANGA N / PERMASALA HAN
									KEUANGAN		FISIK			
									(Rp.)	%	%			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN			4.104.985.17 4,00					1.760.215.60 4,00				2.344.769.57 0,00	

	PEMERINTAHAN													
	PERENCANAAN			4.006.652.57 4,00				1.737.522.90 4,00					2.269.129.67 0,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.160.765.47 4,00				1.479.503.85 4,00					1.681.261.62 0,00	
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.831.333.44 2,00				1.315.860.40 0,00					1.515.473.04 2,00	
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3 1	Orang/Bul an	Barru	2.831.333.442, 00			1.315.860.400, 00	46,4 7	100, 00	0,69		1.515.473.042, 00	
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.000.000,00			0,00					9.000.000,00	
1.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3	Orang	Barru	9.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		9.000.000,00	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah				87.219.800,0 0			53.794.850,0 0					33.424.950,0 0	
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	Barru	9.405.900,00			7.405.320,00	78,7 3	78,7 3	0,00		2.000.580,00	
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	Barru	4.396.900,00			1.563.800,00	35,5 7	35,5 7	0,00		2.833.100,00	
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	paket	Barru	8.550.000,00			1.390.000,00	16,2 6	16,2 6	0,00		7.160.000,00	
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Paket	Barru	1.140.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		1.140.000,00	
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 2	Laporan	Barru	3.468.000,00			932.500,00	26,8 9	26,8 9	0,00		2.535.500,00	
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 0	Laporan	Barru	60.259.000,00			42.503.230,00	70,5 3	72,5 0	0,01		17.755.770,00	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				82.276.600,0 0			55.973.501,0 0					26.303.099,0 0	
1.4.1	Pengadaan Mebel	3	unit	Barru	11.463.500,00			6.216.000,00	54,2 2	66,6 7	0,00		5.247.500,00	
	-Filling Cabinet				6.216.000, 00	PT. PANTERO SELARAS UTAMA	EP- 01JRW3BMMQZMJZJEJHGY ZPZR9C Tanggal, '15 April 2025	Maret-April 2025						
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	unit	Barru	70.813.100,00			49.757.501,00	70,2 7	85,7 1	0,02		21.055.599,00	

	"-LCD Projector				7.300.001,00	PT. AYOOKLIK PANTERO TEKNOLOGI	EP-01JRENFJWC FY1YP0WD69B Y9SJVTanggal 10 April 2025	Maret-April 2025						
	"-Laptop				14.652.000,00	PT. AYOOKLIK PANTERO TEKNOLOGI	EP-01JRSED68J5X100RR9MNGT CJC2Tanggal 15 April 2025	Maret-April 2025						
	"-Printer dan Scanner				27.805.500,00	PT. AYOOKLIK PANTERO TEKNOLOGI	EP-01JRSED68J5X100RR9MNGT CJC2Tanggal 15 April 2025	Maret-April 2025						
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.006.192,00				43.606.066,00				67.400.126,00	
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	Laporan	Barru	52.206.192,00				17.006.066,00	32,57	50,00	0,01	35.200.126,00	
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	Barru	58.800.000,00				26.600.000,00	45,24	50,00	0,01	32.200.000,00	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				39.929.440,00				10.269.037,00				29.660.403,00	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	unit	Barru	18.200.000,00				2.909.037,00	15,98	15,98	0,00	15.290.963,00	
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38	unit	Barru	15.050.000,00				1.275.000,00	8,47	8,47	0,00	13.775.000,00	
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	Barru	6.679.440,00				6.085.000,00	91,10	100,00	0,00	594.440,00	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				535.689.500,00				155.815.450,00				379.874.050,00	
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				380.118.700,00				155.815.450,00				224.303.250,00	

2.1.1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	2	Berita Acara	Barru	19.748.400,00				6.511.850,00	32,97	100,00	0,00	13.236.550,00	
2.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	2	Berita Acara	Barru	36.924.400,00				26.941.000,00	72,96	100,00	0,01	9.983.400,00	
2.1.3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2	Berita Acara	Barru	58.936.200,00				12.980.000,00	22,02	100,00	0,01	45.956.200,00	
2.1.4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	11	Dokumen	Barru	264.509.700,00				109.382.600,00	41,35	63,64	0,06	155.127.100,00	1. Rancangan Awal RKPd Tahun 2026; 2. Rancangan RKPd Tahun 2026; 3. Rancangan Akhir RKPd Tahun 2026; 4. Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029; 5. Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029; 6. Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029; 7. Rancangan Perubahan RKPd Tahun 2025;
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				7.775.000,00				0,00				7.775.000,00	
2.2.1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	44	Orang	Barru	7.775.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	7.775.000,00	
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				147.795.800,00				0,00				147.795.800,00	
2.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10	Laporan	Barru	5.175.600,00				0,00	0,00	100,00	0,00	5.175.600,00	

	Daerah di Kabupaten/Kota													
2.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 6	Laporan	Barru	142.620.200,0 0				0,00	0,00	25,0 0	0,03	142.620.200,0 0	
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				310.197.600,00				102.203.600,00				207.994.000,00	
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				145.549.200,00				42.370.300,00				103.178.900,00	
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 6	Dokumen	Barru	21.416.800,00				5.036.300,00	23,5 2	23,5 2	0,01	16.380.500,00	
3.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 2	Laporan	Barru	55.300.000,00				19.269.000,00	34,8 4	34,8 4	0,01	36.031.000,00	
3.1.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 2	Dokumen	Barru	15.431.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	15.431.000,00	
3.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	Laporan	Barru	53.401.400,00				18.065.000,00	33,8 3	33,8 3	0,01	35.336.400,00	
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan				66.821.200,00				20.971.300,00				45.849.900,00	

	SDA (Sumber Daya Alam)													
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 2	Dokumen	Barru	14.614.500,00				3.305.000,00	22,6 1	22,6 1	0,00	11.309.500,00	
3.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4	Laporan	Barru	16.670.200,00				7.342.100,00	44,0 4	44,0 4	0,00	9.328.100,00	
3.2.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	Dokumen	Barru	17.568.100,00				3.373.500,00	19,2 0	19,2 0	0,00	14.194.600,00	
3.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2	Laporan	Barru	17.968.400,00				6.950.700,00	38,6 8	38,6 8	0,00	11.017.700,00	
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				97.827.200,00				38.862.000,00				58.965.200,00	
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 2	Dokumen	Barru	37.538.100,00				20.223.100,00	53,8 7	53,8 7	0,01	17.315.000,00	
3.3.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan	Barru	43.560.500,00				15.488.900,00	35,5 6	35,5 6	0,01	28.071.600,00	

3.3.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 1	Dokumen	Barru	8.871.500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	8.871.500,00	
3.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	7	Laporan	Barru	7.857.100,00				3.150.000,00	40,0 9	40,0 9	0,00	4.707.100,00	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				98.332.600,0 0				22.692.700,0 0				75.639.900,0 0	
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				98.332.600,0 0				22.692.700,0 0				75.639.900,0 0	
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				47.435.700,0 0				16.595.160,0 0				30.840.540,0 0	
4.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1	Laporan	Barru	34.910.900,00				13.891.690,00	39,7 9	39,7 9	0,01	21.019.210,00	
4.1.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1	Laporan	Barru	12.524.800,00				2.703.470,00	21,5 8	21,5 8	0,00	9.821.330,00	
4.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				50.896.900,0 0				6.097.540,00				44.799.360,0 0	
4.2.1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1	Laporan	Barru	50.896.900,00				6.097.540,00	11,9 8	11,9 8	0,01	44.799.360,00	
	TOTAL				4.104.985.17 4,00				1.760.215.60 4,00	42,8 8	42,8 8	1,00	2.344.769.57 0,00	

BAPENDA

N O	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKA T DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA								REALISAS I CAPAIAN KINERJA DAN ANGGAR N RENJA PERANGK AT DAERAH YANG DIEVALUA SI (SEMESTE RI TRIWULA NI TAHUN ANGGAR N 2025)				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISA SI ANGGAR AN RENSTRA PERANGK AT DAERAH S/D SEMESTE RI II TAHUN ANGGAR AN 2025 (%)				UNIT PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
															I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.													
(1)	(2)						(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) =8+9+10+11		(13) = 6+ 12		(14) = 13 / 5 * 100		(15)					
								URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan/implementasi SAKIP Badan Pendapatan Daerah	5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Maturitas SPIP Badan Pendapata n Daerah	Point	4	23.833.003.695	3	11.772.623.318	3	3.966.986.992	0	790.387.609	0	-	0	-	0	-	-	790.387.609,0	3,00	12.563.010.927	75,00	52,71	Badan Pendapat anDaerah					
								Rata-rata Lama Pegawai mendapatk an Pendidikan dan Pelatihan	JPL	100	330.000.000	20	11.417.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	20,00	11.417.500	20,00	3,46						
		5	02	01	2.02		Administras i Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusuna n dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Perse ntase	100	20.060.919.445	70	8.175.579.567	100	2.970.686.642	20	582.021.740	0	-	-	-	0	-	20	582.021.740	90,00	8.757.601.307	90,00	43,66	Badan Pendapat anDaerah					
		5	02	01	2.02	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima	orang /bulan	135	20.060.919.445	75	8.175.579.567	25	2.970.686.64	25	582.021.74	0	0	0	0	0	0	25	582.021.740	100,00	8.757.601.307	74,07	43,66	Badan Pendapat anDaerah					

					1	ASN	Gaji dan Tunjangan ASN						2	0													h			
		5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Persentase	100	330.000.000	19	11.417.500	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	19,00	11.417.500	19,00	3,46	Badan Penerimaan Daerah	
		5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	30	330.000.000	6	11.417.500	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6,00	11.417.500	20,00	3,46	Badan Penerimaan Daerah	
		5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase	100	974.649.000	60	846.871.130	100	385.476.700	7	25.667.869	0	0	0	0	0	0	7	25.667.869,0	67,00	872.538.999	67,00	89,52	Badan Penerimaan Daerah	
		5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	4.750.000	3	2.572.000	1	1.368.700	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	3,00	2.572.000	60,00	54,15	Badan Penerimaan Daerah
		5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	4.310.000	4	10.264.100	1	1.032.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00	10.264.100	80,00	238,15	Badan Penerimaan Daerah
		5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	265	965.589.000	581	834.035.030	390	383.076.000	45	25.667.869	0	0	0	0	0	0	45	25.667.869,0	62,600	859.702.899	23,623	89,03	Badan Penerimaan Daerah
		5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan	Persentase	100	783.785.000	54	1.797.328.026	100	293.485.000	50	145.410.000	0	0	0	0	0	0	0	50	145.410.000,0	10,400	1.942.738.026	10,400	247,87	Badan Penerimaan Daerah

[illegible]

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																											68,33	81,91		
PREDIKAT KINERJA																											S	T		
2	Meningkatnya sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Person	100,00	16.738.880,00	54	8.046.117.073	100,00	2.900.867.313	5	134.406.380	0	0	0	0	0	0	5	134.406.380	59,00	8.180.523.453	59,00	48,87	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase keterpenuhan capaian intensifikasi dan ekstensifikasi	Person	100	16.738.880,00	54	8.046.117.073	100	2.900.867.313	5	134.406.380	0	0	0	0	0	0	5	134.406.380	59,00	8.180.523.453	59,00	48,87	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	04	2.01	0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	14	4.607.100.000	14	963.250.545	9	679.539.690	2	69.478.480	0	0	0	0	0	0	2	69.478.480	16,00	1.032.729.025	114,29	22,42	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	35	631.521.000	23	3.065.917.185	7	55.700.500	1	3.250.000	0	0	0	0	0	0	1	3.250.000	24,00	3.069.167.185	68,57	486,00	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	35	1.642.550.000	22	1.089.139.700	7	498.574.200	1	2.800.000	0	0	0	0	0	0	1	2.800.000	23,00	1.091.939.700	65,71	66,48	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	9	5.408.042.000	6	929.120.364	2	104.461.000	1	17.250.000	0	0	0	0	0	0	1	17.250.000	7,00	946.370.364	77,78	17,50	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan	Laporan	10	880.112.500	9	212.991.750	6	77.591.200	2	6.650.300	0	0	0	0	0	0	2	6.650.300	11,00	219.642.050	110,00	24,96	Badan Pendapatan Daerah

[illegible]

b. Evaluasi Pelaksanaan Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan

Tabel 2.8

Realisasi capaian Indikator SPM Kabupaten Barru Tahun 2025

No	Uraian	Target RKPD Pokok Tahun 2025	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hingga Trw II Tahun 2025	Realisasi Anggaran Hingga Triwulan II Tahun 2025
I	Pendidikan				
1	Pendidikan Anak usia dini	-	9.942.313.450	-	-
2	Pendidikan Dasar (SD)	72%	39.653.477.896	-	-
3	Pendidikan Dasar (SMP)	76%	19.663.175.234	19,96%	504.000.000
4	Pendidikan Kesetaraan		3.503.252.680	-	-
II	Kesehatan				
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil	3.180 orang	739.146.300	448 Orang	300.000
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin	2.671 orang	98.874.300	453 Orang	2.960.000
3	Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir	2.544 orang	237.656.920	460 Orang	-
4	Pelayanan Kesehatan Bagi Balita	12.376 orang	89.866.272	2.355 Orang	-
5	Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar	2.880 orang	536.697.500	8.001 Orang	2.800.000
6	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif	34.676 orang	396.049.755	23.893 Orang	-
7	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut	16.022 orang	247.374.100	13.491 Orang	2.780.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	48.358 orang	527.110.233	9.625 Orang	-
9	Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus	3.069 orang	31.624.760	1.637 Orang	-
10	Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	475 orang	38.528.050	446 Orang	950.000
11	Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkolosis	3.630 orang	349.235.975	1.230 Orang	587.500
12	Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV	3.760 orang	135.686.300	509 Orang	-
III	Pekerjaan Umum				
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	1.660.308.310	0,80%	13.282.466

No	Uraian	Target RKPD Pokok Tahun 2025	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hingga Trw II Tahun 2025	Realisasi Anggaran Hingga Triwulan II Tahun 2025
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%	1.927.294.900	0,50%	9.636.475
IV	Perumahan Kawasan Pemukiman				
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1	1.276.505.800	0,05	127.650.580
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-	-	-	-
VI	Ketenteraman Ketertiban				
1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	1.105.612.000	1	104.550.300
2	pelayanan informasi rawan bencana	140.610 orang	45.000.000	-	850.000
3	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	140.610 orang	159.850.000	-	-
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	555 orang	385.250.000	1.401 Orang	95.554.896
VI	Sosial				
1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	65,048,600	60%	17,033,430
2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	15,186,700	90%	11,332,500
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	100%	13,418,700	10%	4,943,000
4	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	38,333,300	50%	14,743,000
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	94,921,000	30%	36,928,370

Sumber : Bappelitbangda (Olahan) 2025

Dari tabel di atas, untuk SPM Bidang Pendidikan yang telah terlaksana mulai bulan januari hingga April 2024 hanya SPM Pendidikan Dasar (SMP) dengan realisasi kinerja sebesar 19,96% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 504.000.000,-. Untuk SPM Bidang Kesehatan dari 12 SPM yang memiliki realisasi kinerja dan anggaran hanya sebanyak 6 SPM. Sementara untuk SPM Pekerjaan Umum, kedua indicator baik air minum dan air limbah telah memiliki realisasi meskipun masih sebesar 0,80 % dan 0,50 %.

Sementara untuk SPM Perumahan dan kawasan permukiman, dari 2 SPM, yang telah memiliki realisasi hanya 1 indikator. Selanjutnya

untuk SPM Ketentraman dan ketertiban, dari 4 indikator SPM hanya 2 indikator yang telah realisasi.

c. Capaian Kinerja Pendanaan

Informasi tentang capaian kinerja pendanaan memberikan gambaran capaian kinerja berdasarkan realisasi anggaran pada masing – masing kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada perangkat daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu Kategori rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0-20%. Kategori sedang untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari 20%-40% dan Kategori tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran di atas 40 %. Penetapan batas realisasi yang diharapkan berdasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan sampai dengan triwulan II yaitu lebih dari 40%.

1. *Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program*

Pada hasil evaluasi capaian kinerja outcome pada level program untuk tiap perangkat daerah dengan menggunakan kategori yang telah diuraikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan pada seluruh perangkat daerah sebanyak 198 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah masih sebanyak 198 program atau 100 persen (realisasinya 0-20 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang (realisasi >20-40 persen) dan untuk capaian kinerja kategori tinggi (realisasi di atas 40 persen) belum ada program yang mencapai hal ini.

2. *Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Kegiatan*

Pada evaluasi pelaksanaan capaian kinerja outcome pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, terdapat 510 kegiatan. Dari keseluruhan kegiatan tersebut secara keseluruhan kegiatan masih dalam kategori rendah yaitu 0–20 persen. Belum ada kegiatan yang yang berada dalam kategori sedang dan kategori tinggi.

3. *Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level sub Kegiatan*

Untuk evaluasi capaian kinerja outcome pada level sub kegiatan, dapat diuraikan bahwa dari 1.318 sub kegiatan, belum satupun yang berada pada kategori sedang dan tinggi. Sebanyak 1.318 sub kegiatan semuanya masih berada pada kategori rendah.

2.5. Hambatan, Upaya Pencapaian, Dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2025

a. Hambatan dan Kendala pelaksanaan RKPD Tahun 2025

Pelaksanaan pembangunan berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan 2 tahun 2025 masih berada di kisaran angka 0-20 %. Adapun hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya antara lain:

1. Terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau perubahan regulasi yang mempengaruhi jalannya program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Barru;
2. Keterbatasan fiskal daerah, Ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat, PAD rendah atau belum berkembang optimal
3. Kurangnya koordinasi yang efektif antar unit kerja dalam pemerintah daerah yang bisa menghambat pelaksanaan program secara efisien dan efektif;
4. Kekurangan jumlah pegawai yang terlatih dan kompeten di bidangnya menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan menjadi terhambat dan tidak maksimal.
5. Keterbatasan data dan informasi, Data sektoral tidak terintegrasi, Data belum mutakhir atau tidak tersedia secara spasial
6. Koordinasi lintas sektor dan wilayah yang lemah, Kurangnya sinkronisasi antara OPD dan pemerintah pusat/provinsi, Perbedaan prioritas antar wilayah
7. Kegiatan belum sepenuhnya berbasis outcome
8. Proses pengadaan barang dan jasa yang lambat
9. Masalah teknis maupun regulasi menyebabkan keterlambatan
10. Monitoring dan evaluasi yang belum efektif
11. Sistem pelaporan belum berbasis digital secara menyeluruh
12. Tumpang tindih kewenangan antar level pemerintahan
13. Perubahan kebijakan politik atau kepemimpinan yang mengubah Mengubah arah prioritas pembangunan jangka menengah

b. Upaya-upaya Pencapaian pelaksanaan RKPD Tahun 2025

Terhadap berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana diuraikan di atas, maka beberapa hal yang dapat dipertimbangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penyederhanaan proses birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dan standar konstruksi yang lebih baik;
2. Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Diversifikasi sumber PAD, seperti retribusi berbasis digital dan pemanfaatan aset daerah, serta Mendorong investasi daerah melalui penyederhanaan perizinan dan promosi potensi lokal.
3. Penguatan Data dan Informasi melalui Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terintegrasi dan berbasis spasial serta Mendorong OPD melakukan updating data sektoral secara berkala dan terstandarisasi.
4. Meningkatkan Kualitas Anggaran Berbasis Kinerja, melalui Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan outcome dan indikator yang jelas serta Evaluasi rutin terhadap efektivitas belanja publik dan rasionalisasi program yang tidak berdampak langsung.
5. Penguatan Kapasitas SDM dan Organisasi, melalui Pelatihan teknis dan manajerial berbasis kebutuhan jabatan serta Penempatan SDM berdasarkan kompetensi dan evaluasi kinerja secara berkala.
6. Untuk mewujudkan pencapaian indikator kinerja utama dan pencapaian SPM perlu dilaksanakan kegiatan yang terintegrasi, antara lain :
 - a. Meningkatkan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar lokal dan mendukung penurunan TPT;
 - b. Mendorong UMKM produktif menyerap tenaga kerja informal, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi;
 - c. Menurunkan angka kemiskinan berbasis pemberdayaan lokal dan akses layanan dasar;
 - d. Sinkronisasi intervensi berbasis data agar lebih tepat sasaran untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting;
 - e. Meningkatkan investasi produktif untuk pertumbuhan PDRB dan penciptaan lapangan kerja.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Situasi ekonomi global masih menantang, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih lemah dan ketidakpastian yang meningkat. Risiko resesi global berangsur mereda, sedangkan tingkat inflasi yang sempat mencapai puncaknya pada tahun 2022, saat ini telah berangsur turun. Di sisi lain, peningkatan ketegangan geopolitik menjadi salah satu sumber risiko utama bagi ekonomi dunia. Fragmentasi geoekonomi dan peningkatan proteksionisme dapat menekan laju perdagangan dan investasi global, serta berpotensi menghambat progress pengendalian inflasi global. Sementara itu, tantangan juga muncul dari perubahan iklim, perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI/digitalisasi), serta penuaan populasi di negara-negara maju (*ageing population*).

Sebagai perekonomian terbuka, ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan. Perkembangan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Jepang dan Zona Eropa, perlu terus dimonitor dan diantisipasi dampaknya. Dampak pandemic Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang, tingkat suku bunga global yang masih bertahan di level tinggi, serta eskalasi konflik geopolitik yang mengakibatkan fragmentasi ekonomi, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global hingga awal tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai dengan tahun 2025.

Di tengah tekanan ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif. Beberapa negara mitra dagang utama mengalami tekanan: ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,0 persen, Jepang 1,8 persen, Singapura 3,8 persen, sementara Korea Selatan justru mengalami kontraksi sebesar 0,1 persen pada triwulan I2025.

Perekonomian Indonesia pada triwulan I-2025 mencatat pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y). Meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,11 persen pada periode yang sama

tahun sebelumnya, tren pertumbuhan tetap terjaga. Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 tumbuh sebesar 4,87 persen, yang ditopang oleh sektor pertanian yang tumbuh double digit, industri makanan dan minuman yang tetap solid, serta sektor transportasi. Selain itu, Ramadan dan Idul fitri juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa tumbuh solid sebesar 6,78 persen, ditopang oleh peningkatan ekspor beberapa komoditas barang nonmigas seperti lemak & minyak hewan/nabati; besi & baja; mesin & peralatan listrik; serta kendaraan dan bagiannya. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara juga turut mendorong ekspor jasa. Sedangkan konsumsi pemerintah mengalami kontraksi 1,38 persen karena normalisasi belanja pemerintah, dimana pada triwulan I tahun lalu terdapat belanja pemerintah yang besar terkait Pemilu. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mencatat pertumbuhan 2,12 persen, melambat ditenga ketidakpastian global.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sebesar 10,52 persen. Capaian ini berbanding terbalik dibandingkan kondisi triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, ketika sektor pertanian mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 3,54 persen. Kinerja positif sektor pertanian tahun ini didorong oleh adanya peningkatan produksi padi dan jagung sebesar 51,45 persen dan 39,02 persen sepanjang triwulan 1-2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, serta meningkatnya permintaan domestik. Peningkatan tersebut mendorong tanaman pangan tumbuh 42,26 persen; dan peningkatan permintaan domestic daging dan telur saat Ramadan dan Idulfitri mendorong peternakan tumbuh 8,83 persen. Sementara itu, sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang utama PDB dengan pertumbuhan sebesar 4,55 persen, dan sektor informasi dan komunikasi tumbuh signifikan sebesar 7,72 persen, mencerminkan peningkatan kontribusi digitalisasi dalam struktur ekonomi nasional. Secara spasial, Pulau Jawa mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99 persen dan Sulawesi 6,40 persen, keduanya berada di atas rata-rata nasional. Sementara itu, wilayah Maluku dan Papua tetap tumbuh positif

sebesar 1,69 persen, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada awal tahun 2025, Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan dalam konteks perekonomian nasional dan global. Setelah melalui masa pemulihan dari pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat fondasi ekonomi melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, kompleksitas tantangan global dan dinamika internal tetap menjadi perhatian utama.

Adapun tantangan Ekonomi Indonesia di 2025, sebagai berikut :

1. Ketidakpastian Ekonomi Global Perubahan kebijakan moneter di Negara maju, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, dapat memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Kenaikan suku bunga global, misalnya, dapat memicu aliran modal keluar dari pasar domestik, sehingga melemahkan nilai tukar rupiah.
2. Inflasi dan Harga Komoditas Meskipun harga beberapa komoditas andalan Indonesia, seperti batu bara dan minyak sawit, mengalami peningkatan selama pandemi, fluktuasi harga yang tidak stabil tetap menjadi ancaman. Inflasi yang tinggi, baik akibat faktor domestik maupun global, dapat berdampak pada daya beli masyarakat.
3. Pengangguran dan Kesenjangan Sosial Tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan tenaga kerja muda, menjadi tantangan serius. Selain itu, kesenjangan ekonomi antarwilayah di Indonesia masih cukup tajam, dengan kawasan timur Indonesia yang tertinggal dibandingkan kawasan barat.
4. Transformasi Digital yang Belum Merata Meskipun Indonesia mengalami percepatan transformasi digital, akses teknologi dan infrastruktur digital masih belum merata di seluruh wilayah. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital yang potensial.

Sementara itu Peluang Ekonomi Indonesia di 2025, sebagai berikut :

1. Peningkatan Investasi Asing Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menarik investasi asing, termasuk melalui UndangUndang Cipta Kerja dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek strategis seperti

ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Potensi Ekonomi Hijau Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi hijau, termasuk energi terbarukan dan inisiatif keberlanjutan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, seperti tenaga surya dan angin, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
3. Ekonomi Digital Ekspansi sektor e-commerce, fintech, dan startup digital membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan populasi muda yang adaptif terhadap teknologi, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara.
4. Kerja Sama Regional dan Global Partisipasi Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional seperti RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) dapat membuka akses pasar baru bagi produk-produk Indonesia. Hal ini juga dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

Awal tahun 2025 akan menjadi periode krusial bagi Indonesia untuk menentukan arah perekonomian di masa depan. Dengan mengatasi tantangan secara strategis dan memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia berpotensi memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia Tenggara. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

B. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Perekonomian Sulawesi Selatan triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 173,51 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 97,36triliun. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,78 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,56 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor. Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,61 persen.

Berdasarkan rilis BPS Sulsel, ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan kinerja yang mengesankan pada kuartal pertama tahun 2025 dengan pertumbuhan sebesar 5,78 persen secara tahunan (yoy). Angka ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 4,87 persen, menjadikan Sulsel sebagai salah satu daerah yang berperan signifikan dalam menopang perekonomian Indonesia di awal tahun ini. Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada periode ini ditopang kuat oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami lonjakan signifikan. Sektor ini mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara lapangan usaha lainnya, yakni sebesar 16,56 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh membaiknya produksi tanaman pangan, khususnya padi, setelah sebelumnya tertekan oleh dampak El Nino pada tahun lalu.

Pada kuartal I 2025, produksi padi di Sulsel naik hingga 139 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika pertanian sempat terdampak kekeringan akibat El Nino. Selain padi, peningkatan juga terjadi pada produksi kelapa, kakao, dan bawang merah, serta subsektor perikanan seperti ikan tangkap dan peternakan yang mencatatkan peningkatan produksi ayam dan telur. Meskipun secara umum pertumbuhan ekonomi Sulsel menunjukkan tren positif, tidak semua sektor mengalami hal serupa. Sektor pertambangan dan penggalian tercatat mengalami kontraksi sebesar 3,94 persen, seiring turunnya produksi nikel dan ekspor besi serta baja yang merosot hingga 23 persen. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa tumbuh paling tinggi dengan pertumbuhan 16,61 persen, mencerminkan peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri. Konsumsi rumah tangga juga mencatatkan pertumbuhan yang stabil sebesar 4,71 persen. Namun, beberapa komponen pengeluaran lainnya mengalami kontraksi, seperti konsumsi lembaga non-profit rumah tangga yang turun 11,65 persen, konsumsi pemerintah yang turun 1,97 persen, Pembentukan Modal Tetap

Bruto yang turun 0,63 persen, serta impor barang dan jasa yang mengalami penurunan tajam hingga 12,16 persen. Sektor konstruksi juga mengalami penurunan sebesar 3,11 persen, sementara industri barang galian bukan logam menunjukkan penurunan produksi.

Dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 24,20 persen, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran sebesar 14,15 persen, industri pengolahan 13,18 persen, konstruksi 11,56 persen, dan informasi serta komunikasi sebesar 5,54 persen. Begitupun Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan tetap tumbuh di 2025 pada rentang 4,8% - 5,6%, meski ada tantangan efisiensi anggaran oleh pemerintah. Efisiensi yang dilakukan pemerintah sejatinya hanya mengalihkan beberapa poin anggaran ke program yang lebih penting, seperti makan bergizi gratis atau MBG. Jadi meskipun belanja pada perjalanan dinas dan kegiatan seremonial berkurang, namun belanja pada pemenuhan MBG akan menutup kekurangan itu. Meskipun kegiatan seremonial berkurang, tapi karena dialihkan ke MBG. Jadi cuma alokasinya saja yang berbeda. Sehingga yang dihitung nanti adalah total pengeluaran pemerintah. Bisa saja dibanding 2024, totalnya tetap atau bahkan lebih tinggi.

Apalagi motor penggerak ekonomi Sulsel masih pada sektor pertanian, di mana pada tahun ini produksinya diproyeksi lebih baik seiring terjadinya musim basah atau La Nina dengan kondisi lemah. Cuaca seperti ini diperkirakan akan membuat persawahan jadi tumbuh lebih subur. Selain itu, pada 2025 Kementerian Pertanian juga telah mencanangkan program pencetakan sawah dan mengalokasikan pupuk bersubsidi lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Ekonomi Sulsel akan tetap tumbuh baik, konsumsi domestik juga diprediksi tetap kuat ditopang kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 yang lebih tinggi, serta prospek investasi yang terjaga seiring pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulsel seperti peternakan sapi dan kawasan industri di Takalar. Faktor lain yang bisa mempengaruhi ekonomi Sulsel yaitu penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah atau HPP untuk komoditas beras dan jagung guna mendorong serapan Bulog dan mendukung ketahanan pangan.

Secara ringkas, ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2025 diprediksi tumbuh positif, namun tantangan dan peluang tetap ada. Tantangan meliputi ketidakpastian global dan inflasi, sementara

peluang berasal dari peningkatan investasi, konsumsi domestik, dan sektor pertanian.

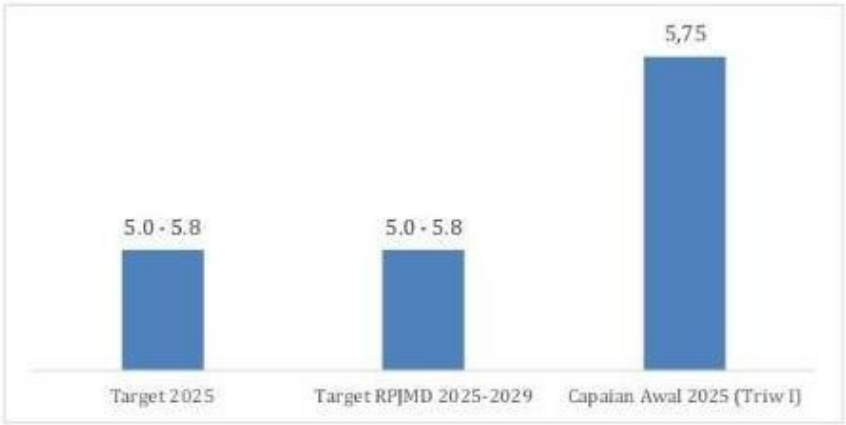
Tantangan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2025

- a. Inflasi : Prospek harga emas global yang tinggi dapat meningkatkan tekanan inflasi terhadap komoditas tertentu.
- b. Ketidakpastian Global : Kondisi ekonomi global yang tidak pasti bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sulsel.
- c. Efisiensi Anggaran Pemerintah : Normalisasi konsumsi pemerintah setelah lonjakan belanja pada tahun politik 2024 bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Adapun Peluang ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 sangat positif, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,8% hingga 5,6%. Beberapa factor yang mendukung pertumbuhan ini antara lain peningkatan produksi pertanian, konsumsi domestik yang kuat, prospek investasi yang terjaga, dan normalisasi konsumsi pemerintah. Adapun target pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2025, target RPJMD 2025-2029 tahun bersangkutan, dan capaian triwulan I tahun 2025 sebagai berikut.

Grafik 3.1

Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025



Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2025

C. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru pada triwulan pertama tahun 2025 belum terdapat data pada BPS. Namun, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan secara keseluruhan pada triwulan pertama 2025 mencapai 5,78% (y-on-y). Diasumsikan Kabupaten Barru juga akan mencapai 5% untuk pertumbuhan ekonomi di triwulan I.

Adapun tantangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Efisiensi Anggaran Pemerintah. Pemerintah pusat menerapkan instruksi efisiensi anggaran besar-besaran (pemotongan seremonial, perjalanan dinas, ATK), yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal jika mitigasi terhadap UMKM tidak optimal.
- b. Stabilitas Makro-ekonomi & Inflasi. Fokus kebijakan daerah mencakup stabilitas ekonomi makro melalui optimasi PAD, efisiensi belanja, dan pengendalian inflasi. Inflasi di Barru cukup rendah—0,09 % YoY dan -0,48 % MoM pada Februari 2025—namun tetap perlu dijaga melalui operasi pasar, sidak distribusi, dan kerja sama penyedia komoditas pangan
- c. Infrastruktur & Aksesibilitas. Sebagai bagian dari Sulawesi Selatan, Barru mengalami keterbatasan infrastruktur energi dan logistik; hanya sekitar 78 % kebutuhan listrik industri dipenuhi, dan banyak jalan provinsi serta kabupaten Barru dalam kondisi rusak parah.
- d. Pengembangan Kawasan Industri & Angkatan Kerja Pemerintah Barru menyiapkan pembangunan Kawasan Industri Barru (KIBAR) untuk meningkatkan lapangan kerja dan mencegah pengiriman tenaga kerja ke luar daerah . Tantangannya termasuk pembentukan perangkat daerah baru seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja dan memastikan investasi berjalan efektif.
- e. Ketidakpastian Global & Perdagangan Internasional. Ekonomi Sulsel (termasuk Barru) rentan terhadap ketegangan global seperti Perang Dagang Global 2.0, yang dapat menekan permintaan komoditas dan rantai pasok industri local, Diversifikasi sektor ekonomi seperti agroindustri, perikanan, dan logistik laut menjadi solusi, tetapi butuh pendalaman investasi dan hilirisasi lokal.

Adapun Peluang ekonomi Kabupaten Barru pada tahun 2025 sangat positif, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada dokumen RPJMD ditargetkan pada angka 5,74%, dengan baseline awal pada tahun 2024 capaian Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,92%.

Adapun sektor-sektor ekonomi utama yang membentuk PDRB Kabupaten Barru dan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru, diantaranya :

1. Pertanian & Perikanan: fondasi PDRB utama (~31 %) dan menyerap tenaga kerja besar. Peternakan dan budidaya udang sebagai subsektor unggulan.
2. Konstruksi: mendukung pembangunan infrastruktur dan kuat menyumbang nilai tambah lokal.
3. Perdagangan dan reparasi: aktivitas ekonomi riil harian yang stabil dan menjadi kanal distribusi utama.
4. Jasa—khususnya Jasa Lainnya, Sosial, dan Perusahaan: motor pertumbuhan tertinggi di 2024.
5. Pengeluaran LNPR dan konsumsi lokal memperluas basis permintaan domestik yang menopang pertumbuhan.

3.1.1.2 Inflasi

A. Inflasi Nasional

Nilai tukar rupiah relatif stabil di tengah tekanan global. Pada 27 Maret 2025, rupiah tercatat pada level Rp16.560 per USD, menguat 0,12% dari posisi akhir Februari. Namun, saat pasar domestik tutup selama libur panjang Idulfitri, terjadi tekanan di pasar offshore non-deliverable forward (NDF). Bank Indonesia merespons dengan melakukan intervensi berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York.

Upaya tersebut berhasil menstabilkan rupiah yang kembali menguat menjadi Rp16.855 per USD pada 22 April 2025. Pergerakan nilai tukar rupiah masih sejalan dengan mata uang negara lain di kawasan dan didukung oleh fundamental ekonomi domestik yang kuat, inflasi yang rendah, dan imbal hasil aset keuangan yang menarik.

Sementara itu, meskipun pasar keuangan global bergejolak, kinerja pasar surat berharga negara (SBN) Indonesia tetap terjaga. Yield SBN tenor 10 tahun sempat naik ke level 7,8% pada awal April 2025 pasca libur Lebaran, namun kembali turun ke 6,98% pada 22 April.

Investor asing mencatatkan net buy sebesar Rp12,78 triliun, meski proporsi kepemilikan mereka sedikit menurun dari 14,3% menjadi 14,25%. Stabilitas pasar SBN turut didorong oleh ekspektasi inflasi yang rendah dan prospek pertumbuhan ekonomi nasional yang positif.

Tingkat inflasi Indonesia pada Maret 2025 tetap terkendali. Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatat inflasi sebesar 1,03% secara tahunan (year-on-year), dengan inflasi inti sebesar 2,48%. Inflasi kelompok makanan bergejolak (volatile food) menurun menjadi 0,37%, sementara kelompok harga barang yang diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 3,16%.

Kinerja inflasi ini menunjukkan keberhasilan sinergi pengendalian harga antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), serta program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Proyeksi inflasi untuk 2025 dan 2026 tetap dalam sasaran 2,5% $\pm$ 1%, dengan ekspektasi inflasi yang masih terjangkau dan stabil.

B. Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan

Pada Januari 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,10 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,46. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Luwu Timur 0,87 persen dengan IHK sebesar 106,13 dan terendah terjadi di Kabupaten Wajo sebesar -0,64 persen dengan IHK sebesar 105,73.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,32 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,51 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,35 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,74 persen; kelompok transportasi sebesar 0,41 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,31 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,20 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,1 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,34 persen. Adapun kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 9,31 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,36 persen.

Tingkat deflasi month to month (m-to-m) pada Januari 2025 sebesar 0,75 persen dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) Provinsi Sulawesi Selatan bulan Januari 2025 sebesar 0,75 persen.

C. Inflasi Kabupaten Barru

Inflasi di Kabupaten Barru pada triwulan pertama 2025 mengikuti inflasi Kota Parepare. Pada Maret 2025 di Kota Parepare terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 1,98 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,11.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau 3,75 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 0,63 persen; kelompok kesehatan 1,40 persen; kelompok transportasi 2,63 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 1,34 persen; kelompok pendidikan 2,73 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 3,90 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 8,17 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 6,02 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,24 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,20 persen.

Tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) Maret 2025 sebesar 2,34 persen dan tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) Maret 2025 sebesar 1,43 persen.

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

A. Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) Nasional

Penduduk Usia Kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. PUK cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. PUK pada Februari 2025 sebanyak 216,79 juta orang, bertambah sebanyak 2,79 juta orang dibandingkan Februari 2024. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yang mencapai 153,05 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 63,74 juta orang.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2025 terdiri dari 145,77 juta orang penduduk bekerja dan 7,28 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2024, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja, dan pengangguran masing-masing bertambah sebanyak 3,67 juta orang; 3,59 juta orang; dan 0,08 juta orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sebesar 1,30 persen poin sejak Februari 2023 sampai dengan Februari 2025. TPAK pada Februari 2025 sebesar 70,60 persen, naik 0,80 persen poin dibanding Februari 2024. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Dari 216,79 juta penduduk usia kerja pada Februari 2025, sebanyak 153,05 juta orang di antaranya merupakan angkatan kerja. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 70,60%. Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2025, TPAK laki-laki sebesar 84,34 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 56,70 persen. Dibandingkan pada Februari 2024, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 0,32 persen poin dan 1,29 persen poin.

Sebanyak 7,28 juta orang atau 4,76 persen dari total angkatan kerja pada Februari 2025 merupakan pengangguran. Jumlah pengangguran tersebut meningkat sebanyak 0,08 juta orang dibandingkan Februari 2024.

Proporsi pekerja informal mengalami peningkatan, terutama didorong oleh bertambahnya penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap. Sementara itu, proporsi pekerja penuh meningkat dan tingkat setengah pengangguran menurun.

Tiga lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak pada Februari 2025 adalah Pertanian, Perdagangan, dan Industri Pengolahan, yang ketiganya juga merupakan lapangan usaha dengan peningkatan jumlah tenaga kerja tertinggi.

B. Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah angkatan kerja Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2025 sebanyak 4,82 juta orang, naik 108,41 ribu orang dibanding Februari 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sulawesi Selatan naik sebesar 0,58 persen poin dibanding Februari 2024.

Penduduk yang bekerja di Provinsi Sulawesi Selatan pada Februari 2025 sebanyak 4,58 juta orang, naik sebanyak 100,29 ribu orang dari Februari 2024. Lapangan usaha yang mengalami

peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 104,07 ribu orang. Pada Februari 2025 sebanyak 1,71 juta orang (37,37 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun sebesar 3,57 persen poin dibanding Februari 2024.

Persentase setengah pengangguran Provinsi Sulawesi Selatan pada Februari 2025 turun sebesar 0,29 persen poin dan presentase pekerja paruh waktu naik sebesar 5,08 persen poin dibanding Februari 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Selatan pada Februari 2025 sebesar 4,96 persen, naik sebesar 0,06 persen poin dibanding pada Februari 2024.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) Kabupaten Barru

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Barru pada triwulan I 2025 adalah 6,42%. TPT Sulawesi Selatan pada Februari 2025 adalah 4,96% menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan jumlah pengangguran di Sulawesi Selatan terjadi meskipun ekonomi tumbuh positif.

3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan

a. Tingkat Kemiskinan Nasional

Tahun 2025 membuka babak baru dalam catatan kemiskinan nasional: tingkat kemiskinan termurah dalam hampir dua dekade terakhir, sekaligus penurunan kemiskinan ekstrem yang secara historis baru dilaporkan resmi pada awal 2025. Penurunan ini terjadi meskipun target pemerintah untuk mencapai 7–8 % masih belum tercapai sepenuhnya. Masyarakat desa mencatat perbaikan lebih nyata dibanding kota, tetapi peningkatan gap pengeluaran di daerah perkotaan menjadi perhatian.

Tingkat kemiskinan nasional tercatat 8,47 % dari total penduduk per Maret 2025, sedikit menurun dari 8,57 % pada September 2024. Jumlah penduduk miskin: 23,85 juta orang, turun hampir 210 ribu dibanding September 2024, dan sekitar 1,37 juta jika dibanding Maret 2024. Jika menggunakan baseline RPJPN yang menargetkan pada 2025 di bawah 8 %, maka angka 8,47 % ini sedikit lebih tinggi dari target ideal pemerintah.

b. Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin di Sulsel pada Bulan September 2024 jauh lebih baik dibandingkan Maret 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 7,77 persen, turun 0,29 persen poin terhadap Maret 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 711,77 ribu orang, turun 24,7 ribu orang terhadap Maret 2024.

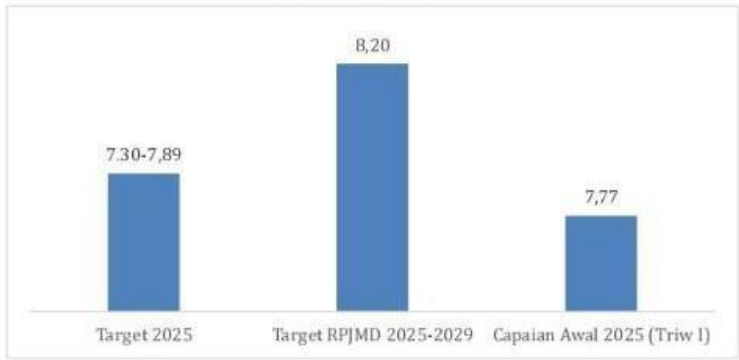
Meski secara keseluruhan jumlah penduduk miskin di Sulsel mengalami penurunan, namun persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 5,08 persen, naik menjadi 5,21 persen pada September 2024. Sementara, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 10,74 persen, turun menjadi 10,11 persen pada September 2024.

Dibanding Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan naik sebanyak 8,9 ribu orang (dari 219,65 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 228,59 ribu orang pada September 2024). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 33,7 ribu orang (dari 516,83 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 483,17 ribu orang pada September 2024).

Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp 467.991,-/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 350.315,- (74,68 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 117.676,- (25,32 persen) Pada September 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Sulawesi Selatan memiliki 5,36 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.508.432,-/rumah tangga miskin/bulan.

Target kemiskinan Sulawesi Selatan tahun 2025, target RPJMD 2025-2029 tahun bersangkutan, dan capaian triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.2
Target Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025



Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2025

c. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru

Pada akhir 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Barru tercatat 14,64 %, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 8.310 jiwa dari total penduduk sekitar 194.000 pada pertengahan 2023.

Meskipun BPS belum merilis data resmi terbaru per Maret 2025 khusus untuk Kabupaten Barru, indikator pada akhir 2024 memberikan gambaran tren di awal tahun 2025 yaitu Angka kemiskinan tidak mengalami lonjakan tajam dan cenderung berlanjut pada penurunan moderat karena tren sepanjang 2023–2024. Publikasi Kabupaten Barru Dalam Angka 2025 (rilis 28 Februari 2025, revisi 1 Juli 2025) tetap mencatat 14,64 % untuk 2024, menunjukkan bahwa tidak ada perubahan data yang substansial hingga pertengahan 2025.

Secara alami, ini mengindikasikan bahwa pada awal 2025, tingkat kemiskinan di Barru kemungkinan berada di kisaran 14,5 % hingga 14,7 %, mendekati angka akhir 2024. Untuk target RPJMD Tahun 2025 – 2029, untuk tingkat kemiskinan di targetkan sebesar 7,65%.

Adapun Faktor-Faktor Pemicu & Tantangan Berkelanjutan bagi penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Barru adalah :

- a. Banyak rumah tangga masih berpenghasilan sangat rendah (bawah Rp 250.000/kapita/bulan), Intervensi sosial belum terintegrasi sepenuhnya dan cenderung bersifat konsumtif,
- b. Belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dan kelembagaan serta pembiayaan berbasis data. Di sisi lain, Pemerintah Kab. Barru menekankan perlunya transformasi ke program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendampingan UMKM, sertifikasi lahan bagi keluarga prasejahtera, serta keterlibatan

CSR sektor swasta demi mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting.

3.1.1.5 Gini Ratio

A. Gini Ratio Nasional

Penurunan tingkat ketimpangan (Gini) memberi sinyal positif tentang distribusi ekonomi yang lebih merata. Gini ratio nasional menurun dari 0,381 (September 2024) menjadi 0,375 pada Maret 2025, menunjukkan penurunan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan di kota turun ke 0,395, dan di desa menjadi 0,299 Poin.

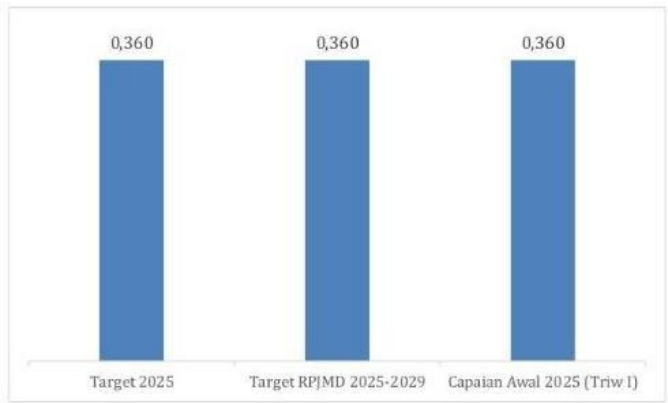
B. Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan

Salah satu pengukuran tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat adalah Koefisien Gini atau Gini Ratio. Di mana metode ini menggunakan alat ukur dengan grafik kurva Lorenz, sehingga jika kurva Lorenz mendekati diagonal grafik, menggambarkan pendapatan/pengeluaran yang makin merata karena nilai gini ratio makin kecil.

Berdasarkan rilis BPS, secara keseluruhan angka Gini Ratio Sulawesi Selatan pada awal tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan data terbaru, ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan pada tahun 2025 turun dari 0,363 (Maret 2024) menjadi 0,360 (tidak disebutkan bulan pasti). Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Luwu Utara mencatat tingkat ketimpangan pendapatan terendah yang menunjukkan distribusi pendapatan paling merata di Sulawesi Selatan. Di mana pada 2022, berada pada kisaran 0,349 point, 2023 menurun ke 0,342 point, dan 2024 kembali terjadi penurunan yang sangat signifikan ke level 0,272 point.

Berikut target Gini Ratio Sulawesi Selatan tahun 2025, target RPJMD Sulawesi Selatan 2025-2029, dan capaian triwulan I tahun 2025.

Grafik 3.3
Target Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025



Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2025

C. Gini Ratio Kabupaten Barru

Menurut publikasi Tren Kemiskinan Kabupaten Barru 2018–2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Barru pada tahun 2024 berhasil turun dari 0,371 pada tahun 2023 menjadi 0,310 poin. Angka ini merupakan salah satu yang terendah di Sulawesi Selatan dan menunjukkan distribusi pengeluaran yang semakin merata di masyarakat Barru.

Pada tahun 2025 diperkirakan rasio Gini awal 2025 berada sekitar 0,31 poin, dengan potensi sedikit fluktuasi dalam kisaran 0,30–0,32 poin. Sementara untuk target RPJMD Tahun 2025 – 2029, Gini Ratio ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 0,304 Poin.

Adapun tantangan gini ratio Kabupaten Barru, diantaranya:

1. Pendapatan rendah masih merata, tapi tetap rendah.
Meskipun ketimpangan makin kecil, banyak rumah tangga tetap berada di garis kemiskinan. Rasio Gini rendah sering kali mencerminkan distribusi pendapatan yang buruk secara absolut—bukan kesejahteraan yang tinggi.
2. Kemiskinan ekstrem belum teratasi sepenuhnya.
Distribusi pendapatan cenderung merata karena banyak orang masih berpenghasilan di bawah ambang minimal; gap antara rumah tangga “relatif lebih kaya” dan “relatif lebih miskin” semakin kecil karena semuanya dekat kemiskinan.
3. Ketimpangan akses antar wilayah.
Ketimpangan antardesa (barat-timur Barru) tetap menjadi isu, terutama soal infrastruktur, layanan sosial, dan akses digital—yang tidak sepenuhnya tercermin dalam angka Gini umum.

Adapun peluang untuk meratanya pembangunan Kabupaten Barru, diantaranya adalah memberi ruang untuk program pemberdayaan inklusif, Peningkatan kualitas daya beli masyarakat, Pengembangan UMKM dan industri local, serta mewujudkan sinergi pembangunan desa.

3.2. Tantangan Perekonomian Daerah

3.2.1 Aspek Eksternal

A. Tantangan Perekonomian Nasional

Perekonomian nasional saat ini menghadapi sejumlah tantangan strategis yang memerlukan perhatian dan respons kebijakan yang adaptif dan terintegrasi. Meskipun tren pemulihan ekonomi terus berlanjut pascapandemi, berbagai dinamika global dan domestik masih menjadi faktor penghambat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Ketidakpastian Ekonomi Global

Ketegangan geopolitik, disrupti rantai pasok global, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memberikan tekanan terhadap nilai tukar, arus modal, dan harga komoditas strategis. Hal ini berpotensi memicu volatilitas pasar keuangan dan meningkatkan biaya impor serta beban fiskal nasional.

2. Kesenjangan dan Ketimpangan Antarwilayah

Perekonomian nasional masih didominasi oleh wilayah barat Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Kesenjangan pertumbuhan antarwilayah dan keterbatasan infrastruktur di daerah tertinggal menjadi penghambat pemerataan hasil pembangunan. Hal ini juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan tingkat kemiskinan yang belum merata penurunannya.

3. Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja

Produktivitas nasional, terutama di sektor informal dan pertanian, masih rendah. Sementara itu, daya saing tenaga kerja Indonesia menghadapi tekanan akibat kemajuan teknologi, digitalisasi, dan transformasi industri global. Tantangan ini diperparah oleh kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja dan keterampilan yang dimiliki angkatan kerja.

4. Ketahanan Pangan dan Energi

Fluktuasi harga pangan dan energi global, disertai dengan perubahan iklim dan gangguan distribusi, mengancam stabilitas

harga domestik serta daya beli masyarakat. Ketergantungan terhadap impor pangan dan energi masih tinggi, sementara produksi dalam negeri belum sepenuhnya optimal dari sisi efisiensi dan skala ekonomi.

5. Pembiayaan Pembangunan dan Ruang Fiskal

Kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial semakin besar. Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah terbatas akibat beban utang dan kebutuhan subsidi, sehingga dibutuhkan reformasi fiskal yang lebih efisien dan berkelanjutan.

6. Perubahan Iklim, Risiko terhadap Ketahanan Ekonomi dan Pangan

Perubahan iklim telah berdampak nyata terhadap sektor-sektor ekonomi utama Indonesia, terutama pertanian, perikanan, energi, dan infrastruktur. Fenomena seperti kenaikan suhu, ketidakpastian musim tanam, banjir pesisir, dan kekeringan ekstrem semakin sering terjadi dan memperbesar risiko gagal panen, konflik lahan, serta inflasi harga pangan.

7. Perkembangan Teknologi, Disrupsi dan Tantangan Transformasi Industri.

Perkembangan teknologi—khususnya otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT)—telah membawa perubahan besar dalam dunia kerja dan struktur industri. Teknologi membawa peluang peningkatan efisiensi dan inovasi, namun juga mengancam lapangan kerja konvensional dan memperlebar kesenjangan keterampilan tenaga kerja.

8. Digitalisasi: Ketimpangan Akses, Perlindungan Data, dan Daya Saing

Arus digitalisasi ekonomi yang kian cepat—from e-commerce, sistem pembayaran digital, hingga tata kelola pemerintahan—telah menciptakan model bisnis dan konsumsi baru. Namun, tantangan besar muncul dari sisi : Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan, Kelemahan regulasi dan infrastruktur dalam menghadapi kejahatan siber dan perlindungan data, Ketergantungan pada platform digital asing yang mendominasi ekosistem digital nasional.

Menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan sinergi kebijakan yang kuat antarinstansi, penguatan kelembagaan, serta partisipasi aktif

sektor swasta dan masyarakat. Transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah tinggi, penguatan SDM, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan ketahanan dan kemajuan ekonomi nasional ke depan

B. Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan salah satu daerah penopang pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, dengan struktur ekonomi yang cukup beragam, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, hingga industri pengolahan. Namun demikian, dalam perjalanannya, perekonomian Sulsel tidak lepas dari berbagai tantangan struktural dan dinamis yang perlu segera direspons untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Ketergantungan pada Sektor Primer

Ekonomi Sulsel masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang sangat dipengaruhi oleh cuaca dan fluktuasi harga komoditas. Ketergantungan ini menjadikan ekonomi daerah rentan terhadap guncangan eksternal, seperti perubahan iklim, gangguan pasokan, dan harga pasar global.

2. Kesenjangan Antarwilayah

Tingkat pembangunan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Makassar sebagai pusat kegiatan ekonomi utama. Sementara itu, daerah-daerah di bagian selatan dan timur Sulsel masih menghadapi tantangan dalam akses infrastruktur dasar, layanan publik, serta pemerataan investasi.

3. Rendahnya Nilai Tambah Industri Pengolahan

Meskipun memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan, kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB masih relatif rendah. Kurangnya infrastruktur hilirisasi, teknologi produksi, dan akses pasar menyebabkan hasil produksi belum diolah secara optimal untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

4. Pengangguran dan Ketidaksesuaian Keterampilan

Tingkat pengangguran terbuka, terutama di kalangan usia muda dan lulusan perguruan tinggi, masih menjadi persoalan. Hal ini mencerminkan adanya mismatch antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan industri, terutama di sektor-sektor baru seperti ekonomi digital dan jasa berbasis teknologi.

5. Ketahanan Pangan dan Kerentanan Terhadap Iklim

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Sulsel menghadapi tantangan perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan produksi pangan. Gangguan cuaca ekstrem, banjir, dan kekeringan musiman dapat mengancam produksi pertanian dan pendapatan petani.

6. Rendahnya Investasi di Daerah Hinterland

Meskipun iklim usaha di Kota Makassar cukup berkembang, daerah-daerah hinterland di luar pusat kota masih kurang menarik bagi investor akibat keterbatasan infrastruktur dasar, regulasi yang belum optimal, serta minimnya dukungan fasilitas usaha.

Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas wilayah untuk mendorong transformasi ekonomi daerah. Pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, percepatan hilirisasi industri, dan inovasi kebijakan daerah menjadi kunci utama dalam membangun perekonomian Sulsel yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

3.2.2 Aspek Internal

Secara umum kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan struktural dan mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selaras dengan hal tersebut maka pengelolaan keuangan daerah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan dengan tetap menjaga *fiscal sustainability* jangka menengah.

Peningkatan peran Kabupaten Barru terhadap pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, merupakan tantangan sendiri. Perencanaan diarahkan lebih fokus pada program prioritas, efisien dan berdaya tahan serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian agar keberlanjutan fiskal dapat dijaga. Kerangka kebijakan fiskal juga harus menjadi *aggregate control* untuk menjaga konsistensi kebijakan dan sekaligus menjembatani keselarasan antara kebijakan jangka pendek dan jangka menengah melalui pengelolaan fiskal yang konsisten, efektif, hati-hati dan berkelanjutan. Pengelolaan fiskal perlu didorong agar *responsive*,

integrative, komprehensif dan efektif untuk memperkuat pondasi perekonomian daerah.

Adapun tantangan perekonomian daerah Kabupaten Barru dari aspek internal diantaranya :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu tantangan utama pembangunan ekonomi Barru adalah masih rendahnya kualitas SDM lokal, baik dari segi pendidikan formal, keterampilan teknis, maupun kecakapan kerja berbasis digital dan industri.

Tingkat pendidikan di Barru masih didominasi oleh lulusan SMP dan SMA, sementara kebutuhan sektor potensial seperti industri pengolahan, jasa, dan logistik memerlukan keterampilan lebih spesifik.

Rendahnya partisipasi pelatihan vokasi dan kejuruan, terutama di kalangan usia produktif, membatasi mobilitas tenaga kerja ke sektor-sektor dengan produktivitas tinggi. Masih terbatasnya akses terhadap pendidikan berbasis teknologi dan literasi digital, khususnya di wilayah pedesaan dan pesisir, menghambat integrasi masyarakat ke dalam ekonomi digital.

2. Rendahnya Tingkat Inovasi dan Kewirausahaan Lokal.

Semangat kewirausahaan masyarakat Kabupaten Barru tergolong sedang, tetapi belum diiringi oleh sistem dukungan dan ekosistem inovasi yang memadai :

- UMKM lokal cenderung beroperasi secara konvensional, dengan model usaha berbasis kebutuhan harian dan skala kecil, sehingga memiliki daya tahan lemah terhadap guncangan pasar.
- Rendahnya adopsi teknologi dalam usaha kecil menyebabkan produktivitas stagnan dan keterbatasan akses pasar.
- Kurangnya inkubasi bisnis, pelatihan manajerial, dan akses pembiayaan produktif menjadikan pertumbuhan usaha mikro dan startup berbasis lokal berjalan lambat.
- Kegiatan riset dan pengembangan (R&D) oleh lembaga pendidikan atau swasta belum terkoneksi dengan kebutuhan ekonomi lokal.

3. Struktur Ekonomi Daerah Masih Didominasi Sektor Primer.

Dengan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai lebih dari 30% PDRB, struktur ekonomi Barru masih

sangat tergantung pada sektor primer yang rawan fluktuasi harga, cuaca, dan akses pasar.

Diversifikasi ekonomi belum optimal ke sektor manufaktur ringan, pengolahan hasil pertanian, atau jasa bernilai tambah tinggi.

Infrastruktur penunjang industri seperti kawasan industri (KIBAR), logistik, dan jaringan distribusi belum termanfaatkan secara maksimal karena kurangnya SDM terampil dan investasi teknologi

3.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima (5) tahunan RPJMD. Penekanan prioritas tersebut bukan berarti bahwa program/kegiatan pembangunan operasional pada Perangkat Daerah di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan melahirkan program pembangunan daerah.

Arah kebijakan Kabupaten Barru terkait peningkatan perekonomian daerah melalui :

1. Peningkatan perekonomian wilayah melalui sektor-sektor strategis;
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
3. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
4. Optimalisasi penerapan *good governance*; dan

5. Peningkatan layanan infrastruktur berwawasan lingkungan.

Selanjutnya Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Barru
Tahun 2023-2025

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2025	Target RKPD Perubahan Tahun 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,51	75,22	75,22
2	Angka Kemiskinan	%	8,31	6,28	7,65
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,42	4,98	6,33
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,92	5,5	5,74
5	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	52,28	53,47	56,26
6	Rasio Gini	poin	0,310	0,32	0,300
7	Inflasi	Poin	1,73	1,5	1-3

Sumber data : BPS Kab.Barru Tahun 2025 dan Bappelitbangda (Olahan) 2025

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka menjawab kebijakan pembangunan daerah perlu didukung oleh kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah merupakan instrument fiskal daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas perekonomian serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Instrumen fiskal tersebut diwujudkan dalam sistem keuangan daerah. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah, maka keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur

pendapatan dan struktur belanja daerah yang sejalan dengan prinsip value for money yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Perubahan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Barru sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan diantaranya :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Menurut peraturan perundang – undangan pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Barru tahun 2025 yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari sisi regulasi nasional maupun strategi daerah itu sendiri, diantaranya : Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025. Selain itu arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Barru akan diprioritaskan dalam strategi upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan public, salah satunya dengan melakukan perluasan digitalisasi transaksi pajak dan retribusi.

Untuk target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025 mengalami penurunan dari target RKPD 2025 dari Rp, 965.241.439.118,- yang menjadi 970.487.557.877,- namun jika dibandingkan dengan APBD 2025, target tersebut mengalami peningkatan, dari APBD 2025 sebesar Rp. 942.682.702.023,-.

Peningkatan Target RKPD 2025 disebabkan karena peningkatan pendapatan, belanja, dan prioritas pembangunan daerah, dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor strategis dan kebijakan, baik secara nasional maupun daerah.

Untuk Perubahan RKPD 2025 target disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan APBD 2025 yang juga mengalami peningkatan. Hal ini ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Target Perubahan APBD Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Target RPJMD Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2025	APBD 2025	Target RKPD Perubahan Tahun 2025	Bertambah/ Berkurang
4	PENDAPATAN	1.057.134.513.859	961.307.419.212	942.682.702.023	913,881,879,599	47,425,539,613
04.01	Pendapatan Asli daerah	129.882.222.017	128,988,091,324.	128.517.022.299	121,255,769,878	7,732,321,446
04.01.01	Pajak Daerah	32.221.235.790	39,588,466,324	38.921.855.239,00	38.921.855.239	666,611,085
04.01.02	Retribusi Daerah	10.463.651.592	6,033,313,272.	72.436.483.917,00	67.211.579.025	(61,178,265,753)
04.01.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	9.786.249.360	10,418,879,113	10.418.879.114,00	10.632.531.585	(213,652,472)
04.01.04	Lain-Lain PAD yang sah	77.411.085.275	72,947,432,615.	6.739.804.029,00	4.489.804.029	68,457,628,586
04.02	Dana Transfer	843.052.848.914	832.319.327.888	791.155.243.416	792,626,109,721.00	39,693,218,167.00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	786.941.301.335	782.179.956.000	741.015.871.528	719,130,804,328.00	63,049,151,672.00
4.2.02	Transfer Antar Daerah	51.111.547.579	50.139.371.888	50.139.371.888	73,495,305,393.00	(23,355,933,505.00)
4.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	84.199.442.928	-	-	-	-
5	BELANJA	1.061.008.317.318	965.141.764.662	942.682.702.023	1,872,271,438,098	(907,129,673,436)
05.01	Belanja Operasi	791.523.846.905	745.423.611.847	750.035.132.520	744,614,952,736	808,659,111
05.01.01	Belanja Pegawai	466.979.795.597	451.898.151.683	435.156.760.755	448,779,223,985	3,118,927,698
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	305.935.193.060	276.916.275.182	295.222.246.175	278,614,964,767	(1,698,689,585)
05.01.03	Belanja Bunga	3.054.716.406	2.530.000.000	2.530.000.000	2,331,248,308	198,751,692
05.01.04	Belanja Subsidi	-	1.000.000.000			1,000,000,000
05.01.05	Belanja Hibah	15.554.141.842	13.239.184.982	16.958.125.590	14,889,515,676	(1,650,330,694)
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	-	840.000.000	168.000.000	-	840,000,000
05.02	Belanja Modal	138.881.270.459	118.678.403.649	84.942.469.613	140,849,017,228	(22,170,613,579)
5.2.01	Belanja Modal Tanah			2.560.000.000	6,500,375,196	(6,500,375,196)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			15.722.086.520	19,115,729,156	(19,115,729,156)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			27.235.738.407	36,691,420,551	(36,691,420,551)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			39.140.436.786	77,870,174,125	(77,870,174,125)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			284.207.900	671,318,200	(671,318,200)

05.03	Belanja Tidak Terduga	12.574.451.209	3.000.000.000	9.841.903.790	4,580,302,070	(1,580,302,070)
05.04	Belanja Transfer	118.028.748.745	98.039.749.166	97.863.196.100	96,763,196,100	1,276,553,066
05.04.02.5	Belanja Bagi Hasil			-	-	-
05.04.02.	Belanja Bantuan Keuangan	118.028.748.745		97.863.196.100	96,763,196,100	(96,763,196,100)
6	PEMBIAYAAN					
06.01	Penerimaan Pembiayaan	9.057.901.487	3.834.345.450	26.063.467.573	75,978,619,801	(72,144,274,351)
06.02	Pengeluaran Pembiayaan	5.184.098.028	5.053.031.265	3.053.031.265	3,053,031,265	2,000,000,000

Sumber data : BKAD 2025

a. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi: Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain- lain

pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah

- a. Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi

daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.

- i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- k. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- l. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
- m. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- n. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XV/2017

sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.

- o. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - p. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan
 - q. Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
 - r. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Adapun target perubahan dari komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD 2025 antara lain :

- a. Pajak Daerah Pendapatan pajak daerah diperkirakan meningkat menjadi Rp. 38.921.855.239

- b. Retribusi Daerah Pendapatan retribusi daerah diperkirakan turun sebesar Rp. 72.436.483.917,-, hal ini disebabkan beberapa potensi mengalami penurunan pendapatan.
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan meningkat menjadi Rp. 10,418,879,114,-
- d. Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain PAD Yang Sah diperkirakan meningkat sebesar Rp. 6.739.804.029,-

b. Perubahan Pendapatan Transfer

Selanjutnya ketentuan terkait Pendapatan Transfer mengacu pada pasal 34 sampai dengan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi :

1. transfer Pemerintah Pusat Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut :
 - a. Dana Perimbangan terdiri atas 1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; 2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; 3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah
2. Transfer antar Daerah Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
 - a. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas :
 - i. bantuan keuangan dari Daerah provinsi;

- ii. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota

Adapun pendapatan transfer diperkirakan mengalami penurunan dari RKPD Pokok dari Rp. 832.319.327.888,- menjadi Rp. 773.581.503.416,-, hal ini disebabkan tingginya proyeksi pada RKPD Pokok 2025 terhadap pendapatan transfer, namun realisasi ke Pemerintah Kabupaten Barru mengalami penurunan.

c. Perubahan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

- A. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya

untuk lain-lain pendapatan yang sah, tidak dianggarkan di RKPD 2025, begitupun target RKPD Perubahan 2025.

Tabel 3.3

Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Target RPJMD Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2025	APBD 2025	Target RKPD Perubahan Tahun 2025	Bertambah/ Berkurang
4	PENDAPATAN	1.057.134.513.859	961.307.419.212	942.682.702.023	913,881,879,599	47,425,539,613
04.01	Pendapatan Asli daerah	129.882.222.017	128,988,091,324.	128.517.022.299	121,255,769,878	7,732,321,446
04.01.01	Pajak Daerah	32.221.235.790	39,588,466,324	38.921.855.239,00	38.921.855.239	666,611,085
04.01.02	Retribusi Daerah	10.463.651.592	6,033,313,272.	72.436.483.917,00	67.211.579.025	(61,178,265,753)
04.01.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	9.786.249.360	10,418,879,113	10.418.879.114,00	10.632.531.585	(213,652,472)
04.01.04	Lain-Lain PAD yang sah	77.411.085.275	72,947,432,615.	6.739.804.029,00	4.489.804.029	68,457,628,586
04.02	Dana Transfer	843.052.848.914	832.319.327.888	791.155.243.416	792,626,109,721.00	39,693,218,167.00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	786.941.301.335	782.179.956.000	741.015.871.528	719,130,804,328.00	63,049,151,672.00
4.2.02	Transfer Antar Daerah	51.111.547.579	50.139.371.888	50.139.371.888	73,495,305,393.00	(23,355,933,505.00)
4.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	84.199.442.928	-	-	-	-
4	PENDAPATAN	1.057.134.513.859	961.307.419.212	942.682.702.023	913,881,879,599	47,425,539,613
04.01	Pendapatan Asli daerah	129.882.222.017	128,988,091,324.	128.517.022.299	121,255,769,878	7,732,321,446
04.01.01	Pajak Daerah	32.221.235.790	39,588,466,324	38.921.855.239,00	38.921.855.239	666,611,085
04.01.02	Retribusi Daerah	10.463.651.592	6,033,313,272.	72.436.483.917,00	67.211.579.025	(61,178,265,753)
04.01.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	9.786.249.360	10,418,879,113	10.418.879.114,00	10.632.531.585	(213,652,472)
04.01.04	Lain-Lain PAD yang sah	77.411.085.275	72,947,432,615.	6.739.804.029,00	4.489.804.029	68,457,628,586
04.02	Dana Transfer	843.052.848.914	832.319.327.888	791.155.243.416	792,626,109,721.00	39,693,218,167.00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	786.941.301.335	782.179.956.000	741.015.871.528	719,130,804,328.00	63,049,151,672.00
4.2.02	Transfer Antar Daerah	51.111.547.579	50.139.371.888	50.139.371.888	73,495,305,393.00	(23,355,933,505.00)
4.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	84.199.442.928	-	-	-	-

3.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

a. Perubahan Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja Barang dan jasa, Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah
3. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Belanja Subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana perubahan belanja operasi Kabupaten Barru meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai diproyeksikan mengalami penurunan menjadi Rp. 435.156.760.755,-, hal ini setelah dilakukan rasionalisasi jumlah total gaji dan ketersediaan ASN dan P3K.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa diperkirakan mengalami Peningkatan sebesar Rp 1.760.432.904,- menjadi Rp. 278.676.708.085,- dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam rangka pencapaian target kinerja.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga diproyeksikan tetap sebesar Rp. 2.530.000.000,-

d. Belanja Hibah

Belanja hibah diproyeksikan tetap sebesar Rp 16.958.125.590,- untuk mengakomodir lanjutan pembangunan gedung negara.

b. Perubahan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan:

- 1) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 2) Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 3) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 5) Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

Rencana perubahan belanja modal Kabupaten Barru diperkirakan mengalami Penurunan dari Rp. 118.678.403.649,- menjadi Rp . 88.779.939.703,-, hal ini disebabkan karena kebijakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang menyebabkan DAU Spesifik grant bidang infrastruktur dan DAK irigasi di offkan penganggarannya.

c. Perubahan Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Rencana perubahan belanja tak terduga Kabupaten Barru diperkirakan mengalami Peningkatan dari Rp. 3,000,000,000,- menjadi Rp. 4.976.231.790,-, hal ini untuk mengantisipasi kondisi alam hingga akhir tahun.

d. Perubahan Belanja Transfer

Penganggaran belanja tidak transfer Kabupaten Barru diperkirakan mengalami Penurunan dari Rp. 98.036.749.166,- menjadi Rp. 97.863.196.100,-, . Belanja transfer terdiri dari :

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah, Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah Kabupaten Barru kepada pemerintah Desa dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah Kabupaten dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2024, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2023 yang belum direalisasikan kepada pemerintah Desa atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

- 2) Bantuan Keuangan, diarahkan sebagai salah percepatan pembangunan daerah untuk mengatasi satu upaya kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah. Pendanaan pembangunan dimaksud berbentuk bantuan umum (block grant) dan bantuan khusus (specific grant), antara lain Alokasi Dana Desa (ADD). Belanja transfer berupa belanja bantuan keuangan diproyeksikan menurun pada angka dari Rp. 98.036.749.166,- menjadi Rp. 97.863.196.100,-.

Tabel 3.4
Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Target RPJMD Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2025	APBD 2025	Target RKPD Perubahan Tahun 2025	Bertambah/ Berkurang
5	BELANJA	1.061.008.317.318	965.141.764.662	942.682.702.023	1,872,271,438,098	(907,129,673,436)
05.01	Belanja Operasi	791.523.846.905	745.423.611.847	750.035.132.520	744,614,952,736	808,659,111
05.01.01	Belanja Pegawai	466.979.795.597	451.898.151.683	435.156.760.755	448,779,223,985	3,118,927,698
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	305.935.193.060	276.916.275.182	295.222.246.175	278,614,964,767	(1,698,689,585)
05.01.03	Belanja Bunga	3.054.716.406	2.530.000.000	2.530.000.000	2,331,248,308	198,751,692
05.01.04	Belanja Subsidi	-	1.000.000.000			1,000,000,000
05.01.05	Belanja Hibah	15.554.141.842	13.239.184.982	16.958.125.590	14,889,515,676	(1,650,330,694)
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	-	840.000.000	168.000.000		840,000,000
05.02	Belanja Modal	138.881.270.459	118.678.403.649	84.942.469.613	140,849,017,228	(22,170,613,579)
5.2.01	Belanja Modal Tanah			2.560.000.000	6,500,375,196	(6,500,375,196)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			15.722.086.520	19,115,729,156	(19,115,729,156)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			27.235.738.407	36,691,420,551	(36,691,420,551)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			39.140.436.786	77,870,174,125	(77,870,174,125)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			284.207.900	671,318,200	(671,318,200)
05.03	Belanja Tidak Terduga	12.574.451.209	3.000.000.000	9.841.903.790	4,580,302,070	(1,580,302,070)

05.04	Belanja Transfer	118.028.748.745	98.039.749.166	97.863.196.100	96,763,196,100	1,276,553,066
05.04.02.5	Belanja Bagi Hasil			-	-	-
05.04.02.	Belanja Bantuan Keuangan	118.028.748.745		97.863.196.100	96,763,196,100	(96,763,196,100)

3.3.2 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Adapun target perubahan pembiayaan daerah pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Target RPJMD Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2025	APBD 2025	Target RKPD Perubahan Tahun 2025	Bertambah/ Berkurang
6	PEMBIAYAAN					
06.01	Penerimaan Pembiayaan	9.057.901.487	3.834.345.450	26.063.467.573	75,978,619,801	(72,144,274,351)
06.02	Pengeluaran Pembiayaan	5.184.098.028	5.053.031.265	3.053.031.265	3,053,031,265	2,000,000,000

a. Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

- SiLPA Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. penghematan belanja;
 - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan

akhir tahun belum terselesaikan; dan/ataug. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Pencairan Dana Cadangan Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.
4. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan direncanakan mengalami peningkatan dari nilai APBD Tahun 2025 yang disebabkan oleh perubahan penerimaan SILPA dari Rp. 9.057.901.487 menjadi Rp. 26.063.467.570,-, peningkatan ini disebabkan adanya beberapa kegiatan lanjutan dari tahun 2025.

b. Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- 2) Penyertaan Modal Daerah
 - a. Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun Target Perubahan Pembiayaan

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- d. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air, minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

3) Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyesisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari :

- a. DAK;
- b. pinjaman daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi, untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:
 - i. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - ii. program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - iii. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 - iv. sumber dana cadangan; dan
 - v. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 diproyeksikan menurun dari Rp 5.053.031.265 menjadi Rp. 3,053,031,265.00,-.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan RKPD Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025, dimana penyusunan RKPD Tahun 2024 memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan target pada Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pada rancangan RPJMD Kabupaten Barru 2025-2029. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RKP Tahun 2025 dan kebijakan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025. Perumusan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2025 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 triwulan 1 serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029

Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 menjadi pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 Kabupaten Barru. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan (tahun 2025) menunjukkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Barru fokus untuk melakukan pemulihan di beberapa sektor diantaranya peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan, peningkatan rasio gini, sehingga berimplikasi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan maka menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan orientasi dalam perencanaan kedepan melalui perubahan RKPD Tahun 2025.

Penyesuaian-penyesuaian yang dimaksud dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025, sebagaimana diamanahkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dapat dilakukan penyesuaian.

Substansi perubahan dan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD 2025 mendasarkan dan memperhatikan pada:

1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
2. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan di dalam Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.
3. Arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2025.
4. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah dan Kabupaten sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional maupun provinsi dan Kabupaten.
5. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2025. Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Substansi perubahan menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru dalam menyusun perubahan rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Barru sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2025.

Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 juga telah memperhatikan Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati terpilih, khususnya penambahan

kegiatan dan sub kegiatan baru. Perubahan dan penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru tersebut telah ditindaklanjuti dengan perubahan Renstra Perangkat Daerah

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan pada perubahan RKPD tahun 2025 mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Barru tahun 2025 - 2029. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan yang merupakan penggalan dari 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C.

Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2025-2029. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai visi pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2025-2029. Adapun Visi pembangunan daerah Kabupaten Barru untuk periode RPJMD 2025- 2029 adalah :

**“Barru Berkeadilan, Barru Maju Berkelanjutan,
Barru Sejahtera Lebih Cepat”**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka;
2. Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif;
3. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur wilayah Yang Berketahanan Iklim;
4. Meningkatkan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan; dan

5. Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing

Adapun penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada gambar 4.2:

Gambar 4.1
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Barru
Tahun 2025 – 2029



Pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029 dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Perbandingan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan pada RKPD Pokok Tahun 2025 yang masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang menbaca pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Pembangunan Kabupaten Barru pada RKPD Pokok Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026

No	Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Keterangan
1	Misi 1: Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya						
	1	Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,80	75,22	
	1	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat	Indeks pendidikan	Poin	70,28	71,02	
	2	Sasaran : Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat	Indeks kesehatan	Poin	75,92	77,51	
	3	Sasaran : Meningkatnya kualitas daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita	Juta rupiah	11,71	11,86	
2	Misi 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal						
	2	Tujuan : Mewujudkan ketahanan terhadap bencana	Indeks ketahanan daerah terhadap bencana	Poin	0,54	0,78	
	4	Sasaran : Meningkatnya ketangguhan bencana	Persentase penurunan korban meninggal dan hilang karena bencana	%	0,077	0,004	
	3	Tujuan : Mewujudkan pengembangan pemajuan kebudayaan	Persentase peningkatan desa/kel pemajuan kebudayaan dari 0 menjadi 12,73%	%	7,31	17,00	
	5	Sasaran : Terwujudnya penguatan seni budaya	Persentase objek kemajuan budaya yang terpelihara	%	11,11	14,29	

No	Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Keterangan
3	Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal						
	4	Tujuan : Meningkatkan kualitas pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks williamson	Poin	0,27	0,20	
	6	Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur	Poin	2,990	3,884	
4	Misi 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan						
	5	Tujuan : mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi	%	3,51	5,74	
	7	Sasaran : Meningkatnya sektor-sektor strategis perekonomian daerah	Persentase kontribusi sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	52,52	53,29	
	8	Sasaran : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	72,04	74,60	
5	Misi 5: Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan						
	6	Tujuan : Menurunkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan	Indeks gini	Poin	0,34	0,35	
	9	Sasaran : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,89	5,22	
			Angka kemiskinan	%	8,46	7,73	
6	Misi 6: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi						

No	Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Keterangan
	7	Tujuan : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih	Nilai reformasi birokrasi	Poin	50,13	73	
	10	Sasaran : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik	Nilai SAKIP	Poin	60,04	75	
			Indeks pelayanan publik	Poin	3,96	4,25	
7	Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama						
	8	Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama	Angka kriminalitas	Per 10.000 penduduk	5,8	5,7	
	11	Sasaran : Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, norma-norma, hukum dan ideologi kebangsaan pada masyarakat	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Poin	0,001	0,001	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2023

Sedangkan perubahan target dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Barru tahun 2025-2029, yang menjadi landasan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,dan Target Kinerja Pembangunan Kabupaten Barru pada Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2025
Misi 1: Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	T.1 Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Indeks Gini	Poin	0,310	0,3
		S1.1 Berkurangnya Kemiskinan Msyarakat	Angka Kemiskinan	%	8,31	7,45
		S1.2 Berkembangnya Lapangan Kerja dan kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,42	6,33
Misi 2 : Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif	T.2 Meningkatkan Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	74,51	75,22
		S2.1 Meningkatnya Mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	67,19	67,51
			Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor Pendidikan	Poin	62,62	66,11
		S2.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	81,15	82,51
			Prevalensi Stunting	%	26,9	19,50
Misi 3 : Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur dan wilayah Yang Berketahanan Iklim	T.3 Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,42	3,54
		S3.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	3,990	3,995
		S3.2 Menurunnya Emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	-	36,56
		S3.3 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	168,40	127
Misi 4 : Meningkatkan Good Governance	T.4 Meningkatkan Integritas Tata		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin		70,82

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2025
yang Bernafaskan Keagamaan	Kelola Pemerintahan					
		S4.1 Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan	Nilai SAKIP	Poin	61,42	62,83
			Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,48	4,01
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	75,70	76,5
			Maturitas SPIP	Level	3,091	3,000
Misi 5: Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing	T.5 Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Daerah		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	52,28	56,26
		S5.1 Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,92	5,74
		S5.2 Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	4,43	5,29
		S5.3 Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	12,20	14,17

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukkan tujuan sasaran serta indikator yang akan mendukung pencapaian Misi Kabupaten Barru terdiri atas 5 tujuan, dan 11 sasaran dengan rumusan indikator sebanyak 5 indikator tujuan dan 16 indikator sasaran sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian Misi Kabupaten Barru sebanyak 21 Indikator.

Tujuan dan sasaran pada Pembangunan Kabupaten Barru pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 sehingga visi misi pembangunan Kabupaten Barru dapat tercapai. Perubahan tujuan dan sasaran pada Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 disebabkan oleh berakhirnya periode RPJMD Tahun 2021-2026 dan memasuki periode RPJMD Tahun 2025-2029 serta mengacu pada visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk periode Tahun 2025-2029.

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Prioritas pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2025 merupakan target pertama dari RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 yang disusun

berdasarkan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam tahapan ke empat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2025–2029, dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sebagai mana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun 2024, tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2025 serta untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, maka RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 dibuatkan penahapan pembangunan setiap tahun sehingga terdapat penekanan fokus setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 sebagai tahapan Pertama RPJMD dengan tema : **“Konsolidasi Sosial Ekonomi dan Penataan Pelayanan Dasar”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Percepatan Penanggulangan kemiskinan terintegrasi dan Terpadu (PIK PAKET)
2. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
3. Peningkatan Kualitas dan akses pelayanan pendidikan.
4. Subsidi SPP Mahasiswa S1, S2, dan S3 dan terutama Beasiswa 5 orang untuk Mahasiswa Kedokteran;
5. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
6. Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan
7. Peningkatan kesejahteraan kader posyandu;
8. Pembangunan Akademi Sepak Bola Ramang;
9. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SD/MI dan SMP/Mts;
10. Perbaikan tata kelola musabab tilawatil qur'an dan umroh serta peningkatan insentif bagi pegawai sara dan guru mengaji;
11. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan;
12. Peningkatan Infrastruktur Jalan
13. Peningkatan Infrastruktur Irigasi
14. Peningkatan Infrastruktur air Bersih
15. Penerapan dan Pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektornik (SPBE)
16. merit system ASN;

- 17. Digitalisasi Desa;
- 18. Perbaikan Tata Kelola dan peningkatan TPP ASN termasuk TPP bagi guru bersertifikasi
- 19. Pembangunan dan pengembangan kawasan industri Barru (KIBAR)
- 20. Perbaikan tata kelola dan subsidi pupuk
- 21. Pembangunan dan pengembangan agroteknologi, agropolitan serta hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan.
- 22. SPBU Nelayan
- 23. Pembangunan Pariwisata Gurilla
- 24. Penguatan Kapasitas UMKM dan Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis lokal

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2025 dengan sasaran, indikator dan target kinerja seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Keselarasan Tema Pembangunan, Permasalahan Pembangunan, Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 Kabupaten Barru

Tema Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian tahun 2024	Target RKPD Pokok 2025	Target Perubahan RKPD Tahun 2025
Konsolidasi Sosial Ekonomi dan Penataan Pelayanan Pelayan Dasar	Belum optimalnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	Berkurangnya kemiskinan masyarakat	Angka Kemiskinan	8,31	7,73	7,45
			Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,42	5,22	6,33
	Masih Rendahnya Kualitas Manusia	Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya Mutu pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,51	75,22	75,22
				Indeks Pendidikan	67,19	71,02	67,51
				Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor Pendidikan	62,62	66,11	66,11
			Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	81,15	77,51	82,51
				Prevalensi Stunting	26,9	19,5	19,5

Tema Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian tahun 2024	Target RKPD Pokok 2025	Target Perubahan RKPD Tahun 2025
	Masih rendahnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana	Peningkatan Kualitas dan kuantitas infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	3,99	3,884	3,995
		Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, agropolitan serta Hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,42	3,54	3,54
	Masih rendahnya Integritas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan	Nilai SAKIP	61,42	-	62,83
				Indeks Pelayanan Publik	3,48	-	4,01
				Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,7	-	76,5
	Belum optimalnya Produktifitas Ekonomi Daerah	Pembangunan dan pengembangan kawasan industri Barru (KIBAR)	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4,92	5,74	5,74
		Pemberdayaan dan Penguatan UMKM dan Koperasi	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,43	-	5,29
		Pengembangan Pariwisata Tuntas	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	12,2	-	14,17

Sumber : Data Olahan Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Selama 78 tahun kemerdekaan, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan

kekuatan maritim. Sehingga cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud.

4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020- 2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025 dengan berfokus pada komponen-komponen sebagaimana termuat pada gambar berikut.

Gambar 4. 2
Tema RKP Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025

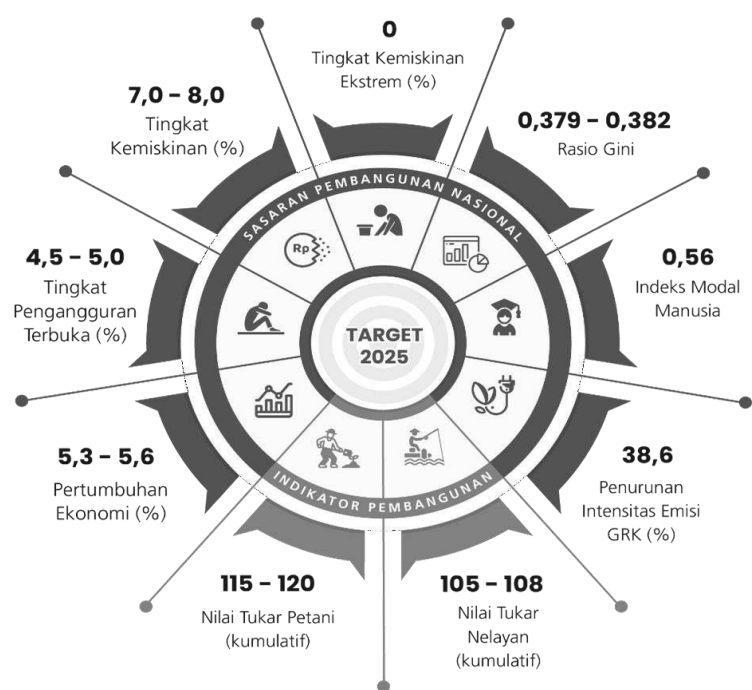
Kedudukan RKP Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun awal dari RPJMN Tahun 2025-2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN 2025-2029 merupakan tahapan penguatan fondasi dalam kerangka pencapaian Indonesia Emas 2045.

4.2.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan

Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Gambar 4. 3
Sasaran Pembangunan Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Tahun 2025

4.2.1.3 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

Gambar 4.4
Prioritas Nasional Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

4.2.1.4 Agenda Pembangunan pada RKP Tahun 2025

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan. Gambar di bawah ini memperlihatkan lima Agenda Pembangunan RKP Tahun 2025.

Gambar 4.5
Agenda Pembangunan RKP Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

4.2.1.5 Dukungan Pemerintah Kabupaten Barru terhadap Sasaran Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru juga disusun dalam rangka mendukung sasaran prioritas nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Adapun dukungan prioritas Kabupaten Barru terhadap sasaran prioritas pembangunan nasional dapat dilihat melalui indikator kinerja sasaran pembangunan Kabupaten Barru yang sebagai berikut :

Tabel 4.4
 Dukungan Pemerintah Kabupaten Barru Terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Target 2025	Sasaran Prioritas Pembangunan Kab. Barru	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025
Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,6%	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	5,74%
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5% - 5,0%	Berkembangnya Lapangan Kerja dan kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,33%
Rasio Gini	0,379 - 0,382	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Rasio Gini	0,304
Tingkat Kemiskinan	7% - 8%	Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7,65
Indeks Modal Manusia	0,56	Meningkatnya Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat	Indeks Pembangunan Manusia	75,22
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	38,6%	Menurunnya Emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	36,56%
Nilai Tukar Petani	115-120	-		-
Nilai Tukar Nelayan	105-108	-		-

Sumber : Data Olah Bappelitbangda Kab.Barru tahun 2025

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk

menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”. Dalam rangka operasionalisasi tema pembangunan Tahun 2025 sebagai tahun awal RPJMD Tahun 2025-2029, terdapat 8 prioritas pembangunan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan
6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi

Keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2025 dengan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Keterkaitan Sasaran pembangunan Kabupaten Barru dengan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru			Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Perubahan 2025	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Perubahan 2025
Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Rasio Gini	0,3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Rasio Gini	0,36
Berkurangnya Kemiskinan Msyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	7,45	Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan (%)	7,30-7,89
Berkembangnya Lapangan Kerja dan kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,33		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,80 – 4,10
Meningkatkan Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,22	Meningkatnya kualitas Modal Manusia	Indeks Modal Manusia	0,52
Meningkatnya Mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	67,51	Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	Rata rata lama sekolah	9,47
	Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor Pendidikan	66,11		Harapan lama sekolah	13,80-13,81
Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	82,51	Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	Usia Harapan Hidup	73,95
	Prevalensi Stunting (%)	19,5			
Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana	Indeks Daya Saing Daerah	3,54	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yg merata dan lingkungan yang berkelanjutan	Indeks Williamson	0,55
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	3,995	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	88,39
Menurunnya Emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	36,56	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yg merata dan lingkungan yang berkelanjutan	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	29,7
Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	127	Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	Indeks Resiko Bencana	135,46

Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru			Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		
Meningkatkan Integritas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	70,82	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, responsif dan berorientasi pada Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	81,80
Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan	Nilai SAKIP	62,83	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai SAKIP	69,27
	Indeks Pelayanan Publik	4,01	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,41
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76,5			
	Maturitas SPIP	3,000			
Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Daerah	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	56,26	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,2-5,8
Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,74			
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	5,29	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	13,05
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	14,17		Rasio Volume usaha Kopersasi terhadap PDRB (%)	0,95

4.2.2.1 Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Barru terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru juga disusun dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dukungan dapat dilihat melalui beberapa indikator kinerja sasaran yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6
Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Barru Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulalwesi Selatan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Perubahan 2025	Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru	Indikator Kinerja	Target Perubahan 2025
Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan (%)	7,30-7,89	Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	Tingkat Kemiskinan (%)	7,45
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,80 –4,10		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,33
Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Meningkatnya kualitas Modal Manusia	Indeks Modal Manusia	0,52	Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,22
	Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	Rata rata lama sekolah	9,47		Indeks Pendidikan	67,51
		Harapan lama sekolah	13,80-13,81		Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor Pendidikan	66,11
	Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	Usia Harapan Hidup	73,95		Indeks Kesehatan	82,51
					Prevalensi Stunting (%)	19,5
Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yg merata dan lingkungan yang berkelanjutan	Indeks Williamson	0,55	Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, agropolitan serta Hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan	Indeks Daya Saing Daerah	3,54
	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	88,39		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	3,995
	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yg merata dan lingkungan yang berkelanjutan	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	29,7		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	36,56

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Perubahan 2025	Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru	Indikator Kinerja	Target Perubahan 2025
Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	Indeks Resiko Bencana	135,46		Indeks Resiko Bencana	127
Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, responsif dan berorientasi pada Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	81,80	Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	70,82
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai SAKIP	69,27		Nilai SAKIP	62,83
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,41		Indeks Pelayanan Publik	4,01
					Indeks Kerukunan Umat Beragama	76,5
					Maturitas SPIP	3,000
Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,2-5,8	Pemberdayaan dan Penguatan UMKM dan Koperasi	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	56,26
					Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,74
		Rasio Gini	0,36		Rasio Gini	0,3
	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	13,05	Pengembangan Kawasan Industri Barru	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	5,29
		Rasio Volume usaha Kopersasi terhadap PDRB (%)	0,95	Pengembangan Pariwisata Tuntas	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	14,17

Sumber : Data Olah Bappelitbangda Kab.Barru tahun 2025

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru

Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran yang pada dasarnya meliputi program program unggulan perangkat daerah, target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Adapun tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu “Konsolidasi Sosial Ekonomi dan Penataan Pelayanan Dasar” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka
2. Peningkatan Kualitas dan Akses pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Pengembangan Kawasan Industri Barru
6. Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, agropolitan serta Hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan
7. Pengembangan Pariwisata Tuntas
8. Pemberdayaan dan Penguatan UMKM dan Koperasi

Adapun sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Prioritas, Arah Kebijakan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan
Kabupaten Barru Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2025
Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	Mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan sistem terpadu berbasis teknologi informasi, yang mencakup perbaikan infrastruktur layanan dasar, peningkatan akses pendidikan vokasi, dan pengembangan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Berkurangnya kemiskinan masyarakat	Angka Kemiskinan	8,31	7,45
			Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,42	6,33
Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatkan mutu pendidikan, derajat kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga terkait lainnya, dengan dukungan kebijakan yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat	Meningkatnya Mutu pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,51	75,22
				Indeks Pendidikan	67,19	67,51
				Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor Pendidikan	62,62	66,11
			Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	81,15	82,51
				Prevalensi Stunting	26,9	19,5
Peningkatan Kualitas dan kuantitas infrastruktur	Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan wilayah terhadap	Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	3,99	3,995
			Menurunnya Emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi GRK	-	36,56

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2025
	bencana melalui perencanaan terpadu berbasis risiko, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan penerapan teknologi inovatif, penguatan sistem peringatan dini, serta perluasan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna membangun infrastruktur yang tangguh, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan iklim serta risiko bencana	berketahanan terhadap Bencana	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	168,4	127
Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten serta berbasis hasil penelitian	Meningkatkan Integritas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan	Nilai SAKIP	61,42	62,83
				Indeks Pelayanan Publik	3,48	4,01
				Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,7	76,5
Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, agropolitan serta Hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan	Mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata, serta memperkuat kapasitas UMKM,	Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Daerah	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4,92	5,74

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2025
Pengembangan Kawasan Industri Barru	menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah		Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,43	5,29
Pemberdayaan dan Penguatan UMKM dan Koperasi						
Pengembangan Pariwisata Tuntas			Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	12,2	14,17

Sumber : Data Oleh Bappelitbangda Kab.Barru tahun 2025

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2025 dengan sasaran, indikator dan target kinerja seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini.

Prioritas, arah kebijakan, strategi, Arah kebijakan, dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan Tahun 2025 yang meliputi antara lain :

Tabel 4.8
Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kabupaten Barru Tahun 2024	Target RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025	Target Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025	Target Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,51	74,80	75,22	0,52 (IMM)
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,31	7,73	7,45	7,30-7,89
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,42	5,22	6,33	3,80 – 4,10
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,92	5,74	5,74	5,50-6,30
5	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rp	52,28	74,55	56,26	76,58 – 80,16
6	Rasio Gini	Angka	0,310	0,356	0,300	0,371-0,376

Sumber : Data Oleh Bappelitbangda Kab.Barru tahun 2025

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025

Rencana pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk tahun 2025 Kabupaten Barru. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan target dan pendanaan program. Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 alokasi pendanaan sebesar Rp 961.307.419.212,-, sementara Perubahan RKPD 2025 diproyeksikan Rp 913.881.879.599,-. Hal ini mengalami penurunan disebabkan karena terjadinya perubahan kebijakan diantaranya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, karena dana transfer pemerintah pusat yang masuk dalam APBD Tahun 2025 mengalami penurunan tahun 2025 masih diasumsikan dalam masa pemulihan ekonomi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK.

Hal tersebut berlaku juga di Kabupaten Barru sehingga RKPD Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan, penyesuaian dengan regulasi terkait pengelolaan keuangan Daerah yang juga sangat mempengaruhi struktur dalam Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, salah satunya dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 menyebabkan postur APBD Tahun 2025 berubah secara signifikan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut :

Tabel 5.1
Rincian Rencana Pendanaan Perubahan Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran RKPD Tahun 2025	Anggaran pada APBD 2025	Proyeksi Penganggaran RKPD Perubahan Tahun 2025	Bertambah/ Berkurang	%
4	PENDAPATAN	961.307.419.212	942.682.702.023	913.881.879.599	47,425,539,613	4.93%
04.01	Pendapatan Asli daerah	128,988,091,324	128.517.022.299	121.255.769.878	7,732,321,446	5.99%
04.02	Dana Transfer	832.319.327.888	791.155.243.416	792.626.109.721	39,693,218,167	4.77%
5	BELANJA	965.141.764.662	942.682.702.023	986,807,468,134	(21,665,703,472)	-2.24%
05.01	Belanja Operasi	745.423.611.847	750.035.132.520	744,614,952,736	808,659,111	0.11%
05.02	Belanja Modal	118.678.403.649	84.942.469.613	140,849,017,228	(22,170,613,579)	-18.68%
05.03	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	9.841.903.790	4,580,302,070	(1,580,302,070)	-52.68%
05.04	Belanja Transfer	98.039.749.166	97.863.196.100	96,763,196,100	1,276,553,066	1.30%
6	PEMBIAYAAN					
06.01	Penerimaan Pembiayaan	3.834.345.450	26.063.467.573	75.978.619.801	(72,144,274,351)	-1881.53%
06.02	Pengeluaran Pembiayaan	5.053.031.265	3.053.031.265	3.053.031.265	2,000,000,000	39.58%

Sumber : Bappelitbangda dan BKAD Kabupaten Barru, diolah, 2025

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2025

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk Perubahan tahun 2025, Perumusan program prioritas pembangunan daerah pada RKPD Perubahan tahun 2025 terdiri dari 8 (Delapan) Prioritas Pembangunan yaitu :

- 1. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka;
- 2. Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan dan pendidikan;
- 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur;
- 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 5. Pengembangan Kawasan Industri Barru;

- 6. Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, agropolitan serta Hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
- 7. Pengembangan Pariwisata Tuntas; dan
- 8. Pemberdayaan dan Penguatan UMKM dan Koperasi

Secara keseluruhan prioritas pembangunan tahun 2025 adalah sebanyak 8 (Delapan) prioritas pembangunan dengan 8 (delapan) sasaran, dan 92 (Sembilan puluh dua) program prioritas sebagai mana di jabarkan pada tabel berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. BARRU
TAHUN 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								320,205,500,349.00	272,582,176,521.00	280,116,480,926.00	-40,089,019,423.00							0.00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN							318,492,968,849.00	271,571,917,821.00	279,212,583,979.00	-39,280,384,870.00								0.00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							318,492,968,849.00	271,571,917,821.00	279,212,583,979.00	-39,280,384,870.00								0.00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pendidikan				-	3 Poin	245,730,749,589.00	241,368,259,751.00	254,923,014,062.00	-245,730,749,589.00								0.00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Keuangan				-	100 %	244,652,047,063.00	240,267,908,365.00	253,890,371,595.00	9,238,324,532.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2180 Orang/bulan	2180 Orang/bulan	244,652,047,063.00	0.00	0.00	-244,652,047,063.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	2180 Orang/bulan	0.00	240,267,908,365.00	253,890,371,595.00	253,890,371,595.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISK-TPG PNSD DAK NON FISK-TAMSI L GURU PNSD	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Teknis/ Fungsional/ Struktural				-	100 %	35,344,500.00	57,628,000.00	57,628,000.00	22,283,500.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	6 Orang	35,344,500.00	57,628,000.00	57,628,000.00	22,283,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	214,743,550.00	443,592,900.00	291,187,400.00	76,443,850.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	91,079,550.00	58,085,400.00	58,085,400.00	-32,994,150.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	123,864,000.00	385,507,500.00	233,102,000.00	109,438,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	60,000,000.00	38,305,000.00	43,072,000.00	-16,928,000.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	50 Unit	60,000,000.00	38,305,000.00	43,072,000.00	-16,928,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-16,928,000.00		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	3 Jenis	632,144,476.00	414,868,382.00	414,868,382.00	-217,276,094.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	332,884,500.00	92,488,410.00	92,488,410.00	-240,396,090.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	153,166,476.00	174,076,572.00	174,076,572.00	20,910,096.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Desedakan				19 Laporan	19 Laporan	146,093,500.00	148,303,400.00	148,303,400.00	2,209,900.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelthara			-	100 %		136,470,000.00	145,957,104.00	225,886,685.00	89,416,685.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelthara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52 Unit	52 Unit	75,070,000.00	70,930,200.00	70,930,200.00	-4,139,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelthara				4 Unit	4 Unit	55,500,000.00	63,975,000.00	63,975,000.00	8,475,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelthara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	5,900,000.00	0.00	0.00	-5,900,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelthara/Direhabilitasi			-		8 Unit	0.00	11,051,904.00	90,981,485.00	90,981,485.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD			-	94.63 %		72,762,219,260.00	30,203,658,070.00	24,289,569,917.00	-72,762,219,260.00						0.00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SPM SD)			-	100% %		39,653,477,896.00	12,424,253,486.00	6,726,564,039.00	-32,926,913,857.00			-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang GuruKepala SekolahTU																
			Jumlah Ruang Guru/Kepala SekolahTU yang Telah Dibangun				1 Ruang	5 Ruang	261,297,854.00	0.00	53,377,200.00	-207,920,654.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	14 Ruang	150,000,000.00	157,622,300.00	61,819,447.00	-88,180,553.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				48 Unit	76 Unit	8,020,913,445.00	175,827,616.00	1,285,991,287.00	-6,734,922,158.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala SekolahGuru/Perjaga Sekolah																
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	2 Unit	193,540,623.00	394,055,750.00	204,827,975.00	11,287,352.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																
			Jumlah Mebel sekolah yang Terseda				5 Paket	5 Paket	160,000,000.00	0.00	0.00	-160,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Terseda				10 Paket	10 Paket	131,250,000.00	27,478,000.00	27,478,000.00	-103,772,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENCIODIKAN-RE GULER-SD	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				600 Peserta Didik	600 Peserta Didik	217,260,800.00	0.00	0.00	-217,260,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			-		600 Peserta Didik	0.00	378,012,900.00	304,772,600.00	304,772,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	0 Ruang	407,756,900.00	0.00	0.00	-407,756,900.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0067		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	113,850,000.00	0.00	0.00	-113,850,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD (SPM PAUD)				-	100 %	9,942,313,450.00	10,038,504,656.00	10,111,936,350.00	169,622,900.00			-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0002		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				10 Unit	8 Unit	241,120,000.00	304,954,000.00	358,785,114.00	117,665,114.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJATAHUN SEBELUMNYADAK FISK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0011		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				6869 Peserta Didik	6869 Peserta Didik	3,841,735,900.00	3,719,472,800.00	3,732,022,800.00	-109,713,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISK-BOP PAUD	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0015		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				645 Orang	540 Orang	5,213,655,000.00	5,613,300,000.00	5,561,601,300.00	347,946,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0016		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	128,521,600.00	123,334,100.00	123,334,100.00	-5,187,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0017		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				254 Satuan Pendidikan	254 Satuan Pendidikan	117,280,950.00	70,300,200.00	81,158,100.00	-36,122,850.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0030		Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	7 Ruang	400,000,000.00	207,143,556.00	255,034,936.00	-144,965,064.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJATAHUN SEBELUMNYA	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM Kesetaraan)				-	100 %	3,503,252,680.00	2,573,947,600.00	2,545,488,600.00	-957,764,080.00			-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	-		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0046		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1050 Peserta Didik	1050 Peserta Didik	3,503,252,680.00	2,573,947,600.00	2,545,488,600.00	-957,764,080.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN							1,712,531,500.00	1,010,258,700.00	903,896,947.00	-808,634,553.00							0.00	
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							1,712,531,500.00	1,010,258,700.00	903,896,947.00	-808,634,553.00							0.00	
1. 2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Cagar dan Karyabudaya yang Ditetapkan sebagai WBTB				-	0,33 Poin	1,095,030,500.00	799,322,100.00	715,741,100.00	-1,095,030,500.00							0.00	

			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik							6882 Peserta Didik	0,00	8,228,120,000.00	8,228,120,000.00	8,228,120,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KNERJA	-		4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA					0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		UPTD DINAS PENDIDIKAN SD BARRU									0,00	16,443,330,000.00	16,443,330,000.00	16,443,330,000.00										0,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN									0,00	16,443,330,000.00	16,443,330,000.00	16,443,330,000.00										0,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									0,00	16,443,330,000.00	16,443,330,000.00	16,443,330,000.00										0,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-						-	-	0,00	16,443,330,000.00	16,443,330,000.00	0,00										0,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-						-	-	0,00	16,443,330,000.00	16,443,330,000.00	16,443,330,000.00			-		4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	-				0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																								
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik						-	16407 Peserta Didik	0,00	16,443,330,000.00	16,443,330,000.00	16,443,330,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KNERJA	-		4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA					0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		DINAS KESEHATAN										179,101,919,969.00	132,749,877,969.00	141,529,336,091.65	-37,572,583,877.35										154,942,214,972.00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN									179,101,919,969.00	132,749,877,969.00	141,529,336,091.65	-37,572,583,877.35										154,942,214,972.00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									179,101,919,969.00	132,749,877,969.00	141,529,336,091.65	-37,572,583,877.35										154,942,214,972.00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan					-		4 Poin	95,964,270,978.00	74,449,440,342.00	74,033,531,342.00	-21,715,602,436.00										74,248,668,542.00		
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan					-		100 Persen	991,800.00	45,192,240.00	5,841,240.00	4,849,440.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	ASN				5,841,240.00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen		991,800.00	45,192,240.00	5,841,240.00	4,849,440.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					5,841,240.00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang Undangan					-		100 Persen	74,248,329,275.00	71,300,347,173.00	71,300,347,173.00	-2,947,982,102.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	ASN				71,300,347,173.00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					726 Orang/ bulan	726 Orang/ bulan		74,248,329,275.00	71,300,347,173.00	71,300,347,173.00	-2,947,982,102.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					71,300,347,173.00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu					-		100 Persen	26,416,000.00	6,716,000.00	3,716,000.00	-22,700,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	ASN				3,716,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																								

			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	26,416,000.00	6,716,000.00	3,716,000.00	-22,700,000.00	Kab. Barru, Barru, Tuwung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			3,716,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah				-	100 Persen	785,997,900.00	912,729,500.00	560,313,500.00	-235,684,400.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	ASN		864,906,700.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	1 Paket	10,182,000.00	12,477,000.00	12,477,000.00	2,295,000.00	Kab. Barru, Barru, Tuwung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			12,477,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	7 Paket	143,301,400.00	81,720,000.00	81,720,000.00	-61,581,400.00	Kab. Barru, Barru, Tuwung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			81,720,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	9 Paket	10,096,000.00	17,484,100.00	17,484,100.00	7,388,100.00	Kab. Barru, Barru, Tuwung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			17,484,100.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	113,315,000.00	117,465,400.00	117,465,400.00	4,150,400.00	Kab. Barru, Barru, Tuwung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			117,465,400.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	1 Paket	33,250,000.00	33,247,000.00	33,247,000.00	-3,000.00	Kab. Barru, Barru, Tuwung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			33,247,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	13,380,000.00	10,022,500.00	10,022,500.00	-3,357,500.00	Kab. Barru, Barru, Tuwung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			10,022,500.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	462,473,500.00	640,313,500.00	277,897,500.00	-184,576,000.00	Kab. Barru, Barru, Tuwung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			992,490,700.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah				-	100 Persen	32,800,000.00	71,009,800.00	71,009,800.00	38,209,800.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	ASN		71,009,800.00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Unit	2 Unit	735,740,340.00	0.00	0.00	-735,740,340.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			103,236,490.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				4 Unit	4 Unit	2,054,837,347.00	0.00	0.00	-2,054,837,347.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			152,626,584.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				200 Unit	13 Unit	75,477,507.00	0.00	0.00	-75,477,507.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			1,666,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				117 Unit	240 Unit	38,918,000.00	149,393,400.00	151,103,400.00	112,185,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENKOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			151,103,400.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			4,800,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	2,877,578,492.00	6,057,498,381.00	6,057,498,381.00	3,179,919,889.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENKOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			6,057,498,381.00	DINAS KESEHATAN

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					12 Dokumen	12 Dokumen	106,300,000.00	84,850,500.00	78,580,500.00	-27,719,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENKOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					78,580,500.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					2 Dokumen	0 Dokumen	11,510,000.00	0.00	0.00	-11,510,000.00	Kab. Barru, Semua KelDesa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	12 Dokumen	697,050,500.00	127,168,400.00	127,168,400.00	-569,882,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENKOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA				127,168,400.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																					
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					2384 Orang	0 Orang	30,255,000.00	0.00	0.00	-30,255,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA				0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	12 Dokumen	1,638,502,960.00	174,354,250.00	167,014,250.00	-1,471,488,710.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENKOT A	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA				166,374,250.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					12 Dokumen	12 Dokumen	45,488,187,741.00	41,908,084,784.00	41,893,884,784.00	-3,594,302,957.00	Kab. Barru, Barru, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				41,903,464,784.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-								404,432,000.00	15,560,000.00	15,560,000.00	-388,872,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Masyarakat				15,560,000.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																						
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					2 Dokumen	2 Dokumen		404,432,000.00	15,560,000.00	15,560,000.00	-388,872,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENKOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA				15,560,000.00	DINAS KESEHATAN	
	PUSKESMAS BOJO BARU										0.00	2,231,498,570.00	2,231,498,570.00	2,231,498,570.00								1.00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN									0.00	2,231,498,570.00	2,231,498,570.00	2,231,498,570.00								1.00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									0.00	2,231,498,570.00	2,231,498,570.00	2,231,498,570.00								1.00		
1. 1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-					-	-		0.00	1,744,400,000.00	1,744,400,000.00	1.00								1.00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-					-	-		0.00	1,744,400,000.00	1,744,400,000.00	1,744,400,000.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			1.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																						
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					-	1 Unit Kerja		0.00	1,744,400,000.00	1,744,400,000.00	1,744,400,000.00	Kab. Barru, Malutestasi, Bojo Baru	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				1.00	DINAS KESEHATAN	
2. 1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT	-					-	-		0.00	482,689,570.00	482,689,570.00	0.00								0.00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-					-	-		0.00	482,689,570.00	482,689,570.00	482,689,570.00				3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																						
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	0 Orang		0.00	20,615,820.00	20,615,820.00	20,615,820.00	Kab. Barru, Malutestasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																						
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	0 Orang		0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	Kab. Barru, Malutestasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																						
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					-	0 Orang		0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	Kab. Barru, Malutestasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																						
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					-	0 Orang		0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	Kab. Barru, Malutestasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	0 Dokumen		0.00	145,628,700.00	145,628,700.00	145,628,700.00	Kab. Barru, Malutestasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					-	0 Dokumen		0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Kab. Barru, Malutestasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																						

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0.00	16,645,000.00	16,645,000.00	16,645,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0.00	67,190,720.00	67,190,720.00	67,190,720.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0.00	145,486,600.00	145,486,600.00	145,486,600.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0.00	5,372,730.00	5,372,730.00	5,372,730.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengeladaan pelayanan kelanjutan				-	0 Dokumen	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASY ARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0.00	4,409,000.00	4,409,000.00	0.00			-				0.00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	-				-	-	0.00	4,409,000.00	4,409,000.00	4,409,000.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	0 Dokumen	0.00	4,409,000.00	4,409,000.00	4,409,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PALANRO							0.00	2,500,125,135.00	2,500,125,135.00	2,500,125,135.00								2,001,999,984.00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN							0.00	2,500,125,135.00	2,500,125,135.00	2,500,125,135.00							2,001,999,984.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							0.00	2,500,125,135.00	2,500,125,135.00	2,500,125,135.00							2,001,999,984.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-				-	-	0.00	1,801,691,075.00	1,801,691,075.00	2,001,999,984.00							2,001,999,984.00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0.00	1,801,691,075.00	1,801,691,075.00	1,801,691,075.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		2,001,999,984.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0.00	1,801,691,075.00	1,801,691,075.00	1,801,691,075.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			2,001,999,984.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAY A KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY A KESEHATAN MASY ARAKAT	-				-	-	0.00	694,459,610.00	694,459,610.00	0.00							0.00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP-Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0.00	694,459,610.00	694,459,610.00	694,459,610.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		0.00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					311 Orang	0.00	60,108,800.00	60,108,800.00	60,108,800.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2573 Orang	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	42 Orang	0.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	421 Orang	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0.00	228,475,900.00	228,475,900.00	228,475,900.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0.00	25,500,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0.00	17,150,000.00	17,150,000.00	17,150,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	75 Orang	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0.00	115,775,600.00	115,775,600.00	115,775,600.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0.00	153,054,100.00	153,054,100.00	153,054,100.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	10 Orang	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0.00	6,708,000.00	6,708,000.00	6,708,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0.00	1,087,210.00	1,087,210.00	1,087,210.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	12 Dokumen	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0.00	3,974,490.00	3,974,490.00	0.00							0.00	

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	-					-	-	0.00	3,974,450.00	3,974,450.00	3,974,450.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																				
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	12 Dokumen	0.00	3,974,450.00	3,974,450.00	3,974,450.00	Kab. Barru, Maltasasi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MADELLO								0.00	3,055,216,280.00	3,055,216,280.00	3,055,216,280.00								2,015,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN								0.00	3,055,216,280.00	3,055,216,280.00	3,055,216,280.00								2,015,000,000.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG								0.00	3,055,216,280.00	3,055,216,280.00	3,055,216,280.00								2,015,000,000.00	
	1. 1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-					-	-	0.00	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	2,015,000,000.00								2,015,000,000.00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-					-	-	0.00	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			2,015,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																				
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					-	1 Unit Kerja	0.00	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				2,015,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	2. 1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT	-					-	-	0.00	750,729,340.00	750,729,340.00	0.00								0.00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-					-	-	0.00	750,729,340.00	750,729,340.00	750,729,340.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																				
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	355 Orang	0.00	57,268,800.00	57,268,800.00	57,268,800.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																				
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	1657 Orang	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					-	40 Orang	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																				
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					-	40 Orang	0.00	13,250,000.00	13,250,000.00	13,250,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																				
			Jumlah Orang Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	12 Dokumen	0.00	281,112,000.00	281,112,000.00	281,112,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					-	12 Dokumen	0.00	8,750,000.00	8,750,000.00	8,750,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	12 Dokumen	0.00	22,800,000.00	22,800,000.00	22,800,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	12 Dokumen	0.00	22,700,000.00	22,700,000.00	22,700,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN

1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
		Jumlah Orang dengan Masalah Kjiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	35 Orang	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0.00	103,888,000.00	103,888,000.00	103,888,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0.00	166,126,800.00	166,126,800.00	166,126,800.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria																			
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	30 Orang	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0.00	1,907,200.00	1,907,200.00	1,907,200.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0.00	6,126,540.00	6,126,540.00	6,126,540.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
3. 1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0.00	4,486,940.00	4,486,940.00	0.00			-				0.00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	-				-	-	0.00	4,486,940.00	4,486,940.00	4,486,940.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.05.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0.00	4,486,940.00	4,486,940.00	4,486,940.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS PEKKAE						0.00	3,335,781,986.00	3,335,781,986.00	3,335,781,986.00							0.00		
1	URUSAN PEMBERANTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN							0.00	3,335,781,986.00	3,335,781,986.00	3,335,781,986.00							0.00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							0.00	3,335,781,986.00	3,335,781,986.00	3,335,781,986.00							0.00		
1. 1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-				-	-	0.00	2,663,073,766.00	2,663,073,766.00	0.00							0.00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0.00	2,663,073,766.00	2,663,073,766.00	2,663,073,766.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0.00	2,663,073,766.00	2,663,073,766.00	2,663,073,766.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
2. 1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0.00	669,715,020.00	669,715,020.00	0.00							0.00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0.00	669,715,020.00	669,715,020.00	669,715,020.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	357 Orang	0.00	34,320,000.00	34,320,000.00	34,320,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			

			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2271 Orang	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	41 Orang	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	529 Orang	0.00	20,100,000.00	20,100,000.00	20,100,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0.00	214,820,700.00	214,820,700.00	214,820,700.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0.00	20,100,000.00	20,100,000.00	20,100,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0.00	21,550,000.00	21,550,000.00	21,550,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	41 Orang	0.00	16,100,000.00	16,100,000.00	16,100,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0.00	100,615,930.00	100,615,930.00	100,615,930.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0.00	176,232,800.00	176,232,800.00	176,232,800.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0.00	8,235,700.00	8,235,700.00	8,235,700.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0.00	3,389,890.00	3,389,890.00	3,389,890.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	12 Dokumen	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0.00	2,993,200.00	2,993,200.00	0.00			-				0.00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	-				-	-	0.00	2,993,200.00	2,993,200.00	2,993,200.00			-				0.00	DINAS KESEHATAN

1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																					
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	12 Dokumen		0.00	2,993,200.00	2,993,200.00	2,993,200.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
	PUSKESMAS DOI-DOI									0.00	1,396,687,720.00	1,396,687,720.00	1,396,687,720.00							0.00		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN								0.00	1,396,687,720.00	1,396,687,720.00	1,396,687,720.00							0.00			
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG								0.00	1,396,687,720.00	1,396,687,720.00	1,396,687,720.00							0.00			
1.1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-					-	-	0.00	879,800,000.00	879,800,000.00	0.00							0.00			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-					-	-	0.00	879,800,000.00	879,800,000.00	879,800,000.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		0.00	DINAS KESEHATAN		
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																						
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					-	1 Unit Kerja		0.00	879,800,000.00	879,800,000.00	879,800,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
2.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-					-	-	0.00	512,241,340.00	512,241,340.00	0.00							0.00			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-					-	-	0.00	512,241,340.00	512,241,340.00	512,241,340.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		0.00	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																						
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	184 Orang		0.00	32,282,400.00	32,282,400.00	32,282,400.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																						
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	1017 Orang		0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																						
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					-	15 Orang		0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																						
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					-	319 Orang		0.00	16,800,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	12 Dokumen		0.00	146,053,000.00	146,053,000.00	146,053,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					-	12 Dokumen		0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	12 Dokumen		0.00	16,400,000.00	16,400,000.00	16,400,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan																						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	12 Dokumen		0.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																						
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					-	15 Orang		0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																						
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	12 Dokumen		0.00	80,352,500.00	80,352,500.00	80,352,500.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	

1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0.00	142,517,000.00	142,517,000.00	142,517,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																						
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	10 Orang	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0.00	1,929,600.00	1,929,600.00	1,929,600.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0.00	1,056,840.00	1,056,840.00	1,056,840.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	12 Dokumen	0.00	32,400,000.00	32,400,000.00	32,400,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN		
3. 1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-					-	-	0.00	4,646,380.00	4,646,380.00	0.00			-					0.00			
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	-					-	-	0.00	4,646,380.00	4,646,380.00	4,646,380.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			0.00	DINAS KESEHATAN		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0.00	4,646,380.00	4,646,380.00	4,646,380.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN		
	PUSKESMAS RALLA										0.00	2,379,502,798.00	2,379,502,798.00	2,379,502,798.00								0.00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN								0.00	2,379,502,798.00	2,379,502,798.00	2,379,502,798.00										0.00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG								0.00	2,379,502,798.00	2,379,502,798.00	2,379,502,798.00										0.00	
1. 1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-					-	-	0.00	1,707,625,928.00	1,707,625,928.00	0.00								0.00			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-					-	-	0.00	1,707,625,928.00	1,707,625,928.00	1,707,625,928.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			0.00	DINAS KESEHATAN		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0.00	1,707,625,928.00	1,707,625,928.00	1,707,625,928.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua KelDesa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN		
2. 1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-					-	-	0.00	667,931,260.00	667,931,260.00	0.00								0.00			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-					-	-	0.00	667,931,260.00	667,931,260.00	667,931,260.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			0.00	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	286 Orang	0.00	32,224,000.00	32,224,000.00	32,224,000.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	800 Orang	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																						
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	38 Orang	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																						

			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	464 Orang	0.00	73,800,000.00	73,800,000.00	73,800,000.00	Kab. Barnu, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0.00	205,997,400.00	205,997,400.00	205,997,400.00	Kab. Barnu, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Kab. Barnu, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0.00	32,200,000.00	32,200,000.00	32,200,000.00	Kab. Barnu, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	Kab. Barnu, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1000 Orang	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	Kab. Barnu, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0.00	112,885,000.00	112,885,000.00	112,885,000.00	Kab. Barnu, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0.00	139,182,200.00	139,182,200.00	139,182,200.00	Kab. Barnu, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	15 Orang	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Kab. Barnu, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelodaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0.00	1,364,000.00	1,364,000.00	1,364,000.00	Kab. Barnu, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelodaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0.00	778,660.00	778,660.00	778,660.00	Kab. Barnu, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelodaan pelayanan kelanjutan				-	12 Dokumen	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	Kab. Barnu, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0.00	3,945,610.00	3,945,610.00	0.00			-					0.00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	-				-	-	0.00	3,945,610.00	3,945,610.00	3,945,610.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0.00	3,945,610.00	3,945,610.00	3,945,610.00	Kab. Barnu, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANCANA					-		0.00	1,885,378,330.00	1,885,378,330.00	1,885,378,330.00			-					43,428,800.00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					-		0.00	1,885,378,330.00	1,885,378,330.00	1,885,378,330.00			-					43,428,800.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					-		0.00	1,885,378,330.00	1,885,378,330.00	1,885,378,330.00			-					43,428,800.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-				-	-	0.00	1,295,376,020.00	1,295,376,020.00	0.00			-					0.00	

1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-								0.00	1,295,376,020.00		1,295,376,020.00	1,295,376,020.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-						0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja		0.00	1,295,376,020.00		1,295,376,020.00	1,295,376,020.00	Kab. Baru, Tanete Riiau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE							0.00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAK KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAK KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-		0.00	585,527,660.00		585,527,660.00	43,428,800.00											43,428,800.00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-		0.00	585,527,660.00		585,527,660.00	585,527,660.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-						43,428,800.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	262 Orang		0.00	28,328,800.00		28,328,800.00	28,328,800.00	Kab. Baru, Tanete Riiau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE							28,328,800.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2344 Orang		0.00	27,000,000.00		27,000,000.00	27,000,000.00	Kab. Baru, Tanete Riiau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE							0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	42 Orang		0.00	7,800,000.00		7,800,000.00	7,800,000.00	Kab. Baru, Tanete Riiau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE							0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	394 Orang		0.00	12,600,000.00		12,600,000.00	12,600,000.00	Kab. Baru, Tanete Riiau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE							12,600,000.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen		0.00	228,545,500.00		228,545,500.00	228,545,500.00	Kab. Baru, Tanete Riiau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE							0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen		0.00	2,850,000.00		2,850,000.00	2,850,000.00	Kab. Baru, Tanete Riiau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE							0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen		0.00	14,700,000.00		14,700,000.00	14,700,000.00	Kab. Baru, Tanete Riiau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE							0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen		0.00	15,900,000.00		15,900,000.00	15,900,000.00	Kab. Baru, Tanete Riiau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE							0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	15 Orang		0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	Kab. Baru, Tanete Riiau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE							2,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen		0.00	97,590,960.00		97,590,960.00	97,590,960.00	Kab. Baru, Tanete Riiau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE							0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen		0.00	136,745,000.00		136,745,000.00	136,745,000.00	Kab. Baru, Tanete Riiau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE							0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																									
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	10 Orang		0.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00	Kab. Baru, Tanete Riiau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE							500,000.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen		0.00	2,528,000.00		2,528,000.00	2,528,000.00	Kab. Baru, Tanete Riiau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE							0.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																									

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0.00	21,500,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0.00	6,950,000.00	6,950,000.00	6,950,000.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	2368 Orang	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0.00	89,990,000.00	89,990,000.00	89,990,000.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0.00	138,229,000.00	138,229,000.00	138,229,000.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	30 Orang	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0.00	2,528,000.00	2,528,000.00	2,528,000.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0.00	740,220.00	740,220.00	740,220.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengeladaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASY ARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0.00	3,175,800.00	3,175,800.00	0.00			-				0.00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	-				-	-	0.00	3,175,800.00	3,175,800.00	3,175,800.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0.00	3,175,800.00	3,175,800.00	3,175,800.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PUJANANTING							0.00	1,164,879,220.00	1,164,879,220.00	1,164,879,220.00								0.00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN							0.00	1,164,879,220.00	1,164,879,220.00	1,164,879,220.00							0.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							0.00	1,164,879,220.00	1,164,879,220.00	1,164,879,220.00							0.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-				-	-	0.00	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00							0.00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0.00	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0.00	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Pujananting	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAY A KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAY A KESEHATAN MASY ARAKAT	-				-	-	0.00	410,444,720.00	410,444,720.00	0.00							0.00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP-Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0.00	410,444,720.00	410,444,720.00	410,444,720.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		0.00	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	107 Orang	0.00	27,310,000.00	27,310,000.00	27,310,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	594 Orang	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					-	18 Orang	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					-	329 Orang	0.00	11,300,000.00	11,300,000.00	11,300,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	12 Dokumen	0.00	119,237,000.00	119,237,000.00	119,237,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					-	12 Dokumen	0.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	12 Dokumen	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	12 Dokumen	0.00	13,350,000.00	13,350,000.00	13,350,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					-	18 Orang	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	12 Dokumen	0.00	75,828,000.00	75,828,000.00	75,828,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					-	12 Dokumen	0.00	107,594,000.00	107,594,000.00	107,594,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					-	5 Orang	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					-	12 Dokumen	0.00	1,464,000.00	1,464,000.00	1,464,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					-	12 Dokumen	0.00	911,720.00	911,720.00	911,720.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					-	12 Dokumen	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-					-	-	0.00	4,434,500.00	4,434,500.00	0.00							0.00	

1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	-							0.00	4,434,500.00	4,434,500.00	4,434,500.00			3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																					
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						12 Dokumen	0.00	4,434,500.00	4,434,500.00	4,434,500.00	Kab. Barru, Pujaningting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
	PUSKESMAS PADONGKO								0.00	3,374,642,508.00	3,374,642,508.00	3,374,642,508.00									0.00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN								0.00	3,374,642,508.00	3,374,642,508.00	3,374,642,508.00								0.00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG								0.00	3,374,642,508.00	3,374,642,508.00	3,374,642,508.00								0.00		
1.1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-						-	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00								0.00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-						-	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00					3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-	0.00	DINAS KESEHATAN		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																					
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						1 Unit Kerja	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
2.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT	-						-	0.00	870,939,788.00	870,939,788.00	0.00								0.00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-						-	0.00	870,939,788.00	870,939,788.00	870,939,788.00					3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-	0.00	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																					
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						389 Orang	0.00	33,396,000.00	33,396,000.00	33,396,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																					
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						3793 Orang	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																					
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar						14 Orang	0.00	13,800,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																					
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						275 Orang	0.00	26,700,000.00	26,700,000.00	26,700,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						12 Dokumen	0.00	288,248,000.00	288,248,000.00	288,248,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						12 Dokumen	0.00	8,750,000.00	8,750,000.00	8,750,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12 Dokumen	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan						12 Dokumen	0.00	20,670,000.00	20,670,000.00	20,670,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																					
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						14 Orang	0.00	13,400,000.00	13,400,000.00	13,400,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																					

			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	0.00	163,233,940.00	163,233,940.00	163,233,940.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0.00	189,436,000.00	189,436,000.00	189,436,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0.00	9,260,998.00	9,260,998.00	9,260,998.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																						
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	20 Orang	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0.00	2,528,000.00	2,528,000.00	2,528,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0.00	6,116,850.00	6,116,850.00	6,116,850.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																						
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	12 Dokumen	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	DINAS KESEHATAN		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0.00	3,702,720.00	3,702,720.00	0.00									0.00			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	-				-	-	0.00	3,702,720.00	3,702,720.00	3,702,720.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				0.00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0.00	3,702,720.00	3,702,720.00	3,702,720.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	DINAS KESEHATAN		
		PUSKESMAS PALAKKA										0.00	1,916,009,830.00	1,916,009,830.00	1,916,009,830.00								0.00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN							0.00	1,916,009,830.00	1,916,009,830.00	1,916,009,830.00											0.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							0.00	1,916,009,830.00	1,916,009,830.00	1,916,009,830.00											0.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-				-	-	0.00	1,396,575,370.00	1,396,575,370.00	0.00									0.00			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0.00	1,396,575,370.00	1,396,575,370.00	1,396,575,370.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				0.00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	0 Unit Kerja	0.00	1,396,575,370.00	1,396,575,370.00	1,396,575,370.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	DINAS KESEHATAN		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0.00	516,838,600.00	516,838,600.00	0.00									0.00			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0.00	516,838,600.00	516,838,600.00	516,838,600.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				0.00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																						
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	160 Orang	0.00	24,880,000.00	24,880,000.00	24,880,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																						

			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1262 Orang	0.00	17,200,000.00	17,200,000.00	17,200,000.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	27 Orang	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	292 Orang	0.00	24,500,000.00	24,500,000.00	24,500,000.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0.00	140,788,000.00	140,788,000.00	140,788,000.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0.00	13,800,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0.00	28,850,000.00	28,850,000.00	28,850,000.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	27 Orang	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0.00	113,011,200.00	113,011,200.00	113,011,200.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0.00	123,939,000.00	123,939,000.00	123,939,000.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	12 Orang	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0.00	1,752,000.00	1,752,000.00	1,752,000.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0.00	768,400.00	768,400.00	768,400.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengeladaan pelayanan kelanjutan				-	12 Dokumen	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0.00	2,595,860.00	2,595,860.00	0.00							0.00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	-				-	-	0.00	2,595,860.00	2,595,860.00	2,595,860.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0.00	2,595,860.00	2,595,860.00	2,595,860.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS KESEHATAN

		PUSKESMAS MANGKOSO								0.00	2,861,271,248.00	2,861,271,248.00	2,861,271,248.00							0.00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN								0.00	2,861,271,248.00	2,861,271,248.00	2,861,271,248.00							0.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG								0.00	2,861,271,248.00	2,861,271,248.00	2,861,271,248.00							0.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-					-	-	0.00	2,092,784,808.00	2,092,784,808.00	0.00							0.00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-					-	-	0.00	2,092,784,808.00	2,092,784,808.00	2,092,784,808.00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					-	1 Unit Kerja	0.00	2,092,784,808.00	2,092,784,808.00	2,092,784,808.00	Kab. Barru, Soppeng Raja, Mangkoso	PENDAPATAN DARI BLUD	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-					-	-	0.00	765,210,730.00	765,210,730.00	0.00							0.00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-					-	-	0.00	765,210,730.00	765,210,730.00	765,210,730.00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-	0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	318 Orang	0.00	26,196,800.00	26,196,800.00	26,196,800.00	Kab. Barru, Soppeng Raja, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	4563 Orang	0.00	38,200,000.00	38,200,000.00	38,200,000.00	Kab. Barru, Soppeng Raja, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					-	43 Orang	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	Kab. Barru, Soppeng Raja, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					-	488 Orang	0.00	11,900,000.00	11,900,000.00	11,900,000.00	Kab. Barru, Soppeng Raja, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	12 Dokumen	0.00	308,766,400.00	308,766,400.00	308,766,400.00	Kab. Barru, Soppeng Raja, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					-	12 Dokumen	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Kab. Barru, Soppeng Raja, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	12 Dokumen	0.00	22,600,000.00	22,600,000.00	22,600,000.00	Kab. Barru, Soppeng Raja, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	12 Dokumen	0.00	9,850,000.00	9,850,000.00	9,850,000.00	Kab. Barru, Soppeng Raja, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					-	400 Orang	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	Kab. Barru, Soppeng Raja, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	12 Dokumen	0.00	133,934,580.00	133,934,580.00	133,934,580.00	Kab. Barru, Soppeng Raja, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					-	12 Dokumen	0.00	173,530,000.00	173,530,000.00	173,530,000.00	Kab. Barru, Soppeng Raja, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			

			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria						25 Orang		0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Kab. Barru, Soppeng Raja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE						0.00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					-	12 Dokumen		0.00	1,674,400.00	1,674,400.00	1,674,400.00	Kab. Barru, Soppeng Raja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE						0.00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					-	12 Dokumen		0.00	3,008,550.00	3,008,550.00	3,008,550.00	Kab. Barru, Soppeng Raja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE						0.00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					-	12 Dokumen		0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	Kab. Barru, Soppeng Raja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE						0.00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-					-	-		0.00	3,275,710.00	3,275,710.00	0.00											0.00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	-					-	-		0.00	3,275,710.00	3,275,710.00	3,275,710.00				-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				0.00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	12 Dokumen		0.00	3,275,710.00	3,275,710.00	3,275,710.00	Kab. Barru, Soppeng Raja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE						0.00	DINAS KESEHATAN	
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI										51,249,315,184.00	54,972,579,784.65	45,993,188,113.00	-5,256,127,071.00											53,160,336,531.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN									51,249,315,184.00	54,972,579,784.65	45,993,188,113.00	-5,256,127,071.00											53,160,336,531.00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									51,249,315,184.00	54,972,579,784.65	45,993,188,113.00	-5,256,127,071.00											53,160,336,531.00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SPIP RSUD					3 Poin	3 Poin		45,679,602,844.00	45,678,802,844.00	45,678,802,844.00	4,980,733,687.00											50,660,336,531.00		
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase Penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu Tingkat Kesehatan BLUD					100 % 1 Unit	100 % 1 Unit		500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	RSUD					0.00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen		500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE						0.00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																									
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-					-	-		300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen		300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00	Kab. Barru, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE						0.00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					-	1 Unit Kerja		45,678,802,844.00	45,678,802,844.00	45,678,802,844.00	0.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	RSUD				50,660,336,531.00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																									

			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	45,678,802,844.00	45,678,802,844.00	45,678,802,844.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETribusi PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			50,660,336,531.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Pasien yang tertangani sesuai standart pelayanan					77,550 %	77,550 %	5,569,712,340.00	9,293,776,940.65	314,385,269.00	-3,069,712,340.00							2,500,000,000.00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit					100 %	1 Unit	5,569,712,340.00	9,293,776,940.65	314,385,269.00	-5,255,327,071.00		-		4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	Pasien		2,500,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																			
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000					1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																			
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun					1 Unit	1 Unit	28,983,106.00	0.00	0.00	-28,983,106.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit					2 Unit	1 Unit	292,774,545.00	0.00	314,385,269.00	21,610,724.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			2,500,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					100 Unit	100 Unit	2,254,098,459.00	0.00	0.00	-2,254,098,459.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																			
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit					6 Unit	1 Unit	949,000,000.00	9,293,776,940.65	9,420,910,882.65	8,471,910,882.65	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																			
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan					1 Paket	1 Paket	2,044,856,230.00	0.00	0.00	-2,044,856,230.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
		DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN								66,458,513,325.00	65,984,833,284.00	112,134,779,564.39	45,676,266,239.35							48,407,986,697.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN								66,433,513,325.00	65,959,834,484.00	112,121,943,564.39	45,688,430,239.35							48,407,986,697.00	

[illegible]

[illegible]

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4 Laporan	4 Laporan	19,375,500.00	19,363,800.00		14,682,400.00	-4,693,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN					37,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					24 Laporan	24 Laporan	110,250,000.00	110,250,000.00		76,027,500.00	-34,222,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN					83,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Laporan	4 Laporan	11,840,000.00	11,775,000.00		11,775,000.00	-65,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN					28,271,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	249,600,000.00	261,600,000.00		267,600,000.00	18,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN					220,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %		446,837,500.00	412,120,600.00		412,120,600.00	-34,716,900.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	ASN				443,279,760.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					4 Unit	4 Unit	61,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00	-12,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN					20,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																						

			Jumlah Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					26 Unit	26 Unit		79,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00	-2,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN					80,386,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																							
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya					6 Unit	6 Unit		306,837,500.00	286,120,600.00	286,120,600.00	-20,716,900.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN					342,893,760.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendali Banjir di WS Kewenangan Kab./Kota					-	11.21 %		9,346,926,677.00	8,309,679,106.00	5,849,381,083.00	83,073,323.00									9,430,000,000.00		
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan SDA dan Pengaman Pantai Yang Terbangun					-	0.43 km		4,443,957,105.00	3,356,054,718.00	2,495,155,873.00	-1,948,801,232.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	Mas yara kat				430,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																							
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Didina dan Diberdayakan					2 Lembaga	2 Lembaga		50,000,000.00	49,999,980.00	49,999,980.00	-20.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN					0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																							
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara					-	0.02 KM		0.00	0.00	285,913,935.00	285,913,935.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN					0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir																							
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara					0.22 KM	0.092 KM		241,268,343.00	241,268,206.00	241,268,206.00	-137.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN					430,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1.03.02.2.01.0099	Peningkatan Kanal Banjir																							

			Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan				0.410 KM	0 KM	1,273,999,990.00	773,999,798.00	0.00	-1,273,999,990.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																			
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi				0.028 KM	0.02 KM	219,463,992.00	219,463,896.00	171,941,734.00	-47,522,258.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																			
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.202 KM	0.166 KM	1,080,700,000.00	1,080,699,852.00	593,712,432.00	-486,987,568.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																			
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0.125 KM	0.082 KM	1,228,524,780.00	990,622,986.00	1,092,063,286.00	-136,461,494.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0122	Rehabilitasi Kanal Banjir																			
			Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi				-	0.05 KM	0.00	0.00	60,256,300.00	60,256,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku																			
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000.00	0.00	0.00	-350,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

[illegible]

			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun					1 Dokumen	2 Dokumen	233,998,500.00	410,874,600.00	401,859,200.00	167,860,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																						
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun					-	0 Liter/Detik	0.00	0.00	114,598,427.00	114,598,427.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																						
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					100 SR	2 SR	1,539,939,773.00	1,249,433,710.00	173,010,920.00	-1,366,928,853.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air limbah domestik yang layak				-	66.9 %		1,850,642,300.00	2,215,828,489.00	406,139,770.00	-1,850,642,300.00										0.00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses pengolahan air limbah				-	96 RT		1,850,642,300.00	2,215,828,489.00	406,139,770.00	-1,444,502,530.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	Mas yara kat					0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																						
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja					50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	177,917,500.00	188,544,930.00	134,595,500.00	-43,322,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																						
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara					2 Unit	2 Unit	69,815,300.00	99,988,659.00	86,875,060.00	17,059,760.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																						

			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar					120 Rumah Tangga	2 Rumah Tangga	1.602.909.500,00	1.927.294.900,00		184.669.210,00	-1.418.240.290,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJATAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYABIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai daerah kabupaten				-	39,88 %		1.971.182.000,00	1.370.000.000,00		1.295.992.002,35	-1.510.148.844,00										461.033.156,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya sistem drainase perkotaan				-	2 Sistem drainase		1.971.182.000,00	1.370.000.000,00		1.295.992.002,35	-675.189.997,65			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat					461.033.156,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																							
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dibangun				-	66 M		0,00	0,00		46.647.415,00	46.647.415,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																							
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				-	1 Sistem Drainase Perkotaan		0,00	0,00		36.559.350,00	36.559.350,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																							
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				7 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan		1.971.182.000,00	1.370.000.000,00		1.212.785.237,35	-758.396.762,65	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PAJAK ROKOK DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						461.033.156,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik				-	100 %		10.442.511.619,00	16.593.268.848,00		26.854.677.332,00	-4.097.511.619,00										6.345.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penataan Bangunan pemerintah				-	16 Bangunan Gedung		10.442.511.619,00	16.593.268.848,00		26.854.677.332,00	16.412.165.713,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	Pemerintah dan Masyarakat					6.345.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																							

		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dubahsuaikan				13 Bangunan Gedung	9 Bangunan Gedung	8.887,647,119.00	7.567,992,771.00	14,206,716,579.00	5,319,069,460.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			6,095,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																			
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	50,000,000.00	49,914,799.00	49,914,799.00	-85,201.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																			
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	5 Dokumen	1,306,405,700.00	8,775,922,078.00	12,501,912,254.00	11,195,506,554.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			150,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																			
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				100 Dokumen	100 Dokumen	198,458,800.00	199,439,200.00	96,133,700.00	-102,325,100.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
7.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemandapan Jalan Kabupaten/Kota			-	38.53 %	27,168,578,783.00	18,268,586,471.00	60,699,335,433.00	-1,892,254,783.00							25,276,324,000.00		
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang penanganan ruas jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Kewenangan Kabupaten			-	0.888 Km	27,168,578,783.00	18,268,586,471.00	60,699,335,433.00	33,530,756,650.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	Mas yara kat		25,276,324,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																			
		Panjang Jalan yang Dibangun				-	0 Km	0.00	0.00	1,022,012,230.00	1,022,012,230.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																			

		Panjang Jalan yang Direkonstruksi				6.134 KM	15.857 KM	18,403,578,909.00	12,745,000,000.00	53,435,995,365.00	36,032,416,456.00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				19,343,184,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin			10 Jembatan	10 Jembatan	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			2,480,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun			4 Jembatan	3 Jembatan	7,415,000,000.00	4,250,000,000.00	4,698,817,467.00	-2,716,182,533.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			2,553,140,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			200 KM	884.106 KM	100,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	200,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi			-	0 KM	0.00	0.00	4,945,000.00	4,945,000.00	Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			95.4 KM	35 KM	999,999,874.00	723,586,471.00	987,565,371.00	-12,434,503.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	OPSN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			400,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
8.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase keadaan pemanfaatan ruang terhadap RTRW			-	100 %	597,149,600.00	837,644,500.00	707,747,000.00	-597,149,600.00							0.00	

[illegible]

			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah					1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000.00	19,999,400.00		9,686,900.00	-10,313,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						0.0	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota					-	100 %	65,376,400.00	61,089,800.00		43,879,000.00	-21,497,400.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	Mas yara kat					0.0	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																								
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota					30 Orang	30 Orang	23,322,000.00	23,156,800.00		15,500,000.00	-7,822,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						0.0	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator																								
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih					30 Orang	30 Orang	26,688,400.00	22,689,000.00		21,980,200.00	-4,708,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						0.0	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																								
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					30 Orang	30 Orang	15,366,000.00	15,244,000.00		6,398,800.00	-8,967,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						0.0	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah					-	172 Orang	1,207,046,080.00	1,276,505,800.00		1,276,501,800.00	69,455,720.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	Mas yara kat				1,437,896,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																								

			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				30 Unit Rumah	39 Unit Rumah	904,613,410.00	924,149,800.00	924,145,800.00	19,532,380.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				925,395,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKMAN	
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																				
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				5 Unit Rumah	6 Unit Rumah	302,432,670.00	352,356,000.00	352,356,000.00	49,923,330.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				512,500,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKMAN	
2	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani				-	5.21 %	892,004,529.00	889,380,415.00	1,178,961,415.00	-892,004,529.00									0.00	
	1.04.03.2.02	Pemabtan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani di bawah 10 Ha				-	5,9 Ha	0.00	0.00	289,581,000.00	289,581,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	Mas yara kat				0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																				
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi				-	1 Dokumen	0.00	0.00	289,581,000.00	289,581,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN					0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha				-	5,9 Ha	892,004,529.00	889,380,415.00	889,380,415.00	-2,624,114.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	Mas yara kat				0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																				
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				15 Unit Rumah	10 Unit Rumah	244,141,270.00	241,931,400.00	241,931,400.00	-2,209,870.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN					0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																				

			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				2,2 Ha	4,81 Ha	647,863,259.00	647,449,015.00	647,449,015.00	-414,244.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN					0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni				-	3.42 %	249,716,770.00	632,311,500.00	632,311,500.00	-249,716,770.00									0.00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	249,716,770.00	632,311,500.00	632,311,500.00	-382,594,730.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	Mas yara kat				0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																				
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	26 Unit Rumah	249,716,770.00	632,311,500.00	632,311,500.00	-382,594,730.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				-	21.40 %	3,789,531,225.00	6,955,956,256.00	5,718,609,363.00	-3,471,505,775.00									318,025,450.00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan yang terbangun				-	100 %	3,789,531,225.00	6,955,956,256.00	5,718,609,363.00	-1,929,078,138.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	Mas yara kat			318,025,450.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																				
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				27 Lokasi	16 Lokasi	3,759,531,225.00	6,930,187,356.00	5,712,883,563.00	-1,953,352,338.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK PBUT - KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJATAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				318,025,450.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																				
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				2 Laporan	2 Laporan	20,000,000.00	15,849,800.00	3,172,300.00	-16,827,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																				
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				3 Laporan	3 Laporan	10,000,000.00	9,919,100.00	2,553,500.00	-7,446,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	

2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN							25,000,000.00	24,998,800.00	12,836,000.00	-12,164,000.00							0.00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							25,000,000.00	24,998,800.00	12,836,000.00	-12,164,000.00							0.00	
1.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase penyelesaian redistribusi tanah dan ganti kerugian				-	100 %	25,000,000.00	24,998,800.00	12,836,000.00	-25,000,000.00							0.00	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen				-	1 Dokumen	25,000,000.00	24,998,800.00	12,836,000.00	-12,164,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMSKINAN	Masyarakat		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pembinaan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000.00	24,998,800.00	12,836,000.00	-12,164,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMSKINAN			0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN							3,098,987,121.00	3,030,896,118.00	3,080,972,868.00	-18,014,253.00							3,799,089,121.00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN							3,098,987,121.00	3,030,896,118.00	3,080,972,868.00	-18,014,253.00							3,799,089,121.00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SPIP BPBD				-	4 point	2,471,387,121.00	2,328,344,558.00	2,316,470,358.00	390,443,104.00							2,861,830,225.00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan				-	100 %	2,146,830,225.00	1,975,298,400.00	1,975,298,400.00	-171,531,825.00			-	-	-		2,146,830,225.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	2,146,830,225.00	1,975,298,400.00	1,975,298,400.00	-171,531,825.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2,146,830,225.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN				-	100 %	8,025,000.00	16,500,000.00	0.00	-8,025,000.00			-	-	-		180,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	0 Orang	3,525,000.00	11,000,000.00	0.00	-3,525,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0 Orang	2,500,000.00	5,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah				3 Dokumen undefined	100 %	132,600,000.00	189,120,970.00	193,841,970.00	61,241,970.00			-	-	-		244,100,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		5,000,000.00	4,319,400.00	4,319,400.00	-680,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					7,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket		20,000,000.00	39,801,700.00	39,801,700.00	19,801,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					25,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		3,000,000.00	2,867,700.00	2,867,700.00	-132,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					5,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket		45,000,000.00	50,567,600.00	50,567,600.00	5,567,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					48,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket		11,000,000.00	11,271,170.00	11,271,170.00	271,170.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					12,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																					
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen		400,000.00	284,900.00	284,900.00	-115,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					700,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan		4,200,000.00	4,971,500.00	4,971,500.00	771,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					5,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220 Laporan	152 Laporan		44,000,000.00	75,037,000.00	79,758,000.00	35,758,000.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					141,400,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor				-	100 %		30,000,000.00	7,377,500.00	11,475,000.00	-18,525,000.00			-	-	-				30,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																					
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	17 Unit		30,000,000.00	7,377,500.00	11,475,000.00	-18,525,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					30,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan				-	100 %		105,731,896.00	105,492,488.00	104,392,488.00	-1,339,408.00			-	-	-				112,400,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan		1,731,896.00	1,704,200.00	604,200.00	-1,127,696.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					2,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan		57,000,000.00	56,988,288.00	56,988,288.00	-11,712.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					60,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan		47,000,000.00	46,800,000.00	46,800,000.00	-200,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					50,400,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara				-	100 %		48,200,000.00	34,555,200.00	31,462,500.00	-16,737,500.00			-	-	-				148,500,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	16 Unit		35,200,000.00	24,420,000.00	24,420,000.00	-10,780,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					128,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																					
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	0 Unit		3,500,000.00	3,092,700.00	0.00	-3,500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					3,500,000.00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	6,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-2,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3,500,000.00	3,042,500.00	3,042,500.00	-457,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana (SPM)				-	100 %	627,600,000.00	702,551,560.00	764,502,510.00	309,658,896.00							937,258,896.00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Informasi tentang Rawan Bencana				-	125 orang	45,000,000.00	48,253,000.00	37,739,000.00	-7,261,000.00							55,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				125 Orang	125 Orang	45,000,000.00	48,253,000.00	37,739,000.00	-7,261,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				-	140610 orang	159,850,000.00	166,535,300.00	242,067,700.00	82,217,700.00							665,600,000.00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				5 Unit	11 Unit	5,000,000.00	2,610,700.00	4,994,000.00	-6,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberlangsungan sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	21,600,000.00	21,169,810.00	17,967,810.00	-3,732,190.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33,600,000.00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				2 Kawasan	1 Kawasan	15,000,000.00	14,998,740.00	121,046,340.00	106,046,340.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				25 Orang	4 Orang	7,500,000.00	7,489,800.00	2,083,800.00	-5,416,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			360,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,250,000.00	10,249,670.00	8,084,170.00	-2,165,830.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	1 laporan	5,500,000.00	5,456,180.00	5,456,180.00	-43,820.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				2 Kawasan	2 Kawasan	95,000,000.00	104,560,400.00	82,535,400.00	-12,464,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130,000,000.00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota						555 orang	385.250.000,00	439.010.590,00	451.157.140,00	65.907.140,00			-	-	-	145.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat					1 Dokumen	1 Dokumen	315.900.000,00	370.451.400,00	363.938.100,00	48.036.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana					355 Orang	355 Orang	19.525.000,00	20.386.500,00	13.138.500,00	-6.386.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					150 Orang	150 Orang	37.500.000,00	41.078.600,00	29.922.100,00	-7.577.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota					1 Laporan	1 Laporan	12.325.000,00	7.092.090,00	44.158.440,00	31.833.440,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang tersedia, tertata dan terlaksana					-	1 Sistem	37.500.000,00	48.752.670,00	33.538.670,00	-3.961.330,00			-	-	-	71.658.896,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana						0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia					1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.499.530,00	4.549.530,00	-2.950.470,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		7.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																		
		Jumlah Laporan Hasil Binas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	6.786.200,00	4.288.200,00	-711.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun					1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	34.464.940,00	24.700.940,00	-299.060,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		44.158.896,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							8.172.122.301,00	7.934.398.715,00	7.793.783.015,00	-378.339.286,00						8.169.436.407,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERRKAITAN DENGAN PELAYANAN								8.172.122.301,00	7.934.398.715,00	7.793.783.015,00	-378.339.286,00						8.169.436.407,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN								8.172.122.301,00	7.934.398.715,00	7.793.783.015,00	-378.339.286,00						8.169.436.407,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP Satpol PP dan DAMKAR				20 3,00 jpl poin	20 3,00 jpl poin	5.661.053.319,00	5.356.024.215,00	5.771.580.715,00	-10.685.894,00						5.650.367.425,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan				100 persen	100 persen	5.161.617.107,00	4.868.331.352,00	4.868.331.352,00	-293.285.755,00			-	-	-	5.161.617.107,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					58 Orang/b ulan	58 Orang/b ulan	5.161.617.107,00	4.868.331.352,00	4.868.331.352,00	-293.285.755,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		5.161.617.107,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN				100 persen	100 persen	70.000.000,00	17.706.000,00	17.706.000,00	-52.294.000,00			-	-	-	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	3 Paket	60,000,000.00	17,706,000.00	17,706,000.00	-42,294,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60,000,000.00	SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah				100 persen	100 persen	175,753,394.00	178,096,700.00	331,927,200.00	156,173,806.00			-	-	-		175,067,500.00	SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	2 Paket	2,000,000.00	1,433,500.00	1,433,500.00	-566,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2,000,000.00	SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3,685,894.00	0.00	0.00	-3,685,894.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,000,000.00	SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2,000,000.00	SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	36,000,000.00	30,244,700.00	30,244,700.00	-5,755,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PAJAK ROKOK	-	-			36,000,000.00	SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3,000,000.00	4,691,000.00	4,691,000.00	1,691,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,000,000.00	SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				137 Laporan	137 Laporan	129,067,500.00	141,727,500.00	295,558,000.00	166,490,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PAJAK ROKOK	-	-			129,067,500.00	SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	15,000,000.00	20,533,000.00	20,533,000.00	5,533,000.00			-	-	-		15,000,000.00	SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	5,000,000.00	5,675,000.00	5,675,000.00	675,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PAJAK ROKOK	-	-			5,000,000.00	SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	13 Unit	10,000,000.00	14,858,000.00	14,858,000.00	4,858,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PAJAK ROKOK	-	-			10,000,000.00	SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor				100 persen	100 persen	85,682,818.00	84,565,963.00	84,565,963.00	-1,116,855.00			-	-	-		85,682,818.00	SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

[illegible]

		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran perda dan peraturan bupati/walikota				100 persen	100 persen	88,978,982.00	100,931,300.00	103,840,300.00	14,861,318.00			-	-	-		88,978,982.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				7 Laporan	7 Laporan	28,978,982.00	34,263,300.00	45,723,300.00	16,744,318.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			28,978,982.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				6 Laporan	6 Laporan	25,000,000.00	35,389,500.00	29,264,000.00	4,264,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-			25,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				7 Laporan	7 Laporan	35,000,000.00	31,278,500.00	28,853,000.00	-6,147,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-			35,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
3. 1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM) Waktu tanggap (rnsponse time)				15 100 menit persen	100 15 persen menit	1,444,070,000.00	1,492,643,200.00	1,175,462,000.00	10,000,000.00							1,454,070,000.00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penanggulangan Bahaya Kebakaran				100 persen	100 persen	1,444,070,000.00	1,492,643,200.00	1,175,462,000.00	-268,608,000.00			-	-	-		1,454,070,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				150 Laporan	150 Laporan	1,431,530,000.00	1,462,000,000.00	1,141,000,000.00	-290,520,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1,431,530,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				60 Orang	60 Orang	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				2 Unit	4 Unit	0.00	30,643,200.00	34,462,000.00	34,462,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2,550,000.00	0.00	0.00	-2,550,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2,550,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan simulasi pemadam kebakaran				100 persen	100 persen	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-		0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				60 Orang	60 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		DINAS SOSIAL							5,050,097,900.00	3,989,020,415.00	3,834,132,115.00	-1,215,965,785.00							0.00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN							5,050,097,900.00	3,989,020,415.00	3,834,132,115.00	-1,215,965,785.00							0.00	

	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	30,490,200.00	30,490,200.00	30,490,200.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	54,065,000.00	76,800,000.00	76,800,000.00	22,735,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara				-	100 %	68,315,000.00	60,364,200.00	60,364,200.00	-7,950,800.00			-	-	-		0.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	16,600,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00	-1,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	38,365,000.00	34,494,200.00	34,494,200.00	-3,870,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	4,950,000.00	4,915,000.00	4,915,000.00	-35,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	5,400,000.00	5,355,000.00	5,355,000.00	-45,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ahli dan kompeten sesuai standart peraturan perUUanPersentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ahli dan kompeten sesuai standart peraturan perUUan				-	100 100 % %	121,093,000.00	105,251,400.00	132,805,900.00	-121,093,000.00							0.00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang medapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial				-	100 %	121,093,000.00	105,251,400.00	132,805,900.00	11,712,900.00			-	-	-		0.00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	55 Orang	43,093,000.00	35,023,400.00	35,023,400.00	-8,069,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	7 Orang	50,000,000.00	42,233,300.00	20,316,800.00	-29,683,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	2 Lembaga	28,000,000.00	27,994,700.00	77,465,700.00	49,465,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
3	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK	-				-	-	19,000,000.00	0.00	0.00	-19,000,000.00							0.00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Debakasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-				-	-	19,000,000.00	0.00	0.00	-19,000,000.00			-	-	-		0.00	DINAS SOSIAL

1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																			
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	19,000,000.00	0.00	0.00	-19,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase Warga Negara Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta PMKS lainnya yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial				-	100 %	263,369,500.00	187,013,000.00	177,437,500.00	-263,369,500.00							0.00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM) Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)				-	15 Orang 5 Orang	263,369,500.00	187,013,000.00	177,437,500.00	-85,932,000.00			-	-	-		0.00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	93,322,500.00	49,425,900.00	42,325,900.00	-50,996,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	39,694,500.00	33,494,400.00	33,494,400.00	-6,200,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	2 Orang	25,223,500.00	11,493,900.00	15,814,900.00	-9,408,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	13,123,500.00	10,862,300.00	10,862,300.00	-2,261,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																			
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	92,005,500.00	81,736,500.00	74,940,000.00	-17,065,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial				-	100 %	810,980,000.00	671,030,200.00	336,834,100.00	-810,980,000.00							0.00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah B40 yang mendapatkan pelayanan data dan Fasilitasi Bantuan				-	72000 Orang	810,980,000.00	671,030,200.00	336,834,100.00	-474,145,900.00			-	-	-		0.00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				72000 Orang	72000 Orang	25,980,000.00	12,054,400.00	9,614,400.00	-16,365,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				1100 Keluarga	1100 Keluarga	25,000,000.00	0.00	0.00	-25,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1100 Keluarga	1100 Keluarga	760,000,000.00	658,975,800.00	327,219,700.00	-432,780,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	DINAS SOSIAL

6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)			-	100 %	264,206,500.00	243,046,300.00	240,098,300.00	-264,206,500.00								0.00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial			-	1500 Orang	115,000,000.00	94,921,000.00	94,921,000.00	-20,079,000.00		-	-	-				0.00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			100 Orang	100 Orang	40,000,000.00	30,602,600.00	30,602,600.00	-9,397,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			300 Orang	100 Orang	60,000,000.00	55,398,900.00	55,398,900.00	-4,601,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			20 Orang	20 Orang	15,000,000.00	8,919,500.00	8,919,500.00	-6,080,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase keterlibatan TAGANA Pada penanganan Darurat Bencana			-	100 %	149,206,500.00	148,125,300.00	145,177,300.00	-4,029,200.00			-	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			10 Orang	11 Orang	149,206,500.00	148,125,300.00	145,177,300.00	-4,029,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00	DINAS SOSIAL
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam yang mendapatkan pemeliharaan			-	100 %	70,000,000.00	45,800,800.00	55,808,600.00	-70,000,000.00								0.00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang mendapatkan Pemeliharaan			-	7 Makam	70,000,000.00	45,800,800.00	55,808,600.00	-14,191,400.00			-	-	-			0.00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			183 Makam	183 Makam	70,000,000.00	45,800,800.00	55,808,600.00	-14,191,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA						3,194,006,006.00	2,240,315,664.00	2,118,136,664.00	-1,075,869,342.00							2,618,078,219.00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN						3,194,006,006.00	2,240,315,664.00	2,118,136,664.00	-1,075,869,342.00								2,618,078,219.00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						3,194,006,006.00	2,240,315,664.00	2,118,136,664.00	-1,075,869,342.00								2,618,078,219.00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-			-	-	1,908,100,000.00	2,158,343,664.00	2,053,644,164.00	429,650,347.00								2,337,750,347.00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	-			-	-	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		1,823,259.00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			1,823,259.00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			-	15 orang/bulan	1,412,600,000.00	1,729,463,774.00	1,729,463,774.00	316,863,774.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		1,528,563,818.00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1,412,600,000.00	1,729,463,774.00	1,729,463,774.00	316,863,774.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			1,528,563,818.00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			-	-	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		1,567,395.00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			1,567,395.00	DINAS TENAGA KERJA	

2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan				-		20 JPL	30,000,000.00	13,845,000.00		0.00		-30,000,000.00						3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					98,878,688.00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						8 Orang	8 Orang	20,000,000.00		0.00		-20,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					68,878,688.00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						8 Orang	2 Orang	10,000,000.00	13,845,000.00	0.00		-10,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					30,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi				-		100 %		209,000,000.00	277,952,600.00	181,705,100.00		-27,294,900.00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					376,417,187.00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	500,000.00	618,900.00	618,900.00		118,900.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					2,127,136.00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						4 Paket	4 Paket	5,000,000.00		0.00		-5,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					50,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	1,000,000.00		0.00		-1,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					7,860,000.00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 Paket	2 Paket	1,000,000.00	10,019,700.00	13,980,700.00		12,980,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					18,197,865.00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																										
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	500,000.00		0.00		-500,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					6,090,000.00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						2 Laporan	2 Laporan	500,000.00		0.00		-500,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					5,568,176.00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						338 Laporan	329 Laporan	200,000,000.00	267,314,000.00	167,105,500.00		-32,894,500.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					276,574,010.00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																										
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	500,000.00		0.00		-500,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					10,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD				-		100 %		90,000,000.00	46,361,100.00	46,361,100.00		-43,638,900.00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					160,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						3 Unit	1 Unit	20,000,000.00		0.00		-20,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					50,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						6 Unit	6 Unit	10,000,000.00		0.00		-10,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					50,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						1 Unit	1 Unit	30,000,000.00		0.00		-30,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					30,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																										

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	4 Unit	30,000,000.00	46,361,100.00	46,361,100.00	16,361,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				30,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan Jasa Penunjang yang terpenuhi				-	100 %	50,000,000.00	50,173,590.00	53,616,590.00	3,616,590.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			135,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000.00	13,372,680.00	16,815,680.00	-3,184,320.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				105,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000.00	20,000,910.00	20,000,910.00	10,000,910.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				10,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	-3,200,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				20,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah siap Pakai				-	100 %	115,500,000.00	40,547,600.00	42,497,600.00	-73,002,400.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			35,500,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				8 Unit	4 Unit	45,000,000.00	25,725,600.00	27,675,600.00	-17,324,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				10,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				500,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	4 Unit	20,000,000.00	6,065,000.00	6,065,000.00	-13,935,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				20,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	50,000,000.00	8,757,000.00	8,757,000.00	-41,243,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				5,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2. 2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi				-	100 %	11,000,000.00	18,850,300.00	12,304,800.00	31,167,766.00								42,167,766.00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Kerja Makro dan Mikro				-	1 Dokumen	11,000,000.00	18,850,300.00	12,304,800.00	1,304,800.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			42,167,766.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																			
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	18,850,300.00	12,304,800.00	11,304,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				1,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																			
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				12 Orang	12 Orang	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				41,167,766.00	DINAS TENAGA KERJA
	3. 2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				-	20 undefined	1,188,502,006.00	6,163,600.00	4,493,600.00	-1,065,502,006.00								123,000,000.00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi				-	32 Orang	1,175,502,006.00	267,500.00	267,500.00	-1,175,234,506.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			110,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																			
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				120 Orang	16 Orang	163,002,006.00	267,500.00	267,500.00	-162,734,506.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				100,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																			

			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				2 Lembaga	2 Lembaga		5,000,000.00	0.00		0.00		-5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. PERCEPATAN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN					5,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																									
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				151 Unit	17 Unit		1,007,500,000.00	0.00		0.00		-1,007,500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. PERCEPATAN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN					5,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi				-	85.7 %		3,000,000.00	5,896,100.00		4,226,100.00		1,226,100.00				-		2. PERCEPATAN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN	-				3,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																									
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga		3,000,000.00	5,896,100.00		4,226,100.00		1,226,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. PERCEPATAN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN					---	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-				-	-		5,000,000.00	0.00		0.00		-5,000,000.00				-		2. PERCEPATAN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN	-				---	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Penzinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi																									
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				1 Perizinan	1 Perizinan		5,000,000.00	0.00		0.00		-5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. PERCEPATAN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN					---	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-				-	-		5,000,000.00	0.00		0.00		-5,000,000.00				-		2. PERCEPATAN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN	-				---	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																									
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				6 Perusahaan	6 Perusahaan		5,000,000.00	0.00		0.00		-5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. PERCEPATAN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN					---	DINAS TENAGA KERJA	
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota				-	65 %		48,000,000.00	9,978,000.00		9,978,000.00		33,774,417.00											---	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja terdaftar				-	57 %		17,000,000.00	5,415,300.00		5,415,300.00		-11,584,700.00				-		2. PERCEPATAN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN	-				---	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja																									
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				10 Orang	10 Orang		5,000,000.00	0.00		0.00		-5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. PERCEPATAN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN					---	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																									
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempaikan Melalui Layanan AKAD dan AKL				15 Orang	10 Orang		5,000,000.00	5,415,300.00		5,415,300.00		415,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. PERCEPATAN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN					---	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																									
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				5 Orang	5 Orang		2,000,000.00	0.00		0.00		-2,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. PERCEPATAN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN					---	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																									
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				500 Orang	500 Orang		5,000,000.00	0.00		0.00		-5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					---	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-		5,000,000.00	0.00		0.00		-5,000,000.00				-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				---	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS																									
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				2 Lembaga	2 Lembaga		5,000,000.00	0.00		0.00		-5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					---	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-		10,000,000.00	0.00		0.00		-10,000,000.00				-		2. PERCEPATAN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN	-				---	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																									
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				10 Orang	10 Orang		5,000,000.00	0.00		0.00		-5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. PERCEPATAN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN					---	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																									

			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			7 Orang	7 Orang		5,000,000.00	0.00	0.00		-5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN									DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan PMI Sesuai Standard Per Undang Undangan			-	100 %		16,000,000.00	4,562,700.00	4,562,700.00		-11,437,300.00			-	2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN									DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																								
			Jumlah CPM/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya			8 Orang	8 Orang		7,500,000.00	4,562,700.00	4,562,700.00		-2,937,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN									DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																								
			Jumlah CPM yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani			10 Orang	10 Orang		3,500,000.00	0.00	0.00		-3,500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN									DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																								
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan			10 Orang	10 Orang		5,000,000.00	0.00	0.00		-5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN									DINAS TENAGA KERJA
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PPPKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			-	62.12 %		38,404,000.00	46,980,100.00	37,716,100.00		-5,018,311.00													
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dan pendataan PP, PK, Struktur Skala Upah dan BPJS Kesehatan bagi perusahaan			-	63.78 %		18,404,000.00	20,264,000.00	15,816,500.00		-2,587,500.00			-	2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN							16,996,000.00		DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																								
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			12 Perusahaan	12 Perusahaan		6,500,000.00	0.00	0.00		-6,500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN							5,092,000.00		DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																								
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama			12 Perusahaan	12 Perusahaan		4,904,000.00	0.00	0.00		-4,904,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN							4,904,000.00		DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																								
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			4 Laporan	4 Laporan		7,000,000.00	20,264,000.00	15,816,500.00		8,816,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN							7,000,000.00		DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang diselesaikan			-	100 %		20,000,000.00	26,716,100.00	21,899,600.00		1,899,600.00			-	2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN							16,389,689.00		DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																								
			Jumlah Perselisihan yang Dizegah			12 Perkara	3 Perkara		10,000,000.00	6,749,700.00	6,749,700.00		-3,250,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN							9,621,000.00		DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																								
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Tersesahkan			12 Perkara	3 Perkara		5,000,000.00	4,370,400.00	3,540,400.00		-1,459,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN							3,924,240.00		DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																								
			Terselaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			12 Orang	120 Orang		5,000,000.00	15,596,000.00	11,809,500.00		6,609,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN							2,844,449.00		DINAS TENAGA KERJA
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							9,737,390,064.00	13,549,197,916.00	13,536,305,564.00	3,798,915,500.00							12,492,451,653.00						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN							9,737,390,064.00	13,549,197,916.00	13,536,305,564.00	3,798,915,500.00							12,492,451,653.00							
208		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN							594,637,950.00	4,193,151,305.00	4,169,025,805.00	3,574,387,855.00							948,000,000.00							

[illegible]

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	10,120,000.00	0.00	0.00		-10,120,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				35,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif sesuai peraturan perundang undangan				-	100 persen	198,866,600.00	3,769,132,175.00	3,758,191,175.00		3,559,324,575.00			-	-				250,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Layanan	6 Layanan	198,866,600.00	3,769,132,175.00	3,758,191,175.00		3,559,324,575.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA, PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-				250,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN	Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender				-	80 persen	10,120,000.00	23,242,130.00	14,546,630.00		48,880,000.00								59,000,000.00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterpenuhan Data Gender dan Anak sesuai peraturan perundang undangan				-	100 persen	10,120,000.00	23,242,130.00	14,546,630.00		4,426,630.00			-	-				59,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	10,120,000.00	23,242,130.00	14,546,630.00		4,426,630.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				59,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase OPD yang menerapkan pemenuhan Hak Anak dalam Pelayanan Tupoksi OPDnya				-	100 persen	65,500,000.00	92,032,230.00	65,210,230.00		51,500,000.00								117,000,000.00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Status Predikat Kabupaten Layak Anak (Utama)				-	950 pan	65,500,000.00	92,032,230.00	65,210,230.00		-289,770.00			-	-				117,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	65,500,000.00	92,032,230.00	65,210,230.00		-289,770.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				117,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak				-	0,010 persen	245,719,400.00	278,083,100.00	276,983,100.00		49,280,600.00								295,000,000.00	

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10 Paket	10 Paket	2,475,000.00	1,015,900.00	1,015,900.00	-1,459,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-						2,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	1,732,000.00	496,400.00	496,400.00	-1,235,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-						1,850,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20 Laporan	20 Laporan	51,739,200.00	69,706,200.00	131,129,700.00	79,390,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-						150,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	100 persen	48,076,450.00	4,765,900.00	41,995,000.00	-6,081,450.00			-	-	-					103,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	5 Unit	15,000,000.00	4,765,900.00	41,995,000.00	26,995,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-						25,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																						
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					5 Unit	5 Unit	25,000,000.00	0.00	0.00	-25,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-						50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor					-	100 persen	93,261,140.00	93,566,726.00	93,566,726.00	-305,586.00			-	-	-					119,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2 Laporan	2 Laporan	33,492,500.00	33,797,390.00	33,797,390.00	304,890.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-						45,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																						

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan		18,969,640.00	18,969,336.00		18,969,336.00		696.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-							20,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan		40,800,000.00	40,800,000.00		40,800,000.00		0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-							54,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara					-	100 persen		41,011,400.00	191,738,000.00		208,908,800.00		167,897,400.00			-	-	-						68,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					29 Unit	29 Unit		37,000,000.00	182,860,000.00		182,860,000.00		145,860,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-							50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					2 Unit	2 Unit		1,500,000.00	4,400,000.00		7,400,000.00		5,900,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-							8,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Drehabilitasi					2 Unit	2 Unit		2,511,400.00	4,478,000.00		18,648,800.00		16,137,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-							10,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama antar Desa dari 17,50% menjadi 75%					-	62,50 persen		31,172,500.00	34,582,360.00		26,992,360.00		29,827,500.00			-	-							61,000,000.00	
	2.13.03.2.01	Facilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase MoU Kerja sama antar Desa yang ditetapkan					-	62,50 persen		31,172,500.00	34,582,360.00		26,992,360.00		-4,180,140.00			-	-	-						61,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.03.2.01.0001	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																										

			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				40 Dokumen	40 Dokumen	12,000,000.00	0.00	0.00	-12,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					31,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan				40 Dokumen	1 Dokumen	19,172,500.00	34,582,360.00	26,992,360.00	7,819,860.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan desa yang mencapai tertib administrasi sesuai peraturan Per UU an				-	100 persen	999,934,872.00	1,321,106,122.00	1,009,723,370.00	902,065,128.00									1,902,000,000.00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Keterpenuhihan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai peraturan per UU an				-	100 persen	999,934,872.00	1,321,106,122.00	1,009,723,370.00	9,788,498.00			-	-	-				1,902,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																				
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				40 Dokumen	40 Dokumen	825,369,372.00	1,110,251,712.00	804,770,460.00	-20,598,912.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					900,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa																				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				40 Dokumen	40 Dokumen	56,713,000.00	83,843,600.00	84,993,600.00	28,280,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					70,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																				
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				40 Orang	40 Orang	22,214,500.00	22,214,540.00	40,775,540.00	18,561,040.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					56,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa																				
			Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa				40 Laporan	40 Laporan	19,043,000.00	19,042,940.00	19,042,940.00	-60.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					48,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																				

			Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa					40 Dokumen	40 Dokumen	9,240,000.00	14,764,210.00	17,069,710.00	7,819,710.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-							-49,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																						
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					12 Laporan	12 Laporan	10,240,000.00	10,000,550.00	4,913,050.00	-5,326,950.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-							550,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitas Penyusunan Profil Desa																						
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun					40 Dokumen	40 Dokumen	17,091,000.00	17,090,960.00	7,657,960.00	-9,433,040.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-							85,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																						
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas					80 Orang	80 Orang	9,240,000.00	0.00	0.00	-9,240,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-							32,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																						
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					55 Dokumen	55 Dokumen	30,784,000.00	43,896,610.00	30,510,110.00	-273,890.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-							112,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase LPM Berprestasi					-	41.14 persen	254,737,500.00	168,289,220.00	349,269,220.00	306,262,500.00										561,000,000.00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa yang di bina					-	6 Lembaga	254,737,500.00	168,289,220.00	349,269,220.00	94,531,720.00			-		-					561,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																						
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					4 Lembaga	4 Lembaga	20,661,000.00	28,966,530.00	29,853,030.00	9,192,030.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-							40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																						

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	48,326,500.00	23,100,800.00	17,319,800.00	-31,006,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					126,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																						
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				40 Laporan	40 Laporan	24,000,000.00	0.00	0.00	-24,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																						
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				55 Dokumen	55 Dokumen	161,750,000.00	116,221,890.00	302,096,390.00	140,346,390.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					355,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN							4,512,476,550.00	4,551,034,083.06	4,584,435,583.06	71,959,033.06									5,355,346,000.00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)(MCPRM)				-	14.65 persen	125,600,000.00	191,996,600.00	249,088,100.00	130,400,000.00									256,000,000.00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten/Kota sesuai dengan Rencana Nasional/Provinsi				-	100 persen	0.00	0.00	57,091,500.00	57,091,500.00			-	-					0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																						
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0.00	0.00	57,091,500.00	57,091,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					0.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data pemetaan perkiraan pengendalian penduduk				-	10 persen	125,600,000.00	191,996,600.00	191,996,600.00	66,396,600.00			-	-					256,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																						
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	2 Laporan	0.00	59,996,600.00	59,996,600.00	59,996,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-					80,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																						

			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					2 Laporan	2 Laporan		48,600,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00		-600,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-						56,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																									
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					1 Dokumen	1 Dokumen		77,000,000.00	84,000,000.00		84,000,000.00		7,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-						120,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	15,25 persen		3,160,576,000.00	3,247,891,482.94		3,224,201,482.94		544,824,000.00											3,705,400,000.00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Informasi dan Edukasi LKIE M Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan				-	85 persen		837,350,000.00	591,328,782.92		572,576,782.92		-264,773,217.08			-	-		-					1,130,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK					1 Laporan	1 Laporan		80,000,000.00	0.00		0.00		-80,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-						150,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					12 Laporan	12 Laporan		347,200,000.00	255,885,042.92		255,885,042.92		-91,314,957.08	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-						450,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																									
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					10 Laporan	10 Laporan		105,000,000.00	69,154,400.00		69,154,400.00		-35,845,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-						150,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																									
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					3 Dokumen	3 Dokumen		105,150,000.00	177,321,400.00		158,569,400.00		53,419,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	-						140,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh polga advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																									

			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				2 Organisasi	2 Organisasi	200,000,000.00	88,967,940.00	88,967,940.00		-111,032,060.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-				240,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB LPKB/PLKB) yang berperan aktif dalam Penyuluhan dan Pengembangan Program KB				-	100 persen	856,920,000.00	1,448,875,700.00	1,448,875,700.00		591,955,700.00			-	-	-			900,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Pengerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																				
			Jumlah Kader yang Mengikuti Pengerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				298 Orang	298 Orang	165,000,000.00	416,000,000.00	416,000,000.00		251,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-				200,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakkan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																				
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakkan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				2 Laporan	2 Laporan	691,920,000.00	1,032,875,700.00	1,032,875,700.00		340,955,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	-	-				700,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi				-	100 persen	432,141,000.00	979,315,200.02	979,315,200.02		547,174,200.02			-	-	-			505,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																				
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				14 Laporan	14 Laporan	11,700,000.00	14,460,000.00	14,460,000.00		2,760,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-				30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				517 Orang	517 Orang	189,502,000.00	944,758,800.02	944,758,800.02		755,256,800.02	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-				200,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																				
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				8 Unit	8 Unit	216,039,000.00	0.00	0.00		-216,039,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-				250,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																				

			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jaringannya					2 Laporan	2 Laporan	14,900,000.00	20,096,400.00	20,096,400.00	5,196,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-	-	25,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Keterpenuhihan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				-	100 persen		1,034,165,900.00	228,371,800.00	223,433,800.00	-810,731,200.00			-	-	-	-	1,170,400,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																			
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				15 Organisasi	15 Organisasi		25,415,000.00	37,971,800.00	33,033,800.00	7,618,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																			
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				2 Dokumen	2 Dokumen		3,750,000.00	0.00	0.00	-3,750,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			5,400,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																			
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				24 Unit	24 Unit		720,000,000.00	0.00	0.00	-720,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			800,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																			
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				55 Kampung	55 Kampung		285,000,000.00	190,400,000.00	190,400,000.00	-94,600,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			320,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (PS)	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Sejahtera				-	83,33 persen		1,226,300,550.00	1,111,146,000.12	1,111,146,000.12	167,645,450.00							1,393,946,000.00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitas Kegiatan Bina Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				-	5 kegiatan		300,000,000.00	173,946,000.17	173,946,000.17	-126,053,999.83			-	-	-		393,946,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																			

			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	1 Laporan / Dokumen	0.00	43,946,000.17	43,946,000.17	43,946,000.17	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			43,946,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA, BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				25 Unit	25 Unit	300,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	-170,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			350,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA, BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan peran Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarg				-	2 Organisasi	926,300,550.00	937,199,999.95	937,199,999.95	10,899,449.95			-	-	-		1,000,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA, BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				2 laporan	2 laporan	426,000,000.00	426,000,000.00	426,000,000.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			500,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA, BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				2 laporan	2 laporan	500,300,550.00	511,199,999.95	511,199,999.95	10,899,449.95	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			500,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA, BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							7,802,901,093.00	7,608,976,544.00	7,367,109,544.00	-435,791,549.00							7,192,101,093.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN							7,802,901,093.00	7,608,976,544.00	7,367,109,544.00	-435,791,549.00							7,192,101,093.00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							7,802,901,093.00	7,608,976,544.00	7,367,109,544.00	-435,791,549.00							7,192,101,093.00	
	1 2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP Dinas Lingkungan Hidup				-	20 4.00 JPL Point	3,465,293,943.00	2,981,571,294.00	2,843,745,294.00	-796,997,361.00							2,668,296,582.00	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan				-	100 %	2,991,153,943.00	2,478,722,294.00	2,478,722,294.00	-512,431,649.00			-	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-		2,140,184,711.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/b uan	23 Orang/b uan	0.00	2,478,722,294.00	2,478,722,294.00	2,478,722,294.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			2,140,184,711.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2								7,802,901,093.00	7,608,976,544.00	7,367,109,544.00	-435,791,549.00							7,192,101,093.00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							7,802,901,093.00	7,608,976,544.00	7,367,109,544.00	-435,791,549.00							7,192,101,093.00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN							7,802,901,093.00	7,608,976,544.00	7,367,109,544.00	-435,791,549.00							7,192,101,093.00	

2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							7,802,901,093.00	7,608,976,544.00	7,367,109,544.00	-435,791,549.00							7,192,101,093.00		
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/fungsional				-	100 %	0.00	0.00	0.00	0.00			-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-	100,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-	100,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				-	100 %	291,255,000.00	312,922,100.00	194,125,600.00	-97,129,400.00			-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-	228,806,426.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	48,400,000.00	26,872,000.00	26,872,000.00	-21,528,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-	68,068,350.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3,900,500.00	3,892,800.00	3,892,800.00	-7,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-	6,246,623.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4,254,200.00	4,010,300.00	4,010,300.00	-243,900.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-	4,375,823.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				294 Laporan	223 Laporan	234,700,300.00	278,147,000.00	159,350,500.00	-75,349,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-	150,115,630.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor				-	100 %	105,400,000.00	106,864,900.00	86,620,900.00	-18,779,100.00			-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-	102,271,695.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	30,000,000.00	31,394,900.00	31,400,900.00	1,400,900.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-	27,071,695.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-	20,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50,400,000.00	50,470,000.00	30,220,000.00	-20,180,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-	55,200,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pemeliharaan barang milik daerah				-	100 %	77,485,000.00	83,062,000.00	84,276,500.00	6,791,500.00			-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-	97,033,750.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	32 Unit	61,065,000.00	62,815,000.00	62,815,000.00	1,750,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-	69,062,500.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-	13,571,250.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8,020,000.00	11,847,000.00	13,061,500.00	5,041,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-	14,400,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan				-	100 %	150,000,000.00	149,982,000.00	143,316,500.00	195,000,000.00							345,000,000.00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ok RPPLH Penyelesaian d				-	100 %	150,000,000.00	149,982,000.00	143,316,500.00	-6,683,500.00		-	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-			15,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan	RPPLH Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	15,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH	Kabupaten/Kota																	
			Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000.00	149,982,000.00	143,316,500.00	-6,683,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	0.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	330,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan	KLHS RPJPD/RPJMD																	
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	130,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan	KLHS Rencana Tata Ruang																	
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	200,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan Tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup				-	23 %	78,412,350.00	77,385,450.00	50,208,950.00	256,427,569.00							334,839,919.00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang ditentukan status mutunya				-	3 KEG	78,412,350.00	77,385,450.00	50,208,950.00	-28,203,400.00		-	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-			313,378,767.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Diaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	48,412,350.00	48,074,950.00	34,479,950.00	-13,932,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	129,156,140.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000.00	29,310,500.00	15,729,000.00	-14,271,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	21,317,961.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium	Lingkungan Hidup kabupaten/kota																	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	162,904,666.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	21,461,152.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi	Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	21,461,152.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati				-	100 %	140,616,000.00	36,928,900.00	45,155,900.00	219,234,625.00							359,850,625.00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH yang dipelihara				-	1 Lokasi	140,616,000.00	36,928,900.00	45,155,900.00	-95,460,100.00		-	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-			359,850,625.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		

	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH				-	2 Lembaga/ Organisasi	43,711,300.00	42,920,500.00	24,254,000.00	-19,457,300.00			-	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-			76,375,339.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																				
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	43,711,300.00	42,920,500.00	24,254,000.00	-19,457,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-			76,375,339.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai peraturan per UU an	-	100 %	20,000,000.00		19,832,000.00	9,951,000.00	-6,658,603.00										13,341,397.00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan terkait izin PPLH	-	5 Pengaduan	20,000,000.00		19,832,000.00	9,951,000.00	-10,049,000.00					-	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-			13,341,397.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																				
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	4 Pengaduan	4 Pengaduan	20,000,000.00		19,832,000.00	9,951,000.00	-10,049,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						13,341,397.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase sampah yang tertangani	-	82.37 %	3,844,839,000.00		4,241,707,400.00	4,219,060,900.00	-637,598,694.00										3,207,240,306.00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	-	25180.6 Ton	3,844,839,000.00		4,241,707,400.00	4,219,060,900.00	374,221,900.00					-	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-			3,207,240,306.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																				
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	2 Kelompok	45,000,000.00		20,356,000.00	13,806,000.00	-31,194,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						113,174,930.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	40 Unit	40 Unit	799,914,000.00		799,913,900.00	799,913,900.00	-100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH	-	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						900,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																				
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000.00		34,562,500.00	18,466,000.00	-16,534,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						61,785,020.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																				
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	25180.6 Ton	25180.6 Ton	2,964,925,000.00		3,386,875,000.00	3,386,875,000.00	421,950,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						2,066,395,856.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan																				
			Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00		0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN						65,884,500.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4,393,843,670.00	3,783,191,853.00	3,550,049,053.00	-843,794,617.00						4,799,267,920.00					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN						4,393,843,670.00	3,783,191,853.00	3,550,049,053.00	-843,794,617.00						4,799,267,920.00				
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN						4,393,843,670.00	3,783,191,853.00	3,550,049,053.00	-843,794,617.00						4,799,267,920.00				

1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas Smp Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil				400 20 Point JPL	20 4.00 JPL Point	4,065,349,720.00	3,454,846,953.00	3,331,383,453.00	86,272,050.00						4,151,621,770.00	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima gaji dan tunjangan				100 Persen	100 Persen	3,192,837,270.00	2,569,022,953.00	2,569,022,953.00	-623,814,317.00			-	-	-	3,192,837,270.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3,192,837,270.00	2,569,022,953.00	2,569,022,953.00	-623,814,317.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	3,192,837,270.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	394,131,000.00	394,056,400.00	229,020,400.00	-165,110,600.00			-	-	-	469,686,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	302,938,000.00	302,932,900.00	153,654,100.00	-149,283,900.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	322,820,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	1,776,000.00	1,774,900.00	1,217,700.00	-558,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1,815,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				139 Laporan	69 Laporan	89,417,000.00	89,348,600.00	74,148,600.00	-15,268,400.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	145,051,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	135,610,950.00	149,248,000.00	215,460,500.00	79,849,550.00			-	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	124,248,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	4 Unit	135,610,950.00	149,248,000.00	215,460,500.00	79,849,550.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	124,248,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor				100 Persen	100 Persen	285,020,500.00	285,018,500.00	261,018,500.00	-24,002,000.00			-	-	-	285,020,500.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	40,220,500.00	40,218,500.00	40,218,500.00	-2,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	40,220,500.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	244,800,000.00	244,800,000.00	220,800,000.00	-24,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	244,800,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara				100 Persen	100 Persen	57,750,000.00	57,501,100.00	56,861,100.00	-888,900.00			-	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	79,830,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				21 Unit	16 Unit	47,695,000.00	47,681,100.00	47,681,100.00	-13,900.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	64,550,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	5,775,000.00	5,775,000.00	5,775,000.00	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	11,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	4,280,000.00	4,045,000.00	3,405,000.00	-875,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	4,280,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN	Persentase Perekaman Ktp-EI				99 Persen	99 Persen	190,040,500.00	190,035,400.00	118,011,200.00	36,829,000.00						226,869,500.00	

2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk					4 Jenis	4 Jenis	120,372,500.00	120,369,300.00	83,413,800.00	-36,958,700.00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	Semua Masyarakat			140,686,500.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																			
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk					4 Dokumen	4 Dokumen	19,109,000.00	19,108,000.00	11,751,000.00	-7,358,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			20,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																			
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					1 Laporan	1 Laporan	101,263,500.00	101,261,300.00	71,662,800.00	-29,600,700.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			120,686,500.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pendaftaran Penduduk yang Diselenggarakan					2 Jenis	2 Jenis	54,970,000.00	54,969,000.00	25,813,400.00	-29,156,600.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	Semua masyarakat		54,970,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																			
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk					2 Dokumen	2 Dokumen	54,970,000.00	54,969,000.00	25,813,400.00	-29,156,600.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			54,970,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk					1 Jenis	1 Jenis	14,698,000.00	14,697,100.00	8,784,000.00	-5,914,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	Semua masyarakat		31,213,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk																			
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk					4 Laporan	4 Laporan	14,698,000.00	14,697,100.00	8,784,000.00	-5,914,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			31,213,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3. 2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran					99 Persen	99 Persen	70,843,350.00	70,727,600.00	55,128,400.00	75,024,050.00							145,867,400.00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil					3 Jenis	3 Jenis	67,843,350.00	67,758,400.00	55,128,400.00	-12,714,950.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	Semua Masyarakat		140,867,400.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																			
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					4 Dokumen	4 Dokumen	3,703,850.00	3,674,100.00	2,424,100.00	-1,279,750.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			26,669,400.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																			
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan					1 Layanan	1 Layanan	64,139,500.00	64,084,300.00	52,704,300.00	-11,435,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			114,198,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					1 Jenis	1 Jenis	3,000,000.00	2,969,200.00	0.00	-3,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	Semua masyarakat		5,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil																			

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/b ulan	42 Orang/b ulan	4.244,485,452.00	3.750.494,795.00	3.750.494,795.00	-493,990,657.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				3.442.107.315.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	240.861.500.00	286.008.730.00	174.095.230.00	-66.766.270.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	Dinas Perhubungan			434.313.219.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	486.500.00	485.300.00	485.300.00	-1.200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				5.000.000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	67.073.000.00	61.806.000.00	64.876.500.00	-2.196.500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				80.000.000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	1 Paket	1.800.000.00	1.799.630.00	1.799.630.00	-370.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				5.000.000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4 Laporan	412.000.00	407.800.00	407.800.00	-4.200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				9.000.000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				800 Laporan	385 Laporan	171,090,000.00	221,510,000.00	106,526,000.00	-64,564,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			335,313,219.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0.00	0.00	47,978,600.00	47,978,600.00				5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-		50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0.00	0.00	47,978,600.00	47,978,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100 %	106,150,642.00	106,351,142.00	97,351,142.00	-8,799,500.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	Dinas Perhubungan		59,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1700 Laporan	4 Laporan	12,090,000.00	12,350,500.00	3,350,500.00	-8,739,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			4,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	120 Laporan	94,060,642.00	94,000,642.00	94,000,642.00	-60,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			55,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	192,198,300.00	169,006,100.00	209,756,100.00	17,557,800.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	Dinas Perhubungan		159,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	21 Unit	126,053,800.00	84,719,800.00	125,469,800.00	-584,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perabtan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	19 Unit	8,775,000.00	8,775,000.00	8,775,000.00		0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			14,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1 Unit	57,369,500.00	75,511,300.00	75,511,300.00		18,141,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA AL OKASI UMUM (DALU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			45,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan PerlelgkapanJalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan				-	100 %	1,202,394,150.00	1,202,695,250.00	1,702,926,950.00		2,980,746,434.00							4,183,140,584.00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlelgkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlelgkapan dan prasarana jalan Kabupaten yang terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				-	7 jenis	642,933,350.00	642,928,450.00	1,258,410,150.00		615,476,800.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	Maeyarakat Pengguna Jalan		3,551,736,838.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlelgkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perlelgkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				900 Unit	34 Unit	470,776,750.00	470,776,350.00	586,259,450.00		115,482,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			2,661,810,805.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																			
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5 Unit	5 Unit	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			15,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlelgkapan Jalan																			
			Jumlah Perlelgkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				415 Unit	856 Unit	162,156,600.00	162,152,100.00	662,150,700.00		499,994,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN			874,926,033.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji sesuai dengan peraturan yang telah di persyaratkan				-	900 Unit	18,455,800.00	10,997,600.00	10,997,600.00	-7,458,200.00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	Pemilik Kendaraan Bermotor			26,998,120.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																				
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2000 Dokumen	88 Dokumen	2,500,000.00	2,499,200.00	2,499,200.00	-800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				25,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				6 Unit	1 Unit	15,955,800.00	8,496,400.00	8,496,400.00	-7,457,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				1,998,120.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah ruas jalan kabupaten terselenggara manajemen rekayasa lalu lintas				-	105 Ruas	538,800,000.00	546,570,400.00	432,420,400.00	-106,379,600.00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	-			602,605,626.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																				
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				5 Laporan	1 Laporan	3,600,000.00	3,570,400.00	1,870,400.00	-1,729,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				32,905,626.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																				
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				5 Laporan	3 Laporan	535,200,000.00	543,000,000.00	430,550,000.00	-104,650,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN				569,700,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					0 Orang	0 Orang		0,00	0,00		0,00	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					108.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0 Orang	0 Orang		0,00	0,00		0,00	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					65.947.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	100 %		143.657.500,00	143.693.860,00		86.961.810,00	-56.695.690,00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				292.608.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket		1.839.000,00	1.908.600,00		1.908.600,00	69.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					2.979.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2 Paket	2 Paket		1.500.000,00	1.499.100,00		1.499.100,00	-900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					3.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket		23.477.500,00	23.477.500,00		23.464.800,00	-22.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					50.242.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					4 Laporan	4 Laporan		1.227.000,00	1.227.000,00		1.192.000,00	-35.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					142 Laporan	63 Laporan		115.614.000,00	115.581.660,00		58.907.310,00	-56.706.690,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					226.886.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	100 %		0,00	0,00		0,00	0,00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				173.217.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 Unit	0 Unit		0,00	0,00		0,00	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					0 Unit	0 Unit		0,00	0,00		0,00	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					138.217.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor					-	100 %		112.491.500,00	112.455.390,00		108.394.800,00	-4.096.700,00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				120.600.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4 Laporan	4 Laporan		112.491.500,00	112.455.390,00		108.394.800,00	-4.096.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					120.600.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara					-	100 %		25.995.000,00	191.955.000,00		194.955.000,00	168.960.000,00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				31.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					7 Unit	7 Unit		21.995.000,00	187.955.000,00		187.955.000,00	165.960.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	14 Unit		4,000,000.00	4,000,000.00	7,000,000.00	3,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					9,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik			-		100 %		957,751,500.00	1,696,979,010.00	3,586,591,125.00	1,526,922,000.00									2,484,673,500.00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya Jumlah Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan			-		206 Informasi		957,751,500.00	1,696,979,010.00	3,586,591,125.00	2,628,839,625.00				3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				2,484,673,500.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																					
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	1 Laporan		156,065,000.00	303,064,980.00	324,051,300.00	167,986,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					275,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat					58 Komunitas	58 Komunitas		157,437,500.00	304,965,480.00	153,475,200.00	-3,962,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					148,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																					
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	1 Laporan		8,066,500.00	8,065,810.00	16,579,000.00	8,512,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					45,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																					
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				80 Permohonan	80 Permohonan		470,571,500.00	917,271,810.00	2,934,693,975.00	2,464,122,475.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					1,299,631,500.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																					
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				0 Rekomendasi	0 Rekomendasi		0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					24,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																					
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				0 Persentase	0 Persentase		0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					148,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																					
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				38 Media	45 Media		165,611,000.00	165,610,930.00	157,791,650.00	-7,819,350.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					545,042,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			-		100 %		1,370,938,600.00	2,163,730,480.00	2,133,394,600.00	806,796,400.00									2,177,735,000.00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki situs WEB yang sesuai Standar			-		100 %		15,000,000.00	15,070,000.00	15,070,000.00	70,000.00				-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			15,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																					
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen		15,000,000.00	15,070,000.00	15,070,000.00	70,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					15,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan yang telah diimplementasikan secara Elektronik			-		100 %		1,355,938,600.00	2,148,660,480.00	2,118,324,600.00	762,386,000.00				-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			2,162,735,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																					
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				3 Laporan	3 Laporan		303,338,600.00	300,175,480.00	270,489,600.00	-32,849,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					62,735,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																					

			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	1,052,600,000.00	1,848,485,000.00	1,847,835,000.00	795,235,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			2,100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	220	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							77,403,500.00	77,423,360.00	66,409,640.00	-10,993,860.00							398,287,500.00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi				-	100 %	77,403,500.00	77,423,360.00	66,409,640.00	320,884,000.00							398,287,500.00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral				-	100 %	77,403,500.00	77,423,360.00	66,409,640.00	-10,993,860.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			398,287,500.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				5 Orang	5 Orang	17,688,500.00	17,684,500.00	8,191,000.00	-9,497,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			176,567,500.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	100 Persentase	53,750,000.00	53,774,300.00	44,110,100.00	-9,639,900.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			100,373,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				18 Dokumen	18 Dokumen	2,790,000.00	2,789,560.00	11,764,640.00	8,974,640.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			39,972,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah menerima rekomendasi dari Pembina Data Statistik				18 Dokumen	18 Dokumen	3,175,000.00	3,175,000.00	2,343,900.00	-831,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			81,375,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	221	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							32,649,000.00	32,649,000.00	17,230,500.00	-15,418,500.00							63,000,000.00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Informasi Daerah yang Wajib Diamankan dengan Persandian				-	100 %	32,649,000.00	32,649,000.00	17,230,500.00	30,351,000.00							63,000,000.00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				-	1 Dokumen	32,649,000.00	32,649,000.00	17,230,500.00	-15,418,500.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			63,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			7,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	32,649,000.00	32,649,000.00	17,230,500.00	-15,418,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			55,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN							6,989,610,981.00	4,949,361,721.00	5,229,330,163.00	-1,760,280,818.00							5,928,322,936.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN							3,847,038,582.00	3,722,136,071.00	4,085,263,943.00	238,225,361.00							3,898,286,410.00	
	217	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							3,847,038,582.00	3,722,136,071.00	4,085,263,943.00	238,225,361.00							3,898,286,410.00	

1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Nilai Maturitas SPIP Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan						20 3 JPL Point	3,784,510,082.00	3,656,171,871.00	3,581,959,468.00	-488,216,860.00						3,296,293,222.00		
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan						100 Persen	3,414,884,602.00	3,290,058,691.00	3,290,058,691.00	-124,825,911.00		-	-	ASN dan PPPK		2,884,845,722.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						30 Orang	30 Orang	3,414,884,602.00	3,290,058,691.00	3,290,058,691.00	-124,825,911.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		2,884,845,722.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-						-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-	45,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0 Orang	0 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-		45,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah						-	100 Persen	105,246,900.00	148,544,500.00	104,283,900.00	-963,000.00			-	-	ASN, PPPK dan Tenaga Honorer	125,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						2 Paket	2 Paket	1,791,000.00	1,680,500.00	2,798,900.00	1,007,900.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		5,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						94 Laporan	105 Laporan	103,455,900.00	146,864,000.00	101,485,000.00	-1,970,900.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		120,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						-	100 Persen	91,837,000.00	45,147,500.00	36,975,600.00	-54,861,400.00			-	-	Sarana dan Prasarana Kantor	45,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	-		20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2										3,847,038,582.00	3,722,136,071.00	4,085,263,943.00	238,225,361.00						3,898,286,410.00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									3,847,038,582.00	3,722,136,071.00	4,085,263,943.00	238,225,361.00						3,898,286,410.00	
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN									3,847,038,582.00	3,722,136,071.00	4,085,263,943.00	238,225,361.00						3,898,286,410.00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									3,847,038,582.00	3,722,136,071.00	4,085,263,943.00	238,225,361.00						3,898,286,410.00	
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						7 Unit	2 Unit	90,337,000.00	45,147,500.00	36,975,600.00	-53,361,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						3 Unit	3 Unit	1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		5,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						-	100 Persen	147,441,580.00	146,876,180.00	126,096,277.00	-21,345,303.00			-	-	Tenaga Honorer dan Jasa Penunjang Kantor Lainnya	157,572,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan	117,170,500.00	116,245,100.00	103,245,100.00	-13,925,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		106,062,500.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

[illegible]

			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan					40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	11.180.500.00	10.343.400.00	7.697.900.00	-3.482.600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-							DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Pemmodalan																						
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan					0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-							DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian Persentase Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian					-	85 82 % %	0.00	0.00	0.00	70.000.000.00											
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-					-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																						
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian					0 Orang	0 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	-	-	-						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
4.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro					-	11.33 %	17.772.000.00	17.931.700.00	35.988.890.00	52.228.000.00											
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendidikan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	Persentase UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha					-	40 Persen	17.772.000.00	17.931.700.00	35.988.890.00	18.216.890.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		Usaha Mikro Kecil dan Menengah					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																						
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro					30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	17.772.000.00	17.931.700.00	35.988.890.00	18.216.890.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-							DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																						
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan					0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-						15.000.000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																						
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro					0 Orang	0 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-						40.000.000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
5.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-					-	-	0.00	0.00	0.00	334.841.188.00										334.841.188.00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-					-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-					334.841.188.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																						
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi					0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	-	-	-					334.841.188.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								3,142,572,399.00	1,227,225,650.00	1,144,066,220.00	-1,998,506,179.00						2,030,036,526.00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG								2,957,609,899.00	1,008,951,500.00	990,736,070.00	-1,966,873,829.00						1,550,036,526.00		
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-					-	-	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00						10,000,000.00		
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-					-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-		10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	0 Dokumen		0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-		10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerja Kab/Kota	-			95 Persen			933,715,900.00	936,373,000.00	944,328,870.00	334,222,626.00						1,267,938,526.00		
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pengelolaan Sarana Perdagangan	-			1 Tahun			933,715,900.00	936,373,000.00	944,328,870.00	10,612,970.00			-	-	Sarana Distribusi Perdagangan	1,267,938,526.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																			
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	4 Unit		29,009,700.00	16,052,700.00	20,463,940.00	-8,545,760.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		363,232,326.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																			
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				8 Unit	8 Unit		904,706,200.00	920,320,300.00	923,864,930.00	19,158,730.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		904,706,200.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	koefisien variasi harga antar waktu	-			10			1,958,120,499.00	6,739,000.00	6,739,000.00	-1,910,120,499.00						48,000,000.00		
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	-			100 Persen			1,958,120,499.00	6,739,000.00	6,739,000.00	-1,951,381,499.00					Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	48,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan		0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																			
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan		6,750,000.00	6,739,000.00	6,739,000.00	-11,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	28,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan		1,951,370,499.00	0.00	0.00	-1,951,370,499.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	-			92.19 Persen			65,773,500.00	65,839,500.00	39,668,200.00	147,324,500.00						213,098,000.00		

	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera sah yang berlaku Tahun Berjalan				-		89.90 Perse	65,773,500.00	65,839,500.00	39,668,200.00	-26,105,300.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-						213,098,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																						
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					748 Unit	748 Unit		60,980,500.00	61,025,000.00	34,853,700.00	-26,126,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-						179,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Pernyuluhan Metrologi Legal																						
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina					240 Orang	240 Orang		4,793,000.00	4,814,500.00	4,814,500.00	21,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-						34,098,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK	-				-	-		0.00	0.00	0.00	11,000,000.00										11,000,000.00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-		0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-					11,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																						
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					0 UMKM	0 UMKM		0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	-	-						11,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG								184,962,500.00	218,274,150.00	153,330,150.00	-31,632,350.00										480,000,000.00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIK				-	100 %		129,597,000.00	162,132,450.00	115,057,450.00	245,403,000.00										375,000,000.00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok IKM yang meningkat kualitasnya				-	3 Kelompok		129,597,000.00	162,132,450.00	115,057,450.00	-14,539,550.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Industri Kecil dan Menengah				375,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					0 Dokumen	0 Dokumen		0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-						110,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					0 Dokumen	0 Dokumen		0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-						50,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																						

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			100,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	129,597,000.00	162,132,450.00	115,057,450.00	-14,539,550.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			110,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			5,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil Pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (UIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait				-	100 Persen	29,353,000.00	30,088,900.00	22,984,900.00	40,647,000.00							70,000,000.00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (UIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				-	100 Persen	29,353,000.00	30,088,900.00	22,984,900.00	-6,368,100.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Industri Kecil dan Menengah		70,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			50,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	29,353,000.00	30,088,900.00	22,984,900.00	-6,368,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat efektifitas pemanfaatan sistem informasi industri nasional				-	100 %	26,012,500.00	26,052,800.00	15,287,800.00	8,987,500.00						35,000,000.00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi industri				-	100 Persen	26,012,500.00	26,052,800.00	15,287,800.00	-10,724,700.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	35,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	26,012,500.00	26,052,800.00	15,287,800.00	-10,724,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		15,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							3,696,981,605.00	2,970,579,117.00	2,899,460,507.00	-797,521,098.00						4,316,274,324.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN							3,696,981,605.00	2,970,579,117.00	2,899,460,507.00	-797,521,098.00						4,316,274,324.00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							3,696,981,605.00	2,970,579,117.00	2,899,460,507.00	-797,521,098.00						4,316,274,324.00	
	1. 2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SIPP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				-	3 Level	2,966,821,605.00	2,674,407,907.00	2,600,486,107.00	364,667,481.00						3,331,489,086.00	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang - Undangan				-	100 Persen	2,409,085,357.00	2,222,910,017.00	2,222,910,017.00	-186,175,340.00			-	-	-	2,172,564,866.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	2,409,085,357.00	2,222,910,017.00	2,222,910,017.00	-186,175,340.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		2,172,564,866.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-	130,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		36,225,243.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		93,774,757.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Yang Terpenuhi				-	100 Persen	269,170,748.00	166,800,190.00	96,378,390.00	-171,792,358.00							425,560,015.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	347,600.00	343,900.00	343,900.00	-3,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4,664,149.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34,333,544.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	2 Paket	2,409,648.00	2,402,100.00	2,402,100.00	-7,548.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21,883,033.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	26,963,500.00	24,051,000.00	22,289,200.00	-4,674,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,528,000.00	1,478,190.00	1,478,190.00	-2,049,810.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2,750,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	14,585,000.00	4,643,000.00	2,509,000.00	-12,076,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31,596,860.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				163 Laporan	44 Laporan	220,337,000.00	133,882,000.00	67,356,000.00	-152,981,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			307,832,429.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-		127,851,375.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34,334,179.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93,517,196.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Yang Terpenuhi				-	100 Persen	258,265,500.00	256,897,700.00	253,397,700.00	-4,867,800.00			-	-	-		279,862,682.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	600,500.00	297,700.00	297,700.00	-302,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10,755,332.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2,065,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,065,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				28,884,714.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	255,600,000.00	255,600,000.00	252,100,000.00	-3,500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				240,222,636.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Siap Pakai				-	100 Persen	31,300,000.00	27,800,000.00	27,800,000.00	-3,500,000.00			-	-	-			195,650,148.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				10 Unit	10 Unit	31,300,000.00	27,800,000.00	27,800,000.00	-3,500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				56,126,784.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				467,723.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				7,157,699.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				33,676,070.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				98,221,872.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kebijakan Pro Investasi yang tersusun Sesuai Standaard Peraturan Perundang - Undangan				-	100 Persen	29,593,000.00	39,172,140.00	169,101,200.00	31,712,365.00								61,305,365.00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				-	1 Dokumen	8,828,000.00	8,819,440.00	4,748,500.00	-4,079,500.00			-	-	-			29,039,379.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																			
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	8,828,000.00	8,819,440.00	4,748,500.00	-4,079,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				29,039,379.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Peta Potensi Investasi yang telah mencakup keseluruhan potensi investasi				-	20 Persen	20,765,000.00	30,352,700.00	164,352,700.00	143,587,700.00			-	-	-			32,265,976.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				4 Dokumen	5 Dokumen	20,765,000.00	30,352,700.00	164,352,700.00	143,587,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				32,265,976.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang berinvestasi				-	80,16 Persen	5,110,000.00	55,109,000.00	6,563,000.00	-3,286,741.00								1,823,259.00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang mendapatkan pelayanan Promosi Penanaman Modal				-	45 Persen	5,110,000.00	55,109,000.00	6,563,000.00	1,453,000.00			-	-	-			1,823,259.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							4,097,767,076.00	4,816,025,101.00	4,736,370,511.00	638,603,435.00						4,692,214,831.00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Materitas SPIP Dinas Perpustakaan				20 4.00 JPL Point	3.00 Point	3,965,599,776.00	3,953,866,961.00	3,921,470,961.00	-381,740,425.00						3,583,859,351.00	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dibayarkan Gaji dan tunjangan nya				100 Persen	100 Persen	3,091,274,467.00	3,059,536,283.00	3,059,536,283.00	-31,738,184.00			-	-	-	2,276,280,902.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/b ulan	31 Orang/b ulan	3,091,274,467.00	3,059,536,283.00	3,059,536,283.00	-31,738,184.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN AT AS KEBUAKIAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-		2,276,280,902.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-	85,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Penddkan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		20,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		65,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah				-	100 Pensen	51,758,000.00	72,246,400.00	45,350,400.00	-6,407,600.00			-	-	-	300,407,140.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		500,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				116 Laporan	93 Laporan	51,758,000.00	72,246,400.00	45,350,400.00	-6,407,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		299,907,140.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah daerah				-	100 Pensen	34,736,000.00	34,617,500.00	34,617,500.00	-118,500.00			-	-	-	117,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		70,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		25,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	34,736,000.00	34,617,500.00	34,617,500.00	-118,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		22,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor				-	100 Pensen	753,711,309.00	753,696,778.00	753,696,778.00	-14,531.00			-	-	-	753,711,309.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	29,121,000.00	29,107,600.00	29,107,600.00	-13,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		29,121,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	24 Laporan	84,990,309.00	84,989,178.00	84,989,178.00	-1,131.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		84,990,309.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan		639,600,000.00	639,600,000.00	639,600,000.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				639,600,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				-	100 Persen		34,120,000.00	33,770,000.00	28,270,000.00	-5,850,000.00			-	-	-			51,460,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	15 Unit		27,220,000.00	26,870,000.00	21,370,000.00	-5,850,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				23,950,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit		0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				2,510,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit		6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				14,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit		0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				11,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)				-	23,88 persen		132,167,300.00	862,158,140.00	814,899,550.00	976,188,180.00								1,108,355,480.00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten /Kota yang terkelola dengan Baik				-	100 Persen		51,414,000.00	237,728,440.00	218,358,440.00	166,944,440.00			-	-	-			770,939,850.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																				
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				238 Perpustakaan	238 Perpustakaan		51,414,000.00	51,413,490.00	32,043,490.00	-19,370,510.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				107,100,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				0 Perpustakaan	0 Perpustakaan		0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				9,680,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																				
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				0 Layanan	0 Layanan		0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				20,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																				
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				0 Perpustakaan	0 Perpustakaan		0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				5,789,850.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah tenaga perpustakaan yang dilibatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang		0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				70,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																				
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan				0 Dokumen	1 Dokumen		0.00	58,184,450.00	58,184,450.00	58,184,450.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	-				11,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																				
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				0 Eksemplar	0 Eksemplar		0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				515,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	10,800,000.00	10,798,200.00	6,799,200.00	-4,001,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				10,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan pasal 59 Undang- undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)			-		75 Nilai	18,300,000.00	18,282,000.00	11,907,000.00	0.00								18,300,000.00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun "			-		100 Persen	2,900,000.00	2,899,000.00	1,899,000.00	-1,001,000.00			-	-	-			2,900,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																			
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				2300 Berkas	2300 Berkas	2,200,000.00	2,199,800.00	1,399,800.00	-800,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				2,200,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																			
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1 Arsip	2300 Arsip	700,000.00	699,200.00	499,200.00	-200,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				700,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terselamatkan	Persentase Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terselamatkan "			-		100 Persen	14,000,000.00	13,986,000.00	9,176,000.00	-4,824,000.00			-	-	-			14,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan																			
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan				1 Arsip	1 Arsip	7,000,000.00	6,991,500.00	5,241,500.00	-1,758,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				7,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan																			
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				1 Arsip	1 Arsip	7,000,000.00	6,994,500.00	3,934,500.00	-3,065,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				7,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang yang dicari			-		100 Persen	1,400,000.00	1,397,000.00	832,000.00	-568,000.00			-	-	-			1,400,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang																			
			Jumlah Daftar Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan				1 Arsip	1 Arsip	1,400,000.00	1,397,000.00	832,000.00	-568,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				1,400,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN								4,509,008,246.00	4,162,280,137.00	3,555,872,437.00	-953,135,809.00						4,651,184,524.00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4,509,008,246.00	4,162,280,137.00	3,555,872,437.00	-953,135,809.00								4,651,184,524.00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN							4,509,008,246.00	4,162,280,137.00	3,555,872,437.00	-953,135,809.00								4,651,184,524.00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perikanan			-		3 angka	3,488,104,371.00	3,142,973,347.00	3,091,795,847.00	-496,663,105.00								2,991,441,266.00	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PersentasePenyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan			-		100 Persen	3,201,806,571.00	2,856,063,747.00	2,856,063,747.00	-345,742,824.00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-	2,507,936,772.00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	3,201,806,571.00	2,856,063,747.00	2,856,063,747.00	-345,742,824.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		2,507,936,772.00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			-		100 Persen	113,081,500.00	114,849,100.00	76,447,400.00	-36,634,100.00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-	298,052,567.00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	4,000,000.00	3,987,800.00	5,647,600.00	1,647,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		4,329,729.00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				20 Orang	100 Orang		30,000,000.00	29,732,400.00	28,432,400.00	-1,567,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					75,779,251.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																					
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				6 Kelompok	6 Kelompok		2,400,000.00	2,297,700.00	1,297,700.00	-1,102,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					5,412,161.00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya			-		8 %		781,224,675.00	780,888,830.00	262,721,130.00	486,293,184.00									1,267,517,859.00	
	3.25.04.2.02	PemberdayaanPembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan Pembinaan, Pendampingan dan pengembangan Usaha			-		12 Kelompok		12,185,000.00	11,962,550.00	9,862,550.00	-2,322,450.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	Kelompok Pembudidayaan ikan				15,412,161.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																					
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				6 Kelompok	6 Kelompok		9,585,000.00	9,464,850.00	8,464,850.00	-1,120,150.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					10,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																					
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				6 Kelompok	6 Kelompok		2,600,000.00	2,497,700.00	1,397,700.00	-1,202,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					5,412,161.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK)			-		10 Dokumen		3,360,000.00	3,340,000.00	1,740,000.00	-1,620,000.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					15,606,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi		3,360,000.00	3,340,000.00	1,740,000.00	-1,620,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					15,606,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan pengelolaan usaha			-		15 Kelompok		765,679,675.00	765,586,280.00	251,118,580.00	-514,561,095.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					1,236,499,698.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen		7,760,000.00	7,758,050.00	4,078,050.00	-3,681,950.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					21,648,643.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				5 Dokumen	5 Dokumen		1,475,000.00	1,473,580.00	773,580.00	-701,420.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					5,412,161.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				75 Unit	20 Unit		642,764,675.00	642,732,960.00	138,206,760.00	-504,557,915.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					977,540,301.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																					
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				40 Unit	40 Unit		2,160,000.00	2,120,000.00	1,070,000.00	-1,090,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					5,412,161.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																					
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				30 Unit	30 Unit		101,695,000.00	101,694,950.00	100,594,950.00	-1,100,050.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					216,486,432.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																					
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen		9,825,000.00	9,806,740.00	6,395,240.00	-3,429,760.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					10,000,000.00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	Total produksi produk olahan perikanan			-		1442 Ton		347,073,200.00	146,985,160.00	127,048,660.00	100,673,305.00									247,746,505.00	

3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Daftar usaha Pengolahan yang diterbitkan						1 Dokumen	7.263.000.00	7.264.580.00	3.884.580.00	-3.378.420.00						1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					7.282.800.00	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																							
		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko						1 Dokumen	1 Dokumen	7.263.000.00	7.264.580.00	3.884.580.00	-3.378.420.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					7.282.800.00	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase usaha skala mikro dan kecil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengolahan dari keseluruhan umkm perikanan					-	483	8.674.200.00	8.673.080.00	5.553.080.00	-3.121.120.00				-		1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				7.074.200.00	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																							
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	8.674.200.00	8.673.080.00	5.553.080.00	-3.121.120.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					7.074.200.00	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyakuran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku olahan perikanan (TON)					-	3283.63 tn	131.136.000.00	131.047.500.00	117.611.000.00	-13.525.000.00				-		1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				233.389.505.00	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																							
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						46.15 Ton	46.15 Ton	38.278.500.00	38.190.100.00	31.143.800.00	-7.134.900.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					45.000.000.00	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																							
		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi						5 Pelaku Usaha	146 Pelaku Usaha	92.857.500.00	92.857.400.00	86.467.400.00	-6.390.100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					188.389.505.00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								9.992.073.139.00	9.916.892.554.00	10.039.756.879.00	47.683.740.00									14.826.147.658.00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN								5.310.000.000.00	5.866.253.009.00	6.067.184.130.00	757.184.130.00									1.276.334.794.00			
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN								5.310.000.000.00	5.866.253.009.00	6.067.184.130.00	757.184.130.00									1.276.334.794.00			
1. 2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Peran Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri					-	133 14,50 %	2.880.000.000.00	3.023.128.800.00	3.022.958.750.00	-1.948.448.902.00									931.550.098.00			
2.19.02.2.01	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader	Persentase penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten / Kota Wira Usaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten Kota					-	100 %	2.780.000.000.00	2.883.058.800.00	2.882.888.750.00	102.888.750.00				-		4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	-				903.065.298.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																							
		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota yang Difasilitasi/ Pengembangan Kewirausahaan Pemuda						40 Orang	80 Orang	50.000.000.00	94.623.000.00	78.468.000.00	28.468.000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-		4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA					93.848.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																							
		Jumlah yang menerima penghargaan pemuda						1928 Orang	1792 Orang	2.700.000.000.00	2.735.981.500.00	2.731.076.000.00	31.076.000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-		-					820.000.000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																							
		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda						1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000.00	52.454.300.00	50.373.300.00	20.373.300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-		-					60.000.000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota																							

			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				-	2 Unit		0.00	0.00	22,971,450.00	22,971,450.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				22,971,450.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten / kota				-	100 %		100,000,000.00	140,070,000.00	140,070,000.00	40,070,000.00			-	-	-			28,484,800.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																				
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				2 Organisasi	2 Organisasi		100,000,000.00	140,070,000.00	140,070,000.00	40,070,000.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA AL OKASI UMUM (DAU)	-	-				28,484,800.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Kenaikan Raihan Prestasi Pada Event Olahraga Nasional dan Provinsi				-	100 %		2,030,000,000.00	2,443,122,509.00	2,644,223,680.00	-1,705,215,304.00								324,784,696.00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota				-	100 %		150,000,000.00	591,841,209.00	998,189,580.00	848,189,580.00			-	-	-			149,102,643.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																				
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	3 Unit		50,000,000.00	100,105,809.00	508,704,180.00	458,704,180.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-				134,102,643.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	2 Dokumen		100,000,000.00	491,735,400.00	489,485,400.00	389,485,400.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			15,000,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat daerah Kabupaten / Kota				-	100% undefined		300,000,000.00	304,566,300.00	118,541,100.00	-181,458,900.00			-	-	-			125,682,053.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan		100,000,000.00	98,384,600.00	105,184,600.00	5,184,600.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-				95,682,053.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																				
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				50 Orang	00 Orang		200,000,000.00	206,181,700.00	13,356,500.00	-186,643,500.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-				30,000,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi tingkat Daerah Provinsi				-	100 %		70,000,000.00	46,428,500.00	27,206,500.00	-42,793,500.00			-	-	-			25,000,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																				
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				3 Orang	15 Orang		10,000,000.00	11,421,000.00	11,421,000.00	1,421,000.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-				5,000,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																				
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				100 Orang	100 Orang		50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-				20,000,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota																				
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen		10,000,000.00	35,007,500.00	15,785,500.00	5,785,500.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-				0.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Kegiatan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga				-	100 %		1,500,000,000.00	1,500,286,500.00	1,500,286,500.00	286,500.00			-	-	-			15,000,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																				
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen		1,500,000,000.00	1,500,286,500.00	1,500,286,500.00	286,500.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-				15,000,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi					-	100 %	10,000,000.00		0.00	0.00	-10,000,000.00				-	-	-				10,000,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000.00		0.00	0.00	-10,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-					10,000,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentase Lembaga Kepramukaan yang Aktif				-	100 %	400,000,000.00		400,001,700.00	400,001,700.00	-380,000,000.00										20,000,000.00		
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	400,000,000.00		400,001,700.00	400,001,700.00	1,700.00					-	-	-			20,000,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																							
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	400,000,000.00		400,001,700.00	400,001,700.00	1,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-				20,000,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4,682,073,139.00		4,050,639,545.00	3,972,572,749.00	-709,500,390.00										13,549,812,864.00		
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							4,682,073,139.00		4,050,639,545.00	3,972,572,749.00	-709,500,390.00										13,549,812,864.00		
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP Dinas Pariwisata				-	20 4.00 JPL Point	4,032,073,139.00		3,737,214,845.00	3,653,267,095.00	1,949,696,148.00										5,981,769,287.00		
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-	-	3,509,182,946.00		3,137,711,651.00	3,137,711,651.00	-371,471,295.00				-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				4,815,920,987.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3,509,182,946.00		3,137,711,651.00	3,137,711,651.00	-371,471,295.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					4,815,920,987.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	10,000,000.00		17,379,000.00	17,379,000.00	7,379,000.00				-	-	-				120,000,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	4 Orang	10,000,000.00		17,379,000.00	17,379,000.00	7,379,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-					120,000,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	234,000,193.00		346,472,700.00	270,479,200.00	36,479,007.00				-	-	-				475,744,500.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,000,193.00		0.00	0.00	-2,000,193.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-					14,641,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	1 Paket	2,000,000.00		1,166,700.00	1,166,700.00	-833,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					21,961,500.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	230,000,000.00		345,306,000.00	269,312,500.00	39,312,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					439,142,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	40,000,000.00		0.00	0.00	-40,000,000.00				-	-	-				194,316,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																							
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	20,000,000.00		0.00	0.00	-20,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-					54,137,500.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																							
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20,000,000.00		0.00	0.00	-20,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					140,178,500.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	190,500,000.00		204,371,494.00	196,771,494.00	6,271,494.00				-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				143,825,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	95,500,000.00	109,385,500.00	101,785,500.00	6,285,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPT MALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			143,825,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							0 Laporan	12 Laporan	95,000,000.00	94,985,994.00	94,985,994.00	-14,006.00	Kab. Barru, Barru, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPT MALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						-	-	48,390,000.00	31,280,000.00	30,925,750.00	-17,464,250.00			-	3. OPT MALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		231,962,800.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							10 Unit	10 Unit	20,000,000.00	21,900,000.00	11,600,000.00	-8,400,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPT MALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			40,994,800.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							30 Unit	26 Unit	10,000,000.00	9,380,000.00	9,380,000.00	-620,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPT MALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			143,641,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							1 Unit	1 Unit	13,390,000.00	0.00	9,945,750.00	-3,444,250.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39,930,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							10 Unit	10 Unit	5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7,397,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2. 3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	Presentase Peningkatan Jumlah PAD Pariwisata						-	undefined undefined	105,000,000.00	0.00	34,669,554.00	5,986,388,042.00							6,091,388,042.00	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-						-	-	75,000,000.00	0.00	0.00	-75,000,000.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-		4,287,302,242.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota							1 Lokasi	1 Lokasi	75,000,000.00	0.00	0.00	-75,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			4,287,302,242.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-						-	-	25,000,000.00	0.00	34,669,554.00	9,669,554.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-		1,744,190,800.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							8 Unit	1 Unit	25,000,000.00	0.00	34,669,554.00	9,669,554.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			1,744,190,800.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-						-	-	5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-		59,895,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota							20 Usaha	20 Usaha	5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			59,895,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3. 3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Pertumbuhan Jmlah Wisatawan						-	6.49 %	250,000,000.00	214,015,400.00	147,646,600.00	166,923,147.00							416,923,147.00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Jumlah promosi daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dilaksanakan						-	100 %	250,000,000.00	214,015,400.00	147,646,600.00	-102,353,400.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-		416,923,147.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota							6 Kegiatan	4 Kegiatan	200,000,000.00	196,918,400.00	137,867,600.00	-62,132,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			334,523,147.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																				

			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					2 Promosi	3 Promosi	50,000,000.00	17,097,000.00	9,779,000.00	-40,221,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				82,400,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK	-					-	-	25,000,000.00	0.00	0.00	184,558,800.00								209,558,800.00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-					-	-	25,000,000.00	0.00	0.00	-25,000,000.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-			209,558,800.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																				
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif					40 Produk	40 Produk	25,000,000.00	0.00	0.00	-25,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				209,558,800.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					-	14 %	270,000,000.00	99,409,300.00	136,989,500.00	580,173,588.00								850,173,588.00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif dan Pariwisata					-	15 Orang	180,000,000.00	99,409,300.00	136,989,500.00	-43,010,500.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-			652,520,088.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif					1 Laporan	1 Laporan	40,000,000.00	0.00	0.00	-40,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				197,653,500.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																				
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					40 Orang	40 Orang	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				409,948,000.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					20 Orang	25 Orang	90,000,000.00	99,409,300.00	136,989,500.00	46,989,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				44,918,588.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-					-	-	90,000,000.00	0.00	0.00	-90,000,000.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-			197,653,500.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					40 Orang	40 Orang	90,000,000.00	0.00	0.00	-90,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				197,653,500.00	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN								20,160,861,508.00	17,155,063,222.00	14,546,416,735.00	-5,614,444,773.00								30,341,831,220.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN								748,946,208.00	605,709,140.00	502,924,840.00	-246,021,368.00								1,220,646,208.00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG								748,946,208.00	605,709,140.00	502,924,840.00	-246,021,368.00								1,220,646,208.00	
1.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-					-	-	150,000,000.00	0.00	0.00	116,200,000.00								266,200,000.00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	-					-	-	150,000,000.00	0.00	0.00	-150,000,000.00			-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	-			266,200,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																				
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia					1 Unit	1 Unit	100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA				100,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia					2 unit	2 unit	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA				166,200,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein				-	97 %	428,946,208.00	467,959,840.00	419,698,840.00	56,000,000.00						484,946,208.00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	Perseniese Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				-	100 %	100,000,000.00	54,196,430.00	46,337,630.00	-53,662,370.00		-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	-		106,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				10 Laporan	7 Laporan	25,000,000.00	26,464,360.00	24,897,160.00	-102,840.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA		25,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																	
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				7 Unit	7 Unit	25,000,000.00	0.00	0.00	-25,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA		25,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																	
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				7 Unit	10 Unit	25,000,000.00	16,351,540.00	7,447,240.00	-17,552,760.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA		31,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																	
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000.00	11,380,530.00	13,993,230.00	-11,006,770.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA		25,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				-	3 Unit	70,000,000.00	175,611,410.00	169,390,810.00	99,390,810.00			-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	-	100,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				5 Ton	10 Ton	50,000,000.00	175,611,410.00	169,390,810.00	119,390,810.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA		50,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				2 Ton	2 Ton	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA		20,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				2 Ton	10 Ton	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA		30,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	-				-	-	25,000,000.00	0.00	0.00	-25,000,000.00			-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	-	30,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal																	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				7 Laporan	7 Laporan	25,000,000.00	0.00	0.00	-25,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA		30,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Gizi				-	81 %	233,946,208.00	238,152,000.00	203,970,400.00	-29,975,808.00			-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	-	248,946,208.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																	
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				8 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000.00	18,557,200.00	10,784,900.00	-19,215,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA		30,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3 Laporan	3 Laporan	178,946,208.00	219,594,800.00	193,185,500.00	14,239,292.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA		188,946,208.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				7 Laporan	7 Laporan	25,000,000.00	0.00	0.00	-25,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA		30,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN	Persentase Penurunan Kasus Kerawanan Pangan				-	0.40 %	80,000,000.00	91,960,700.00	43,243,400.00	249,500,000.00						329,500,000.00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				-	1 Dokumen	30,000,000.00	52,188,100.00	26,523,000.00	-3,477,000.00			-	2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	-	100,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6,250,000.00	5,815,000.00		6,815,000.00	565,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					6,250,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60,600,000.00	60,600,000.00	60,600,000.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					60,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara				-	100 %	161,000,000.00	300,101,200.00	311,451,200.00	150,451,200.00				-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				149,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	63 Unit	41,000,000.00	39,934,200.00	34,934,200.00	-6,065,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					41,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100,000,000.00	250,168,800.00	266,518,800.00	166,518,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					100,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	8 Unit	10,000,000.00	9,998,200.00	9,998,200.00	-1,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					3,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					5,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Produktivitas Pertanian Perhektar Tahunan Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun				-	8,48 3,95 %	1,734,000,542.00	3,840,928,800.00	1,283,988,440.00	922,021,318.00									2,656,021,860.00		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang mendukung modernisasi pertanian				-	100 %	929,031,057.00	2,433,251,400.00	448,246,640.00	-480,784,417.00				-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				1,379,761,331.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																					
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				4 Laporan	2 Laporan	280,908,067.00	2,108,153,200.00	35,802,300.00	-245,105,757.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					129,761,331.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																					
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	4 Laporan	648,123,000.00	325,098,200.00	412,444,340.00	-235,678,660.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					1,250,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme				-	100 %	366,463,485.00	439,685,100.00	413,073,700.00	46,610,215.00				-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				684,657,390.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																					
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000.00	11,082,900.00	6,624,100.00	-53,375,900.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					60,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																					
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	306,463,485.00	428,602,200.00	406,449,600.00	99,086,115.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					624,657,390.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman				-	100 %	70,780,000.00	70,817,600.00	69,138,800.00	-1,641,200.00				-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				301,603,139.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																					

			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	18 Unit	1,000,000,000.00	827,917,400.00	423,840,614.00	-576,159,386.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJATAHUN SEBELUMNYA	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				2,650,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																			
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	240,000,000.00	0.00	0.00	-240,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJATAHUN BERJALAN	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				960,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																			
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	6 Unit	100,000,000.00	113,703,600.00	136,163,542.00	36,163,542.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				1,500,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																			
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	3 Unit	2,617,375,000.00	82,368,100.00	97,940,300.00	-2,519,434,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJATAHUN SEBELUMNYA	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				150,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																			
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				2 Unit	22 Unit	150,000,000.00	0.00	266,232,817.00	116,232,817.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJATAHUN BERJALAN	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				2,450,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																			
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				50,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular				-	0.27 %	591,702,150.00	273,665,380.00	234,479,480.00	-8,185,150.00								583,517,000.00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabahnya Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Penyakit Hewan dan Zoonosis				-	100 %	83,062,150.00	83,109,200.00	66,738,700.00	-16,323,450.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-			300,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	83,062,150.00	83,109,200.00	66,738,700.00	-16,323,450.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				300,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpindahan Hewan/Ternak dan Produk Hewan yang diawasi sesuai standar peraturan perundang undangan				-	100 %	60,000,000.00	59,695,200.00	46,903,800.00	-13,096,200.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-			60,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																			
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				7 laporan	7 laporan	45,000,000.00	44,884,100.00	35,959,300.00	-9,040,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				45,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya																			
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				4 Laporan	3 Laporan	15,000,000.00	14,811,100.00	10,944,500.00	-4,055,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				15,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah				-	100 %	388,075,000.00	85,852,800.00	77,718,800.00	-310,356,200.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-			137,917,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																			
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				2 Laporan	2 Laporan	45,000,000.00	45,019,400.00	36,175,200.00	-8,824,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				106,090,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner					2 Laporan	2 Laporan		343,075,000.00	40,833,400.00	41,543,600.00	-301,531,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					31,827,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang dibina dan diawasi	-				100 %		15,000,000.00	0.00	0.00	-15,000,000.00				-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				15,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																							
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						1 Laporan	1 Laporan		15,000,000.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					15,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Penerapan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan	-				100 %		45,565,000.00	45,008,180.00	43,118,180.00	-2,446,820.00				-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				70,600,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.2.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya																							
		Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani						7 Kasus	7 Kasus		45,565,000.00	45,008,180.00	43,118,180.00	-2,446,820.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					70,600,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Kerugian Akibat Bencana Pertanian	-				15 %		95,000,000.00	105,235,400.00	80,531,700.00	235,000,000.00										330,000,000.00		
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-				100 %		95,000,000.00	105,235,400.00	80,531,700.00	-14,468,300.00				-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				330,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																							
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan						5 Ha	5 Ha		35,000,000.00	49,263,100.00	31,550,800.00	-3,449,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					180,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																							
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani						2 Ha	2 Ha		50,000,000.00	55,972,300.00	48,980,900.00	-1,019,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					50,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																							
		Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan						4 Laporan	4 Laporan		10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					100,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
6.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-					-	-		25,000,000.00	11,807,200.00	5,907,200.00	99,272,700.00									124,272,700.00		
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-					-	-		15,000,000.00	0.00	0.00	-15,000,000.00				-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				109,272,700.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian																							
		Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian						1 Dokumen	1 Dokumen		5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					27,318,175.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																							
		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian						1 Dokumen	1 Dokumen		5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					54,636,350.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																							
		Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi						1 Laporan	1 Laporan		5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					27,318,175.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase Pelayanan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-				100 %		10,000,000.00	11,807,200.00	5,907,200.00	-4,092,800.00				-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				15,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																							

			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi				2 Laporan		10,000,000.00	11,807,200.00	5,907,200.00	-4,092,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				15,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
7.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani			-	20 %		664,077,624.00	327,496,714.00	639,757,184.00	201,572,376.00								865,650,000.00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	100 %		664,077,624.00	327,496,714.00	639,757,184.00	-24,320,440.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				865,650,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																					
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Unit	7 Unit	285,085,800.00	98,865,300.00	429,208,670.00	144,122,870.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				200,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																					
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Unit	7 Unit	120,891,700.00	38,560,700.00	26,381,900.00	-94,509,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				406,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				7 Unit	7 Unit	158,100,124.00	190,070,714.00	184,166,614.00	26,066,490.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				159,650,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				7 Unit	7 Unit	100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				100,000,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN																			
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN							416,323,500.00	466,306,800.00	346,966,300.00	-69,357,200.00								585,116,961.00	
		401	SEKRETARIAT DAERAH						416,323,500.00	466,306,800.00	346,966,300.00	-69,357,200.00								585,116,961.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Kematangan Organisasi			-	400 20 2 Point JPL Level		101,234,200.00	104,101,500.00	67,774,500.00	22,385,246.00								123,619,446.00	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN			-	100 Persen		2,180,500.00	2,193,500.00	78,000.00	-2,102,500.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			9,625,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	2,180,500.00	2,193,500.00	78,000.00	-2,102,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				9,625,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			-	100 Persen		66,775,200.00	66,022,500.00	31,811,000.00	-34,964,200.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			71,429,446.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	1,233,000.00	1,112,500.00	1,112,500.00	-120,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				5,066,786.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				96 Laporan	88 Laporan	65,542,200.00	64,910,000.00	30,698,500.00	-34,843,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				66,363,660.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	100 Persen		10,194,500.00	9,670,300.00	9,670,300.00	-524,200.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			15,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10,194,500.00	9,670,300.00	9,670,300.00	-524,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				15,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor			-	100 Persen		10,374,000.00	14,505,200.00	14,505,200.00	4,131,200.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			13,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10,374,000.00	14,505,200.00	14,505,200.00	4,131,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			13,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara				-	100 Persen	11,710,000.00	11,710,000.00	11,710,000.00	0.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		14,565,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			10,500,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6 Unit	2,710,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			4,065,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Rata-rata capaian kinerja Program Sekretariat Daerah				-	100 %	315,089,300.00	362,205,300.00	279,191,800.00	146,408,215.00							461,497,515.00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Money yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan				-	100 Persen	315,089,300.00	362,205,300.00	279,191,800.00	-35,997,500.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		461,497,515.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	5 Dokumen	9,971,400.00	10,263,300.00	6,177,800.00	-3,793,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			28,642,455.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				125 Laporan	2 Laporan	221,996,400.00	239,042,000.00	198,442,000.00	-23,554,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			349,733,560.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				169 Laporan	3 Laporan	83,121,500.00	112,900,000.00	74,572,000.00	-8,549,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			83,121,500.00	SEKRETARIAT DAERAH
			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																	14,302,570,670.00
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN							12,678,044,450.00	15,102,570,670.00	14,995,387,690.00	2,317,343,240.00							14,302,570,670.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							12,678,044,450.00	15,102,570,670.00	14,995,387,690.00	2,317,343,240.00							14,302,570,670.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Kematangan Organisasi Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah				-	20 2 4,00 JPL Level Point	55,472,000.00	73,971,290.00	100,257,130.00	18,499,290.00							73,971,290.00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah				-	100 Persen	39,159,500.00	47,243,100.00	67,191,700.00	28,032,200.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		47,243,100.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	54 Laporan	39,159,500.00	47,243,100.00	67,191,700.00	28,032,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			47,243,100.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor				-	100 Persen	16,312,500.00	20,808,190.00	27,145,430.00	10,832,930.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		20,808,190.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	16,312,500.00	20,808,190.00	27,145,430.00	10,832,930.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			20,808,190.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0.00	5,920,000.00	5,920,000.00	5,920,000.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		5,920,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	3 Unit	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			1,500,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	10 Unit	0.00	4,420,000.00	4,420,000.00	4,420,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			4,420,000.00	SEKRETARIAT DAERAH

2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai hasil evaluasi RB pada Penataase PerUjan Presentase Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)				-	4 100 34769 Point Persen Point	12,622,572,450.00	15,028,599,380.00	14,895,130,560.00	1,606,026,930.00						14,228,599,380.00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketersediaan laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang tersusun sesuai aturan perundang-undangan undefined				-	100 Persen undefined undefined	12,622,572,450.00	15,028,599,380.00	14,895,130,560.00	2,272,558,110.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-	14,228,599,380.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				12 Dokumen	12 Dokumen	11,968,780,450.00	14,367,899,400.00	14,236,380,580.00	2,267,600,130.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		13,567,899,400.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Melalui Ususan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	649,921,500.00	657,021,480.00	652,969,480.00	3,047,980.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		667,021,480.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Melalui Ususan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	3,870,500.00	3,678,500.00	5,780,500.00	1,910,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		3,678,500.00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA																	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN							303,341,200.00	453,304,800.00	355,738,100.00	52,396,900.00						0.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							303,341,200.00	453,304,800.00	355,738,100.00	52,396,900.00						0.00	
	1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-			-	-	90,899,700.00	113,807,300.00	62,291,200.00	-90,899,700.00						0.00	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	6,992,000.00	9,080,000.00	9,080,000.00	2,088,000.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				180 Orang	100 Orang	6,992,000.00	9,080,000.00	9,080,000.00	2,088,000.00	Kab. Barru, Barru, Coppo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	67,739,200.00	67,632,000.00	19,125,500.00	-48,613,700.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	27 Laporan	67,739,200.00	67,632,000.00	19,125,500.00	-48,613,700.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	14,103,500.00	33,130,300.00	30,120,700.00	16,017,200.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	14,103,500.00	33,130,300.00	30,120,700.00	16,017,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2,065,000.00	3,965,000.00	3,965,000.00	1,900,000.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	8 Unit	2,065,000.00	3,965,000.00	3,965,000.00	1,900,000.00	Kab. Barru, Barru, Coppo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	SEKRETARIAT DAERAH

2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-					-	-	212,441,500.00	339,497,500.00	293,446,900.00	-212,441,500.00						0.00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-					-	-	212,441,500.00	339,497,500.00	293,446,900.00	81,005,400.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					50 Dokumen	50 Dokumen	134,053,000.00	251,014,700.00	230,235,700.00	96,182,700.00	Kab. Barru, Barru, Coppo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik					3 Dokumen	3 Dokumen	61,350,000.00	74,755,800.00	52,799,700.00	-8,550,300.00	Kab. Barru, Barru, Coppo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					90 Orang	90 Orang	17,038,500.00	13,727,000.00	10,411,500.00	-6,627,000.00	Kab. Barru, Barru, Coppo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEMERINTAHAN								436,536,400.00	466,528,740.00	325,971,700.00	-110,564,700.00						1,067,171,237.00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN								436,536,400.00	466,528,740.00	325,971,700.00	-110,564,700.00						1,067,171,237.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH								436,536,400.00	466,528,740.00	325,971,700.00	-110,564,700.00						1,067,171,237.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kematangan Organisasi Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah					-	2 400 Level JPL Point	83,447,000.00	86,131,400.00	98,488,900.00	50,863,000.00						134,310,000.00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah					-	100 Persen	68,553,000.00	70,822,100.00	83,179,600.00	14,626,600.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-	113,740,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 Laporan	108 Laporan	68,553,000.00	70,822,100.00	83,179,600.00	14,626,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		113,740,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor					-	100 Persen	11,964,000.00	12,716,500.00	12,716,500.00	752,500.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-	14,520,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	11,964,000.00	12,716,500.00	12,716,500.00	752,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		14,520,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara					-	100 Persen	2,930,000.00	2,592,800.00	2,592,800.00	-337,200.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-	6,050,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5 Unit	4 Unit	2,930,000.00	2,592,800.00	2,592,800.00	-337,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		6,050,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai hasil evaluasi RB pada Penataan PerUjan Presentase Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)					-	4 100 3,4769 Point Persen Point	353,089,400.00	380,397,340.00	227,482,800.00	579,771,837.00						932,861,237.00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaporan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan					-	100 Persen	284,520,900.00	310,973,640.00	189,762,600.00	-94,758,300.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-	835,518,310.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan					1 Dokumen	1 Dokumen	12,945,000.00	13,266,650.00	2,680,900.00	-10,284,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		144,371,150.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					1 Dokumen	1 Dokumen	116,145,500.00	98,519,000.00	63,924,500.00	-52,221,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		181,210,810.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Facilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	155,430,400.00	199,187,990.00	123,177,200.00	-32,253,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		509,936,350.00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.02.2.04	Facilitasi Kerja Sama Daerah	-							68.568.500,00	69.423.700,00	37.720.200,00	-30.848.300,00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				97.342.927,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																						
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri						1 Dokumen	1 Dokumen	68.568.500,00	69.423.700,00	37.720.200,00	-30.848.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				97.342.927,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA									269.376.700,00	396.781.990,00	387.781.070,00	118.404.370,00										296.314.370,00
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN								269.376.700,00	396.781.990,00	387.781.070,00	118.404.370,00										296.314.370,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH								269.376.700,00	396.781.990,00	387.781.070,00	118.404.370,00										296.314.370,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Tingkat Kematangan Organisasi Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan					-	2 400 20 Level Point JPL	112.849.100,00	150.226.800,00	75.517.300,00	11.284.910,00										124.134.010,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah					-	100 Persen	93.382.600,00	130.640.500,00	55.931.000,00	-37.451.600,00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				102.720.860,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						69 Laporan	94 Laporan	93.382.600,00	130.640.500,00	55.931.000,00	-37.451.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				102.720.860,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor					-	100 Persen	7.716.500,00	7.836.300,00	7.836.300,00	119.800,00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				8.488.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan	7.716.500,00	7.836.300,00	7.836.300,00	119.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				8.488.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara					-	100 Persen	11.750.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				12.925.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						3 Unit	3 Unit	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				9.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						10 Unit	10 Unit	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				3.575.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-					-	-	156.527.600,00	246.555.190,00	312.263.770,00	15.652.760,00										172.180.360,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Ketersediaan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					-	4 Rekomendasi	109.409.700,00	130.403.750,00	189.618.550,00	80.208.850,00			-		1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				120.350.670,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						2 Dokumen	2 Dokumen	21.975.700,00	23.180.850,00	9.888.350,00	-12.087.350,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				24.173.270,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																						
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						5 Laporan	5 Laporan	24.464.500,00	38.286.300,00	15.950.800,00	-8.513.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				26.910.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																						
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						4 Dokumen	4 Dokumen	48.965.000,00	49.127.200,00	7.360.200,00	-41.604.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				53.861.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD						1 Dokumen	1 Dokumen	14.004.500,00	19.809.400,00	156.419.200,00	142.414.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				15.404.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan					-	100 Persen	47.117.900,00	116.151.440,00	122.645.220,00	75.527.320,00			-		1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				51.829.690,00	SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah					100 Persen	25,961,500.00	52,108,500.00	36,514,000.00	10,562,500.00					3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				25,961,500.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					32 Laporan	44 Laporan	25,961,500.00	52,108,500.00	36,514,000.00	10,562,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			25,961,500.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-		0.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					-	2 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		0.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor					-	100 Persen	4,144,500.00	15,644,450.00	15,644,450.00	11,499,950.00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		4,144,500.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 laporan Laporan	4 Laporan	4,144,500.00	15,644,450.00	15,644,450.00	11,499,950.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			4,144,500.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara					-	100 Persen	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		2,950,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya																				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					8 Unit	8 Unit	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			2,950,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
2. 4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai hasil evaluasi RB pada Penataan PerUuan Presentase Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)					-	4 100 3.4769 Point Persen Point	475,810,000.00	531,879,800.00	295,861,200.00	0.00								475,810,000.00	
4.01.02.2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah Perda dan Pertub yang ditetapkan					-	30 Dokumen	475,810,000.00	531,879,800.00	295,861,200.00	-179,948,800.00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		475,810,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0001	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah																				
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun					3 Dokumen	3 Dokumen	230,676,500.00	336,344,800.00	210,544,800.00	-20,131,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			230,676,500.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0002	Fasilitas Bantuan Hukum																				
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum					3 Kasus	3 Kasus	129,949,500.00	77,576,600.00	7,739,600.00	-122,209,900.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			129,949,500.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																				
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi					1 Dokumen	5 Dokumen	115,184,000.00	117,958,400.00	77,576,800.00	-37,607,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			115,184,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM																			
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN								28,915,180,454.00	30,211,576,733.00	36,908,592,488.00	7,993,412,034.00								32,981,694,420.00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								28,915,180,454.00	30,211,576,733.00	36,908,592,488.00	7,993,412,034.00								32,981,694,420.00	
1. 4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-					-	-	28,915,180,454.00	30,211,576,733.00	36,908,592,488.00	4,066,513,966.00								32,981,694,420.00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-					-	-	10,593,372,390.00	9,706,003,905.00	9,706,003,905.00	-887,368,485.00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		12,593,947,739.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					94 Orang/b ulan	94 Orang/b ulan	10,593,372,390.00	9,706,003,905.00	9,706,003,905.00	-887,368,485.00	Kab. Barru, Barru, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			12,593,947,739.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					-	-	2,372,007,900.00	2,207,492,800.00	2,544,016,300.00	172,008,400.00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		2,616,366,500.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	74,429,900.00	74,440,600.00	74,440,600.00	10,700.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			89,030,700.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	50,172,000.00	39,882,100.00	27,722,100.00	-22,449,900.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			55,189,200.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	146,345,000.00	146,344,600.00	115,624,600.00	-30,720,400.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			160,979,500.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1,146,393,500.00	992,156,000.00	1,376,247,500.00	229,854,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			1,261,032,850.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				789 Laporan	789 Laporan	954,667,500.00	954,667,500.00	949,981,500.00	-4,686,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			1,050,134,250.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	-				-	-	1,065,470,900.00	3,464,937,400.00	4,416,562,950.00	3,351,112,050.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		1,250,278,590.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	926,000,000.00	3,428,882,400.00	3,428,882,400.00	2,502,882,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			1,018,600,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	113,070,900.00	36,055,000.00	36,055,000.00	-77,015,900.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			202,638,590.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	26,400,000.00	0.00	951,645,550.00	925,245,550.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			29,040,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	-				-	-	8,007,874,194.00	8,490,810,026.00	10,905,110,671.00	2,897,236,477.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		8,808,661,613.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	190,738,000.00	190,736,350.00	190,236,350.00	-501,650.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			209,811,800.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6,062,896,194.00	6,503,313,678.00	7,903,314,321.00	1,840,418,127.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			6,669,185,813.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	523,400,000.00	523,320,000.00	1,538,120,000.00	1,014,720,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			575,740,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,230,840,000.00	1,273,440,000.00	1,273,440,000.00	42,600,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			1,353,924,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	-				-	-	1,809,529,865.00	1,638,315,400.00	2,251,109,012.00	441,579,147.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		2,105,822,252.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	607,040,300.00	607,341,000.00	607,341,000.00	300,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			667,744,330.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	413,469,500.00	413,447,800.00	442,307,800.00	28,838,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			570,155,850.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	29 Unit	19,985,000.00	13,895,000.00	16,695,000.00	-3,290,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			21,983,500.00	SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	370.605.025.00	370.591.600.00	922.000.212.00	551.395.187.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			407.665.528.00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	398.430.040.00	233.040.000.00	262.765.000.00	-135.665.040.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			438.273.044.00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					-	-	4.181.934.205.00	3.819.264.000.00	6.201.016.450.00	2.019.082.245.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		4.633.127.626.00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	645.643.705.00	752.050.000.00	752.050.000.00	106.406.295.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			743.208.076.00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	172.300.000.00	171.044.500.00	270.924.500.00	98.624.500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			189.530.000.00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6 Orang	6 Orang	227.400.000.00	225.022.500.00	225.022.500.00	-2.377.500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			250.140.000.00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	3.136.590.500.00	2.671.147.000.00	4.953.019.450.00	1.816.428.950.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			3.450.249.550.00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					-	-	884.991.000.00	884.753.200.00	884.753.200.00	-237.800.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		973.490.100.00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																			
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	469.995.000.00	469.988.000.00	469.988.000.00	-7.000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			516.994.500.00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																			
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	350.000.000.00	349.772.000.00	349.772.000.00	-228.000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			385.000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																			
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	64.996.000.00	64.993.200.00	64.993.200.00	-2.800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			71.495.600.00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN ORGANISASI																	522,722,060.00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN							361,449,300.00	661,448,880.00	524,826,690.00	163,377,390.00							522,722,060.00		
401	SEKRETARIAT DAERAH							361,449,300.00	661,448,880.00	524,826,690.00	163,377,390.00							522,722,060.00		
1. 4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Kematangan Organisasi Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah				-	20 2 4,00 JPL Level Point	361,449,300.00	661,448,880.00	524,826,690.00	161,272,760.00							522,722,060.00		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah				-	100 Persen	31.697.500.00	59.517.000.00	59.244.500.00	27.547.000.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		53.667.500.00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				97 Laporan	12 Laporan	31.697.500.00	59.517.000.00	59.244.500.00	27.547.000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			53.667.500.00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 Persen	20.725.000.00	40.198.300.00	89.421.700.00	68.696.700.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		89.421.700.00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	6 Unit	20.725.000.00	40.198.300.00	89.421.700.00	68.696.700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			89.421.700.00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor				-	100 Persen	17.174.400.00	16.272.280.00	12.445.980.00	-4.728.420.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		17.293.400.00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	17,174,400.00	16,272,280.00	12,445,980.00	-4,728,420.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			17,293,400.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara				-	100 Persen	1,300,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	1,410,000.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		1,335,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	6 Unit	1,300,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	1,410,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			1,335,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi yang terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan				-	100 Persen	290,552,400.00	542,751,300.00	361,004,510.00	70,452,110.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		361,004,460.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	2 Dokumen	88,252,600.00	68,146,400.00	78,740,900.00	-9,511,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			78,740,900.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	91,405,800.00	76,787,400.00	104,088,100.00	12,682,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			104,088,100.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	64,067,000.00	93,202,300.00	54,966,800.00	-9,100,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			54,966,800.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	2 Dokumen	46,827,000.00	304,615,200.00	123,208,710.00	76,381,710.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			123,208,660.00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							30,168,695,935.00	30,843,583,389.00	26,166,278,889.00	-4,002,417,046.00							31,289,902,435.00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN							30,168,695,935.00	30,843,583,389.00	26,166,278,889.00	-4,002,417,046.00							31,289,902,435.00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							30,168,695,935.00	30,843,583,389.00	26,166,278,889.00	-4,002,417,046.00							31,289,902,435.00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Maturitas SPIP Sekretariat DPRD Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan				4 20 Point JPL	4 20 Point JPL	16,815,115,435.00	18,279,752,689.00	18,084,535,939.00	-102,299,500.00							16,712,815,935.00	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan				100 Persen	100 Persen	2,034,868,699.00	2,136,507,025.00	2,136,507,025.00	100,638,326.00			-	ASN Sekretariat DPRD			2,234,868,699.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	2,034,868,699.00	2,136,507,025.00	2,136,507,025.00	100,638,326.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2,234,868,699.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	660,537,700.00	633,992,700.00	522,598,200.00	-137,939,500.00			-	ASN, Non ASN,			719,723,700.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,653,000.00	15,611,200.00	15,611,200.00	-41,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15,653,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	0.00	146,087,400.00	146,087,400.00	146,087,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA			90,175,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4	NON URUSAN							30,168,695,935.00	30,843,583,389.00	26,166,278,889.00	-4,002,417,046.00							31,289,902,435.00	
	4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							30,168,695,935.00	30,843,583,389.00	26,166,278,889.00	-4,002,417,046.00							31,289,902,435.00	
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN							30,168,695,935.00	30,843,583,389.00	26,166,278,889.00	-4,002,417,046.00							31,289,902,435.00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							30,168,695,935.00	30,843,583,389.00	26,166,278,889.00	-4,002,417,046.00							31,289,902,435.00	
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	66,065,000.00	61,411,100.00	61,411,100.00	-4,653,900.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				66,065,000.00	SEKRETARIAT DPRD

4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	53,600,000.00	67,641,800.00	67,641,800.00	14,041,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				53,600,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							6 Dokumen	6 Dokumen	80,880,000.00	69,600,000.00	69,600,000.00	-11,280,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				74,880,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	61,877,200.00	38,095,200.00	38,095,200.00	-23,782,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				53,693,200.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					420 Laporan	450 Laporan	365,657,500.00	235,546,000.00	124,151,500.00	-241,506,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				365,657,500.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100 Persen	100 Persen	444,135,000.00	2,536,437,300.00	2,536,437,300.00	2,092,302,300.00			-	-		Barang Milik Daerah (BMD)		473,605,340.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					3 Unit	5 Unit	50,000,000.00	2,174,460,000.00	2,174,460,000.00	2,124,460,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					5 Unit	1 Paket Unit	62,000,000.00	129,302,100.00	129,302,100.00	67,302,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				173,605,340.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					6 Unit	18 Unit	332,135,000.00	232,675,200.00	232,675,200.00	-99,459,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				300,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Keterpenuhan Layanan jasa penunjang urusan kantor					100 Persen	100 Persen	768,536,640.00	766,245,000.00	766,245,000.00	-2,291,640.00			-	-				760,230,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					48 Laporan	48 Laporan	0.00	204,345,000.00	204,345,000.00	204,345,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				200,730,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	NON URUSAN									30,168,695,935.00	30,843,583,389.00	26,166,278,889.00	-4,002,417,046.00								31,289,902,435.00	
4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									30,168,695,935.00	30,843,583,389.00	26,166,278,889.00	-4,002,417,046.00								31,289,902,435.00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN									30,168,695,935.00	30,843,583,389.00	26,166,278,889.00	-4,002,417,046.00								31,289,902,435.00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD									30,168,695,935.00	30,843,583,389.00	26,166,278,889.00	-4,002,417,046.00								31,289,902,435.00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					38 Laporan	48 Laporan	559,500,000.00	561,900,000.00	561,900,000.00	2,400,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				559,500,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Keterpenuhan Layanan jasa penunjang urusan kantor					100 Persen	100 Persen	1,484,669,200.00	312,127,430.00	312,127,430.00	-1,172,541,770.00			-	-		Barang Milik Daerah (BMD)		1,214,813,822.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					7 Unit	4 Unit	518,362,000.00	134,540,000.00	134,540,000.00	-383,822,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				518,362,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya					11 Unit	10 Unit	21,840,000.00	20,840,000.00	20,840,000.00	-1,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				21,840,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					32 Unit	43 Unit	22,266,000.00	21,474,400.00	21,474,400.00	-791,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				22,266,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					

			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				441 Laporan	319 Laporan		42.300.000,00	105.029.000,00	90.179.000,00	47.879.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				42.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD							
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				75 Dokumen	75 Dokumen		3.366.637.500,00	2.792.677.200,00	2.164.277.200,00	-1.202.360.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				3.456.637.500,00	SEKRETARIAT DPRD							
	4.02.02.2.08	fasilitas Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Tugas DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan				100 Persen	100 Persen		6.596.168.500,00	5.786.564.800,00	3.130.082.800,00	-3.466.085.700,00			-	-	Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD			6.596.168.500,00	SEKRETARIAT DPRD							
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				593 Dokumen	926 Dokumen		6.596.168.500,00	5.786.564.800,00	3.130.082.800,00	-3.466.085.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				6.596.168.500,00	SEKRETARIAT DPRD							
		BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																			4.990.413.446,00	4.539.698.174,00	4.104.978.974,00	-885.434.472,00				4.408.870.524,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN								4.990.413.446,00	4.539.698.174,00	4.104.978.974,00	-885.434.472,00								4.408.870.524,00								
	5.01	PERENCANAAN								4.806.928.446,00	4.360.949.074,00	4.029.394.374,00	-777.534.072,00								4.311.579.524,00								
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan				-	Level 20 3. JPL		3.695.333.846,00	3.214.393.974,00	3.306.323.174,00	-190.642.400,00								3.504.691.446,00								
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tahunan dan sesuai peraturan perundang undangan				-	100 Persen		3.157.685.854,00	2.831.333.442,00	2.831.333.442,00	-326.352.412,00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			3.157.685.854,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan		3.157.685.854,00	2.831.333.442,00	2.831.333.442,00	-326.352.412,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				3.157.685.854,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN				-	100 Persen		3.000.000,00	12.622.500,00	9.592.000,00	6.592.000,00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	2 Orang		3.000.000,00	12.622.500,00	9.592.000,00	6.592.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah				-	100 Persen		193.496.400,00	137.225.800,00	155.237.700,00	-38.258.700,00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			190.024.400,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		5.033.000,00	0,00	0,00	-5.033.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				2.033.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		11.171.400,00	9.405.900,00	9.405.900,00	-1.765.500,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				8.171.400,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																											
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		3.786.000,00	4.396.900,00	3.951.300,00	165.300,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				1.786.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																											

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket		6.940.000,00	8.550.000,00		8.550.000,00		1.610.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					15.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket		1.680.000,00	1.140.000,00		1.140.000,00		-540.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					1.180.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan		5.000.000,00	3.468.000,00		2.232.000,00		-2.768.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					88 Laporan	81 Laporan		159.886.000,00	110.265.000,00		129.958.500,00		-29.927.500,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					156.454.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintah Daerah					-	100 Persen		183.170.400,00	82.276.600,00		125.688.100,00		-57.482.300,00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				0,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					105 Unit	6 Unit		120.000.000,00	11.463.500,00		33.596.000,00		-86.404.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	8 Unit		63.170.400,00	70.813.100,00		92.092.100,00		28.921.700,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor					-	100 Persen		111.006.192,00	111.006.192,00		110.406.192,00		-600.000,00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				111.006.192,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					24 Laporan	24 Laporan		52.206.192,00	52.206.192,00		52.206.192,00		0,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					52.206.192,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan		58.800.000,00	58.800.000,00		58.200.000,00		-600.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					58.800.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara					-	100 Persen		46.975.000,00	39.929.440,00		74.065.740,00		27.090.740,00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-				42.975.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7 Unit	7 Unit		26.475.000,00	18.200.000,00		32.150.000,00		5.675.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					26.475.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					34 Unit	33 Unit		13.500.000,00	15.050.000,00		15.050.000,00		1.550.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					13.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																									

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelhnara/Drehabilitasi				1 Unit	1 Unit	7,000,000.00	6,679,440.00	26,865,740.00	19,865,740.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			3,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUuan dan ditetapkan tepat waktu			-	100 Persen		563,555,500.00	622,786,000.00	363,152,400.00	-183,228,500.00							370,327,000.00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai Peraturan PerUuan			-	100 Persen		466,106,500.00	452,135,700.00	315,135,200.00	-150,971,300.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		286,920,500.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	25,350,000.00	20,548,400.00	6,596,000.00	-18,754,000.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			9,676,000.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	38,005,000.00	37,724,400.00	32,011,000.00	-5,994,000.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			14,645,000.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	57,735,000.00	59,136,200.00	28,429,500.00	-29,305,500.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			24,065,500.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RP-JPD/RP-JMD/RKPD)				11 Dokumen	11 Dokumen	345,016,500.00	334,726,700.00	248,098,700.00	-96,917,800.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			238,534,000.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUuan			-	100 Persen		9,695,000.00	10,411,500.00	7,775,000.00	-1,920,000.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		7,221,500.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				44 Orang	44 Orang	9,695,000.00	10,411,500.00	7,775,000.00	-1,920,000.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			7,221,500.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUuan			-	100 Persen		77,754,000.00	160,238,800.00	40,242,200.00	-37,511,800.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		76,185,000.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				8 Laporan	8 Laporan	19,895,000.00	9,546,600.00	5,175,600.00	-14,719,400.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			8,567,000.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				16 Laporan	16 Laporan	57,859,000.00	150,692,200.00	35,066,800.00	-22,792,400.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			67,618,000.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi dan Kajian Sektoral yang mendukung Perencanaan Pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan PerUuan			-	100 Persen		568,039,100.00	523,769,100.00	359,918,800.00	-121,478,022.00							436,561,078.00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun			-	19 Laporan		249,872,300.00	230,306,700.00	195,303,700.00	-54,568,600.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		143,357,084.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				36 Dokumen	36 Dokumen	52,375,000.00	49,701,300.00	21,254,800.00	-31,120,200.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				26,689,124.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	75,516,000.00	73,047,500.00	105,294,500.00	-29,778,500.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				40,369,000.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				12 Dokumen	12 Dokumen	39,269,000.00	30,703,500.00	15,353,000.00	-23,916,000.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				21,258,160.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	82,712,300.00	76,854,400.00	53,401,400.00	-29,310,900.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				55,040,800.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun				-	20 Laporan	140,970,800.00	122,973,200.00	66,582,200.00	-74,388,600.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			140,159,124.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				12 Dokumen	12 Dokumen	32,007,800.00	32,777,500.00	11,329,600.00	-20,678,200.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				31,916,444.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	37,865,000.00	30,429,700.00	24,760,100.00	-13,104,900.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				39,199,000.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	35,176,500.00	32,665,600.00	15,628,100.00	-19,548,400.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				35,491,680.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	35,921,500.00	27,100,400.00	14,864,400.00	-21,057,100.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				33,552,000.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun				-	14 Laporan	167,196,000.00	170,489,200.00	98,032,900.00	-69,163,100.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			153,044,870.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				12 Dokumen	12 Dokumen	65,094,000.00	65,729,100.00	35,435,500.00	-29,658,500.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				70,739,830.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	69,907,000.00	71,281,500.00	50,396,800.00	-19,510,200.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				77,508,000.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				21 Dokumen	21 Dokumen	14,270,000.00	15,121,500.00	4,021,500.00	-10,248,500.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				1,174,040.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																			

			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				7 Laporan	7 Laporan	17,925,000.00	18,357,100.00	8,179,100.00	-9,745,900.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			3,623,000.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	505	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							183,485,000.00	178,749,100.00	75,584,600.00	-107,900,400.00							97,291,000.00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah				-	60,25 Point	183,485,000.00	178,749,100.00	75,584,600.00	-86,194,000.00							97,291,000.00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUuan				-	100 Persen	112,120,000.00	106,572,700.00	46,963,700.00	-65,156,300.00				-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		49,522,000.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	59,295,000.00	52,522,900.00	36,240,900.00	-23,054,100.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			22,064,000.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	52,825,000.00	54,049,800.00	10,722,800.00	-42,102,200.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			27,458,000.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan				-	100 Persen	71,365,000.00	72,176,400.00	28,620,900.00	-42,744,100.00				-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		47,769,000.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	71,365,000.00	72,176,400.00	28,620,900.00	-42,744,100.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			47,769,000.00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							7,140,642,031.00	6,867,854,305.00	6,152,711,315.00	-987,930,716.00							0.00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN							7,140,642,031.00	6,867,854,305.00	6,152,711,315.00	-987,930,716.00							0.00	
	5.02	KEUANGAN							7,140,642,031.00	6,867,854,305.00	6,152,711,315.00	-987,930,716.00							0.00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP BAPENDA				4.00 20 Point JPL	20 4.00 JPL Point	4,207,902,208.00	3,966,986,992.00	3,778,529,892.00	-4,207,902,208.00							0.00	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan				100 Persen	100 Persen	3,167,614,308.00	2,970,686,642.00	2,970,686,642.00	-196,927,666.00				-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/ib ulan	25 Orang/ib ulan	3,167,614,308.00	2,970,686,642.00	2,970,686,642.00	-196,927,666.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	385,613,400.00	385,476,700.00	203,220,700.00	-182,392,700.00				-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,380,000.00	1,368,700.00	1,368,700.00	-11,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,033,400.00	1,032,000.00	1,032,000.00	-1,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				398 Laporan	240 Laporan	383,200,000.00	383,076,000.00	200,820,000.00	-182,380,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen		312,960,000.00	293,485,000.00	293,485,000.00	-19,475,000.00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																							
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit		162,960,000.00	162,960,000.00	162,960,000.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	9 Unit		150,000,000.00	130,525,000.00	130,525,000.00	-19,475,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor				100 Persen	100 Persen		225,814,500.00	225,805,650.00	225,805,650.00	-8,850.00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan		85,414,500.00	85,405,650.00	85,405,650.00	-8,850.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan		140,400,000.00	140,400,000.00	140,400,000.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara				100 Persen	100 Persen		115,900,000.00	91,533,000.00	85,331,900.00	-30,568,100.00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit		53,400,000.00	53,400,000.00	53,400,000.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit		12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit		50,000,000.00	25,633,000.00	19,431,900.00	-30,568,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD				2.64 Point	2.64 Point		2,932,739,823.00	2,900,867,313.00	2,374,181,423.00	-2,932,739,823.00											0.00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase keterpenuhan capaian intensifikasi dan ekstensifikasi				100 Persen	100 Persen		2,932,739,823.00	2,900,867,313.00	2,374,181,423.00	-558,558,400.00			-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																							
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				10 Dokumen	8 Dokumen		679,542,000.00	679,539,690.00	255,002,600.00	-424,539,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																							
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				7 Laporan	7 Laporan		55,716,500.00	55,700,500.00	51,316,100.00	-4,400,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				7 Unit	18 Unit		498,600,000.00	498,574,200.00	526,704,500.00	28,104,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																							
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	10 Laporan		104,500,000.00	104,461,000.00	54,990,000.00	-49,510,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																							
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				27 Laporan	27 Laporan		77,596,000.00	77,591,200.00	77,591,200.00	-4,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																							
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen		50,991,000.00	19,251,000.00	17,971,000.00	-33,020,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-					0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

[illegible]

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	2,975,000.00	4,804,600.00	4,804,600.00	1,829,600.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			5,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	34,517,500.00	34,509,600.00	34,509,600.00	-7,900.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			50,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	3,163,000.00	5,497,800.00	5,497,800.00	2,334,800.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			5,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	52,875,000.00	60,277,500.00	60,277,500.00	7,402,500.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			55,125,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	5,000,000.00	13,940,000.00	13,940,000.00	8,940,000.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			10,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	23,063,000.00	24,020,000.00	6,846,000.00	-16,217,000.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			30,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	213,451,500.00	302,080,400.00	265,520,400.00	52,068,900.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			200,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan BMD penunjang kelancaran urusan pemerintahan					100 Persen	100 Persen	505,000,000.00	412,315,600.00	582,814,792.00	77,814,792.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	AS N BK AO		100,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					2 Unit	1 Unit	323,000,000.00	251,960,000.00	89,000,000.00	-234,000,000.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	15 Unit	74,000,000.00	26,870,600.00	267,704,792.00	193,704,792.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			50,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	108,000,000.00	133,485,000.00	226,110,000.00	118,110,000.00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		50,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 Persen	100 Persen	184,706,000.00	188,123,000.00	173,123,000.00	-11,583,000.00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	ASN BKAD	230,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4,706,000.00	7,386,000.00	4,386,000.00	-320,000.00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		20,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180,000,000.00	180,737,000.00	168,737,000.00	-11,263,000.00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		210,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara				100 Persen	100 Persen	83,510,000.00	91,969,200.00	91,969,200.00	8,459,200.00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	ASN BKAD	103,500,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	34,575,000.00	42,075,000.00	42,075,000.00	7,500,000.00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		36,075,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				17 Unit	17 Unit	22,245,000.00	24,745,000.00	24,745,000.00	2,500,000.00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		24,925,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	55 Unit	21,050,000.00	21,050,000.00	21,050,000.00	0.00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		22,500,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,640,000.00	4,099,200.00	4,099,200.00	-1,540,800.00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE		20,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan				100 Persen	100 %	103,577,441,231.00	112,750,378,320.00	106,526,963,207.48	-44,928,433.00							103,532,512,798.00	

5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen anggaran daerah yang disahkan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan					100 Persen	100 Persen	1,044,063,001.00	1,041,496,880.00	824,995,380.00	-219,067,621.00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	Perangkat Daerah					0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																					
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					2 Dokumen	2 Dokumen	34,416,500.00	34,390,890.00	19,569,890.00	-14,846,610.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																					
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					2 Dokumen	2 Dokumen	26,380,000.00	26,378,740.00	17,463,740.00	-8,916,260.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																					
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi					54 Dokumen	54 Dokumen	4,108,000.00	4,108,000.00	3,059,000.00	-1,050,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																					
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi					54 Dokumen	54 Dokumen	19,965,251.00	19,959,600.00	17,959,600.00	-2,005,651.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																					
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi					54 Dokumen	54 Dokumen	10,611,500.00	10,583,500.00	9,083,500.00	-1,528,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																					
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi					54 Dokumen	54 Dokumen	4,393,000.00	4,368,200.00	3,268,200.00	-1,124,800.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																					
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					54 Dokumen	54 Dokumen	386,924,750.00	384,911,420.00	300,503,920.00	-86,420,830.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																					
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					2 Dokumen	2 Dokumen	203,837,500.00	203,827,930.00	171,773,930.00	-32,063,570.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE					0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																					

			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				10 Dokumen	10 Dokumen	128,734,500.00	128,726,500.00	95,883,000.00	-32,851,500.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,512,500.00	7,470,300.00	2,514,800.00	-4,997,700.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7,093,500.00	7,091,700.00	2,686,200.00	-4,407,300.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,093,500.00	7,091,700.00	2,986,200.00	-4,107,300.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				108 Orang	108 Orang	202,992,500.00	202,588,400.00	178,244,400.00	-24,748,100.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rata-rata waktu penerbitan dokumen administrasi pengeluaran kas				15 Menit	15 Menit	548,151,000.00	549,892,320.00	353,760,620.00	-194,390,380.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	Perangkat Daerah			55,385,267.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	451,814,000.00	451,622,220.00	309,543,120.00	-142,270,880.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				5 Dokumen	5 Dokumen	63,614,000.00	65,582,300.00	23,384,500.00	-40,229,500.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				55,385,267.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)																			
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				2 Laporan	2 Laporan	32,723,000.00	32,687,800.00	20,833,000.00	-11,890,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase keterpenuhan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah					100 Persen	100 Persen	711,640,000.00	711,349,420.00	481,194,920.00	-230,445,080.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	Perangkat Daerah			890,994,031.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																				
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					12 Laporan	12 Laporan	12,244,500.00	12,228,210.00	6,828,210.00	-5,416,290.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				25,744,500.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-L O, dan Beban																				
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-L O, dan Beban					4 Dokumen	4 Dokumen	42,470,000.00	42,445,510.00	26,945,510.00	-15,524,490.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				62,470,845.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																				
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					2 Laporan	3 Laporan	48,881,000.00	48,817,400.00	31,276,400.00	-17,604,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				68,882,805.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																				
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					2 Laporan	2 Laporan	34,128,000.00	34,110,700.00	15,479,200.00	-18,648,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				17,500,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																				
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					2 Dokumen	2 Dokumen	506,757,500.00	506,598,300.00	361,946,300.00	-144,811,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				657,257,938.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					4 Orang	4 Orang	67,159,000.00	67,149,300.00	38,719,300.00	-28,439,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				59,137,943.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase urusan kewenangan pengelolaan daerah yang dilaksanakan					100 Persen	100 Persen	101,061,598,230.00	110,235,099,890.00	104,774,746,477.48	3,713,148,247.48			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	Pemerintah Daerah			102,586,133,500.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																				
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah					1 Laporan	1 Laporan	2,530,000,000.00	2,530,000,000.00	2,331,248,308.00	-198,751,692.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				3,000,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																				

			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	25,740,000.00	25,672,600.00	12,745,100.00	-12,994,900.00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPT MALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				25,740,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah					2 Laporan	2 Laporan	417,482,500.00	417,208,400.00	363,842,400.00	-53,640,100.00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPT MALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				417,482,500.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																						
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah					1 Laporan	1 Laporan	68,477,700.00	68,399,300.00	31,419,800.00	-37,057,900.00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPT MALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				68,477,700.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																						
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah					2 Laporan	2 Laporan	152,901,500.00	152,844,900.00	134,240,900.00	-18,660,600.00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPT MALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				152,901,500.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																						
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah					1 Laporan	1 Laporan	84,996,500.00	84,356,400.00	68,377,900.00	-16,618,600.00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPT MALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				84,996,500.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																						
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					5 Dokumen	5 Dokumen	130,440,000.00	129,912,900.00	78,522,400.00	-51,917,600.00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPT MALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				130,440,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																						
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					4 Laporan	4 Laporan	50,035,000.00	49,018,100.00	16,158,600.00	-33,876,400.00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPT MALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				50,035,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					108 Orang	108 Orang	110,005,500.00	109,963,000.00	91,457,000.00	-18,548,500.00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. OPT MALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				110,005,500.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																						
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN								5,644,963,428.00	5,272,780,850.00	5,200,741,810.00	-444,221,618.00									7,784,436,060.00		
	5.03	KEPEGAWAIAN								4,411,912,578.00	4,006,017,550.00	4,013,971,910.00	-397,940,668.00									6,807,581,560.00		
	1. 5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Nilai Maturitas SPIP BKPSDM					4 20 Point JP	20 4 JP Point	3,785,659,828.00	3,356,554,190.00	3,242,825,920.00	459,382,681.00									4,245,042,509.00		
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan					100 Persen	100 Persen	3,350,389,828.00	2,899,097,690.00	2,899,097,690.00	-451,292,138.00				-	3. OPT MALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			3,587,308,695.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																						

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	33 Orang/b ulan	3.350.389.828,00	2.899.097.690,00	2.899.097.690,00	-451.292.138,00	Kab. Barru, Barru, Coppo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				3.587.308.695,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN BKPSDM yang telah mengikuti pengembangan SDM				100 Persen	100 Persen	65.000.000,00	81.708.000,00	4.400.000,00	-60.600.000,00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			237.468.720,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	4 Orang	65.000.000,00	81.708.000,00	4.400.000,00	-60.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				237.468.720,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tiap tahun				100 Persen	100 Persen	192.304.000,00	200.844.900,00	232.579.930,00	40.275.930,00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			267.116.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	2.529.000,00	2.791.600,00	2.791.600,00	262.600,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				6.639.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.775.000,00	14.734.800,00	12.474.330,00	-2.300.670,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				19.775.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	175.000.000,00	183.318.500,00	217.314.000,00	42.314.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				240.702.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah tiap tahun				98,86 Persen	97,73 Persen	97.700.000,00	96.013.800,00	27.858.500,00	-69.841.500,00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			25.610.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	76.000.000,00	75.646.300,00	0,00	-76.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	32 Unit	21.700.000,00	20.367.500,00	27.858.500,00	6.158.500,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				25.610.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kant				100 Persen	100 Persen	46.366.000,00	46.814.300,00	46.814.300,00	448.300,00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			88.759.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	46.366.000,00	46.814.300,00	46.814.300,00	448.300,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				88.759.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara tiap tahun				14,12 Persen	14,12 Persen	33.900.000,00	32.075.500,00	32.075.500,00	-1.824.500,00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-			38.778.694,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	27.000.000,00	25.175.500,00	25.175.500,00	-1.824.500,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE				31.878.694,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Crehabilitasi				18 Unit	18 Unit	6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			6,900,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)				B (61-80) Grade	B (61-80) Grade	626,252,750.00	649,463,360.00	771,145,990.00	1,936,286,301.00							2,562,539,051.00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase keterpenuhan ASN tiap tahun yang dikelola secara elektronik				58,25 Persen	58,25 Persen	322,820,100.00	330,342,260.00	199,598,260.00	-123,221,840.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		1,563,444,104.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000.00	2,596,100.00	996,100.00	-2,503,900.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			84,624,248.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPKK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPKK				1 Dokumen	1 Dokumen	177,000,000.00	185,500,180.00	114,774,180.00	-62,225,820.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			867,713,799.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000.00	64,990,700.00	32,649,700.00	-32,350,300.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			173,104,057.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	13,820,100.00	13,778,200.00	13,778,200.00	-41,900.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			14,513,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000.00	44,983,200.00	26,741,200.00	-18,258,800.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			365,159,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	18,500,000.00	18,493,880.00	10,658,880.00	-7,841,120.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			58,330,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase keterisian jabatan yang sesuai dengan syarat jabatan				100 Persen	100 Persen	219,568,650.00	242,017,200.00	521,596,930.00	302,028,280.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		623,056,400.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				5 Dokumen	6 Dokumen	89,568,650.00	78,454,300.00	52,052,500.00	-37,516,150.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			88,970,250.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	75,000,000.00	54,981,300.00	21,062,800.00	-53,937,200.00	Kab. Baru, Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			203,976,300.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	3 Dokumen	55,000,000.00	108,581,600.00	448,481,630.00	393,481,630.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			330,109,850.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang berpendidikan D-IV sampai S3				79.89 Persen	86 Persen	26,864,000.00	20,845,700.00	10,111,700.00	-16,752,300.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		174,645,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																				
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan					56 Orang	35 Orang	26,864,000.00	20,845,700.00	10,111,700.00	-16,752,300.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			174,645,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS yang memiliki penilaian kinerja bernilai minimal baik					100 Persen	100 Persen	57,000,000.00	56,258,200.00	39,839,100.00	-17,160,900.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		201,393,547.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000.00	14,636,900.00	13,726,500.00	-1,273,500.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			52,504,947.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																				
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan					206 Orang	144 Orang	27,000,000.00	27,052,800.00	10,044,100.00	-16,955,900.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			76,070,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																				
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan					6 Orang	6 Orang	15,000,000.00	14,568,500.00	16,068,500.00	1,068,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			72,818,600.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								1,233,050,850.00	1,266,763,300.00	1,186,769,900.00	-46,280,950.00							976,854,500.00		
1. 5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP setahun					80 Persen	80 Persen	1,233,050,850.00	1,266,763,300.00	1,186,769,900.00	-256,196,350.00							976,854,500.00		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus diklat bernilai minimal baik					100 Persen	100 Persen	1,233,050,850.00	1,266,763,300.00	1,186,769,900.00	-46,280,950.00			-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	-		976,854,500.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																				
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					4 Laporan	4 Laporan	1,233,050,850.00	1,266,763,300.00	1,186,769,900.00	-46,280,950.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE			976,854,500.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	INSPEKTORAT								6,317,887,743.00	13,584,739,062.00	12,772,755,062.00	6,454,867,319.00								9,421,746,448.00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN								6,317,887,743.00	13,584,739,062.00	12,772,755,062.00	6,454,867,319.00							9,421,746,448.00		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								6,317,887,743.00	13,584,739,062.00	12,772,755,062.00	6,454,867,319.00							9,421,746,448.00		
1. 6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan				-	400 20 Point 3PL		4,689,264,243.00	8,631,537,362.00	7,911,297,362.00	1,204,245,205.00							5,893,509,448.00		
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan				-	100 %		4,387,395,843.00	4,156,171,132.00	4,156,171,132.00	-231,224,711.00			-	-	-		3,119,663,248.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					38 Orang/b ulan	44 Orang/b ulan	4,387,395,843.00	4,156,171,132.00	4,156,171,132.00	-231,224,711.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,119,663,248.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparat Inspektorat yang Mengikuti Pelatihan				-	100 %		47,229,200.00	2,126,535,800.00	1,840,700,300.00	1,793,471,100.00			-	-	-		2,118,252,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					38 Orang	214 Orang	14,794,800.00	1,502,400,000.00	1,370,264,500.00	1,355,469,700.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			945,192,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					78 Orang	134 Orang	32,434,400.00	624,135,800.00	470,435,800.00	438,001,400.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1,173,060,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %		133,469,500.00	891,845,200.00	457,440,700.00	323,971,200.00			-	-	-		306,180,000.00	INSPEKTORAT	

6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	2,866,500.00	183,027,700.00	183,027,700.00	180,161,200.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				16,280,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				228 Laporan	519 Laporan	130,603,000.00	708,817,500.00	274,413,000.00	143,810,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				289,900,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	4,450,000.00	639,292,630.00	639,292,630.00	634,842,630.00			-	-	-			150,928,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	97 Unit	1,400,000.00	345,885,000.00	345,885,000.00	344,485,000.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				80,048,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45 Unit	3,050,000.00	293,407,630.00	293,407,630.00	290,357,630.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				70,880,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor				-	100 %	62,754,700.00	158,407,500.00	158,407,500.00	95,652,800.00			-	-	-			95,941,200.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	52,478,500.00	110,907,800.00	110,907,800.00	58,429,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				79,860,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	24 Laporan	5,281,200.00	41,896,800.00	41,896,800.00	36,615,600.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				5,281,200.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	36 Laporan	4,995,000.00	5,602,900.00	5,602,900.00	607,900.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				10,800,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara				-	100 %	53,965,000.00	659,285,100.00	659,285,100.00	605,320,100.00			-	-	-			102,545,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	10 Unit	37,645,000.00	559,935,000.00	559,935,000.00	522,290,000.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				43,545,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																				
		Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				6,000,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	60 Unit	8,420,000.00	26,520,000.00	26,520,000.00	18,100,000.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				18,000,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7,400,000.00	72,830,100.00	72,830,100.00	65,430,100.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				35,000,000.00	INSPEKTORAT	
2. 6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pemeriksaan eksternal (temuan BPK) dan internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti				-	90 Persen	1,145,255,000.00	4,157,425,400.00	4,078,807,400.00	1,407,584,000.00								2,552,839,000.00		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Hasil Pengawasan				-	28.5	676,110,000.00	1,596,530,300.00	1,534,757,300.00	858,647,300.00			-	-	-			1,604,867,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																				
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				14 Laporan	15 Laporan	190,960,000.00	213,738,000.00	213,738,000.00	22,778,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				673,200,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																				
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				7 Laporan	21 Laporan	118,570,000.00	650,761,800.00	650,761,800.00	532,191,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				210,650,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																				
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				43 Laporan	31 Laporan	145,375,000.00	66,414,800.00	66,414,800.00	-78,960,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				246,840,000.00	INSPEKTORAT	

6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																			
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	15,800,000.00	48,532,000.00	48,532,000.00	32,732,000.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38,335,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																			
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				7 Laporan	40 Laporan	142,410,000.00	425,294,800.00	425,294,800.00	282,884,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			187,250,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																			
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	260,000.00	314,500.00	314,500.00	54,500.00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30,910,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP																			
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	62,735,000.00	191,474,400.00	129,701,400.00	66,966,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			217,682,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				-	100 %	469,145,000.00	2,560,895,100.00	2,544,050,100.00	2,074,905,100.00			-	-	-		947,972,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																			
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	3 Laporan	13,750,000.00	71,307,000.00	71,307,000.00	57,557,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39,572,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																			
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				48 Laporan	120 Laporan	455,395,000.00	2,489,588,100.00	2,472,743,100.00	2,017,348,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			908,400,000.00	INSPEKTORAT	
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyimpangan/ penyalahgunaan yang terjadi			-	5 Persen	483,368,500.00	795,776,300.00	782,650,300.00	492,029,500.00							975,398,000.00		
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			-	100 %	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-		58,150,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																			
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1,500,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																			
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56,650,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)				-	3.7	483,368,500.00	795,776,300.00	782,650,300.00	299,281,800.00			-	-	-		917,248,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																			
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				36 perangkat daerah	161 perangkat daerah	147,970,000.00	291,518,100.00	291,518,100.00	143,548,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			143,748,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																			
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				36 perangkat daerah	31 perangkat daerah	180,000.00	157,102,200.00	157,102,200.00	156,922,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			157,500,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																			
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	289,564,000.00	317,060,400.00	310,497,400.00	20,933,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			616,000,000.00	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																			
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				36 perangkat daerah	31 perangkat daerah	45,654,500.00	30,095,600.00	23,532,600.00	-22,121,900.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0.00	INSPEKTORAT	
		KECAMATAN TANETE RIAJA						3,916,716,198.00	3,643,576,947.26	3,524,053,779.60	-392,662,418.40							4,087,994,856.00		
7	UNSUR KEWILAYAHAN							3,916,716,198.00	3,643,576,947.26	3,524,053,779.60	-392,662,418.40							4,087,994,856.00		
7.01	KECAMATAN							3,916,716,198.00	3,643,576,947.26	3,524,053,779.60	-392,662,418.40							4,087,994,856.00		

	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP kecamatan Tanete Raja			-	20 3.00 JPL Point	3,524,570,328.00	3,215,789,514.00	3,150,427,429.00	26,784,208.00							3,551,354,536.00	
	7.01.01.2.02	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun			-	38 Orang	3,120,324,828.00	2,826,432,342.00	2,826,432,342.00	-291,892,486.00		-	-	-			3,111,174,086.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			38 Orang	dan 38 Orang	3,120,324,828.00	2,826,432,342.00	2,826,432,342.00	-291,892,486.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,111,174,086.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompetensi teknis terhadap Keseluruhan ASN			-	11 Orang	4,598,000.00	4,598,000.00	4,598,000.00	0.00			-	-	-		54,000,000.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			2 Orang	2 Orang	4,598,000.00	4,598,000.00	4,598,000.00	0.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54,000,000.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah			-	100 Persen	222,384,300.00	221,466,140.00	153,162,140.00	-69,222,160.00			-	-	-		147,706,000.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	2,401,000.00	1,457,700.00	1,457,700.00	-943,300.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2,550,000.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Perakatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	1,530,000.00	1,844,700.00	1,844,700.00	314,700.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4,000,000.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	30,665,000.00	32,628,400.00	32,628,400.00	1,963,400.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17,396,000.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	4 Paket	4,985,000.00	5,929,440.00	5,929,440.00	944,440.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6,000,000.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	1,505,000.00	1,510,000.00	790,000.00	-715,000.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5,160,000.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	6,318,500.00	6,032,000.00	6,032,000.00	-286,500.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2,100,000.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			579 Laporan	339 Laporan	174,979,800.00	172,063,900.00	104,479,900.00	-70,499,900.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110,500,000.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	100 Persen	48,449,700.00	29,510,000.00	36,185,000.00	-13,264,700.00			-	-	-		55,000,000.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5 Unit	5 Unit	15,549,000.00	0.00	0.00	-15,549,000.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15,500,000.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	4 Unit	32,900,700.00	29,510,000.00	36,185,000.00	2,284,300.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39,500,000.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa Penunjang Urusan Kantor			-	100 Persen	93,698,500.00	98,111,032.00	93,603,947.00	-94,553.00			-	-	-		144,914,450.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	67,782,700.00	68,949,500.00	65,349,500.00	-2,433,200.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			121,306,450.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	36 Laporan	25,915,800.00	29,161,532.00	28,254,447.00	2,338,647.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20,608,000.00	KECAMATAN TANETE RIJA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Baru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,000,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				-	100 Persen	35,115,000.00	33,671,000.00	35,446,000.00	331,000.00			-	-	-		38,560,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				8 Unit	8 Unit	21,615,000.00	22,718,100.00	23,018,100.00	1,403,100.00	Kab. Baru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26,560,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	660,000.00	0,00	0,00	-660,000.00	Kab. Baru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5,000,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	15 Unit	5,130,000.00	5,130,000.00	6,605,000.00	1,475,000.00	Kab. Baru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2,500,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	7,710,000.00	5,822,900.00	5,822,900.00	-1,887,100.00	Kab. Baru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4,500,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan				-	100 Persen	21,355,000.00	19,282,400.00	19,459,400.00	6,995,000.00							28,350,000.00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-	100 Persen	20,195,000.00	19,057,900.00	19,234,900.00	-960,100.00			-	-	-		27,850,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	5 Laporan	14,630,000.00	13,388,600.00	13,565,600.00	-1,064,400.00	Kab. Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24,850,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5,565,000.00	5,669,300.00	5,669,300.00	104,300.00	Kab. Baru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,200,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP				-	4 SOP	1,160,000.00	224,500.00	224,500.00	-935,500.00			-	-	-		500,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	2 Laporan	1,160,000.00	224,500.00	224,500.00	-935,500.00	Kab. Baru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelempok/lembaga				-	100 Persen	292,162,070.00	347,132,433.28	304,433,350.60	131,917,250.00							424,079,320.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan				-	6 Desa	2,000,000.00	1,906,300.00	1,006,300.00	-993,700.00			-	-	-		3,200,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyara katan	42 Lembaga K emasyarak atan	2,000,000.00	1,906,300.00	1,006,300.00	-993,700.00	Kab. Baru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,200,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan				-	100 Persen	158,904,070.00	215,537,033.28	192,246,950.60	33,342,880.60			-	-	-		283,679,320.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	12,343,000.00	18,563,740.00	20,979,740.00	8,636,740.00	Kab. Baru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19,000,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	46,117,400.00	45,886,793.28	45,886,710.60	-230,689.40	Kab. Baru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			260,424,320.00	KECAMATAN TANETE RIAJA

7.01.03.2.02.0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100,443,670.00	151,086,500.00	125,380,500.00	24,936,830.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-				2,255,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																				
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan					4 Laporan	4 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				2,000,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina					-	5 Lembaga	131,258,000.00	129,689,100.00	111,180,100.00	-20,077,900.00			-	-	-			137,200,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																				
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					5 Lembaga Kemasya katan	3 Lembaga Kemasya katan	131,258,000.00	129,689,100.00	111,180,100.00	-20,077,900.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-				137,200,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN DAN KETERIBAN UMUM	Presentase paguduan masyarakat yang tertangani				-	100 Persen	32,950,000.00	30,033,600.00	18,393,600.00	16,540,000.00								49,490,000.00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketenterman dan keteriban umum					-	1 Kegiatan	32,950,000.00	30,033,600.00	18,393,600.00	-14,556,400.00			-	-	-			49,490,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepdisan Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																				
		Jumlah Laporan Hasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan	16,300,000.00	16,270,000.00	16,270,000.00	-30,000.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				21,200,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																				
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					2 Laporan	1 Laporan	16,650,000.00	13,763,600.00	2,123,600.00	-14,526,400.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				28,290,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				-	100 Persen	42,150,800.00	28,115,500.00	28,115,500.00	-11,529,800.00								30,621,000.00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					-	100 Persen	42,150,800.00	28,115,500.00	28,115,500.00	-14,035,300.00			-	-	-			30,621,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					25 Orang	13 Orang	42,150,800.00	28,115,500.00	28,115,500.00	-14,035,300.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				30,621,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi				-	100 Persen	3,528,000.00	3,224,500.00	3,224,500.00	572,000.00								4,100,000.00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Pembinaan dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					-	1 Kegiatan	3,528,000.00	3,224,500.00	3,224,500.00	-303,500.00			-	-	-			4,100,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																				
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					6 Laporan	6 Laporan	3,528,000.00	3,224,500.00	3,224,500.00	-303,500.00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				4,100,000.00	KECAMATAN TANETE RIAJA
		KECAMATAN MALLUSETASI																			
7	UNSUR KEWILAYAHAN								5,307,520,207.00	5,396,161,782.00	4,992,577,382.00	-314,942,825.00								4,423,398,161.00	
701	KECAMATAN								5,307,520,207.00	5,396,161,782.00	4,992,577,382.00	-314,942,825.00								4,423,398,161.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Maturitas SPIP kecamatan Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan				-	3 20 poin jpl	4,472,773,807.00	4,464,743,212.00	4,327,401,212.00	-1,377,969,376.00								3,094,804,431.00	

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan						100 persen	3.704.871,046.00	3,628,914,282.00	3,628,914,282.00	-75,956,764.00								2,114,690,931.00	KECAMATAN MALLUSETASI	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						43 Orang/b ulan	43 Orang/b ulan	3,704,871,046.00	3,628,914,282.00	3,628,914,282.00	-75,956,764.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				2,114,690,931.00	KECAMATAN MALLUSETASI
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah						100 persen	232,802,500.00	504,347,820.00	185,397,320.00	-47,405,180.00								343,263,500.00	KECAMATAN MALLUSETASI	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						4 Paket	4 Paket	16,260,000.00	19,448,400.00	19,448,400.00	3,188,400.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				37,440,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																					
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						8 Paket	8 Paket	7,497,000.00	8,211,420.00	8,211,420.00	714,420.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				16,623,500.00	KECAMATAN MALLUSETASI
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																					
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						5 Dokumen	5 Dokumen	8,760,000.00	10,800,000.00	6,960,000.00	-1,800,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				11,250,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1045 Laporan	1045 Laporan	200,285,500.00	465,888,000.00	150,777,500.00	-49,508,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				277,950,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-	100 persen	27,852,400.00	92,487,100.00	146,636,100.00	118,783,700.00			-	-	-			140,250,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						6 Unit	6 Unit	27,852,400.00	92,487,100.00	146,636,100.00	118,783,700.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				140,250,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layananjasa penunjang urusan kantor						-	100 persen	385,177,861.00	222,286,210.00	215,432,410.00	-169,745,451.00			-	-	-			401,100,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan	41,792,700.00	47,160,600.00	44,121,400.00	2,328,700.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				55,500,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	60,785,161.00	60,525,610.00	56,711,010.00	-4,074,151.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				24,000,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	282,600,000.00	114,600,000.00	114,600,000.00	-168,000,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				321,600,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara						-	100 persen	122,070,000.00	16,707,800.00	151,021,100.00	28,951,100.00			-	-	-			95,500,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya						20 Unit	20 Unit	48,220,000.00	16,707,800.00	40,207,800.00	-8,012,200.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				61,000,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						23 Unit	23 Unit	8,350,000.00	0.00	11,185,000.00	2,835,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				14,000,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi						5 Unit	5 Unit	65,500,000.00	0.00	99,628,300.00	34,128,300.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				20,500,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
2. 7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen SOP Pelayanan yang disusun dan diimplementasikan						-	100 Persen	8,850,000.00	9,423,600.00	9,423,600.00	-1,350,000.00								7,500,000.00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						-	100 Persen	8,850,000.00	9,423,600.00	9,423,600.00	573,600.00			-	-	-			7,500,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkait																					

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					12 Laporan	2 Laporan	8,850,000.00	9,423,600.00	9,423,600.00	573,800.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					7,500,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/ kelompok / lembaga				-	100 PERSEN		749,245,000.00	858,948,270.00	601,909,370.00	483,348,730.00									1,232,593,730.00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendukung Kegiatan Pemberdayaan				-	100 Persen		524,066,000.00	136,944,000.00	136,944,000.00	-387,122,000.00			-	-	-				1,035,843,730.00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	24,624,000.00	32,652,000.00	32,652,000.00	8,028,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					114,750,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					3 Unit	3 Unit	394,358,000.00	0.00	0.00	-394,358,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	-	-	-					816,293,730.00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																					
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					30 Pokmas / Ormas	30 Pokmas / Ormas	103,770,000.00	104,292,000.00	104,292,000.00	522,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-					100,800,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																					
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan					3 Laporan	3 Laporan	1,314,000.00	0.00	0.00	-1,314,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					4,000,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Dibina				-	100 persen		225,179,000.00	722,004,270.00	464,965,370.00	239,786,370.00			-	-	-				196,750,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	225,179,000.00	722,004,270.00	464,965,370.00	239,786,370.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-					196,750,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani				-	100 persen		28,825,000.00	28,833,100.00	19,629,600.00	3,425,000.00									32,250,000.00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum				-	15 laporan		28,825,000.00	28,833,100.00	19,629,600.00	-9,195,400.00			-	-	-				32,250,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																					
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan	19,650,000.00	19,629,600.00	19,629,600.00	-20,400.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					19,750,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					12 Laporan	0 Laporan	9,175,000.00	9,203,500.00	0.00	-9,175,000.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					12,500,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				-	100 persen		47,826,400.00	34,213,600.00	34,213,600.00	8,423,600.00									56,250,000.00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				-	25 orang		47,826,400.00	34,213,600.00	34,213,600.00	-13,612,800.00			-	-	-				56,250,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																					

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				25 Orang	25 Orang	47,826,400.00	34,213,600.00	34,213,600.00	-13,612,800.00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56,250,000.00	KECAMATAN MALLUSETASI
			KECAMATAN SOPPENG RIAJA						3,791,817,110.00	3,911,813,471.61	3,797,452,581.61	5,635,471.61							4,171,590,228.00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							3,791,817,110.00	3,911,813,471.61	3,797,452,581.61	5,635,471.61							4,171,590,228.00	
7.01		KECAMATAN							3,791,817,110.00	3,911,813,471.61	3,797,452,581.61	5,635,471.61							4,171,590,228.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan Soppeng Riaja				-	3 Level	3,169,666,182.00	3,318,379,372.00	3,206,858,782.00	421,495,046.00							3,591,161,228.00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peresentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tawak Waktu dan sesuai Peraturan perundang-undangan				-	100 %	2,678,314,358.00	2,682,388,992.00	2,682,388,992.00	4,074,634.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-		2,708,841,908.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/b ulan	31 Orang/b ulan	2,678,314,358.00	2,682,388,992.00	2,682,388,992.00	4,074,634.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-		2,708,841,908.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peresentase ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Teknis terhadap keseluruhan ASN				-	100 %	9,196,000.00	13,794,000.00	2,299,000.00	-6,897,000.00			-	-	-		53,155,800.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	1 Orang	9,196,000.00	13,794,000.00	2,299,000.00	-6,897,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		53,155,800.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peresentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Perangkat Daerah				-	100 %	218,712,100.00	260,324,210.00	159,510,320.00	-59,201,780.00			-	-	-		273,343,200.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	900,000.00	536,500.00	536,500.00	-363,500.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6,500,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1,420,000.00	1,603,700.00	1,603,700.00	183,700.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-		12,100,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	11 Paket	34,170,000.00	37,097,200.00	37,097,200.00	2,927,200.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-		43,045,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4,307,000.00	6,142,610.00	6,161,420.00	1,854,420.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-		5,000,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	2 Dokumen	7,030,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	-3,670,000.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-		8,400,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	8,990,000.00	13,849,100.00	13,849,100.00	4,859,100.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-		2,340,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				945 Laporan	12 Laporan	161,895,100.00	197,735,100.00	96,902,400.00	-64,992,700.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-		195,958,200.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	30,181,250.00	99,537,700.00	108,220,500.00	78,039,250.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-			138,306,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Unit	4 Unit	8,100,000.00	16,187,000.00	16,187,000.00	8,087,000.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			11,307,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					7 Unit	12 Unit	22,081,250.00	83,350,700.00	92,033,500.00	69,952,250.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			61,999,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			65,000,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Keterpenuhiannya Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor				-	100 %	169,180,474.00	184,774,870.00	159,209,270.00	-9,971,204.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-			183,714,320.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	24,143,200.00	39,037,300.00	39,037,300.00	14,894,100.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			26,954,400.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					72 Laporan	36 Laporan	23,237,274.00	26,937,570.00	30,371,970.00	7,134,696.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			40,959,920.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dsedikan					12 Laporan	12 Laporan	121,800,000.00	118,800,000.00	89,800,000.00	-32,000,000.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			115,800,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				-	100 %	64,082,000.00	77,559,600.00	96,230,700.00	31,148,700.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-			233,800,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			93,100,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					14 Unit	7 Unit	44,032,000.00	53,198,600.00	53,198,600.00	9,166,600.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			37,250,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
		Jumlah Mebel yang Dipelihara					0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	-	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			2,350,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					22 Unit	25 Unit	9,985,000.00	11,340,000.00	11,340,000.00	1,355,000.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			17,500,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 Unit	4 Unit	10,065,000.00	13,021,000.00	30,692,100.00	20,627,100.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			25,750,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			57,850,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA

2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan					100 Persen	32,694,500.00	26,092,940.00	25,492,940.00	44,905,500.00							77,600,000.00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	-		2 Kegiatan			30,387,500.00	25,437,940.00	24,837,940.00	-5,549,560.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-		24,850,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Snergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Snergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	6 Laporan		22,385,000.00	17,176,900.00	16,576,900.00	-5,808,100.00	Kab. Baru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			7,500,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	2 Dokumen		8,002,500.00	8,261,040.00	8,261,040.00	258,540.00	Kab. Baru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			17,350,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peresentase keterpenuhan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan sesuai SOP	-		100 %			2,307,000.00	655,000.00	655,000.00	-1,652,000.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-		52,750,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	2 Laporan		2,307,000.00	655,000.00	655,000.00	-1,652,000.00	Kab. Baru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			52,750,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/ke- ompok/lembaga	-		100 Persen			510,163,628.00	516,429,659.61	515,723,359.61	-71,734,628.00							438,429,000.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peresentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang diaksanakan	-		100 %			1,800,000.00	1,570,000.00	1,320,000.00	-480,000.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-		7,500,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				25 Lembaga K emasyarakatan	14 Lembaga K emasyarakatan		1,800,000.00	1,570,000.00	1,320,000.00	-480,000.00	Kab. Baru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			7,500,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	-		4 Kelompok			294,630,628.00	294,731,759.61	271,201,859.61	6,571,231.61			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-		371,579,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyara- katan	14 Lembaga K emasyarakatan		17,646,000.00	47,656,470.00	43,776,470.00	26,130,470.00	Kab. Baru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			143,879,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	6 Unit		221,030,628.00	109,795,929.61	119,645,929.61	-101,384,698.39	Kab. Baru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			15,000,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas		25,119,000.00	136,709,360.00	107,209,460.00	82,090,460.00	Kab. Baru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			200,000,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan		835,000.00	570,000.00	570,000.00	-265,000.00	Kab. Baru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS			12,700,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peresentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina	-		100 %			243,733,000.00	220,127,900.00	243,201,500.00	-531,500.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-		59,350,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	243,733,000.00	220,127,900.00	243,201,500.00	-531,500.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					59,350,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase pengaduan masyarakat yang tertangani				-	100 Persen		35,505,000.00	28,475,000.00	24,990,000.00	-2,105,000.00			-						33,400,000.00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan keteriban umum				-	2 Kegiatan		35,505,000.00	28,475,000.00	24,990,000.00	-10,515,000.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				33,400,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																					
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan	18,840,000.00	18,775,000.00	17,230,000.00	-1,610,000.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					25,000,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					2 Laporan	2 Laporan	16,665,000.00	9,700,000.00	7,760,000.00	-8,905,000.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					8,400,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				-	100 Persen		40,722,800.00	19,858,500.00	22,809,500.00	-17,222,800.00			-						23,500,000.00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksana				-	1 Kegiatan		40,722,800.00	19,858,500.00	22,809,500.00	-17,913,300.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				23,500,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					22 Orang	13 Orang	40,722,800.00	19,858,500.00	22,809,500.00	-17,913,300.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					23,500,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi				-	100 Persen		3,065,000.00	2,578,000.00	1,578,000.00	4,435,000.00			-						7,500,000.00	
	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan				-	1 Kegiatan		3,065,000.00	2,578,000.00	1,578,000.00	-1,487,000.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-				7,500,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																					
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					5 Laporan	5 Laporan	3,065,000.00	2,578,000.00	1,578,000.00	-1,487,000.00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS					7,500,000.00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
		KECAMATAN BALUSU								3,099,755,852.00	2,801,286,706.00	2,722,821,706.00	-376,934,146.00									3,556,582,486.00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN								3,099,755,852.00	2,801,286,706.00	2,722,821,706.00	-376,934,146.00									3,556,582,486.00	
	7.01	KECAMATAN								3,099,755,852.00	2,801,286,706.00	2,722,821,706.00	-376,934,146.00									3,556,582,486.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP kecamatan Balusu				-	20 3.00 JPL Point		2,557,510,352.00	2,440,085,066.00	2,385,226,066.00	485,129,634.00									3,042,639,986.00	
	7.01.01.2.02	Adminstrasr Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan				-	100 Persen		1,850,861,352.00	2,007,508,018.00	2,007,508,018.00	156,646,666.00			-	-	-				2,494,120,986.00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					21 Orang/b ulan	21 Orang/b ulan	1,850,861,352.00	2,007,508,018.00	2,007,508,018.00	156,646,666.00	Kab. Barru, Balusu, Balusu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-				2,494,120,986.00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN				-	1 Sub.Kegi atan		54,714,000.00	4,598,000.00	0.00	-54,714,000.00			-	-	-				54,714,000.00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																					

			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penundang-Undangan				9 Orang	9 Orang	54,714,000.00	4,598,000.00	0.00	-54,714,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54,714,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah				-	5 Sub-Kegi atan		214,490,000.00	181,626,210.00	131,365,210.00	-83,124,790.00			-	-	-		213,860,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	3,000,000.00	3,057,700.00	3,057,700.00	57,700.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,000,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					7 Paket	7 Paket	3,600,000.00	3,238,000.00	3,238,000.00	-362,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,000,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	25,000,000.00	49,692,600.00	49,692,600.00	24,692,600.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25,000,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	8,500,000.00	9,462,410.00	9,462,410.00	962,410.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8,500,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 Dokumen	2 Dokumen	3,960,000.00	0.00	0.00	-3,960,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,960,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	1,650,000.00	10,594,500.00	10,594,500.00	8,944,500.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1,650,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					581 Laporan	581 Laporan	168,780,000.00	105,581,000.00	55,320,000.00	-113,460,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			168,750,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen		190,000,000.00	61,807,165.00	61,807,165.00	-128,192,835.00			-	-	-		50,500,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					30 Unit	30 Unit	115,000,000.00	22,310,265.00	22,310,265.00	-92,689,735.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25,000,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	3 Unit	75,000,000.00	39,496,900.00	39,496,900.00	-35,503,100.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25,500,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor				-	100 Persen		118,100,000.00	139,516,973.00	139,516,973.00	21,416,973.00			-	-	-		119,600,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	78,500,000.00	110,419,100.00	110,419,100.00	31,919,100.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80,000,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2 Laporan	2 Laporan	30,000,000.00	19,497,873.00	19,497,873.00	-10,502,127.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30,000,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dsedakan					2 Laporan	2 Laporan	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9,600,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah Yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara				-	100 Persen		129,345,000.00	45,028,700.00	45,028,700.00	-84,316,300.00			-	-	-		109,845,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					8 Unit	8 Unit	92,345,000.00	30,406,600.00	30,406,600.00	-61,938,400.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			92,345,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
		Jumlah Mebel yang Dipelihara					22 Unit	22 Unit	3,000,000.00	1,075,500.00	1,075,500.00	-1,924,500.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,000,000.00	KECAMATAN BALUSU

7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	6,000,000.00	5,505,000.00	5,505,000.00	-495,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6,000,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				2 Unit	2 Unit	28,000,000.00	8,041,600.00	8,041,600.00	-19,958,400.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8,500,000.00	KECAMATAN BALUSU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan			-	100 Persen	79,300,000.00	17,636,170.00	17,586,170.00	-30,800,000.00			-	-			48,500,000.00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Ketrpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-	100 Persen	79,300,000.00	17,636,170.00	17,586,170.00	-61,713,830.00			-	-	-		48,500,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	75,800,000.00	14,824,300.00	14,774,300.00	-61,025,700.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45,000,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	3,500,000.00	2,811,870.00	2,811,870.00	-688,130.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,500,000.00	KECAMATAN BALUSU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kel ompok/lembaga			-	100 Persen	378,445,500.00	287,927,370.00	264,871,370.00	997,000.00			-	-			379,442,500.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	Prsentase Kegiatan Pemberdayaan			-	100 Persen	20,500,000.00	2,327,000.00	1,777,000.00	-18,723,000.00			-	-	-		20,500,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	20,500,000.00	2,327,000.00	1,777,000.00	-18,723,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20,500,000.00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendukung Kegiatan Pemberdayaan			-	100 Persen	150,500,000.00	219,419,870.00	219,419,870.00	68,919,870.00			-	-	-		150,500,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	7,500,000.00	13,723,820.00	13,723,820.00	6,223,820.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7,500,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	110,000,000.00	40,475,070.00	40,475,070.00	-69,524,930.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			110,000,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	30,000,000.00	159,524,480.00	159,524,480.00	129,524,480.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			30,000,000.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	4 Laporan	3,000,000.00	5,696,500.00	5,696,500.00	2,696,500.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,000,000.00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Dibina			-	100 Persen	207,445,500.00	66,180,500.00	43,674,500.00	-163,771,000.00			-	-	-		208,442,500.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	174,945,500.00	64,915,500.00	42,409,500.00	-132,536,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175,942,500.00	KECAMATAN BALUSU
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
		Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	32,500,000.00	1,265,000.00	1,265,000.00	-31,235,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32,500,000.00	KECAMATAN BALUSU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase pengaudan masyarakat yang tertangani			-	100 Persen	33,000,000.00	21,791,800.00	21,791,800.00	1,000,000.00			-	-			34,000,000.00	

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						-	2 Sub.Kegi atan	33,000,000.00	21,791,800.00	21,791,800.00	-11,208,200.00			-	-	-	34,000,000.00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					4 Laporan	4 Laporan	16,000,000.00	14,915,000.00	14,915,000.00	-1,085,000.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		16,000,000.00	KECAMATAN BALUSU	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					1 Laporan	1 Laporan	17,000,000.00	6,876,800.00	6,876,800.00	-10,123,200.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		18,000,000.00	KECAMATAN BALUSU	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					-	100 Persen	46,500,000.00	31,909,800.00	31,909,800.00	500,000.00						47,000,000.00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Penyelenggaraan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah undefined					-	1 Sub Kegiatan undefined	46,500,000.00	31,909,800.00	31,909,800.00	-14,590,200.00			-	-	-	47,000,000.00	KECAMATAN BALUSU	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					25 Orang	25 Orang	46,500,000.00	31,909,800.00	31,909,800.00	-14,590,200.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		47,000,000.00	KECAMATAN BALUSU	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-					-	-	5,000,000.00	1,936,500.00	1,436,500.00	0.00						5,000,000.00		
	7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-					-	-	5,000,000.00	1,936,500.00	1,436,500.00	-3,563,500.00			-	-	-	5,000,000.00	KECAMATAN BALUSU	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					5 Laporan	5 Laporan	5,000,000.00	1,936,500.00	1,436,500.00	-3,563,500.00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		5,000,000.00	KECAMATAN BALUSU	
		KECAMATAN BARRU									7,074,997,269.00	7,245,089,160.57	7,031,094,060.57	-43,903,208.43						8,258,782,270.00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN								7,074,997,269.00	7,245,089,160.57	7,031,094,060.57	-43,903,208.43						8,258,782,270.00		
	7.01	KECAMATAN								7,074,997,269.00	7,245,089,160.57	7,031,094,060.57	-43,903,208.43						8,258,782,270.00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP kecamatan Barru					-	20 3.00 JPL Point	5,501,799,112.00	5,650,795,764.00	5,437,043,764.00	508,209,383.00						6,009,968,495.00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan					-	100 Persen	4,452,319,191.00	4,335,341,419.00	4,335,341,419.00	-116,977,772.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-	4,437,273,135.00	KECAMATAN BARRU	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					51 Orang/b uan	49 Orang/b uan	4,452,319,191.00	4,335,341,419.00	4,335,341,419.00	-116,977,772.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-	4,437,273,135.00	KECAMATAN BARRU	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN					-	40 Persen	13,794,000.00	4,598,000.00	2,299,000.00	-11,495,000.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-	104,388,000.00	KECAMATAN BARRU	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					6 Orang	1 Orang	13,794,000.00	4,598,000.00	2,299,000.00	-11,495,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-	104,388,000.00	KECAMATAN BARRU	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah					-	100 Persen	249,277,700.00	488,810,560.00	276,372,560.00	27,094,860.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-	477,714,800.00	KECAMATAN BARRU	

[illegible]

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28,865,000.00	28,870,000.00	28,870,000.00	5,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				0.00	KECAMATAN BARRU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				-	100 Persen	111,864,487.00	126,357,672.00	133,342,672.00	21,478,185.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-			136,653,170.00	KECAMATAN BARRU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	79,705,000.00	72,182,800.00	72,182,800.00	-7,522,200.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				87,021,170.00	KECAMATAN BARRU
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	3,260,000.00	0.00	0.00	-3,260,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				4,320,200.00	KECAMATAN BARRU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	45 Unit	7,810,000.00	12,665,000.00	19,650,000.00	11,840,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				13,500,000.00	KECAMATAN BARRU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	20,039,487.00	39,959,872.00	39,959,872.00	19,920,385.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				25,457,800.00	KECAMATAN BARRU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3 Unit	1,050,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	500,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				6,354,000.00	KECAMATAN BARRU
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan			-	100 Persen		61,548,500.00	52,880,330.00	52,880,330.00	7,797,525.00			-					69,346,025.00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-	5 Desa/Kelurahan		60,625,500.00	51,801,530.00	51,801,530.00	-8,823,970.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-			67,963,225.00	KECAMATAN BARRU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	24,670,000.00	16,470,700.00	16,470,700.00	-8,199,300.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				28,940,625.00	KECAMATAN BARRU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	5 Dokumen	35,955,500.00	35,330,830.00	35,330,830.00	-624,670.00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				39,012,600.00	KECAMATAN BARRU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP			-	100 Persen		923,000.00	1,078,800.00	1,078,800.00	155,800.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-			1,392,800.00	KECAMATAN BARRU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	923,000.00	1,078,800.00	1,078,800.00	155,800.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				1,392,800.00	KECAMATAN BARRU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/lembaga			-	100 Persen		1,470,764,657.00	1,502,015,066.57	1,511,255,966.57	632,421,193.00			-					2,103,185,850.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan			-	100 Persen		4,565,000.00	4,570,000.00	4,570,000.00	5,000.00			-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	-			3,246,600.00	KECAMATAN BARRU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				35 Lembaga K emasyarak atan	35 Lembaga K emasyarak atan	4,565,000.00	4,570,000.00	4,570,000.00	5,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS				3,246,600.00	KECAMATAN BARRU

			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					10 Laporan	10 Laporan		7,315,000.00	7,570,000.00		5,070,000.00		-2,245,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-								11,739,000.00	KECAMATAN BARRU
		KECAMATAN PUJANANTING											2,957,706,899.00	2,654,855,813.00	2,565,712,881.00	-391,994,018.00											2,799,825,925.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									2,957,706,899.00	2,654,855,813.00	2,565,712,881.00	-391,994,018.00													2,799,825,925.00	
	7.01	KECAMATAN									2,957,706,899.00	2,654,855,813.00	2,565,712,881.00	-391,994,018.00													2,799,825,925.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP kecamatan Pujananting					-	20 3.00 JPL Point		2,440,332,411.00	2,316,523,993.00	2,265,178,661.00	-45,949,112.00													2,394,383,299.00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-					-	-		1,873,092,303.00	1,893,274,833.00	1,893,274,833.00	20,182,530.00				-	-		-						1,873,093,191.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					23 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan		1,873,092,303.00	1,893,274,833.00	1,893,274,833.00	20,182,530.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-									1,873,093,191.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.05	Administrai Kepegawalan Perangkat Daerah	-					-	-		18,555,000.00	0.00	0.00	-18,555,000.00				-	-		-						18,555,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					2 Orang	2 Orang		18,555,000.00	0.00	0.00	-18,555,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-									18,555,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					-	-		223,552,300.00	221,196,760.00	167,791,760.00	-55,760,540.00				-	-		-						207,602,300.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2 Paket	1 Paket		2,145,000.00	3,452,800.00	3,452,800.00	1,307,800.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-									2,145,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2 Paket	13 Paket		29,145,000.00	3,589,000.00	3,589,000.00	-25,556,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-									29,145,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	2 Paket		33,900,000.00	38,646,000.00	38,646,000.00	4,746,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-									33,900,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																										
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	2 Paket		5,323,500.00	7,974,760.00	7,974,760.00	2,651,260.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-									5,323,500.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					4 Dokumen	6 Dokumen		4,320,000.00	4,320,000.00	4,320,000.00	0.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-									4,320,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																										
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan		44,558,800.00	27,101,200.00	27,101,200.00	-17,457,600.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-									44,558,800.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan		104,160,000.00	136,113,000.00	82,708,000.00	-21,452,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-									88,210,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana					-	3 keg		159,170,000.00	58,748,200.00	58,748,200.00	-100,421,800.00				-	-		-						159,170,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					28 Unit	1 Unit		83,820,000.00	3,871,900.00	3,871,900.00	-79,948,100.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-									83,820,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	7 Unit		75,350,000.00	54,876,300.00	54,876,300.00	-20,473,700.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-									75,350,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	4 keg		120,942,808.00	107,564,900.00	109,624,568.00	-11,318,240.00				-	-		-						90,942,808.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan		17,330,638.00	22,357,400.00	22,357,400.00	5,026,762.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-									17,330,638.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																										

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19,612,170.00	14,407,500.00	16,467,168.00	-3,145,002.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19,612,170.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84,000,000.00	70,800,000.00	70,800,000.00	-13,200,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54,000,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	7 keg	45,020,000.00	35,739,300.00	35,739,300.00	-9,280,700.00			-	-	-		45,020,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	30,500,000.00	25,704,000.00	25,704,000.00	-4,796,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30,500,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	10 Unit	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4,500,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10,020,000.00	5,535,300.00	5,535,300.00	-4,484,700.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10,020,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan				-	100 Persen	20,500,000.00	12,249,500.00	12,249,500.00	0.00			-	-			20,500,000.00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan musyawarah yang direncanakan				-	4 keg	20,500,000.00	12,249,500.00	12,249,500.00	-8,250,500.00			-	-	-		20,500,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Snergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Snergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	20,500,000.00	12,249,500.00	12,249,500.00	-8,250,500.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20,500,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelempa				-	100 Persen	411,141,600.00	268,159,820.00	238,572,220.00	-111,931,862.00			-	-			299,209,738.00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan				-	5 keg	364,703,600.00	231,397,420.00	210,560,820.00	-154,142,780.00			-	-	-		252,771,738.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200,000,000.00	0.00	0.00	-200,000,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			88,068,138.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	164,703,600.00	231,397,420.00	210,560,820.00	45,857,220.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			164,703,600.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				-	2 keg	46,438,000.00	36,762,400.00	28,011,400.00	-18,426,600.00			-	-	-		46,438,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasya katan	1 Lembaga Kemasya katan	46,438,000.00	36,762,400.00	28,011,400.00	-18,426,600.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46,438,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	26,850,000.00	24,109,400.00	16,349,400.00	0.00			-	-			26,850,000.00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum	-				-	-	26,850,000.00	24,109,400.00	16,349,400.00	-10,500,600.00			-	-	-		26,850,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	16,200,000.00	16,349,400.00	16,349,400.00	149,400.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16,200,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	10,650,000.00	7,760,000.00	0.00	-10,650,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10,650,000.00	KECAMATAN PUJANANTING

5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				-	100 Persen	36,388,888.00	32,074,100.00	32,074,100.00	0.00							36,388,888.00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Jumlah kegiatan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-	1 keg	36,388,888.00	32,074,100.00	32,074,100.00	-4,314,788.00			-	-	-		36,388,888.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				-	32 Orang	36,388,888.00	32,074,100.00	32,074,100.00	-4,314,788.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36,388,888.00	KECAMATAN PUJANANTING
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi				-	100 Persen	22,494,000.00	1,739,000.00	1,289,000.00	0.00							22,494,000.00	
	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				-	18 keg 1 keg	22,494,000.00	1,739,000.00	1,289,000.00	-21,205,000.00			-	-	-		22,494,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				-	12 Laporan	22,494,000.00	1,739,000.00	1,289,000.00	-21,205,000.00	Kab. Barru, Pujananting, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22,494,000.00	KECAMATAN PUJANANTING
		KECAMATAN TANETE RILAU							4,840,127,677.00	4,732,354,542.00	4,599,756,232.00	-240,371,445.00							4,847,842,080.00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							4,840,127,677.00	4,732,354,542.00	4,599,756,232.00	-240,371,445.00							4,847,842,080.00	
	7.01	KECAMATAN							4,840,127,677.00	4,732,354,542.00	4,599,756,232.00	-240,371,445.00							4,847,842,080.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Maturitas SPIP kecamatan Tanete Rilau Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan				-	3.00 20 Point JPL	4,205,309,053.00	3,991,791,682.00	3,908,789,372.00	-456,943,043.00							3,748,366,010.00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan				-	100 persen	3,700,217,319.00	3,403,783,002.00	3,403,783,002.00	-296,434,317.00			-	-	-		3,161,810,434.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	42 Orang/b ulan	3,700,217,319.00	3,403,783,002.00	3,403,783,002.00	-296,434,317.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,161,810,434.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN				-	38 Persen	0.00	4,598,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00			-	-	-		61,961,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	0 Orang	0.00	4,598,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			61,961,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah				-	100 Persen	224,460,053.00	276,514,120.00	193,579,810.00	-30,880,243.00			-	-	-		180,036,350.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	7 Paket	944,500.00	1,942,200.00	1,942,200.00	997,700.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14,754,900.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	8 Paket	1,312,800.00	2,661,800.00	2,661,800.00	1,349,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12,658,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	3 Paket	42,060,000.00	46,977,900.00	46,977,900.00	4,917,900.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16,798,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				-	2 Paket	5,195,253.00	5,548,520.00	5,615,210.00	419,957.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5,656,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU

7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																					
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,745,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	-65,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				8,684,500.00	KECAMATAN TANETE RILAU		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																					
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6,372,000.00	6,143,700.00	6,143,700.00	-228,300.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				6,945,750.00	KECAMATAN TANETE RILAU		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				541 Laporan	638 Laporan	166,830,500.00	211,560,000.00	128,559,000.00	-38,271,500.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				114,539,200.00	KECAMATAN TANETE RILAU		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	85,093,700.00	91,271,500.00	100,351,500.00	15,257,800.00			-	-	-			93,179,500.00	KECAMATAN TANETE RILAU		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																					
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	26,300,000.00	0.00	0.00	-26,300,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				15,048,500.00	KECAMATAN TANETE RILAU		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	10 Unit	50,668,000.00	78,360,900.00	87,440,900.00	36,772,900.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				63,661,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU		
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	8,125,700.00	12,910,600.00	12,910,600.00	4,784,900.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				14,470,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor				-	100 Persen	157,393,781.00	169,628,960.00	162,878,960.00	5,485,179.00			-	-	-			169,637,726.00	KECAMATAN TANETE RILAU		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	113,598,000.00	124,590,800.00	117,840,800.00	4,242,800.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				121,789,500.00	KECAMATAN TANETE RILAU		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	29,330,781.00	30,558,660.00	30,558,660.00	1,227,879.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				36,848,226.00	KECAMATAN TANETE RILAU		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14,465,000.00	14,479,500.00	14,479,500.00	14,500.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				11,000,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				-	100 Persen	38,144,200.00	45,996,100.00	45,996,100.00	7,851,900.00			-	-	-			81,741,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	5 Unit	25,800,000.00	28,097,000.00	28,097,000.00	2,297,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				36,915,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU		
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																					
		Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	5 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				2,861,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	25 Unit	6,985,000.00	11,195,000.00	11,195,000.00	4,210,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				7,015,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5,359,200.00	6,704,100.00	6,704,100.00	1,344,900.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				31,500,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				3,450,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU		
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan			-	100 Persen	26,362,000.00	24,607,310.00	24,607,310.00	10,083,000.00								36,445,000.00			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-	100 persen undefined	25,918,000.00	24,161,810.00	24,161,810.00	-1,756,190.00			-	-	-			35,870,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU		

	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	5 Laporan		15,938,000.00	13,864,000.00	13,864,000.00	-2,074,000.00	Kab. Barlu, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				22,950,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																				
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen		9,980,000.00	10,297,810.00	10,297,810.00	317,810.00	Kab. Barlu, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				12,920,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	100 persen		444,000.00	445,500.00	445,500.00	1,500.00			-	-	-			575,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan		444,000.00	445,500.00	445,500.00	1,500.00	Kab. Barlu, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				575,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat ke lembaga				-	100 Persen		401,238,324.00	621,998,950.00	586,882,950.00	408,123,552.00								899,361,876.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan				-	100 Persen		2,664,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	-1,664,000.00			-	-	-			3,092,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan		2,664,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	-1,664,000.00	Kab. Barlu, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				3,092,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan				-	100 persen		191,552,324.00	254,445,850.00	253,945,850.00	62,393,526.00			-	-	-			572,161,765.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	12 Lembaga K emasyarak atan		21,250,000.00	23,757,000.00	23,757,000.00	2,507,000.00	Kab. Barlu, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				35,445,500.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit		161,228,324.00	222,269,850.00	222,269,850.00	61,041,526.00	Kab. Barlu, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-				483,916,265.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas		6,950,000.00	7,919,000.00	7,919,000.00	969,000.00	Kab. Barlu, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-				50,500,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																				
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan Laporan	2 Laporan Laporan		2,124,000.00	500,000.00	0.00	-2,124,000.00	Kab. Barlu, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				2,300,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina				-	5 Lembaga		297,022,000.00	366,053,100.00	331,937,100.00	34,915,100.00			-	-	-			324,108,111.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyara katan	12 Lembaga K emasyarak atan		297,022,000.00	366,053,100.00	331,937,100.00	34,915,100.00	Kab. Barlu, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-				321,608,111.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan		0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barlu, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				2,500,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penguatan masyarakat yang tertangani				-	100 Persen		43,464,000.00	40,702,000.00	27,122,000.00	49,809,194.00								93,273,194.00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum				-	10 Aduan		43,464,000.00	40,702,000.00	27,122,000.00	-16,342,000.00			-	-	-			93,273,194.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																				

			Jumlah Laporan Hasil Snergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan	24,104,000.00	24,018,000.00	24,018,000.00	-86,900.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					47,195,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					2 Laporan	1 Laporan	19,360,000.00	16,684,000.00	3,104,000.00	-16,256,000.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					46,078,194.00	KECAMATAN TANETE RILAU
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					-	100 Persen	69,270,800.00	50,354,600.00	50,354,600.00	-11,613,800.00									57,657,000.00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	-					-	-	69,270,800.00	50,354,600.00	50,354,600.00	-18,916,200.00				-	-	-			57,657,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					25 Orang	13 Orang	69,270,800.00	50,354,600.00	50,354,600.00	-18,916,200.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					57,657,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-					-	-	4,483,500.00	2,900,000.00	2,000,000.00	8,255,500.00									12,739,000.00	
	7.01.06.2.01	Facilias, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-					-	-	4,483,500.00	2,900,000.00	2,000,000.00	-2,483,500.00				-	-	-			12,739,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																					
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					8 Laporan	8 Laporan	4,483,500.00	2,900,000.00	2,000,000.00	-2,483,500.00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-					12,739,000.00	KECAMATAN TANETE RILAU
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																					
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								4,372,604,480.00	4,218,032,449.00	4,238,589,449.00	-134,015,031.00									5,131,924,163.00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								4,372,604,480.00	4,218,032,449.00	4,238,589,449.00	-134,015,031.00									5,131,924,163.00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								4,372,604,480.00	4,218,032,449.00	4,238,589,449.00	-134,015,031.00									5,131,924,163.00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Kesbangpol Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan					-	3 20 Poin JPL	2,344,208,076.00	2,168,776,123.00	2,140,030,023.00	348,548,638.00									2,692,756,714.00	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan					-	100 Persen	2,197,190,708.00	2,012,610,455.00	2,012,610,455.00	-184,580,253.00						ASN Kesbangpol			2,197,190,708.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					19 Orang/b ulan	21 Orang/b ulan	2,197,190,708.00	2,012,610,455.00	2,012,610,455.00	-184,580,253.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)							2,197,190,708.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN					-	100 Persen	4,860,000.00	6,897,000.00	0.00	-4,860,000.00						ASN Kesbangpol			95,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																					

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0 Orang		4,860,000.00	6,897,000.00		0.00		-4,860,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					95,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat			-	100 Pensen		49,304,500.00	55,620,300.00		34,144,300.00		-15,160,200.00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		ASN Kesbangpro			192,110,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	7 Paket		1,506,500.00	1,511,100.00		1,511,100.00		4,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					1,600,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	11 Paket		1,697,000.00	2,015,500.00		2,015,500.00		318,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					2,480,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78 Laporan	37 Laporan		46,101,000.00	52,093,700.00		30,617,700.00		-15,483,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					188,030,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	-		1,980,000.00	0.00		0.00		-1,980,000.00			-	-	-	-				36,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit		1,980,000.00	0.00		0.00		-1,980,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-				36,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor			-	100 Pensen		55,872,868.00	62,328,368.00		61,955,268.00		6,082,400.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-				87,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan		46,138,000.00	52,593,500.00		52,220,400.00		6,082,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					65,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan		9,734,868.00	9,734,868.00		9,734,868.00		0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					22,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara			-	100 Pensen		35,000,000.00	31,320,000.00		31,320,000.00		-3,680,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-				85,456,006.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																							

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					6 Unit	6 Unit	26,820,000.00	27,320,000.00	27,320,000.00	500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				45,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6 Unit	8 Unit	3,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				5,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1 Unit	1 Unit	5,180,000.00	0.00	0.00	-5,180,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				35,456,006.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase tingkat keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam kegiatan bela negara dan wawasan kebangsaan				-	100 Persen	1,022,572,400.00	1,066,160,800.00	1,196,419,800.00	95,695,500.00				-				1,118,267,900.00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan ideologi pancasila					-	3 Dokumen	1,022,572,400.00	1,066,160,800.00	1,196,419,800.00	173,847,400.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pasakibraka dan FPK			1,118,267,900.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						100 Orang	100 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				40,274,900.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						10 Orang	10 Orang	5,828,600.00	8,139,000.00	4,278,000.00	-1,550,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				13,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskabrakan dan Purnapaskabraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskabrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskabraka					2 Dokumen	2 Dokumen	1,016,743,800.00	1,058,021,800.00	1,192,141,800.00	175,398,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				1,064,993,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu/ Pilkada				-	80 Persen	607,364,346.00	604,258,126.00	594,363,126.00	90,398,512.00				-				697,762,858.00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Dokumen kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, demokrasi fasilitas kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik, pemilu/ pilkada serta pantauan situasi politik					-	3 Dokumen	607,364,346.00	604,258,126.00	594,363,126.00	-13,001,220.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Partai Polek			697,762,858.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															-					

	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan nasional dan penanganan konflik sosial				-	5 Dokumen	307,265,458.00	304,948,700.00	266,446,800.00	-40,818,658.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	FKDM, POA Forkopimda, Forkopincam		355,979,168.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					100 Orang	70 Orang	23,533,158.00	15,933,900.00	0.00	-23,533,158.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	40,979,168.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					59 Orang	59 Orang	115,245,600.00	117,040,500.00	98,363,500.00	-16,882,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	124,980,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					12 Laporan	12 Laporan	18,529,200.00	20,313,300.00	18,367,800.00	-161,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	20,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					4 Dokumen	2 Dokumen	149,957,500.00	151,661,000.00	149,715,500.00	-242,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	170,020,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		J U M L A H							965,241,439,118.00	942,682,702,023.18	986,101,778,037.32	20,860,338,919.32					633,509,869,514.00		

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru
Tahun 2024-2025

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2025	Target RKPD Perubahan 2025	Target Tahun 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,51	75,22	75,22	75,77
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,31	7,73	7,65	6,58
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,42	5,22	6,33	6,24
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,92	5,74	5,74	5,81
5	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rp.	52,28	56,26	56,26	71,39
6	Rasio Gini	Angka	0,310	0,356	0,304	0,297

Sumber : BPS Tahun 2024, Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas semua indikator mengalami perubahan target dari target indikator RKPD Tahun 2025, kecuali indikator IPM. Hal ini

menyesuaikan dengan kondisi Kabupaten Barru dan capaian tahun 2024 dan memperhatikan target indikator makro pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025.

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.2
Capaian dan Target Perubahan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru
Tahun 2024-2026

No	Indikator	SATUAN	Capaian Tahun 2024	Target RKPD Pokok 2025	Target Perubahan RPKD Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	Indeks Gini	Poin	0,310	0,350	0,3	0,297
2	Angka Kemiskinan	%	8,31	7,73	7,45	6,58
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,42	5,22	6,33	6,24
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	74,51	75,22	75,22	75,77
5	Indeks Pendidikan	Poin	67,19	71,02	67,51	68,15
6	Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor Pendidikan	Poin	62,62	-	66,11	69,59
7	Indeks Kesehatan	Poin	81,15	77,51	82,51	83,31
8	Prevalensi Stunting	%	26,9	-	24,6	17,72
9	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,42	-	3,54	3,66
10	Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	3,990	3,884	3,995	4
11	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	-	-	36,56	39,88
12	Indeks Resiko Bencana	Poin	143,89	-	127	112
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	68,28	73,00	70,82	73,37
14	Nilai Sakip	Poin	61,43	75,00	62,83	65,87
15	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,480	4,25	4,01	4,066
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	75,70	-	76,5	77,3
17	Maturitas SPIP	Level	2	-	3	3
18	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	52,28	-	56,26	66,75
19	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,92	5,74	5,74	5,81
20	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	4,97	-	5,29	5,62
21	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	13,46	-	13,97	16,01

Sumber : Olahan Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*outcome based*) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penetapan indikator kinerja kunci ini menggunakan perpaduan IKK pada Permendagri 86 tahun 2017 dan permendagri 18 Tahun 2020 yang selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.3
Capaian dan Target Perubahan Target Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Barru Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2025	Target Perubahan RKPD Tahun 2025	Target Tahun 2026	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1	Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	91,97	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,30	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	96,51	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	76,28	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Kesehatan						
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	0,088	0,088	0,088	0,088	DINAS KESEHATAN
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	70	100	100	100	DINAS KESEHATAN
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	72	100	100	100	DINAS KESEHATAN
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	75	100	100	100	DINAS KESEHATAN
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	82	100	100	100	DINAS KESEHATAN
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99	100	100	100	DINAS KESEHATAN
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	93	100	100	100	DINAS KESEHATAN
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	70	100	100	100	DINAS KESEHATAN

10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	89	100	100	100	DINAS KESEHATAN
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	112	100	100	100	DINAS KESEHATAN
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	102	100	100	100	DINAS KESEHATAN
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	72	100	100	100	DINAS KESEHATAN
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	71	100	100	100	DINAS KESEHATAN
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Nilai	10,71	16,74	16,74	23,37	DINAS PUTR PERKIM
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Nilai	17,96	28	28	35	DINAS PUTR PERKIM
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Nilai	50,07	50,07	50,07	60,86	DINAS PUTR PERKIM
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	%	97,53	100	100	100	DINAS PUTR PERKIM
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	100	DINAS PUTR PERKIM
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100	100	100	100	DINAS PUTR PERKIM
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	33,30	42,15	42,15	51,09	DINAS PUTR PERKIM
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	1,9	1,9	1,9	1,9	DINAS PUTR PERKIM
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	DINAS PUTR PERKIM
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	DINAS PUTR PERKIM
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	DINAS PUTR PERKIM
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	21,14	34,89	34,89	47,09	DINAS PUTR PERKIM
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						

1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	SATPOL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	SATPOL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	125	125	125	125	BPBD
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	145	145	145	145	BPBD
5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	365	100	100	100	BPBD
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	SATPOL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN
7	Waktu tanggap (response time rate) Penanganan Kebakaran	Menit	9,04	9,04	9,04	9,04	SATPOL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN
8	Sosial						
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	DINAS SOSIAL
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	DINAS SOSIAL
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
1	Tenaga Kerja						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	70	100	100	100	DINAS TENAGA KERJA
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	31	35	35	40	DINAS TENAGA KERJA
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	22	30	30	40	DINAS TENAGA KERJA
4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	42,3	50	50	60	DINAS TENAGA KERJA
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	DINAS PMDPPKBPPPA
2	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	Rasio	0,08	0	0	0	DINAS PMDPPKBPPPA
3	Pangan						
1	Persentase cadangan pangan	%	316	100	100	100	DINAS PERTANIAN DAN KP
4	Pertanahan						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	DINAS PUTR PERKIM

2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	78	100	100	100	DINAS PUTR PERKIM
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100	100	100	100	DINAS PUTR PERKIM
4	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0,00	100	100	100	DINAS PUTR PERKIM
5	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan elalui mediasi	%	100	100	100	100	DINAS PUTR PERKIM
5	Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Nilai	76,65	77	77	77,33	DINAS LH
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	87,04	88,15	88,15	88,93	DINAS LH
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh PEMDA	%	100	100	100	100	DINAS LH
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,37	99,40	99,40	99,45	DINAS DUKCAPIL
2	Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (Kepemilikan akta kelahiran)	%	53,58	60	60	65	DINAS DUKCAPIL
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	96,85	97	97	97,50	DINAS DUKCAPIL
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	PD	33	33	33	33	DINAS DUKCAPIL
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	DINAS PMDPPKBPPPA
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	82,5	85	85	90 95	DINAS PMDPPKBPPPA
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,52	2,80	2,80	2,95	DINAS PMDPPKBPPPA
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	67,98	80	80	90	DINAS PMDPPKBPPPA
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,76	10	10	15	DINAS PMDPPKBPPPA
9	Perhubungan						
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	77,5	80	80	90	DINAS PERHUBUNGAN
10	Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	DINAS KOMINFO SP
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	86,04	90	90	100	DINAS KOMINFO SP
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	79	80	80	90	DINAS KOMINFO SP
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	63,46	65	65	67	DINAS KOP, UKM DAN DAG
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	1,27	1,55	1,55	1,75	DINAS KOP, UKM DAN DAG

12	Penanaman Modal						
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	76	80	80	85	DINAS PMPTSP
13	Kepemudaan dan Olahraga						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	3,95	4,5	4,5	5	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	9,25	12	12	15	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
3	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	100	100	100	100	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
14	Statistik						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	DINAS KOMINFO SP
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	DINAS KOMINFO SP
15	Persandian						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	34,88	36	36	38	DINAS KOMINFO SP
16	Kebudayaan						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	0,33	0,5	0,5	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
17	Perpustakaan						
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	71,92	72,00	72,00	72,10	DINAS PERPUS ARSIP
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	84,17	84,17	84,17	84,70	DINAS PERPUS ARSIP
18	Kearsipan						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	Nilai	75	80	80	85	DINAS PERPUS ARSIP
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai	66,66	80	80	85	DINAS PERPUS ARSIP
3	Pelayanan Urusan Pilihan						
1	Kelautan dan Perikanan						
1	Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	ton	26939,65	26.99	26.99	27.65	DINAS PERIKANAN
2	Pariwisata						
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	79	85	85	95	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	3,42	5	5	10	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
3	Tingkat Hunian Akomodasi	%	12	20	20	40	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	%	0,12	0,50	0,50	1	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR

5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3,35	4,05	4,05	4,75	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
3	Pertanian						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	5,33	6,14	6,14	5,33	DINAS PERTANIAN DAN KP
3	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0,76	0,5	0,5	0,3	DINAS PERTANIAN DAN KP
4	Perdagangan						
1	Persentase Peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	20,83	27,89	27,89	34,13	DINAS KOP, UKM DAN DAG
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	91,66	95	95	100	DINAS KOP, UKM DAN DAG
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	100	100	100	DINAS KOP, UKM DAN DAG
5	Perindustrian						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Kota	%	36,26	100	100	100	DINAS KOP, UKM DAN DAG
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	#N/A	100	100	100	DINAS KOP, UKM DAN DAG
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	DINAS KOP, UKM DAN DAG
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,00	100	100	100	DINAS KOP, UKM DAN DAG
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	%	0,00	100	100	100	DINAS KOP, UKM DAN DAG
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Poin	100	100	100	100	DINAS KOP, UKM DAN DAG
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
1	Perencanaan, Keuangan, dan Pengawasan						
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	23,18	20	20	20	BKAD
2	Rasio PAD	%	12	12,5	12,5	13	BAPENDA
3	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,09	3,09	3,09	3,10	INSPEKTORAT DAERAH
4	Indeks Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Poin	3	3,09	3,09	3,10	INSPEKTORAT DAERAH
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	70,22				BKAD
6	Opini BPK terhadap laporan	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD

	keuangan						
2	Sekretariat Daerah						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	348	100	100	100	SETDA
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	65	100	100	100	SETDA
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	2,97	10	10	20	SETDA
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	77,28	80	80	82	BKPSDM
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	27,24	30	30	31	BKPSDM
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	14,83	50	50	65	BKPSDM
4	Manajemen Keuangan						
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-0,04	0	0	0	BKAD
2	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	-0,07	0	0	0	BAPENDA
3	Assets Management	%	-	50	50	65	BAPENDA
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	3,79	3	3	2	BKAD
5	Transparansi dan Partisipasi Publik						
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	89,05	90	90	95	BKAD
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	BKAD

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas beberapa indikator mengalami perubahan target dari target indikator RKPD Tahun 2025, namun secara umum tidak mengalami perubahan kecuali yang berkaitan dengan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru selain menyesuaikan dengan target RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 juga memperhatikan target indikator makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar untuk Kabupaten/Kota diatur melalui Permendagri 100 Tahun 2018 sebagaimana telah diperbaharui melalui permendagri 59 tahun 2021 yang mengamanatkan 29 indikator yang dibagi dalam 6 urusan yakni:

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6. Sosial

Tabel 6.4
Capaian dan Target Indikator SPM Kabupaten Barru Tahun 2024-2025

No	Uraian	Capaian Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2025	Target Perubahan RKPD Tahun 2025	Target Tahun 2026
I	PENDIDIKAN				
1	pendidikan anak usia dini	78,31	100	100	100
2	pendidikan dasar				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,30	100	100	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	96,51	100	100	100
3	pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C)	100	100	100	100
I	KESEHATAN				
1	pelayanan kesehatan ibu hamil	89	100	100	100
2	pelayanan kesehatan ibu bersalin	85	100	100	100
3	pelayanan kesehatan bayi baru lahir	87	100	100	100

No	Uraian	Capaian Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2025	Target Perubahan RKPD Tahun 2025	Target Tahun 2026
4	pelayanan kesehatan balita	70	100	100	100
5	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	88	100	100	100
6	pelayanan kesehatan pada usia produktif	88	100	100	100
7	pelayanan kesehatan pada usia lanjut	72	100	100	100
8	pelayanan kesehatan penderita hipertensi	76	100	100	100
9	pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	116	100	100	100
10	pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	104	100	100	100
11	pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	97	100	100	100
12	pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	85	100	100	100
II PEKERJAAN UMUM					
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100	100
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100	100	100	100
I PERUMAHAN RAKYAT					
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	n/a	100	100	100
V KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN					
1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100%	100%	100%
2	pelayanan informasi rawan bencana	100	100%	100%	100%
3	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100%	100%	100%
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	100	100%	100%	100%
V SOSIAL					

No	Uraian	Capaian Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2025	Target Perubahan RKPD Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%
2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%
4	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan	100%	100%	100%	100%
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%

Sumber : SKPD Pengampu SPM Tahun 2025, Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

6.5 TPB/SDGs

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Capaian Tahun TPB Tahun 2024 dan Penetapan target indicator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Barru Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.5
Capaian dan Target TPB/SDGs Kabupaten Barru Tahun 2025

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Satuan	2024	TARGET RKPD 2025	TARGET P - RKPD 2025	OPD PENANGGUNG JAWAB DATA
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	8,31	8,06	7,45	BAPPEDA
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Jiwa	35,648	37,335	37,335	DISNAKER
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	%	80	90	90	DINAS KESEHATAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	96,75	100	100	DINAS PUTR PERKIM
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	68,8	100	100	DINAS PUTR PERKIM
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	98.82	99,45	99,45	DINAS PENDIDIKAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	%	96.59	NA	98	DINAS PENDIDIKAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	97.27	99	99	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Per 100.000 Orang	0.02568	0,0001	0,0001	BPBD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi	27	28	28	BPBD

1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Jiwa	1474	532	532	DINAS SOSIAL DAN BPBD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Jiwa	2	0	2	DINAS SOSIAL DAN BPBD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah / Madrasah Aman Bencana)		3	4	4	BPBD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rupiah	1,989,500,000	107.989.531	107.989.531	BPBD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	BPBD
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	%	8.20	8.40	8.40	DINAS PERTANIAN
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	%	7.65	7.65		DINAS PERTANIAN
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	26,9	24,6	24,6	DINAS PERTANIAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.		11	11		DINAS KESEHATAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.		15	14	14	DINAS KESEHATAN

	Semua Usia							
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%	80	82	82	DINAS KESEHATAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	9,52	9,88	9,88	DINAS PMDPPKBPP PA
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	81.24	83	83	DINAS PENDIDIKAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	74.36	77	77	DINAS PENDIDIKAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	98.83	99,05	99,05	DINAS PENDIDIKAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	96.59	97,8	97,8	DINAS PENDIDIKAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.		8.54	8.77	8.77	DINAS PENDIDIKAN
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		6	6	6	DINAS PMDPPKBPP PA

5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	%	20	20	20	DINAS PMDPPKBPP PA
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	97,52	100		DINAS PUPR&PERKIM
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	10	10	12	DINAS PUPR&PERKIM
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	68,8	100	75	DINAS PUPR&PERKIM
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa/Kelurahan	55	55	55	DINAS KESEHATAN
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa/Kelurahan	55	55	55	DINAS KESEHATAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta Rupiah	52,28	56,26	56,26	BAPPEDA
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneagra	10.1.1*	Koefisien Gini.	Poin	0,31	0,30	0,30	BAPPEDA
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	jiwa	0,061	0,01	0,01	BPBD
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	Lembaga	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	BKAD

13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	jiwa	0,061	0,01		BPBD
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dok	3	2	2	DINAS LH
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%	0,01	0,01	0,01	BADAN KESBANGPOL
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Dok	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	BAG HUKUM SETDA
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Org	5	5	7	DISKOMINFO SP

17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1.(a)	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Rupiah	1.081.662.957.430	920,000,000,000	950,000,000,000	DINAS KOMINFOSTAT
----	---	------------	---	--------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kebijakan Ekonomi Daerah

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru agar melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 dengan sebaik- baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 ini;
3. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang terdapat pada Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Barru;
4. Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 akan menjadi dasar penyusunan KUPA PPAS Perubahan dan APBD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2025.
5. Rancangan Perubahan RKPD Kab. Barru tahun 2025 telah melalui tahapan fasilitasi oleh tim fasilitator Provinsi Sulawesi Selatan guna penyempurnaan penyempurnaan Perubahan RKPD Kab Barru tahun 2025. Disamping itu seluruh saran masukan dari tim fasilitasi provinsi telah ditindaklanjuti kedalam masing-masing bab berdasarkan substansinya.
6. P-RKPD kab Barru fungsinya pokoknya adalah Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegiatan prioritas, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan.

7.2. Kesimpulan

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 ini diharapkan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggungjawab untuk mendukung pencapaian Visi Kabupaten Barru yakni *“Barru Berkeadilan, Barru Maju Berkelanjutan, Barru Sejahtera Lebih Cepat.”* Untuk itu, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pengendalian dan evaluasi tersebut meliputi pencapaian sasaran dan target kinerja program/kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya

